



PERUBAHAN
(RKPD)
KABUPATEN TABALONG
TAHUN 2025

PEMERINTAH KABUPATEN TABALONG
TAHUN 2025



***PERUBAHAN
RENCANA KERJA
PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN TABALONG
TAHUN 2025***



**PEMERINTAH KABUPATEN TABALONG
TAHUN 2025**

-- oo O oo --



BUPATI TABALONG
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI TABALONG
NOMOR 18 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TABALONG NOMOR 14 TAHUN 2024
TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TABALONG
TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TABALONG,

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya perubahan kebijakan Nasional maupun Daerah serta keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya yang harus digunakan pada tahun berjalan, perlu melakukan Perubahan Atas Peraturan Bupati Tabalong Nomor 14 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2025;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tabalong Nomor 14 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 04, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6779);
9. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
12. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana

telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah [Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1213];
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 09 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2009 Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong 03], sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 15 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2018 Nomor 15);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 03 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 03);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2022 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 07);

22. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2024 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong 4);
23. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 69 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 69);
24. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 14 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2024 Nomor 14);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TABALONG NOMOR 14 TAHUN 2024 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TABALONG TAHUN 2025.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Tabalong Nomor 14 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2024 Nomor 14), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

- (1) Perubahan RKPD Kabupaten Tabalong Tahun 2025 merupakan penyesuaian atas Dokumen Perencanaan Daerah yang berisi program dan kegiatan untuk periode 1 (satu) tahun dari tanggal 1 Januari 2025 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 yang dibiayai melalui APBD Kabupaten Tabalong Tahun Anggaran 2025.
- (2) Perubahan RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menguraikan tentang perubahan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun 2025.

2. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Perubahan RKPD Tahun 2025 merupakan penjabaran dari RPJMD Tahun 2025-2029 Tahun Pertama.
- (2) Perubahan RKPD Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan sebagai pedoman bagi:
 - a. SKPD dalam menyusun Perubahan Rencana Kerja SKPD Tahun 2025;
 - b. Penyusunan rancangan Perubahan Kebijakan Umum APBD Tahun 2025;
 - c. Penyusunan Perubahan Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Tahun 2025; dan
 - d. Penyusunan Rencana Perubahan APBD Tahun 2025.

3. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Perubahan RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) tertuang dalam Naskah Perubahan RKPD Kabupaten Tabalong Tahun 2025.
 - (2) Perubahan RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan sistematika sebagai berikut:
 - a. pendahuluan;
 - b. gambaran umum kondisi Daerah;
 - c. kerangka ekonomi dan keuangan Daerah;
 - d. sasaran dan prioritas pembangunan Daerah;
 - e. rencana kerja dan pendanaan daerah; dan
 - f. penutup.
 - (3) Isi dan uraian RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
4. Ketentuan mengenai isi dan uraian RKPD sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati Tabalong Nomor 14 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2024 Nomor 14) diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tabalong.

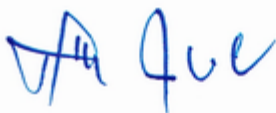
Ditetapkan di Tanjung
pada tanggal **2 Juni 2025**

BUPATI TABALONG,

MUHAMMAD NOOR RIFANI

Diundangkan di Tanjung
pada tanggal **2 Juni 2025**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TABALONG,



HAMIDA MUNAWARAH

DAFTAR ISI

Peraturan Bupati tentang Perubahan RKPD 2025.....	ii
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL.....	ix
DAFTAR GAMBAR.....	xi
 BAB 1 PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	I-1
1.2 Dasar Hukum Penyusunan.....	I-4
1.3 Hubungan Antar Dokumen	I-12
1.4 Maksud dan Tujuan.....	I-14
1.5 Sistematika Dokumen Perubahan RKPD.....	I-15
 BAB 2 EVALUASI HASIL TRIWULAN I TAHUN 2025	
2.1 Keterkaitan RKPD dan APBD	II-1
2.2 Ketercapaian Kinerja dan Permasalahan Pembangunan sampai Triwulan I.....	II-44
 BAB 3 KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH	
3.1 Perubahan Kerangka Ekonomi Daerah	III-1
3.1.1 Perubahan Ekonomi Makro Daerah	III-1
3.1.2 Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah.....	III-9
3.1.3 Strategi dan Arah Kebijakan Penguatan Ekonomi Makro Daerah	III-11
3.2 Perubahan Kebijakan Keuangan Daerah.....	III-14
3.2.1 Perubahan Kebijakan Pendapatan Tahun 2025	III-15
3.2.2 Perubahan Kebijakan Belanja Daerah Tahun 2025	III-19
3.2.3 Perubahan Proyeksi Pembiayaan Daerah.....	III-23
 BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	
4.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah Kabupaten Tabalong	IV-1
4.2 Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun 2025	IV-5
4.2.1 Prioritas Pembangunan Nasional dalam RKP Tahun 2025	IV-5
4.2.2 Keterkaitan RKP Tahun 2025 dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025–2045	IV-11
4.2.3 Pelaksanaan Program Strategis Nasional.....	IV-25
4.2.4 Tema dan Sasaran Pembangunan Wilayah Nasional Tahun 2025	IV-27
4.2.5 Prioritas Pembangunan Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2025..	IV-31
4.2.6 Arah Kebijakan Pembangunan Provinsi Kalimantan Selatan	IV-54
4.2.7 Prioritas dan Sasaran RKPD Perubahan Kabupaten Tabalong	IV-74
 BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH	V-1
 BAB VI PENUTUP	VI-1

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Perbandingan Jumlah Program, Kegiatan dan Dana pada RKPD dan APBD Kabupaten Tabalong Tahun 2025 Berdasarkan Satuan Kerja Perangkat Daerah (sampai Triwulan I)	II-4
Tabel 2.2	Perbandingan Jumlah Program, Kegiatan dan Dana pada RKPD dan APBD Kabupaten Tabalong Tahun 2025 Berdasarkan Urusan (sampai Triwulan I) ..	II-10
Tabel 2.3	Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Utama.....	II-16
Tabel 2.4	Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2025.....	II-22
Tabel 2.5	Sub Kegiatan pada RKPD yang Tidak Digunakan di APBD	II-43
Tabel 2.6	Sub Kegiatan yang Ditambahkan di APBD.....	II-44
Tabel 2.7	Rekapitulasi hasil Capaian Realisasi Anggaran dan Kinerja sampai Triwulan I tahun 2025.....	II-46
Tabel 3.1	Perbandingan Pertumbuhan PDRB Regional Kalimantan Triwulan I 2025 (%).....	III-4
Tabel 3.2	Perubahan Target Ekonomi Makro Tahun 2025	III-9
Tabel 3.3	Realisasi Pendapatan Daerah Sampai Dengan Triwulan I Tahun Anggaran 2025.....	III-16
Tabel 3.4	Proyeksi Perubahan Pendapatan Daerah dalam Perubahan RKPD Kabupaten Tabalong Tahun Anggaran 2025	III-17
Tabel 3.5	Target dan Realisasi Belanja Daerah Sampai Dengan Triwulan I Tahun Anggaran 2025	III-20
Tabel 3.6	Proyeksi Perubahan Belanja Daerah pada Perubahan RKPD Kabupaten Tabalong Tahun Anggaran 2025	III-22
Tabel 3.7	Realisasi Pembiayaan Daerah Sampai Dengan Triwulan I Tahun 2025	III-23
Tabel 3.8	Proyeksi Perubahan Pembiayaan Daerah pada Perubahan RKPD Kabupaten Tabalong Tahun Anggaran 2025	III-23
Tabel 3.9	Ringkasan Pendanaan Perubahan RKPD Kabupaten Tabalong Tahun 2025	III-25
Tabel 4.1	Hubungan Visi/Misi dan Tujuan/Sasaran Pembangunan Kabupaten Tabalong.....	IV-5
Tabel 4.2	Sasaran Utama pada Prioritas Nasional 1.....	IV-13
Tabel 4.3	Sasaran Utama pada Prioritas Nasional 2.....	IV-14
Tabel 4.4	Sasaran Utama pada Prioritas Nasional 3.....	IV-16
Tabel 4.5	Sasaran Utama pada Prioritas Nasional 4.....	IV-18
Tabel 4.6	Sasaran Utama pada Prioritas Nasional 5.....	IV-20
Tabel 4.7	Sasaran Utama pada Prioritas Nasional 6.....	IV-22
Tabel 4.8	Sasaran Utama pada Prioritas Nasional 7.....	IV-23
Tabel 4.9	Sasaran Utama pada Prioritas Nasional 8.....	IV-25
Tabel 4.10	Sasaran dan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2025.....	IV-28
Tabel 4.11	Isu-isu strategis dan Fokus Pembangunan Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2025	IV-31
Tabel 4.12	Indikator Ekonomi Makro Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2025.....	IV-37

Tabel 4.13	Program Prioritas Daerah RPJMD Tahun 2021 – 2026 dan RPJMD Tahun 2025 – 2029	IV-43
Tabel 4.14	Kebijakan Pembangunan Kewilayahan Provinsi Kalimantan Selatan	IV-67
Tabel 4.15	Indikator Sasaran Pembangunan Prioritas Daerah 1.....	IV-79
Tabel 4.16	Sasaran Pembangunan Prioritas Daerah 2.....	IV-80
Tabel 4.17	Sasaran Pembangunan Prioritas Daerah 3.....	IV-80
Tabel 4.18	Sasaran Pembangunan Prioritas Daerah 4.....	IV-81
Tabel 4.19	Sasaran Pembangunan Prioritas Daerah 5.....	IV-81
Tabel 4.20	Target dan Sasaran Pembangunan Tahun 2025	IV-88
Tabel 4.21	Perubahan Target Ekonomi Makro Tahun 2025	IV-88
Tabel 5.1	Rekapitulasi Jumlah Program/Kegiatan dan Pagu Berdasarkan Urusan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Tabalong Tahun 2025	V-2
Tabel 5.2	Rekapitulasi Daftar Perubahan Program dan Perubahan Kegiatan Pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Perubahan Kabupaten Tabalong Tahun 2025	V-8



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Hubungan RKPD dengan Dokumen Perencanaan Lain.....	I-14
Gambar 3.1	Pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) Triwulanan Nasional (%, y-on-y).....	III-3
Gambar 3.2	Pertumbuhan PDRB Kalimantan Selatan Triwulanan (%, y-on-y)	III-4
Gambar 3.3	Pertumbuhan PDRB Kabupaten Tabalong Tahun 2020-2024.....	III-6
Gambar 3.4	Inflasi Nasional Bulanan (%, y-on-y).....	III-7
Gambar 3.5	Inflasi Provinsi Kalimantan Selatan Bulanan (%, y-on-y).....	III-8
Gambar 4.1	Target Indikator Sasaran Pembangunan Nasional Tahun 2025	IV-6
Gambar 4.2	Integrasi RPJPN Tahun 2025-2024 dengan RKP Tahun 2025.....	IV-12
Gambar 4.3	Sebaran Indeks Pembangunan Manusia menurut Kabupaten/Kota Tahun 2023	IV-56
Gambar 4.4	Indeks Daya Saing Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2024	IV-64
Gambar 4.5	Keterkaitan Tema RKP 2025, Tema RKPD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2025 dan Tema RKPD Kabupaten Tabalong Tahun 2025.....	IV-87

BAB I

PENDAHULUAN

***PERUBAHAN RKPD
KABUPATEN TABALONG
TAHUN 2025***

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, mengamanatkan bahwa Pemerintah Daerah berkewajiban menyusun dokumen perencanaan pemerintah daerah, mulai dari perencanaan jangka panjang untuk kurun waktu 20 tahun, yaitu Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD); perencanaan jangka menengah untuk kurun waktu 5 tahun, yaitu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD); dan perencanaan tahunan yaitu, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Dokumen perencanaan tersebut memiliki keterkaitan satu dengan yang lain dalam menjamin kesinambungan pembangunan di daerah.

Untuk melaksanakan peraturan tersebut, Pemerintah telah menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Dalam melaksanakan amanat peraturan tersebut di atas, Pemerintah Kabupaten Tabalong telah menyusun dokumen RPJPD Kabupaten Tabalong Tahun 2025–2045 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 07 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2025-2045, dan dokumen RPD Kabupaten Tabalong Tahun 2025-2026 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah

Kabupaten Tabalong Nomor 04 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2025–2026. Sedangkan perencanaan tahun 2025, telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Tabalong Nomor 14 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Tabalong Tahun 2025, yang berpedoman pada peraturan perundangan di atas dan juga mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2025 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2025.

RKPD Kabupaten Tabalong Tahun 2025 memuat rancangan kerangka ekonomi, program prioritas pembangunan, rencana kerja, pendanaan dan perkiraan maju yang mempertimbangkan kerangka pendanaan dan pagu indikatif yang bersumber dari APBD dan sumber-sumber lain dengan mendorong partisipasi masyarakat. Oleh karena itu, RKPD memiliki kedudukan, peran dan fungsi yang sangat strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Secara substansial, memuat arah kebijakan ekonomi dan keuangan daerah, rencana program, kegiatan, indikator kinerja, pagu indikatif, kelompok sasaran, lokasi kegiatan, prakiraan maju, dan SKPD penanggungjawab yang wajib dilaksanakan pemerintah daerah dalam 1 (satu) tahun;
2. Secara normatif, menjadi dasar penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang akan diusulkan oleh kepala daerah untuk disepakati bersama dengan DPRD sebagai landasan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (R-APBD);
3. Secara operasional, memuat arahan untuk peningkatan kinerja pemerintahan di bidang pelayanan dan pemberdayaan masyarakat serta pembangunan daerah yang menjadi tanggung jawab masing-masing Kepala SKPD dalam melaksanakan tugas dan fungsinya yang ditetapkan dalam Renja SKPD.

4. Secara faktual, menjadi tolak ukur untuk menilai capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah merealisasikan program dan kegiatan dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

RKPD Kabupaten Tabalong Tahun 2025 merupakan tahapan pelaksanaan RPD Kabupaten Tabalong Tahun 2025-2026 yang mempunyai kedudukan strategis, yaitu memfasilitasi antara perencanaan strategis dengan perencanaan dan penganggaran tahunan. Di samping itu RKPD 2025 ini dapat menjadi tongkat estafet kesinambungan pembangunan jangka menengah untuk periode berikutnya. RKPD berfungsi menjabarkan rencana strategis ke dalam perencanaan operasional dengan memuat arah kebijakan umum pembangunan, prioritas pembangunan daerah, rancangan kebijakan ekonomi daerah dan indikasi anggaran per program. Oleh karena itu, RKPD yang disusun diharapkan dapat mengakomodir kebutuhan masyarakat dengan tetap mempertimbangkan kemampuan dan koridor perencanaan jangka menengah dan jangka panjang.

Dalam pelaksanaan RKPD tahun berjalan, ditemukan berbagai kondisi yang layak dijadikan dasar pertimbangan untuk melakukan perubahan atas dokumen RKPD Kabupaten Tabalong Tahun 2025. Kondisi ini diperoleh dari hasil evaluasi atas kinerja pelaksanaan program dan kegiatan sampai dengan triwulan ke satu tahun 2025, yaitu sebagai berikut:

1. Perkembangan keadaan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah yang berdampak terhadap pagu yang mengakibatkan terjadinya penambahan atau pengurangan target kinerja dan pagu kegiatan, penambahan atau penghapusan kegiatan;
2. Faktor lain yang mengakibatkan perlunya dilakukan pergeseran kegiatan antar SKPD, perubahan lokasi dan/atau kelompok sasaran, dan penghapusan kegiatan;
3. Kegiatan baru yang harus diakomodir dalam Perubahan RKPD Tahun 2025 sebagai upaya percepatan pencapaian visi dan misi

daerah setelah terpilih dan dilantiknya kepala daerah/wakil kepala daerah baru.

4. Penyesuaian terhadap visi, misi dan program kepala daerah terpilih dan dukungan terhadap pencapaian prioritas nasional.

1.2. DASAR HUKUM PENYUSUNAN

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2025 disusun dengan landasan hukum :

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959, tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan, dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4410);

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
9. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
12. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

13. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6766);
14. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6779);
15. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
16. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4663);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah

- Provinsi, Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
24. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
25. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Kedudukan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
28. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
29. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);

30. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
31. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
32. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
33. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerjasama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
34. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
35. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
36. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 6633);
37. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 6794);
38. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);

39. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
40. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);
41. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
42. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025 – 2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
43. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional;
44. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor);
45. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450);
46. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
47. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka

- Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1213);
48. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Reviu Atas Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Anggaran Daerah Tahunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 462);
49. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
50. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
51. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
52. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
53. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
54. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
55. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan RKPD Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 543);
56. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 061/2911/SJ/ Tahun 2016 Tentang Tindak Lanjut Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah;

57. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
58. Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 12 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Stunting Indonesia Tahun 2021 - 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1398);
59. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 2 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2022 Nomor 2);
60. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 6 Tahun 2023 tentang RTRWP Kalimantan Selatan Tahun 2023-2042 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2023 Nomor 6);
61. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 4 tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Provinsi Kalimantan Selatan 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2024 Nomor 4);
62. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 03 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 03);
63. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 03 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tabalong Tahun 2023-2042; (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2023 Nomor 03);
64. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 9 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2024 Nomor 9);
65. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 69 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 69);

66. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 14 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2024 Nomor 14);
67. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 23 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2024 Nomor 23);
68. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 9 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Tabalong Nomor 23 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2025 Nomor 9);
69. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 11 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Tabalong Nomor 23 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2025 Nomor 11).

1.3. HUBUNGAN ANTAR DOKUMEN

RKPD tidak dapat dipisahkan keberadaannya dari dokumen perencanaan dan penganggaran lainnya. RKPD ini terintegrasi dan merupakan satu kesatuan dengan dokumen perencanaan lainnya baik di tingkat nasional maupun daerah, terutama dengan dokumen perencanaan dan penganggaran yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah. Adapun dokumen perencanaan dan penganggaran tersebut meliputi RPJPD, RPD, Renstra-SKPD, RKPD, Renja-PD dan RTRW Kabupaten. Secara substansi keberadaan RKPD dengan dokumen perencanaan tersebut membentuk keterkaitan yang bersifat hierarkis, yaitu dokumen perencanaan jangka panjang menjadi rujukan bagi dokumen Perencanaan jangka menengah atau tahunan.

Hubungan antara RKPD dengan dokumen perencanaan lainnya adalah sebagai berikut:

1. RKPD dan RPD Kabupaten Tabalong.

RKPD Kabupaten Tabalong Tahun 2025 merupakan tahapan pelaksanaan RPD Kabupaten Tabalong 2025-2026 yang menjadi dokumen transisi perencanaan pembangunan daerah. Oleh

karenanya, penyusunan RKPD mengacu pada RPD dalam merumuskan prioritas pembangunan tahunan, arah kebijakan, serta program dan kegiatan.

2. RKPD dan RTRW Kabupaten Tabalong

Penyusunan RKPD memperhatikan dan mempertimbangkan berbagai pola dan struktur tata ruang yang telah ditetapkan dalam RTRW Kabupaten Tabalong sebagai dasar untuk menetapkan lokasi program pembangunan yang berkaitan dengan pemanfaatan ruang daerah di Kabupaten Tabalong.

3. RKPD dan Rencana Kerja Perangkat Daerah

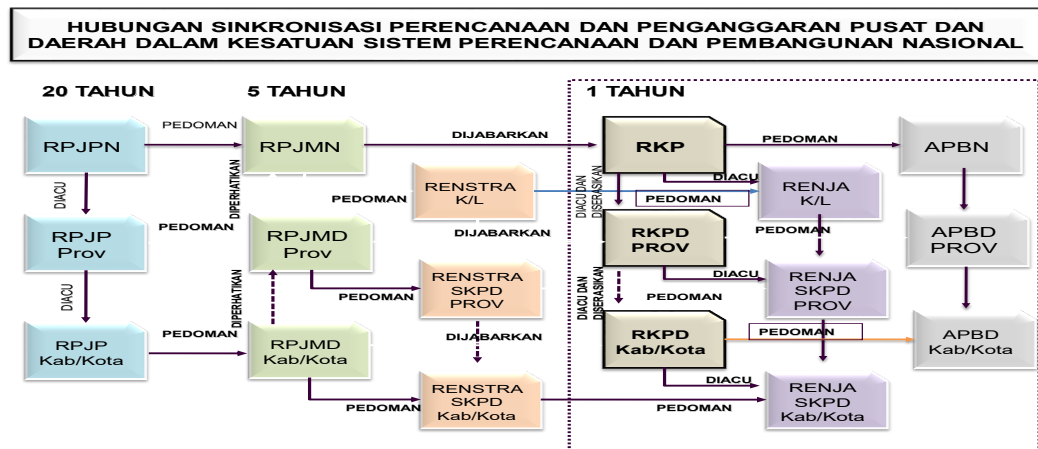
RKPD menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) 1 (satu) tahunan. Renja PD merupakan penjabaran teknis RKPD yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis operasional dalam menentukan arah kebijakan serta indikasi program dan kegiatan setiap urusan bidang dan/atau fungsi pemerintahan untuk jangka waktu 1 (satu) tahunan, yang disusun oleh setiap Perangkat Daerah (PD) di bawah koordinasi Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (BAPPERIDA) Kabupaten Tabalong.

Penyusunan RKPD ditujukan sebagai upaya untuk mewujudkan perencanaan pemerintah daerah yang sinergis antara perencanaan pemerintah nasional, provinsi serta kabupaten/kota yang berbatasan.

Oleh karenanya, substansi Perubahan RKPD Tahun 2025 harus selaras dengan dokumen perencanaan tingkat pusat dan dokumen perencanaan tingkat provinsi serta memperhatikan dokumen-dokumen perencanaan di kabupaten/kota yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Tabalong sehingga terjadi sinergitas perencanaan pembangunan nasional, provinsi dan kabupaten/kota.

Selain itu RKPD merupakan bagian dari transisi awal pelaksanaan RPJMD. Sehingga Perubahan RKPD ini juga diarahkan sebagai dokumen transisi awal untuk mendukung pelaksanaan visi, misi, dan arah kebijakan dalam RPJMD Kabupaten Tabalong Tahun 2025–2029

Keterkaitan hubungan RKPD dengan dokumen perencanaan lainnya dapat dilihat pada **Gambar 1.1** berikut :



Gambar 1.1
Hubungan RKPD dengan Dokumen Perencanaan Lain

1.4. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud penyusunan Perubahan RKPD Kabupaten Tabalong Tahun 2025 adalah untuk :

1. Mengakomodir dan menjabarkan program kepala daerah/wakil kepala daerah yang baru, diantaranya melakukan penyesuaian arah kebijakan dan program pembangunan agar selaras dengan visi, misi, dan janji politik kepala daerah/wakil kepala daerah baru.
2. Menjamin agar program dan kegiatan yang direncanakan tetap relevan terhadap kebutuhan masyarakat dan sejalan dengan arah baru pemerintahan guna mewujudkan kepastian dan sinergitas perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah antar wilayah, antar bidang pembangunan dan antar Perangkat Daerah.
3. Mewujudkan efisiensi dan efektivitas dalam perencanaan alokasi sumber daya dalam pembangunan daerah.

Tujuan penyusunan Perubahan RKPD Kabupaten Tabalong Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Menjadi pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA) Kabupaten Tabalong Tahun 2025 dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan (PPASP)

Kabupaten Tabalong Tahun 2025 serta Rencana Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RPAPBD) Tahun 2025.

2. Menjabarkan rencana strategis ke dalam rencana operasional; memelihara konsistensi antara capaian tujuan perencanaan strategis jangka menengah dengan tujuan perencanaan dan penganggaran tahunan pembangunan daerah;
3. Mengukur kinerja penyelenggaraan fungsi dan urusan wajib pelayanan dasar, urusan wajib bukan pelayanan dasar, urusan pilihan, dan urusan pemerintahan fungsi penunjang melalui capaian target kinerja program dan kegiatan pembangunan;
4. Menjadi acuan dalam penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah kepada DPRD; serta informasi bagi penyusunan laporan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah yang perlu disampaikan kepada pemerintah.

1.5. SISTEMATIKA DOKUMEN PERUBAHAN RKPD

Perubahan RKPD Kabupaten Tabalong Tahun 2025 sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 349 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, disusun dengan sistematika sebagai berikut :

1. **Bab 1 Pendahuluan**, menguraikan tentang latar belakang, dasar hukum penyusunan, hubungan antar dokumen, maksud dan tujuan, dan sistematika dokumen Perubahan RKPD.
2. **Bab 2 Evaluasi Hasil Triwulan II Tahun 2025**, memuat tentang evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan RKPD tahun 2025 hingga triwulan II.

3. **Bab 3 Kerangka Ekonomi dan Kebijakan Keuangan Daerah,** yang memuat penjelasan tentang perubahan arah kebijakan ekonomi daerah, perubahan arah kebijakan keuangan daerah dan proyeksi (pagu indikatif) kerangka pendanaan daerah tahun 2025.
4. **Bab 4 Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah,** memuat tentang tujuan dan sasaran pembangunan serta perubahan prioritas pembangunan Kabupaten Tabalong Tahun 2025.
5. **Bab 5 Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah,** memuat tentang rencana kerja dan pendanaan daerah.
6. **Bab 6 Penutup.**



BAB II

HASIL EVALUASI TRIWULAN I TAHUN 2025

***PERUBAHAN RKPD
KABUPATEN TABALONG
TAHUN 2025***

BAB II

EVALUASI HASIL TRIWULAN I TAHUN 2025

Evaluasi terhadap hasil rencana pembangunan tahunan Daerah lingkup Daerah kabupaten/kota mencakup hasil rencana Renja Perangkat Daerah kabupaten/kota dan hasil RKPD kabupaten/kota. Evaluasi terhadap hasil RKPD mencakup sasaran dan prioritas pembangunan daerah serta rencana program dan kegiatan prioritas daerah yang dilakukan melalui penilaian hasil pelaksanaan RKPD kabupaten.

Penilaian hasil pelaksanaan RKPD digunakan untuk mengetahui realisasi antara rencana program dan kegiatan prioritas Daerah dalam RKPD kabupaten/kota dengan capaian indikator kinerja program dan kegiatan yang dilaksanakan melalui APBD kabupaten/kota; dan realisasi penyerapan dana program dan kegiatan yang direncanakan dalam RKPD kabupaten/kota dengan laporan realisasi APBD kabupaten/kota (hasil evaluasi merupakan dasar dalam perubahan RKPD dan renja SKPD serta menjadi pedoman dalam perubahan APBD).

2.1. Keterkaitan RKPD dan APBD

Memperhatikan tahapan yang dilalui sampai triwulan I pelaksanaan APBD, terdapat perbedaan antara RKPD dengan APBD. Tahapan-tahapan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Penetapan RKPD Kabupaten Tabalong melalui Peraturan Bupati Tabalong Nomor 14 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2025.
2. Penetapan APBD Kabupaten Tabalong melalui Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 09 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tabalong Tahun Anggaran 2025 serta Peraturan Bupati Tabalong Nomor 23 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tabalong Tahun Anggaran 2025.

Pada tahapan ini perbedaan antara RKPD dengan APBD disebabkan oleh:

- a. Hasil kesepakatan antara Pemerintah Daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
 - b. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah yang mengalami pemutakhiran melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan dimutakhirkan kembali dengan Keputusan Menteri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
3. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 9 Tahun 2025 tanggal 25 februari 2025 Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2025 Nomor 9 tentang Perubahan pertama atas Peraturan Bupati Tabalong Nomor 23 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tabalong Tahun Anggaran 2025.

Perubahan ini dilakukan dalam rangka:

- penyesuaian penambahan pendapatan transfer Pemerintah Pusat berupa DAK Fisik, DAK Non Fisik, dan Dana Insentif Fiskal Tahun 2025.
- Surat Edaran Kemendagri Nomor 900.1.1/640/SJ tanggal 11 Februari 2025 tentang Penyesuaian Arah Kebijakan Pembangunan Daerah melalui Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.

4. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 11 Tahun 2025 tanggal 21 Maret 2025 Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2025 Nomor 11 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Tabalong Nomor 23 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tabalong Tahun Anggaran 2025.

Perubahan ini dilakukan dalam rangka:

- penyesuaian anggaran terhadap Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dan Surat Edaran Bupati Tabalong Nomor: S-514/BUP-BPKAD/000.3.4/III/2025 tanggal 03 Maret 2025 tentang Penyesuaian Pendapatan dan Efisiensi Belanja Daerah Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Tabalong Tahun Anggaran 2025.

Adapun perbedaan antara RKPD dengan APBD meliputi jumlah program, kegiatan dan sub kegiatan, jumlah pagu indikatif dan anggaran untuk masing-masing program dan kegiatan. Perbedaan jumlah program, kegiatan dan anggaran antara RKPD dengan APBD dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 2.1
Perbandingan Jumlah Program, Kegiatan dan Dana pada RKPD dan APBD Kabupaten Tabalong Tahun 2025
Berdasarkan Satuan Kerja Perangkat Daerah (sampai Triwulan I)

No	Perangkat Daerah	RKPD				APBD				Pergeseran (s.d TW I)			
		Pagu	Prog	Keg	Sub Kegiatan	Anggaran	Prog	Keg	Sub Kegiatan	Anggaran	Prog	Keg	Sub Kegiatan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1.01.2.22.0.00.01.0000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	479.269.128.009,00	5	16	64	505.767.816.580,00	5	16	80	548.582.093.142,00	5	16	83
2	1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN	212.476.869.095,00	5	20	79	218.160.442.571,00	5	19	78	238.679.846.636,00	5	20	84
3	1.02.0.00.0.00.01.0002 UPTD Puskesmas Tanjung	811.200.000,00	1	1	1	811.200.000,00	1	1	1	1.288.674.201,00	1	1	1
4	1.02.0.00.0.00.01.0003 UPTD Puskesmas Hikun	1.600.000.000,00	1	1	1	1.600.000.000,00	1	1	1	2.375.806.260,00	1	1	1
5	1.02.0.00.0.00.01.0004 UPTD Puskesmas Murung Pudak	1.146.400.000,00	1	1	1	1.146.400.000,00	1	1	1	1.714.190.000,00	1	1	1
6	1.02.0.00.0.00.01.0005 UPTD Puskesmas Mabuun	1.518.000.000,00	1	1	1	1.518.000.000,00	1	1	1	2.155.259.750,00	1	1	1
7	1.02.0.00.0.00.01.0006 UPTD Puskesmas Tanta	1.221.000.000,00	1	1	1	1.221.000.000,00	1	1	1	1.862.712.000,00	1	1	1
8	1.02.0.00.0.00.01.0007 UPTD Puskesmas Muara Harus	460.200.000,00	1	1	1	460.200.000,00	1	1	1	940.215.000,00	1	1	1
9	1.02.0.00.0.00.01.0008 UPTD Puskesmas Kelua	2.780.000.000,00	1	1	1	2.780.000.000,00	1	1	1	3.503.335.000,00	1	1	1
10	1.02.0.00.0.00.01.0009 UPTD Puskesmas Mungkur Agung	659.301.766,00	1	1	1	659.301.766,00	1	1	1	993.087.769,00	1	1	1

No	Perangkat Daerah	RKPD				APBD				Pergeseran (s.d TW I)			
		Pagu	Prog	Keg	Sub Kegiatan	Anggaran	Prog	Keg	Sub Kegiatan	Anggaran	Prog	Keg	Sub Kegiatan
11	1.02.0.00.0.00.01.0010 UPTD Puskesmas Pugaan	502.653.960,00	1	1	1	502.653.960,00	1	1	1	1.106.651.220,00	1	1	1
12	1.02.0.00.0.00.01.0011 UPTD Puskesmas Banua Lawas	1.358.145.300,00	1	1	1	1.358.145.300,00	1	1	1	2.014.159.300,00	1	1	1
13	1.02.0.00.0.00.01.0012 UPTD Puskesmas Bintang Ara	459.600.000,00	1	1	1	459.600.000,00	1	1	1	1.017.029.000,00	1	1	1
14	1.02.0.00.0.00.01.0013 UPTD Puskesmas Panaan	146.231.627,00	1	1	1	146.231.627,00	1	1	1	975.022.629,00	1	1	1
15	1.02.0.00.0.00.01.0014 UPTD Puskesmas Haruai	1.657.000.000,00	1	1	1	1.657.000.000,00	1	1	1	2.132.193.400,00	1	1	1
16	1.02.0.00.0.00.01.0015 UPTD Puskesmas Upau	421.963.000,00	1	1	1	421.963.000,00	1	1	1	890.270.750,00	1	1	1
17	1.02.0.00.0.00.01.0016 UPTD Puskesmas Ribang	325.307.182,00	1	1	1	325.307.182,00	1	1	1	641.787.182,00	1	1	1
18	1.02.0.00.0.00.01.0017 UPTD Puskesmas Muara Uya	2.264.317.267,00	1	1	1	2.264.317.267,00	1	1	1	2.907.951.268,00	1	1	1
19	1.02.0.00.0.00.01.0018 UPTD Puskesmas Wirang	686.351.880,00	1	1	1	686.351.880,00	1	1	1	1.170.769.880,00	1	1	1
20	1.02.0.00.0.00.01.0019 UPTD Puskesmas Jaro	769.000.000,00	1	1	1	769.000.000,00	1	1	1	1.359.687.000,00	1	1	1
21	1.02.0.00.0.00.02.0000 RUMAH SAKIT H. BADARUDDIN KASIM	142.137.132.079,00	2	8	12	145.213.035.494,00	2	8	12	156.357.448.504,00	2	8	14
22	1.03.0.00.0.00.01.0000 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	449.559.617.240,00	9	22	78	523.243.244.876,00	9	22	78	570.196.831.512,00	9	22	78

No	Perangkat Daerah	RKPD				APBD				Pergeseran (s.d TW I)			
		Pagu	Prog	Keg	Sub Kegiatan	Anggaran	Prog	Keg	Sub Kegiatan	Anggaran	Prog	Keg	Sub Kegiatan
23	1.04.2.10.0.00.01.0000 DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	181.596.048.779,00	8	12	23	183.795.265.779,00	8	12	23	174.076.568.034,00	8	12	23
24	1.05.0.00.0.00.01.0000 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	36.127.628.389,00	3	11	42	36.700.196.073,00	3	11	42	35.841.315.019,00	3	11	42
25	1.05.0.00.0.00.02.0000 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	18.749.837.728,00	2	10	36	19.813.967.341,00	2	10	36	18.934.360.535,00	2	10	36
26	1.06.0.00.0.00.01.0000 DINAS SOSIAL	47.614.529.830,00	6	16	36	48.087.797.266,00	6	16	36	49.470.035.634,00	6	16	37
27	2.07.0.00.0.00.01.0000 DINAS TENAGA KERJA	20.039.620.428,00	5	15	29	20.738.016.606,00	5	15	26	23.947.258.870,00	5	15	29
28	2.08.2.14.0.00.01.0000 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	12.356.326.639,00	10	27	44	12.794.553.839,00	10	27	44	16.521.508.206,00	10	28	59
29	2.09.3.25.3.27.01.0000 DINAS KETAHANAN PANGAN, PERIKANAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA	71.094.383.258,00	13	24	51	68.390.854.173,00	13	24	51	68.725.273.087,00	13	24	52
30	2.11.0.00.0.00.01.0000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP	70.250.000.000,00	10	16	34	67.677.119.080,00	10	16	34	66.529.279.664,00	10	16	34
31	2.12.0.00.0.00.01.0000 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	38.026.326.564,00	5	17	45	22.645.308.461,00	5	17	45	21.589.526.789,00	5	17	45

No	Perangkat Daerah	RKPD				APBD				Pergeseran (s.d TW I)			
		Pagu	Prog	Keg	Sub Kegiatan	Anggaran	Prog	Keg	Sub Kegiatan	Anggaran	Prog	Keg	Sub Kegiatan
32	2.13.0.00.0.00.01.0000 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	18.974.204.219,00	5	9	30	18.646.123.481,00	5	9	29	17.787.599.141,00	5	9	29
33	2.15.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERHUBUNGAN	48.971.792.500,00	2	17	42	50.181.191.621,00	2	17	42	49.159.376.633,00	2	17	42
34	2.16.2.20.2.21.01.0000 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	25.231.575.930,00	5	13	49	26.202.432.666,00	5	13	49	25.024.846.628,00	5	13	49
35	2.17.3.31.3.30.01.0000 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	42.387.893.370,00	14	24	41	45.306.459.425,00	14	24	41	45.002.220.031,00	14	24	41
36	2.18.0.00.0.00.01.0000 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	12.666.397.566,00	6	13	34	14.453.497.566,00	6	13	34	13.247.534.855,00	6	13	34
37	2.19.3.26.0.00.01.0000 DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA	39.592.337.150,00	7	19	46	39.357.482.150,00	7	19	46	38.086.262.220,00	7	19	46
38	2.23.2.24.0.00.01.0000 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	13.446.416.195,00	4	16	52	14.765.100.055,00	4	16	52	13.896.184.542,00	4	16	52
39	3.27.0.00.0.00.02.0000 DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN	47.333.500.905,00	6	18	35	47.272.473.324,00	6	18	35	46.642.313.839,00	6	18	35
40	4.01.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DAERAH	87.134.536.687,00	3	19	54	92.825.843.687,00	3	19	54	88.652.570.845,00	3	19	54
41	4.02.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DPRD	88.669.624.339,00	2	17	63	108.779.481.039,00	2	17	63	91.531.843.303,00	2	17	63

No	Perangkat Daerah	RKPD				APBD				Pergeseran (s.d TW I)			
		Pagu	Prog	Keg	Sub Kegiatan	Anggaran	Prog	Keg	Sub Kegiatan	Anggaran	Prog	Keg	Sub Kegiatan
42	5.01.5.05.0.00.01.0000 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	22.562.629.312,00	4	19	66	21.120.069.623,00	4	19	65	19.904.125.284,00	4	19	65
43	5.02.0.00.0.00.01.0000 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	443.519.352.180,00	3	12	51	433.738.351.157,00	3	12	51	435.146.370.980,00	3	12	52
44	5.02.0.00.0.00.02.0000 BADAN PENDAPATAN DAERAH	24.180.496.942,00	2	9	61	29.530.827.360,00	2	9	61	27.824.180.914,00	2	9	61
45	5.03.5.04.0.00.01.0000 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	18.258.527.604,00	3	14	41	18.480.086.287,00	3	14	41	17.147.291.487,00	3	14	41
46	6.01.0.00.0.00.01.0000 INSPEKTORAT	20.727.936.634,00	3	10	27	29.348.732.850,00	3	10	27	24.566.216.702,00	3	10	27
47	7.01.0.00.0.00.01.0000 KECAMATAN TANJUNG	22.703.165.117,00	6	16	46	24.086.545.904,00	6	15	42	23.799.307.779,00	6	15	42
48	7.01.0.00.0.00.02.0000 KECAMATAN MURUNG PUDAK	18.745.637.961,00	6	16	42	21.876.608.592,00	6	16	42	21.545.995.896,00	6	16	42
49	7.01.0.00.0.00.03.0000 KECAMATAN TANTA	5.360.763.926,00	6	12	35	5.637.809.926,00	6	12	35	5.477.714.767,00	6	12	35
50	7.01.0.00.0.00.04.0000 KECAMATAN MUARA HARUS	4.975.573.520,00	6	14	36	5.300.063.670,00	6	14	36	5.148.961.598,00	6	14	36
51	7.01.0.00.0.00.05.0000 KECAMATAN BANUA LAWAS	4.455.744.930,00	6	13	29	4.799.821.930,00	6	13	32	4.645.722.239,00	6	13	32
52	7.01.0.00.0.00.06.0000 KECAMATAN KELUA	6.982.860.753,00	6	13	32	7.399.332.520,00	6	13	37	7.136.266.291,00	6	13	37

No	Perangkat Daerah	RKPD				APBD				Pergeseran (s.d TW I)			
		Pagu	Prog	Keg	Sub Kegiatan	Anggaran	Prog	Keg	Sub Kegiatan	Anggaran	Prog	Keg	Sub Kegiatan
53	7.01.0.00.0.00.07.0000 KECAMATAN PUGAAN	4.226.392.378,00	6	11	31	4.559.646.378,00	6	11	31	4.390.995.643,00	6	11	31
54	7.01.0.00.0.00.08.0000 KECAMATAN JARO	3.848.423.934,00	6	13	34	4.139.113.134,00	6	13	34	3.956.522.377,00	6	13	34
55	7.01.0.00.0.00.09.0000 KECAMATAN MUARA UYA	6.302.140.160,00	6	13	32	6.414.841.159,00	6	13	32	6.264.841.559,00	6	13	32
56	7.01.0.00.0.00.10.0000 KECAMATAN HARUAI	3.821.368.260,00	6	13	35	4.137.364.832,00	6	13	35	3.973.690.049,00	6	13	35
57	7.01.0.00.0.00.11.0000 KECAMATAN UPAU	4.675.194.085,00	6	12	31	5.571.690.753,00	6	12	31	5.408.840.663,00	6	12	31
58	7.01.0.00.0.00.12.0000 KECAMATAN BINTANG ARA	3.388.542.499,00	6	13	30	3.838.050.499,00	6	13	30	3.679.587.363,00	6	13	30
59	8.01.0.00.0.00.01.0000 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	13.274.176.745,00	6	12	30	14.215.795.138,00	6	12	30	12.921.929.043,00	6	12	30
Total		2.854.501.325.821,00	231	616	1.709	2.993.799.126.847,00	230	622	1.732	3.080.469.459.912,00	230	614	1754

Sumber: Rancangan Perubahan Renja SKPD 2025 (SIPD-RI)

Tabel 2.2
Perbandingan Jumlah Program, Kegiatan dan Dana pada RKPD dan APBD Kabupaten Tabalong Tahun 2025
Berdasarkan Urusan (sampai Triwulan I)

No	Bidang Urusan	RKPD				APBD				APBD (Pergeseran)			
		Pagu	Prog	Keg	Sub Kegiatan	Anggaran	Prog	Keg	Sub Kegiatan	Anggaran	Prog	Keg	Sub Kegiatan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	470.968.734.599	3	12	69	498.063.698.778	3	12	66	541.490.073.340	3	12	79
2	1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	373.400.673.156	5	20	76	382.160.150.047	5	20	74	424.086.096.749	5	21	87
3	1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	449.559.617.240	9	22	77	523.243.244.876	9	22	75	570.196.831.512	9	22	78
4	1.04 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	152.177.155.779	5	9	20	154.441.372.779	5	9	19	158.478.346.534	5	9	20
5	1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	54.877.466.117	4	15	63	56.514.163.414	4	15	62	54.775.675.554	4	15	65
6	1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	47.614.529.830	6	16	36	48.087.797.266	6	16	35	49.470.035.634	6	16	37
7	2.07 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	20.039.620.428	5	15	29	20.738.016.606	5	15	29	23.947.258.870	5	15	29
8	2.08 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	10.248.766.867	7	19	31	10.944.339.817	7	19	31	10.853.271.537	7	20	35

No	Bidang Urusan	RKPD				APBD				APBD (Pergeseran)			
		Pagu	Prog	Keg	Sub Kegiatan	Anggaran	Prog	Keg	Sub Kegiatan	Anggaran	Prog	Keg	Sub Kegiatan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
9	2.09 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	43.026.366.719	5	13	25	43.530.422.475	5	13	24	43.138.149.445	5	13	25
10	2.10 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN	29.418.893.000	3	3	3	29.353.893.000	3	3	3	15.598.221.500	3	3	3
11	2.11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	70.250.000.000	10	16	33	67.677.119.080	10	16	32	66.529.279.664	10	16	34
12	2.12 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	38.026.326.564	5	17	45	22.645.308.461	5	17	44	21.589.526.789	5	17	45
13	2.13 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	18.974.204.219	5	9	30	18.646.123.481	5	9	28	17.787.599.141	5	9	29
14	2.14 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	2.107.559.772	3	8	12	1.850.214.022	3	8	12	5.668.236.669	3	8	24
15	2.15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	48.971.792.500	2	17	42	50.181.191.621	2	17	41	49.159.376.633	2	17	42
16	2.16 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	23.789.510.110	3	10	38	25.050.225.846	3	10	36	24.132.955.308	3	10	39
17	2.17 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	18,957,224,435	6	11	21	23.805.266.887	6	11	20	23.176.958.823	6	11	21
18	2.18 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	12.666.397.566	6	13	33	14.453.497.566	6	13	32	13.247.534.855	6	13	34

No	Bidang Urusan	RKPD				APBD				APBD (Pergeseran)			
		Pagu	Prog	Keg	Sub Kegiatan	Anggaran	Prog	Keg	Sub Kegiatan	Anggaran	Prog	Keg	Sub Kegiatan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
19	2.19 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	33.091.328.908	4	15	38	33.689.580.365	4	15	38	32.731.762.835	4	15	38
20	2.20 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK	712.498.420	1	1	5	627.557.420	1	1	5	525.247.920	1	1	5
21	2.21 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN	729.567.400	1	2	5	524.649.400	1	2	5	366.643.400	1	2	5
22	2.22 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	8.300.393.410	2	4	4	7.704.117.802	2	4	4	7.092.019.802	2	4	4
23	2.23 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	10.782.184.243	2	9	43	13.332.818.287	2	9	43	12.734.074.924	2	9	43
24	2.24 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN	2.664.231.952	2	7	9	1.432.281.768	2	7	9	1.162.109.618	2	7	9
25	3.25 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	5.369.490.987	4	5	9	4.365.810.893	4	5	9	4.159.231.893	4	5	9
26	3.26 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	6.501.008.242	3	4	8	5.667.901.785	3	4	8	5.354.499.385	3	4	8
27	3.27 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	70.032.026.457	6	18	52	67.767.094.129	6	18	51	68.070.205.589	6	18	50
28	3.30 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	21.843.246.741	5	10	15	19.949.679.344	5	10	15	20.536.498.782	5	10	15
29	3.31 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	1.587.422.194	3	3	5	1.551.513.194	3	3	5	1.288.762.426	3	5	5
30	4.01 SEKRETARIAT DAERAH	87.134.536.687	3	19	54	92.825.843.687	3	19	53	88.652.570.845	3	19	54

No	Bidang Urusan	RKPD				APBD				APBD (Pergeseran)			
		Pagu	Prog	Keg	Sub Kegiatan	Anggaran	Prog	Keg	Sub Kegiatan	Anggaran	Prog	Keg	Sub Kegiatan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
31	4.02 SEKRETARIAT DPRD	88.669.624.339	2	17	62	108.779.481.039	2	17	60	91.531.843.303	2	17	63
32	5.01 PERENCANAAN	18.965.163.262	3	15	56	18.160.076.621	3	15	55	17.139.436.727	3	15	56
33	5.02 KEUANGAN	467.699.849.122	4	14	99	463.269.178.517	4	14	99	462.970.551.894	4	14	91
34	5.03 KEPEGAWAIAN	13.667.173.897	2	11	38	14.371.858.180	2	11	37	13.823.724.180	2	11	38
35	5.04 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	4.591.353.707	1	3	3	4.108.228.107	1	3	3	3.323.567.307	1	3	3
36	5.05 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	3.597.466.050	1	4	8	2.959.993.002	1	4	8	2.764.688.557	1	4	9
37	6.01 INSPEKTORAT DAERAH	20.727.936.634	3	10	27	29.348.732.850	3	10	27	24.566.216.702	3	10	27
38	7.01 KECAMATAN	89.485.807.523	6	17	57	97.760.889.297	6	17	51	95.428.446.224	6	17	57
39	8.01 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	13.274.176.745	6	12	30	14.215.795.138	6	12	29	12.921.929.043	6	12	30
Jumlah		2.854.501.325.821	156	445	1.310	2.993.799.126.847	156	445	1.277	3.080.469.459.912	156	449	1345

Sumber: Rancangan Perubahan Renja SKPD 2025 (SIPD-RI)

Berdasarkan perbandingan antara target dengan capaian kinerja pada Indikator Kinerja Utama, ada beberapa indikator yang tingkat capaiannya masih belum mencapai target yang telah ditetapkan. Seperti capaian rata-rata lama sekolah yang hanya mencapai 9,15 pada tahun 2024 dari yang ditargetkan pada RPJMD dan RKPD sebesar 9,93. Pada indikator persentase penduduk miskin, program penanggulangan kemiskinan yang diterapkan oleh Pemerintah Kabupaten Tabalong masih belum terlalu berhasil untuk menurunkan angka kemiskinan dengan capaian sebesar 5,64 sesuai target yang ditetapkan pada RPJMD dan RKPD pada tahun 2024 sebesar 5,55 dan hanya mampu menurunkan sebesar 0,13 dari capaian tahun sebelumnya.

Pada sektor kontribusi pertanian dan perdagangan terhadap PDRB, upaya Pemerintah Kabupaten Tabalong untuk meningkatkan peran kedua sektor tersebut masih belum bisa dilakukan secara optimal. Pada tahun 2024 capaian peranan PDRB sektor pertanian sebesar 7,76 sedikit mengalami peningkatan dari capaian tahun 2023 sebesar 7,71. Sedangkan di sektor perdagangan capaian tahun 2024 sebesar 7,61 meningkat dari tahun 2023 sebesar 7,51. Meningkatnya capaian kedua sektor tersebut pada tahun 2024 masih jauh dari target yang dicanangkan pada RPJMD dan RKPD sebesar 11,15 untuk sektor pertanian dan 15,29 untuk sektor perdagangan. Namun hal ini bisa juga dimungkinkan karena adanya peningkatan peran secara signifikan sektor lain yang mengakibatkan peningkatan peran kedua sektor tersebut tidak terlalu signifikan terhadap distribusi PDRB Kabupaten Tabalong.

Dari sektor Pemerintahan, capaian SAKIP Kabupaten Tabalong belum memenuhi target yang dicanangkan pada RPJMD dan RKPD yakni sebesar 70-80 point (BB), dimana pada tahun 2024 Kabupaten Tabalong mendapatkan nilai 67,10 (B). Dari sektor Kemandirian Daerah, capaian tahun 2024 sebesar 8,6 masih jauh dari apa yang ditargetkan pada

RPJMD dan RKPD. Akan tetapi bukan berarti tidak adanya peningkatan terhadap Pendapatan Asli Daerah sebagai unsur pendukung tingkat kemandirian daerah, akan tetapi terjadinya peningkatan yang signifikan terhadap pendapatan transfer dari Pemerintah Pusat yang dipengaruhi oleh aturan terbaru tentang dana bagi hasil dari sektor pertambangan. Disamping adanya target kinerja yang belum tercapai, ada beberapa indikator yang sudah mencapai atau bahkan melebihi dari target kinerja tahun berkenaan. Capaian Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Tabalong pada tahun 2024 mencapai angka 75,97 capaian ini lebih tinggi dari target yang dicanangkan pada dokumen perencanaan baik tahunan maupun lima tahunan sebesar 75,07.

Dari segi pertumbuhan ekonomi, capaian Kabupaten Tabalong pada tahun 2024 mencapai 4,87. Capaian itu lebih rendah dari capaian tahun sebelumnya sebesar 4,90, akan tetapi lebih tinggi dari target RKPD sebesar 3,5 dan RPJMD sebesar 4,5. Selain itu, indikator yang terkait dengan pembangunan infrastruktur juga mengalami peningkatan atau bahkan melebihi dari target yang telah ditetapkan seperti Persentase Desa yang dapat diakses dengan mudah dengan capaian 98,35 kemudian Persentase jalan Kabupaten dalam kondisi mantap dengan capaian 80,91 serta Persentase penduduk berakses air minum dengan capaian 85,36. Hal ini menandakan Pemerintah Kabupaten Tabalong sangat serius dalam pengembangan infrastruktur yang berkualitas. Adapun secara lebih rinci dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.3
Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Utama
Kabupaten Tabalong Tahun 2025

No	Indikator	Capaian	Target RPD	Target RKPD
		2024	2025	2025
1	Indeks kerukunan umat beragama	-	3,50	3,50
2	Angka Kriminalitas		10,00	10,00
3	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	75,97	76,08-77,20	76,08-77,20
4	Angka Harapan Hidup (tahun)	74,76	75,13-75,21	75,13-75,21
5	Rata-Rata Lama Sekolah (tahun)	9,15	9,16-10,00	9,16-10,00
6	Harapan Lama Sekolah (tahun)	12,92	12,93	12,93
7	Persentase penduduk miskin (%)	5,64	3,08-3,47	3,08-3,47
8	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	3,44	2,60-3,60	2,60-3,60
9	Persentase PPKS yang dilayani (%)	100	100	100
10	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	72,54	75,40-76,40	75,40-76,40
11	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	86,47	86,15	86,15
12	Pertumbuhan ekonomi (%)	4,87	6,74	5,0 – 6,0
13	Indeks gini	-	0,244-0,344	0,244-0,344
14	Kontribusi sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan terhadap PDRB (%)	7,76	7,75	7,75
15	Kontribusi sektor Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi terhadap PDRB (%)	7,61	8,21	8,21
16	Indeks Ketahanan Pangan	85,94	82,10	82,10
17	Persentase UKM Aktif (%)	83	86	86
18	Persentase koperasi aktif (%)	53	70	70
19	Persentase desa yang bisa diakses dengan mudah (%)	98,35	100	100
20	Persentase jalan Kabupaten dalam kondisi mantap (%)	80,91	82,60	82,60
21	Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan (%)	67,96	55	55
22	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	71,98	71,96	71,96
23	Indeks Desa	0,69	82,64	82,64
24	Indeks Reformasi Birokrasi	80	78	78
25	Nilai SAKIP (predikat)	BB	BB	BB
26	Opini BPK (predikat)	WTP	WTP	WTP
27	Nilai survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	84,47	87	87
28	Tingkat Kemandirian Daerah	11,13	9,37	9,37
29	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM)	87,66	87,60	87,60
30	Tingkat Kegemaran Membaca (TGM)	67,04	81,90	81,90

Sumber: Rancangan Perubahan Renja SKPD 2025 dan hasil analisis

Berdasarkan perbandingan antara capaian dengan target pada Indikator Kinerja Daerah, ada beberapa capaian kinerja yang sudah memenuhi dari apa yang diharapkan atau direncanakan di dalam dokumen perencanaan. Pada aspek kesejahteraan masyarakat, pertumbuhan PDRB atas harga konstan Kabupaten Tabalong tahun 2024 mencapai 4,87 %. Meskipun mengalami penurunan dari capaian tahun 2023, akan tetapi masih lebih tinggi dari target kinerja yang diharapkan sebesar 3,5.

Peningkatan PDRB ini murni disebabkan oleh meningkatnya produksi pada banyak lapangan usaha, tidak dipengaruhi inflasi. PDRB harga berlaku menunjukkan kemampuan sumber daya ekonomi yang dihasilkan oleh suatu wilayah. Nilai PDRB yang besar menunjukkan kemampuan sumber daya ekonomi yang besar, begitu juga sebaliknya. PDRB per kapita (ADHB) Kabupaten Tabalong pada tahun 2024 mencapai 122,31 juta rupiah dengan jumlah penduduk sebesar 263,40 ribu jiwa. Nilai ini lebih tinggi jika dibandingkan tahun 2023 yang sebesar 117,750 juta rupiah dengan jumlah penduduk 259,84 ribu jiwa. Peningkatan ini terjadi karena membaiknya aktivitas perekonomian pada hampir seluruh sektor di Kabupaten Tabalong pada tahun 2024. Berdasarkan nilai ini, Kabupaten Tabalong masuk ke dalam kategori daerah berpendapatan menengah tinggi. Capaian ini jauh melebihi dari target yang dicanangkan sebesar 80.683 juta rupiah.

Disamping hal tersebut, capaian Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Tabalong juga patut mendapatkan apresiasi. Pada tahun 2024, Kabupaten Tabalong mendapatkan angka 75,97. Capaian ini lebih tinggi dari yang ditargetkan sebesar 75,07. Hal ini menandakan bahwa masyarakat di Kabupaten Tabalong memperoleh kemudahan dalam mengakses layanan yang didasarkan atas 3 aspek yakni: Umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan dan standar hidup layak. Akan tetapi, selain capaian positif di atas. Ada beberapa juga capaian yang belum memenuhi target yang sudah termuat dalam dokumen perencanaan. Persentase penduduk miskin Kabupaten Tabalong pada capaian tahun 2024 sebesar 5,64% masih lebih

besar dari yang ditargetkan sebesar 5,55 %. Hal ini menjadi pekerjaan rumah tersendiri bagi Pemerintah Kabupaten Tabalong karena dari berbagai program yang sudah dilaksanakan untuk pengentasan kemiskinan hanya mampu menurunkan 0,13 % dari tahun sebelumnya 2023.

Pada indikator penunjang pendidikan, Kabupaten Tabalong rata-rata lama sekolah sebesar 9,15 dan harapan lama sekolah sebesar 14,46, Pemerintah Kabupaten Tabalong perlu memberikan perhatian ekstra terkait perkembangannya. Capaian Kabupaten Tabalong terkait dua indikator pendidikan tersebut belum memenuhi dari apa yang sudah ditargetkan, akan tetapi masih lebih tinggi dari capaian Provinsi Kalimantan Selatan.

Pada indikator yang menunjang sektor kesehatan angka kematian bayi/angka kelangsungan hidup bayi sebesar 37/100.000 penduduk masih belum mencapai sesuai dengan target yang dicanangkan pada dokumen perencanaan sebesar 4/100.000 penduduk. Capaian ini masih jauh dari harapan masyarakat Kabupaten Tabalong dalam upaya peningkatan derajat kesehatan di Kabupaten Tabalong. Perlu adanya terobosan yang harus dilakukan Pemerintah Kabupaten Tabalong dalam pelaksanaan penanganan kesehatan bagi bayi sehingga bisa menurunkan risiko kematian bayi. Demikian juga dengan indikator persentase balita gizi buruk, capaian Kabupaten Tabalong pada tahun 2024 mencapai 0,77 dari yang ditargetkan 0,00 %. Hal ini menandakan pemberian fasilitas kesehatan bagi bayi dan balita masih belum optimal sehingga belum mencapai sesuai target yang diharapkan. Akan tetapi capaian ini sedikit lebih baik dari tingkat capaian tahun sebelumnya sebesar 0,93.

Pada aspek pelayanan umum dari sektor pendidikan, capaian persentase tenaga pendidik yang memiliki sertifikat pendidik tahun 2024 sebesar 85,87 % masih jauh dari target yang diharapkan sebesar 100 %. Perlu adanya perhatian terhadap peningkatan kapasitas tenaga pendidik dalam upaya peningkatan kualitas pendidikan di Kabupaten Tabalong.

Dari sektor kesehatan, capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) kesehatan khususnya di Rumah Sakit Umum Daerah pada tahun 2023 sebesar 83 % masih belum memenuhi target yang telah dicanangkan sebesar 100 %. Hal ini turut berimplikasi terhadap capaian Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah pada tahun 2024 sebesar 3,35 dari yang ditargetkan 3,53. Perlu adanya terobosan khusus untuk dapat meningkatkan pelayanan bidang kesehatan terutama di Rumah Sakit Umum Daerah di Kabupaten Tabalong.

Dari sektor infrastruktur, capaian Kabupaten Tabalong terkait rasio jaringan irigasi tahun 2024 sebesar 6,72 sudah melebihi target yang dicanangkan sebesar 6,36. Hal ini menandakan perhatian Pemerintah Daerah Kabupaten Tabalong dalam upaya memajukan sektor pertanian sebagai salah satu sektor unggulan di Kabupaten Tabalong cukup baik.

Dari sektor ketenagakerjaan perlu ditingkatkan lagi program pelatihan berbasis kompetensi dan pemagangan dalam negeri, hal ini bisa dilihat dari capaian target kinerja yang terlihat cukup jauh dengan capaian berbanding target tahun 2024 sebesar 320/138. Demikian juga terkait jumlah pekerja yang mengalami peningkatan produktivitas dari yang ditargetkan sebesar 140 dengan capaian tahun 2024 sebesar 90 pekerja.

Pada pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, capaian kabupaten layak anak masih belum memenuhi target akan tetapi sudah menunjukkan kemajuan yang lumayan signifikan. Hal ini terlihat dari capaian berbanding target kinerja tahun 2024 Nindya/Utama. Demikian juga dengan capaian IPG (Indeks Pembangunan Gender) pada tahun 2024 mencapai 86,47 lebih tinggi dari target sebesar 86,10. Akan tetapi berbanding terbalik dengan capaian IDG (Indeks Pemberdayaan Gender) dengan capaian tahun 2024 sebesar 72,54 dari yang ditargetkan sebesar 75,12.

Pada sektor pangan, capaian skor pola pangan harapan sebesar 92,65 sudah cukup menjanjikan, melebihi dari target yang diharapkan sebesar 89,9. Semakin tinggi skor PPH, semakin beragam dan seimbang pola

konsumsi pangan masyarakat. Skor PPH ideal adalah 100, yang berarti konsumsi pangan masyarakat sudah memenuhi kebutuhan gizi secara lengkap. Hal ini menandakan capaian konsumsi pangan di Kabupaten Tabalong sudah mengarah pada konsumsi pangan yang berkualitas mengarah pada konsumsi pangan yang beragam, bergizi, seimbang dan aman. Demikian juga dengan capaian Indeks Ketahanan Pangan tahun 2024 sebesar 85,94 masih cukup menjanjikan apabila dibandingkan dengan target sebesar 84,72. Hal ini menandakan pemenuhan pangan di Kabupaten Tabalong terpenuhi sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan.

Dari sektor lingkungan hidup capaian Indeks Kualitas air di Kabupaten Tabalong masih jauh dari harapan dengan capaian 52,26. Hal ini dimungkinkan karena posisi Kabupaten Tabalong sebagai daerah penghasil tambang batu bara yang lumayan besar, sehingga berpengaruh terhadap kualitas air di Kabupaten Tabalong. Akan tetapi capaian Indeks kualitas udara pada tahun 2024 mencapai 96,78 jauh melebihi dari yang ditargetkan sebesar 89,5.

Pada sektor administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, persentase kepemilikan KTP elektronik mencapai 99,75. Hal ini menandakan hampir 100 % penduduk di Kabupaten Tabalong sudah melakukan perekaman identitas penduduk digital.

Pada sektor pengendalian penduduk dan keluarga berencana, program yang telah dilaksanakan sudah mampu menekan laju pertumbuhan penduduk di Kabupaten Tabalong sehingga mencapai 1.32 % dari target yang dicanangkan sebesar 1,44 %. Demikian juga dengan capaian indeks pembangunan keluarga dengan capaian tahun 2024 sebesar 67,1 jauh lebih tinggi dari target sebesar 60,55.

Di sektor pariwisata, kontribusi sektor wisata terhadap PDRB di Kabupaten Tabalong masih sangat minim. Capaian kinerja tahun 2024 jika dibandingkan dengan target sebesar 1,42/4. Akan tetapi, ada peningkatan dari tahun sebelumnya. Diperlukan inovasi yang tepat sasaran dalam upaya meningkatkan sektor pariwisata agar bisa berkembang dan memberikan kontribusi yang lebih signifikan dalam PDRB Kabupaten Tabalong.

Demikian juga di sektor perdagangan, peran sektor ini terhadap pengendalian Bapokting sudah lumayan signifikan, melebihi dari capaian target yang diharapkan. Perbandingan antara capaian dengan target kinerja sebesar 2,24/1,14 menandakan peran Pemerintah dalam mengendalikan Bapokting sudah sangat signifikan. Pada sektor perindustrian, capaian kontribusi sektor industri terhadap PDRB sebesar 5,91 dari yang ditargetkan sebesar 11,51. Menguatnya peran sektor pertambangan secara signifikan mengakibatkan perkembangan sektor lain terpinggirkan sehingga seakan-akan sektor lain tidak mengalami peningkatan.

Pada aspek daya saing daerah perkembangan pengeluaran konsumsi pangan per kapita dari pangan dan non pangan per kapita lebih tinggi dari apa yang ditargetkan. Hal ini menandakan perputaran keuangan masyarakat di Kabupaten Tabalong terus meningkat. Hal ini tentu berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Tabalong menjadi meningkat lebih baik. Untuk ke depannya, perlu adanya program khusus serta menarik minat investor dapat berinvestasi di Tabalong pada sektor perdagangan besar sehingga perputaran ekonomi di Kabupaten Tabalong lebih meningkat.

Tabel 2.4
Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2025

No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Target Tahun 2024	Capaian tahun 2024	Target tahun 2025 Rankhir RPJMD 2025-2029)	Target tahun 2025 RKPD
A.	ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT					
1	Pertumbuhan PDRB Atas Harga Konstan	Persen	2,5-3,5	4,87	4,9	4,9
2	Inflasi	Persen	1,14	2,24	2,39	2,39
3	PDRB per kapita (ADHB)	Juta Rp	80.683	122,31	117.75	117.75
4	PDRB per kapita (ADHK)	Juta Rp	62.538	64,89	62.706,01	62.706,01
5	Indeks Gini	Indeks	0,28-0,31	-	0,284	0,284
6	Indeks Pembangunan Manusia	Persen	75,07	75,97	75,43	75,43
7	Persentase penduduk miskin	Persen	5,55	5,64	5,77	5,77
8	Angka kriminalitas yang tertangani	Persen	100	100	90	90
9	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Point	75,12	72,54	72,54	72,54
10	Indeks Pembangunan gender (IPG)	Point	86,10	86,47	86,47	86,47
11	Status Kota Layak Anak	Kategori	Nindya	Nindya	Nindya	Nindya
12	Angka Melek Huruf	Persen	100	98,79	99,52	99,52
13	Angka Rata-rata lama sekolah	Tahun	9,93	9,15	9,18	9,14
14	Harapan Lama Sekolah	Tahun	14,46	12,92	12,95	12,91
15	APK SD	Persen	110,72	105,27	108,66	108,66
16	APK SMP/MTs	Persen	100	96,17	94,92	94,92
17	APK SMA/SMK/MA	Persen	89,60	81,85	88,75	88,75
18	APM SD/SDLB/MI	Persen	100	98,75	99,52	99,52
19	APM SMP	Persen	100	82,01	85,7	85,7

No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Target Tahun 2024	Capaian tahun 2024	Target tahun 2025 Rankhir RPJMD 2025-2029)	Target tahun 2025 RKPD
20	Persentase Sekolah yang mendapatkan akreditasi A	Persen	-	9,44	20,58	20,58
21	Angka Kematian Bayi/Angka kelangsungan hidup bayi	Jiwa	4/1000	37/100.000	11/1000	11/1000
22	Angka Harapan Hidup	Tahun	70,73	74,76	74,85	71,28
23	Persentase Balita Gizi buruk	Persen	0,00	0,77	0,73	0,93
24	Rasio penduduk yang bekerja	Persen	97,25	71,62	96,4	96,4
25	Jumlah Grup Kesenian	Buah	42	45	40	40
26	Jumlah Gedung Kesenian	Buah	1	1	1	1
27	Jumlah klub olahraga	Buah	80	80	128	128
28	Jumlah Gedung Olahraga	Buah	36	36	36	36
B.	ASPEK PELAYANAN UMUM					
1	Urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar					
1.1	Pendidikan					
1.1.1	Persentase tenaga pendidik yang memenuhi kualifikasi S-1	Persen	100	93,90	95,80	87,9
1.1.2	Persentase tenaga pendidik yang memiliki sertifikat pendidik	Persen	100	85,87	40,88	40,76
1.1.3	Jumlah Angka Putus Sekolah (usia 7-15 tahun)	Persen	-	0	0	0
1.1.4	Jumlah Penyelenggaraan Even Tradisi dan Adat Budaya Daerah	Jumlah	10	3	5	5

No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Target Tahun 2024	Capaian tahun 2024	Target tahun 2025 Rankhir RPJMD 2025-2029)	Target tahun 2025 RKPD
1.1.5	Jumlah Situs Cagar Budaya yang dilestarikan	Jumlah	9	9	10	10
1.2	Kesehatan					
	Dinas Kesehatan					
1.2.1	AKI	Rasio	130/100.000 Kelahiran Hidup	161/100.000 Kelahiran Hidup	92/100.000	92/100.000
1.2.2	AKB	Rasio	8/1000 Kelahiran Hidup	37/1000 Kelahiran Hidup	9/100.000	9/100.000
1.2.3	UHC	Persen	100	98,81	99	99
1.2.4	Prevalensi Stunting (Pendek dan Sangat Pendek pada Balita)	Persen	9,5	9,5	7,45	7,45
1.2.5	Rasio Dokter terhadap jumlah penduduk	Rasio	1:2500	1:2500	Belum rilis	Belum rilis
1.2.6	Persentase Faskes dengan ketersediaan Obat Esensial	Persen	100	100	97,5	97,5
1.2.7	Persentase UKBM Aktif	Persen	-	-	90	90
1.2.8	IKM Rumah Sakit Umum Daerah	Indeks	3,53	3,35	3,39	3,39
1.2.9	Akreditasi Rumah Sakit Umum Daerah	Status	Paripurna	Paripurna	Paripurna	Paripurna
1.2.10	SPM Rumah Sakit Umum Daerah	Persen	100	83	83	83
1.3	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang					
1.3.1	Cakupan bangunan untuk fasilitas publik yang laik fungsi	Persen	65	100	100	100

No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Target Tahun 2024	Capaian tahun 2024	Target tahun 2025 Rankhir RPJMD 2025-2029)	Target tahun 2025 RKPD
1.3.2	Rasio Jaringan Irigasi	Persen	6,36	6,72	6,36	6,36
1.3.3	Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik	Persen	75	75,23	76,53	75
1.3.4	Persentase Rumah Tangga Berakses Air Minum	Persen	-	-	86	86
1.3.5	Persentase Rumah Tangga Berakses Sanitasi	Persen	-	-	86	86
1.3.6	Persentase Jalan Kabupaten dalam Kondisi Mantap	Persen	79,8	75,23	78	78
1.3.7	Persentase Penerapan Manajemen Mutu Jasa Konstruksi, SDM yang Berkualitas serta Didukung Peralatan dan Sistem Informasi yang Memadai	Persen	-	-	100	100
1.3.8	Terwujudnya Pengaturan, Pembinaan, Pelaksanaan dan Pengawasan Penataan Ruang	Persen	-	-	36,36	36,36
1.4	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman					
1.4.1	Persentase Rumah Tidak Layak Huni Bagi Korban Pasca Bencana yang direhabilitasi dan dibangun	Persen	-	-	20	20
1.4.2	Persentase Rumah Tidak Layak Huni yang ditangani di Kawasan Kumuh	Persen	-	-	20	20
1.4.3	Persentase Rumah Tidak Layak Huni yang ditangani di Luar Kawasan Kumuh	Persen	-	-	20	20
1.4.4	Persentase PSU yang ditangani	Persen	-	-	72	72

No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Target Tahun 2024	Capaian tahun 2024	Target tahun 2025 Rankhir RPJMD 2025-2029)	Target tahun 2025 RKPD
1.5	Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat					
1.5.1	Persentase penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persen	100	100	100	100
1.5.2	Persentase penegakan peraturan daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Walikota	Persen	100	100	100	100
1.5.3	Persentase pencegahan penanggulangan kebakaran	Persen	100	100	100	100
1.5.4	Terpenuhinya sarana dan prasarana pencegahan penanggulangan kebakaran	Unit	5	5	5	5
1.5.5	Persentase Cakupan Penanggulangan Korban Bencana	Persen	100	100	100	100
1.6	Sosial					
1.6.1	Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang berpartisipasi dalam penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial	Persen	100	100	100	100
1.6.2	Persentase PPKS yang mendapatkan layanan rehabilitasi sosial	Persen	100	100	100	100
1.6.3	Jumlah PPKS yang mendapatkan Layanan Jaminan Sosial	Persen	100	100	100	100
1.6.4	Persentase Jumlah Korban Bencana yang mendapatkan Layanan Sosial	Persen	100	100	100	100
1.6.5	Persentase pengelolaan Taman Makam Pahlawan	Persen	100	100	100	100

No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Target Tahun 2024	Capaian tahun 2024	Target tahun 2025 Rankhir RPJMD 2025-2029)	Target tahun 2025 RKPD
2	Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar					
2.1	Tenaga Kerja					
2.1.1	Jumlah Tenaga Kerja yang mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi dan Pelatihan Pemagangan dalam negeri	Orang	320	138	320	320
2.1.2	Jumlah Pekerja yang meningkat produktivitasnya	Orang	140	90	120	120
2.1.3	Jumlah Tenaga Kerja yang ditempatkan di Dalam Negeri	Orang	500	1.221	3400	500
2.1.4	Persentase Perusahaan yang menerapkan Tata Kelola Kerja yang layak PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar BPJS Ketenagakerjaan.	Persen	86,76	78,89	87,9	87,9
2.1.5	Persentase pelaksanaan program yang sesuai dengan perencanaan tenaga kerja	Persen	-	-	100	100
2.2	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak					
2.2.1	IPG	Point	86,10	86,47	86,76	85,48
2.2.2	IDG	Point	75,12	72,54	74,60	74,60
2.2.3	Kabupaten Layak Anak	Kategori	Utama	Nindya	Utama	Utama
2.2.4	Persentase SKPD yang responsif gender	Persen	100	100	100	100
2.2.5	Persentase Perempuan Korban Kekerasan yang terselesaikan penanganannya pada Unit Pelayanan Terpadu	Persen	100	100	100	100

No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Target Tahun 2024	Capaian tahun 2024	Target tahun 2025 Rankhir RPJMD 2025-2029)	Target tahun 2025 RKPD
2.2.6	Persentase SKPD yang memiliki Data terpilah gender	Persen	100	100	100	100
2.2.7	Persentase Anak Korban Kekerasan yang terselesaikan penanganannya pada Unit Pelayanan Terpadu	Persen	100	100	100	100
2.2.8	Persentase ARG pada Belanja APBD	Persen	30	52,38	60	60
2.2.9	Indeks Perlindungan Anak	Indeks	-	-	68,03	68,03
2.3	Pangan					
2.3.1	Skor Pola Pangan Harapan	Persen	89,9	92,65	93,80	86,6
2.3.2	Meningkatnya ketahanan pangan daerah (IKP)	Indeks	84,72	85,94	86,90	79,79
2.3.3	Meningkatnya Desa Tahan Pangan	Persen	100	100	100	97,71
2.3.4	Tingkat keamanan pangan segar asal tumbuhan	Persen	90	90	100	100
2.4	Pertanahan					
2.4.1	Persentase kasus sengketa lahan yang ditangani	Persen	-	-	100	100
2.4.2	Persentase pengadaan tanah untuk pembangunan kepentingan umum oleh Pemerintah Daerah	Jumlah	-	-	80	80
2.4.3	Penetapan subyek dan obyek reforma agraria	Kasus	-	-	100	100
2.5	Lingkungan Hidup					

No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Target Tahun 2024	Capaian tahun 2024	Target tahun 2025 Rankhir RPJMD 2025-2029)	Target tahun 2025 RKPD
2.5.1	Indeks Kualitas Air	Persen	55,50	52,26	55,19	55,19
2.5.2	Dokumen Perencanaan LH yang updating	Persen	2	3	3	3
2.5.3	Indeks Kualitas Udara	Indeks	89,5	96,78	97,00	90,60
2.5.4	Persentase Jumlah Pengaduan Lingkungan yang ditindaklanjuti	Persen	90	100	100	100
2.5.5	Ketaatan penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, Izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan	Persen	100	100	100	100
2.5.6	Tingkat Ketaatan pelaku usaha/kegiatan dalam pengelolaan Limbah B 3	Persen	70	70	100	100
2.5.7	Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah	Indeks	-	-	76	76
2.5.8	Persentase Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Persen	-	-	75	75
2.5.9	Indeks Kualitas Lahan (IKL)	Persen	-	-	77,77	77,77
2.5.10	Persentase Masyarakat hukum adat (MHA) yang diakui terkait PPLH	Persen	-	-	100	100
2.5.11	Persentase Pembinaan, penyuluhan dan pendampingan kepada lembaga kemasyarakatan	Persen	-	-	100	100
2.6	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil					
2.6.1	Persentase kepemilikan KTP elektronik	Persen	100	99,75	100	100
2.6.2	Persentase kepemilikan kartu keluarga	Persen	100	99,59	100	85
2.6.3	Persentase kepemilikan kartu identitas anak	Persen	75	78,9	100	100
2.6.4	Persentase kepemilikan akta kelahiran	Persen	60	63,89	75	75

No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Target Tahun 2024	Capaian tahun 2024	Target tahun 2025 Rankhir RPJMD 2025-2029)	Target tahun 2025 RKPD
2.6.5	Persentase kepemilikan akta kelahiran anak 0-18 tahun	Persen	100	99,11	100	100
2.6.6	Persentase cakupan kepemilikan buku nikah/akta perkawinan pada semua pasangan yang perkawinannya dilaporkan	Persen	100	100	100	100
2.6.7	Persentase cakupan kepemilikan akta perceraian dari perceraian yang dilaporkan	Persen	100	100	100	100
2.6.8	Persentase kepemilikan akte kematian dari peristiwa kematian yang dilaporkan	Persen	100	100	100	100
2.6.9	Persentase Identitas Kependudukan Digital yang diafiliasi	Persen	-	-	100	100
2.6.10	Persentase penerbitan SKPWN berdasarakan Permohonan	Persen	-	-	10	10
2.6.11	Persentase penduduk rentan yang memiliki Dokumen Administrasi Kependudukan	Persen	-	-	75	75
2.6.12	Persentase Buku Pokok Pemakaman (BPP) yang ditindaklanjuti	Persen	-	-	100	100
2.6.13	Persentase Inovasi pelayanan yang diimplementasikan	Persen	-	-	92	92
2.6.14	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	-	-	IPAK>3,6	IPAK>3,6
2.6.15	Indeks Persepsi Anti Korupsi dan Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan	Indeks	-	-	IPKP>3,2	IPKP>3,2
2.6.16	Persentase desa/kelurahan yang dapat mengakses SIAK dengan baik	Persen	-	-	-	100
2.6.17	Persentase Sarana dan Prasarana Pendukung SIAK dalam kondisi baik	Persen	-	-	-	100

No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Target Tahun 2024	Capaian tahun 2024	Target tahun 2025 Rankhir RPJMD 2025-2029)	Target tahun 2025 RKPD
2.6.18	Persentase Penyajian Data Kependudukan	Persen	-	-	-	100
2.6.19	Persentase PD yang memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerjasama	Persen	-	-	-	37
2.7	Pemberdayaan Masyarakat Desa					
2.7.1	Jumlah sarana transportasi di desa yang dibangun	Jumlah	2	2	2	2
2.7.2	Cakupan sarana dan prasarana perkantoran pemerintahan desa yang baik	Persen	100	100	100	100
2.7.3	Jumlah Kerjasama antar Desa	Persen	2	12	15	12
2.7.4	Persentase Kerjasama Pembangunan Kawasan Perdesaan	Persen	-	-	100	100
2.7.5	Persentase Desa yang memiliki administrasi pemerintahan desa yang baik	Persen	-	-	100	100
2.7.6	Tingkat Lembaga Kemasyarakatan Desa yang aktif	Status	-	-	Tinggi	Tinggi
2.7.7	Indeks Perkembangan Kawasan Perdesaan	Kategori	-	-	Berdaya Saing (75,00)	Berdaya Saing (75,00)
2.8	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana					
2.8.1	Persentase Pencapaian Peserta KB MKJP	Persen	20	13,58	15,26	15,26
2.8.2	Cakupan anggota Bina Keluarga yang ber KB (BKB, BKR, BKL)	Persen	80	89,61	95,3	95,3
2.8.3	Cakupan anggota UPPKS yang ber KB	Persen	92	92,02	95	95

No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Target Tahun 2024	Capaian tahun 2024	Target tahun 2025 Rankhir RPJMD 2025-2029)	Target tahun 2025 RKPD
2.8.4	Laju Pertumbuhan Penduduk	Persen	1,44	1,32	1,44	1,44
2.8.5	Cakupan Peserta KB yang aktif	Persen	82,28	79,32	85	80
2.8.6	Indeks Pembangunan Keluarga	Indeks	60,55	67,1	69	64,55
2.8.7	Angka Kelahiran Remaja umur 15-19 Tahun (<i>Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19</i>)	Angka	29	12,6	10	29
2.8.8	Angka Kelahiran Total (<i>Total Fertility Rate/TFR</i>) Per WUS usia 15-49 Tahun	Angka	2,12	1,54	2,12	2,12
2.8.9	Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern/ <i>Modern Contraceptive</i> (mCPR)	Angka	82,28	79,32	80	80
2.9	Perhubungan					
2.9.1	Meningkatnya Kelaikan Operasional Kendaraan Umum/Pribadi di Jalan Raya	Angka	4.900 KBWU	4.320 KBWU	5.000 KBWU	5.000 KBWU
2.9.2	Persentase Layanan Jasa Sarana dan Prasarana fasilitas keselamatan Perhubungan	Persen	90	90	90	90
2.9.3	Meningkatnya pergerakan Orang dan Barang yang melalui Bandara Warukin	Jumlah	1.500 Orang/ 40.000 Barang/Kuli	81 Orang/ 40.000 Barang/Kuli	3.000 Orang/60.000 0 Barang/Kuli	3.000 Orang/60.000 0 Barang/Kuli
2.9.4	Menurunnya Angka Kecelakaan dan Pelanggaran	Angka	20 Laka 930 Tilang 6 lokasi	20 Laka 930 Tilang 6 lokasi	19 Laka 900 Tilang	19 Laka 900 Tilang
2.9.5	Persentase Layanan Angkutan Multimoda	Persen	100	100	100	100
2.10	Komunikasi dan Informatika					

No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Target Tahun 2024	Capaian tahun 2024	Target tahun 2025 Rankhir RPJMD 2025-2029)	Target tahun 2025 RKPD
2.10.1	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Persen	100	100	100	100
2.10.2	Terlaksananya <i>E-Government</i>	Persen	100	100	100	100
2.10.3	Persentase terlaksananya Program Aplikasi Informatika	Persen	-	-	100	100
2.11	Koperasi Usaha Kecil dan Menengah					
2.11.1	Persentase koperasi aktif	Persen	-	-	63	63
2.11.2	Terlaksananya penilaian kesehatan koperasi	Unit	-	-	16	16
2.11.3	Persentase Terwujudnya SDM Koperasi yang berkualitas	Persen	-	-	30	30
2.11.4	Persentase Terfasilitasi Perizinan Usaha Mikro dan Fasilitasi Kemitraan Usaha	Persen	-	-	100	100
2.11.5	Persentase Terbinanya Para pelaku Usaha Mikro	Persen	-	-	100	100
2.12	Penanaman Modal					
2.12.1	Nilai Skor Standar Kepuasan Masyarakat	Skor	90	90	94,7	94,7
2.12.2	Persentase kemitraan antara usaha besar (PMA/PMDN) dengan UMKM di daerah	Persen	-	-	100	100
2.12.3	Persentase investor yang berminat menanamkan modal	Persen	-	-	100	100
2.12.4	Meningkatnya Pelayanan Investasi Daerah (Persentase Peningkatan Investasi Daerah)	Persen	-	-	750 M PMDN 16.500 USD PMA	750 M PMDN 16.500 USD PMA

No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Target Tahun 2024	Capaian tahun 2024	Target tahun 2025 Rankhir RPJMD 2025-2029)	Target tahun 2025 RKP
2.12.5	Persentase pengelolaan sistem informasi perizinan dan non perizinan yang terintegrasi	Persen	-	-	100	100
2.13	Kepemudaan dan Olahraga					
2.13.1	Jumlah atlet berprestasi	Orang	50	46	55	55
2.13.2	Partisipasi pemuda dalam organisasi	Persen	-	-	25	25
2.13.3	Jumlah Organisasi Kepramukaan yang difasilitasi dalam pengembangan organisasi	Jumlah	-	-	1	1
2.14	Statistik					
2.14.1	Persentase OPD yang mendapat rekomendasi kegiatan statistik	Persen	-	-	80	80
2.15	Persandian					
2.15.1	Persentase terlaksananya Penyelenggaraan Pengamanan Informasi	Persen	-	-	100	100
2.16	Kebudayaan					
2.16.1	Jumlah penyelenggaraan festival seni budaya	Festival	5	5	5	5
2.16.2	Jumlah situs dan cagar budaya yang dilestarikan	Situs	9	9	10	10
2.17	Perpustakaan					
2.17.1	Persentase Jumlah Pengunjung	Persen	20,16	22	23	23
2.17.2	Rasio ketersediaan koleksi bahan pustaka	Rasio	0,25	0,26	0,28	0,28

No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Target Tahun 2024	Capaian tahun 2024	Target tahun 2025 Rankhir RPJMD 2025-2029)	Target tahun 2025 RKPD
2.17.3	Persentase perpustakaan yang dibina	Persen	53	53	60	60
2.17.4	Persentase Jumlah Keterlibatan Masyarakat dalam meningkatkan literasi melalui gemar membaca (Jumlah Masyarakat Terlibat Kegiatan Perpustakaan: Jumlah Penduduk x 100%)	Persen	-	-	0,19	0,19
2.18	Kearsipan					
2.18.1	Persentase Pengelolaan Arsip di OPD	Persen	45	45	45	45
2.18.2	Jumlah Perlindungan, Penyelamatan Arsip, Autentifikasi Arsip statis dan Alih Media	Jumlah	300	500	1385	1385
3	Urusan Pemerintahan Pilihan					
3.1	Kelautan dan Perikanan					
3.1.1	Jumlah produksi perikan budidaya	Ton	18.053,2	18.075,69	18.324,00	18.324,00
3.1.2	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap yang ramah Lingkungan	Ton	2.163,41	2.163,41	2.185,00	2.185,00
3.1.3	Jumlah Produksi Pengolahan hasil perikanan	Ton	32	37,1	32,5	32,5
3.1.4	Jumlah Pelanggaran pada pengawasan sumber daya perikanan tangkap dan pembudidayaan	Jumlah	-	-	2	2
3.2	Pariwisata					
3.2.1	Jumlah Kunjungan Wisata	orang	1.020.000	1.023.390	953. 000	953. 000

No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Target Tahun 2024	Capaian tahun 2024	Target tahun 2025 Rankhir RPJMD 2025-2029)	Target tahun 2025 RKPD
3.2.2	Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap PDRB Kabupaten	Persen	4	1,42	0,65	0,65
3.3	Pertanian					
3.3.1	Produktivitas Pertanian per hektar pertahun - Karet (sheet) - Lada (biji kering) - Kopi	Hektar/ tahun	1,1 ton/ha 220 kg/ha -	1,14 ton/ha 637 kg/ha -	1,3 ton/ha 547 kg/ha 854 kg/ha	1,3 ton/ha 547 kg/ha 215 kg/ha
3.3.2	Produksi Pertanian - Padi - Jagung - Sayur sayuran - Buah-buahan	Ton Ton Ton Ton	4,8 ton/ha 4,05 ton/ha - -	4,8 ton/ha 4,2 ton/ha - -	66.430 2.250 2.060 41.908	66.430 2.250 2.060 41.908
3.3.3	Jumlah Prasarana Pertanian yang dibangun dan dikembangkan	Unit	-	-	43	43
3.3.4	Luas Lahan yang dilakukan pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian (Hektar)	Hektar	-	-	1.500	1.500
3.3.5	Jumlah Kelompok Tani yang meningkat nilai kemampuannya	Jumlah	-	-	20	20
3.3.6	Jumlah Kelahiran Ternak Sapi Melalui Inseminasi Buatan	Jumlah	-	-	300	300
3.3.7	Menekan angka mortalitas ternak komoditi strategis	Persen	-	-	≤3 %	≤3 %
3.3.8	Pengawasan peredaran daging ASUH	Persen	-	-	75	75
3.4	Perdagangan					

No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Target Tahun 2024	Capaian tahun 2024	Target tahun 2025 Rankhir RPJMD 2025-2029)	Target tahun 2025 RKPD
3.4.1	Terkendalinya inflasi harga kebutuhan Bapokting	Persen	1,14	2,24	1,1	1,1
3.4.2	Persentase Pemenuhan Indikator pasar Tipe A Kriteria SNI 8152:2015	Persen	100	90	85,15	85,15
3.4.3	Persentase jumlah alat UTTP dipasar dan SPBU yang ditera/tera ulang	Persen	80	69	60	60
3.4.4	Persentase rekomendasi perizinan yang dikeluarkan	Persen	-	-	75	75
3.4.5	Persentase rekomendasi perizinan yang dikeluarkan	Persen	-	-	85	85
3.5	Perindustrian					
3.5.1	Kontribusi sektor industri terhadap PDRB	Persen	11,51	5,91	11,77	11,77
3.5.2	Persentase jumlah perizinan berusaha industri yang difasilitasi dengan yang dikeluarkan oleh Instansi terkait secara elektronik	Persen	66	50	70	70
3.5.3	Tersedianya Informasi Industri	Persen	100	100	100	100
4	Urusan Pendukung Urusan Pemerintahan					
4.1	Sekretariat Daerah					
4.1.1	Persentase Dokumen Penyelenggaraan Pemerintah yang disusun tepat waktu	Persen	100	100	100	100
4.1.2	Persentase Pelayanan Kelembagaan Sosial Kemasyarakatan	Persen	100	100	100	100
4.1.3	Persentase Pemebeentukan Produk Hukum	Persen	100	100	100	100

No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Target Tahun 2024	Capaian tahun 2024	Target tahun 2025 Rankhir RPJMD 2025-2029)	Target tahun 2025 RKPD
4.1.4	Persentase Tingkat Sinkronisasi dan Penyelarasan Sektor Ekonomi dan Sumber Daya Alam	Persen	100	100	100	100
4.1.5	Persentase Tingkat Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa	Persen	100	100	100	100
4.2	Sekretariat DPRD					
4.2.1	Cakupan layanan administrasi umum Sekretariat DPRD	Persen	100	100	100	100
4.2.2	Persentase Fasilitasi Ranperda menjadi Perda	Persen	100	100	100	100
4.2.3	Persentase Fasilitasi Kegiatan Pengawasan, Anggaran dan Aspirasi Masyarakat/Reses	Persen	100	100	100	100
5	Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan					
5.1	Perencanaan					
5.1.1	Persentase Indikator Kinerja sasaran daerah yang dilaksanakan oleh perangkat daerah	Persen	100	100	100	100
5.1.2	Persentase Keselarasan Dokumen Perencanaan SKPD terhadap Dokumen Perencanaan daerah	Persen	100	100	100	100
5.2	Keuangan					
5.2.1	Persentase Ketepatan waktu Penyusunan dan Penetapan APBD	Persen	100	100	100	100

No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Target Tahun 2024	Capaian tahun 2024	Target tahun 2025 Rankhir RPJMD 2025-2029)	Target tahun 2025 RKPD
5.2.2	Persentase waktu penyelesaian SP2D berdasarkan SPM yang dinyatakan sah dan lengkap sesuai ketentuan dan tepat waktu	Persen	100	100	100	100
5.2.3	Persentase ketepatan waktu penyampaian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Persen	100	100	100	100
5.2.4	Persentase kesesuaian nilai aktiva tetap BMD dengan neraca keuangan Pemerintah Daerah	Persen	100	100	100	100
5.2.5	Persentase kontribusi Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah	Persen	43,54	33,68	37,42	37,42
5.2.6	Persentase kontribusi Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah	Persen	5,1	40,26	2,27	2,27
5.2.7	Persentase SKPD pengelola PAD yang mencapai target (%)	Persen	14	46	50	50
5.3	Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan					
5.3.1	Persentase Peningkatan Kompetensi Pegawai	Persen	100	100	100	100
5.3.2	Indeks Profesionalitas ASN	Indeks	-	-	65	65
5.3.3	Indeks Kepuasan terhadap layanan bidang Kepegawaian	Indeks	-	-	100	100
5.5	Penelitian dan Pengembangan					
5.5.1	Persentase hasil Riset yang ditindaklanjuti	Persen	-	-	17	17
6	Administrasi Pemerintahan Umum					
6.1.1	Persentase tingkat pelayanan anggaran	Persen	100	100	100	100

No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Target Tahun 2024	Capaian tahun 2024	Target tahun 2025 Rankhir RPJMD 2025-2029)	Target tahun 2025 RKPD
6.1.2	Persentase perda yang terselesaikan tepat waktu	Persen	100	100	100	100
6.1.3	Persentase dokumen perencanaan dan keuangan yang disusun tepat waktu	Persen	100	100	100	100
6.1.4	Nilai AKIP: Indeks Pelayanan Kesekretariatan	Indeks	73,90	100	74	74
6.1.5	Persentase tingkat pelayanan Protokol dan Komunikasi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	Persen	100	100	100	100
6.1.6	Persentase SAKIP SKPD yang berpredikat BB	Persen	50	50	88	88
7	Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan					
7.1.1	Tingkat Maturitas SPIP Kabupaten Tabalong	Persen	0	80 %	70	70
7.1.2	Jumlah Perangkat Daerah dengan predikat WBK	Jumlah	3 PD	5 PD	1	1
8	Kewilayahan					
8.1.1	Persentase Pelayanan Kelembagaan Sosial Kemasyarakatan	Persen	73,96	73,96	83	83
8.1.2	Persentase Peningkatan Kinerja Aparatur, Kapasitas dan Tata Kelola Kewilayahan Desa	Persen	75,80	75,80	79	79
8.1.3	Persentase Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman dan Keamanan)	Persen	97,64	97,64	95	95
8.1.4	Persentase dokumen penyelenggaraan Pemerintahan yang disusun tepat waktu	Persen	82,23	82,23	84	84

No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Target Tahun 2024	Capaian tahun 2024	Target tahun 2025 Rankhir RPJMD 2025-2029)	Target tahun 2025 RKP
8.1.5	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa	Persen	84,59	84,59	81	81
9	Unsur Pemerintahan Umum					
9.1.1	Persentase Partisipasi masyarakat dalam Pemilu	Persen	100	100	0	0
9.1.2	Kegiatan pembinaan politik daerah	Jumlah	12	12	24	24
9.1.3	Persentase penganganan konflik dengan forum-forum di Kabupaten Tabalong	Persen	100	100	100	100
9.1.4	Meningkatnya ketahanan sosial, budaya, agama, kemasyarakatan dan Ekonomi	Persen	100	100	97	97
9.1.5	Kegiatan pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP	Jumlah	10	10	14	14
9.1.6	Persentase pelaksanaan kegiatan sosialisasi ideologi Wawasan Kebangsaan	Persen	80	80	100	100
9.1.7	Persentase pemantauan politik daerah dan verifikasi bantuan keuangan partai politik	Persen	78	78	100	100
9.1.8	Persentase pelaksanaan pembinaan LSM dan Ormas	Persen	80	80	100	100
9.1.9	Persentase pelaksanaan pembinaan dan pengembangan ketahanan sosial, budaya dan ekonomi	Persen	80	80	97	97
9.1.10	Persentase pelaksanaan penanganan konflik sosial dengan forum-forum di Kabupaten Tabalong	Persen	80	80	100	100

No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Target Tahun 2024	Capaian tahun 2024	Target tahun 2025 Rankhir RPJMD 2025-2029)	Target tahun 2025 RKPD
C.	ASPEK DAYA SAING DAERAH					
1	Pengeluaran Konsumsi per Kapita	ribu rupiah	1.541.054/1 2.613	1.677.701/1 2.613	8.716.029	8.716.029
2	Proporsi Pengeluaran Konsumsi Non Pangan Perkapita	ribu rupiah	55,08	47,76	51,99	51,99
3	Ketaatan Terhadap RTRW	persen	100	100	100	100
4	Jenis dan Jumlah Bank dan Cabang	Jumlah	24	24	11	11
5	Jenis dan Jumlah Perusahaan Asuransi dan Cabang	Jumlah	4	4	20	20
6	Jenis, Kelas, dan Jumlah Penginapan/Hotel	Jumlah	21	21	37	37
7	Angka kriminalitas	Jumlah	10	10	6,23	6,23
8	Jumlah demo	Kali	0	0	0	0
9	Jumlah Perda yang mendukung iklim usaha	perda	5	5	5	5
10	Jumlah lulusan S1/S2/S3	orang	15,45	15,45	13.535	13.535
11	Rasio Ketergantungan	persen	45,00	42,38	46,64	46,64

Sumber: Rancangan Akhir Perubahan Renja SKPD 2025 dan hasil analisis

Berdasarkan jenisnya, jumlah program, kegiatan dan sub kegiatan pada RKPD ada 155 program, 423 kegiatan dan 1.057 sub kegiatan, sedangkan pada APBD terdapat 156 program, 423 kegiatan, dan 1.040 sub kegiatan. Selanjutnya, sampai Triwulan I pelaksanaan APBD, dilakukan perubahan terhadap APBD sebanyak 2 kali. Kegiatan pada APBD yang semula 423 menjadi 425 dan jumlah sub-kegiatan yang semula 1.040 menjadi 1.089 dengan jumlah program yang tidak berubah, yakni 156 program. Dalam hal ini, terdapat sejumlah sub kegiatan pada RKPD yang tidak digunakan di APBD, juga sejumlah sub kegiatan yang tidak ada di RKPD namun ditambahkan di APBD seiring dengan proses penganggaran yang berjalan. Adapun sub kegiatan dimaksud secara lebih rinci dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.5
Sub Kegiatan pada RKPD yang Tidak Digunakan di APBD

No	Sub Kegiatan
1	2.07.03.2.01.03 Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota
2	2.08.01.2.03.03 Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD
3	2.14.03.2.02.03 Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program KKBPK untuk Petugas Keluarga Berencana/ Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)
4	2.16.01.2.01.02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
5	2.16.01.2.01.03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
6	2.16.01.2.01.04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
7	2.16.01.2.01.05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD
8	2.16.01.2.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
9	2.16.01.2.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
10	2.16.01.2.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
11	2.16.01.2.02.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
12	2.16.01.2.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD
13	2.16.01.2.03.01 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD
14	2.16.01.2.03.05 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD

No	Sub Kegiatan	
15	2.16.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
16	2.23.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
17	5.02.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
18	2.16.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
19	2.16.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
20	2.16.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD

Sumber: Rancangan Perubahan Renja SKPD 2025 dan hasil analisis

Tabel 2.6
Sub Kegiatan yang Ditambahkan di APBD

No	Sub Kegiatan	
1	2.11.02.2.02.0002	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD
2	2.15.02.2.05.0001	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
3	7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan
4	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
5	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
6	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan

Sumber: Rancangan Perubahan Renja SKPD 2025 dan hasil analisis

2.2. Ketercapaian Kinerja dan Permasalahan Pembangunan sampai Triwulan I

Sebagaimana disebutkan di bagian sebelumnya, penilaian hasil pelaksanaan RKPD menggunakan data realisasi pelaksanaan APBD sebagai acuan.

Informasi mengenai anggaran dan realisasinya dapat diperoleh melalui aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD). Sedangkan informasi mengenai tingkat capaian kinerja, permasalahan dan rencana tindaklanjutnya diolah melalui Sistem Monitoring dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (SI MOLEK Pe-De) yang konsepnya disusun berdasarkan Permendagri Nomor 86 tahun 2017. Tingkat capaian anggaran dihitung dengan membandingkan realisasi keuangan sampai akhir Triwulan I tahun 2025 dan tingkat capaian kinerja dihitung

dengan rata-rata capaian program yang telah dilakukan pembobotan secara relatif terhadap anggaran pada setiap perangkat Daerah.

Pada tabel yang diuraikan dalam capaian realisasi anggaran dan kinerja dapat dilihat bahwa tingkat capaian kinerja pada beberapa perangkat Daerah bernilai sangat minim. Sedikitnya ada 2 permasalahan yang menyebabkan hal ini bisa terjadi. Pertama, perangkat Daerah tersebut memang belum melakukan penginputan dalam aplikasi Sistem Monitoring dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah. Kedua, pengisian data dalam sistem tidak tepat sehingga nilainya tidak bisa dihitung dan secara otomatis dianggap 0 (nol).

Kesalahan dalam pengisian realisasi kinerja antara lain: 1) tidak konsisten antara indikator dan target 5 tahunan dengan indikator dan target tahunan; 2) isian realisasi kinerja tidak relevan dengan indikator kinerja, misalnya satuan indikator menyatakan jumlah sedangkan isiannya menggambarkan persentase. Hal ini selain menunjukkan kurangnya pemahaman terhadap pengukuran kinerja juga mengindikasikan kurangnya kesadaran akan pentingnya pengukuran kinerja.

Berikut rekapitulasi hasil pelaksanaan program dan kegiatan perangkat Daerah dan permasalahan pembangunan sampai Triwulan I tahun 2025:

Tabel 2.7
Rekapitulasi hasil Capaian Realisasi Anggaran dan Kinerja sampai Triwulan I tahun 2025
Berdasarkan Satuan Kerja Perangkat Daerah

No	Perangkat Daerah	Anggaran	Realisasi		Tingkat Capaian Kinerja (%)	Permasalahan	Rekomendasi Tindak Lanjut
			Keuangan (Rp)	Keuangan (%)			
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1.01.2.22.0.00.01.0000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	548.582.093.142,00	62.912.463.317,00	11,468 %	21,57	Beberapa kegiatan besar rencana dilaksanakan pada triwulan ke tiga, sehingga kinerja yang diharapkan belum terpenuhi	Sebagai evaluasi dalam penyusunan rencana kegiatan tahun berikutnya
2	1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN	238.679.846.636,00	34.784.102.744,00	14,574 %	5,23	1. Penambahan silpa BLUD 2. Pembayaran iuran BPJS 3. Pembayaran Inakes daerah	Dilakukan penyesuaian pada anggaran perubahan
3	1.02.0.00.0.00.02.0000 RUMAH SAKIT H. BADARUDDIN KASIM	156.357.448.504,00	10.047.674.964,00	6,426 %	13,79	1. Penambahan silpa BLUD	Dilakukan penyesuaian pada anggaran perubahan
4	1.03.0.00.0.00.01.0000 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	570.196.831.512,00	37.985.201.388,00	6,662 %	4,23	Beberapa kegiatan masih dalam proses lelang sehingga kinerja yang diharapkan masih belum tercapai	Sinergitas antar Instansi terkait yang mendukung pencapaian kinerja agar lebih solid, sehingga kinerja yang diharapkan bisa tercapai
5	1.04.2.10.0.00.01.0000 DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	174.076.568.034,00	12.107.790.693,00	6,955 %	30,52	Beberapa kegiatan masih dalam proses lelang sehingga kinerja yang diharapkan masih belum tercapai	Sinergitas antar Instansi terkait yang mendukung pencapaian kinerja agar lebih solid, sehingga kinerja yang diharapkan bisa tercapai
6	1.05.0.00.0.00.01.0000 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	35.841.315.019,00	2.840.483.424,00	7,925 %	7,94	1. Pembelian perlengkapan/peralatan rescue 2. Kontribusi kursus/pelatihan/sosialisasi 3. Belanja perjalanan dinas	Dilakukan penyesuaian pada anggaran perubahan
7	1.05.0.00.0.00.02.0000 BADAN	18.934.360.535,00	937.737.128,00	4,953 %	12,45	Anggaran perjalanan dinas, kebutuhan pengadaan sarana untuk evakuasi saat	Diusulkan pada APBD Perubahan.

No	Perangkat Daerah	Anggaran	Realisasi		Tingkat Capaian Kinerja (%)	Permasalahan	Rekomendasi Tindak Lanjut
			Keuangan (Rp)	Keuangan (%)			
1	2	3	4	5	6	7	8
	PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH					banjir/ musibah orang tenggelam masih belum mencukupi	
8	1.06.0.00.0.00.01.0000 DINAS SOSIAL	49.470.035.634,00	7.765.992.564,00	15,698 %	15,99		
9	2.07.0.00.0.00.01.0000 DINAS TENAGA KERJA	23.947.258.870,00	2.756.341.775,00	11,510 %	23,7	Pelaksanaan kegiatan yang sifatnya Kerjasama dengan Instansi vertikal baru bisa dilaksanakan pada triwulan ketiga sehingga kinerja yang diharapkan belum bisa tercapai	Sebagai evaluasi dalam penyusunan rencana kegiatan tahun berikutnya
10	2.08.2.14.0.00.01.0000 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	16.521.508.206,00	2.122.791.239,00	12,849 %	37,97	Pergeseran dilakukan untuk belanja perjalanan dinas dan belanja pada beberapa sub kegiatan	Dilakukan penyesuaian pada anggaran perubahan
11	2.09.3.25.3.27.01.0000 DINAS KETAHANAN PANGAN, PERIKANAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA	68.725.273.087,00	6.234.318.461,00	9,071 %	9,02	Belanja hibah yang merupakan belanja yang memiliki porsi yang cukup besar dalam APBD DKPPTPH tahun 2022 kepada masyarakat banyak yang belum dilaksanakan karena masih proses pengadaan dan penetapan calon penerima / calon lokasi	Pada Triwulan III realisasi belanja hibah akan meningkat diiringi dengan realisasi keuangan APBD DKPPTPH. Berapa belanja hibah pada Triwulan II masih dalam proses penetapan CP / CL maupun menunggu saat musim yang tepat untuk direalisasikan
12	2.11.0.00.0.00.01.0000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP	66.529.279.664,00	7.673.177.232,00	11,534 %	17,75	* Adanya kebutuhan penambahan anggaran untuk bonus bagi petugas kebersihan atas keberhasilan dalam memperoleh ADIPURA	Disesuaikan pada anggaran perubahan

No	Perangkat Daerah	Anggaran	Realisasi		Tingkat Capaian Kinerja (%)	Permasalahan	Rekomendasi Tindak Lanjut
			Keuangan (Rp)	Keuangan (%)			
1	2	3	4	5	6	7	8
						* Adanya penambahan untuk operasional RTH	
13	2.12.0.00.0.00.01.0000 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	21.589.526.789,00	2.706.023.910,00	12,534 %	22,15		
14	2.13.0.00.0.00.01.0000 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	17.787.599.141,00	1.841.375.614,00	10,352 %	21,31	1. Penyesuaian besaran dana desa akibat adanya peningkatan jumlah Belanja Daerah 2. Kebutuhan akan kegiatan peningkatan kapasitas aparatur desa tentang pengelolaan keuangan desa	Dilakukan penyesuaian pada anggaran perubahan
15	2.15.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERHUBUNGAN	49.159.376.633,00	3.524.712.872,00	7,170 %	26,33	1. Pengadaan untuk kebutuhan rambu lalu lintas pada ruas jalan yang sudah masuk dalam database kebutuhan rambu jalan 2. Pendataan kembali terkait kebutuhan ZOSS (Zona Selamat Sekolah)	
16	2.16.2.20.2.21.01.0000 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	25.024.846.628,00	3.018.237.244,00	12,061 %	23,54	1. Penyesuaian terhadap kebutuhan untuk mendukung kegiatan statistik sektoral di daerah 2. Penyesuaian untuk kebutuhan untuk peningkatan Indeks SPBE 3. Kebutuhan akan Sarana dan Prasarana pendukung	Dilakukan penyesuaian pada anggaran perubahan
17	2.17.3.31.3.30.01.0000 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	45.002.220.031,00	3.901.198.609,00	8,669 %	11,29	1. Anggaran kas yang tidak tersedia pada saat pelaksanaan kegiatan sehingga ada beberapa kegiatan yang tertunda dilaksanakan. 2. Anggaran Kas dalam satu kegiatan yang terpecah-pecah sehingga kegiatan tidak dapat dilaksanakan	1. Kerjasama internal di bidang-bidang 2. Penyesuaian anggaran kas kegiatan pada saat perubahan anggaran 3. Meningkatkan koordinasi lintas sektoral

No	Perangkat Daerah	Anggaran	Realisasi		Tingkat Capaian Kinerja (%)	Permasalahan	Rekomendasi Tindak Lanjut
			Keuangan (Rp)	Keuangan (%)			
1	2	3	4	5	6	7	8
						3. Data kontribusi sektor industri dan sektor perdagangan terhadap PDRB diperoleh dari BPS Kab. Tabalong di akhir tahun. 4. Capaian Kinerja Pelayanan Perizinan tergantung dari usulan perizinan yang masuk 5. Aturan baru terkait perpanjangan SBU Penyedia dari Permen PUPR sehingga banyak penyedia yang belum bisa mengikuti kegiatan pengadaan	4. Sosialisasi secara terbuka untuk mendorong pelaku usaha melakukan pendaftaran ijin 5. Memberi informasi terbaru terkait proses pengadaan
18	2.18.0.00.0.00.01.0000 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	13.247.534.855,00	1.690.271.570,00	12,759 %	33,39		
19	2.19.3.26.0.00.01.0000 DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA	38.086.262.220,00	2.776.412.531,00	7,290 %	11,53	1. Pengelolaan sarana prasarana olah raga yang yang sebelumnya pengelolaannya pada Sekretariat Daerah dialihkan ke Disporapar 2. Hibah KONI	Dilakukan penyesuaian pada anggaran perubahan
20	2.23.2.24.0.00.01.0000 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	13.896.184.542,00	1.808.721.184,00	13,016 %	10,73		Dilakukan penyesuaian pada anggaran perubahan
21	3.27.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN	46.642.313.839,00	3.122.778.217,00	6,695 %	22,03	1. Terdapat kegiatan yang angkasnya ada di Triwulan III dan IV 2. Terdapat kegiatan yang mengalami peningkatan harga akibat inflasi 3. Terdapat kegiatan yang merupakan indikator output Instansi lain sebagai konsekuensi dari satu urusan tetapi diampu oleh dua Instansi yakni Urusan Pertanian	1. Melaksanakan sesuai rencana 2. Pengusulan SSH sesuai harga update pada masa perubahan anggaran 3. Sebagai evaluasi dalam penyusunan organisasi perangkat daerah 4. Perlu dilakukan sinergitas antara

No	Perangkat Daerah	Anggaran	Realisasi		Tingkat Capaian Kinerja (%)	Permasalahan	Rekomendasi Tindak Lanjut
			Keuangan (Rp)	Keuangan (%)			
1	2	3	4	5	6	7	8
							Disbunnak dengan DKP2TP yang sama-sama pengampu urusan pertanian sebagai upaya peningkatan kinerja urusan sesuai kewenangannya
22	4.01.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DAERAH	88.652.570.845,00	10.163.286.680,00	11,464 %	29,80		
23	4.02.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DPRD	91.531.843.303,00	9.756.207.984,00	10,659 %	14,36		
24	5.01.5.05.0.00.01.0000 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	19.904.125.284,00	2.353.482.037,00	11,824 %	27,92	Banyaknya kegiatan dengan anggaran yang lumayan besar dilaksanakan pada Triwulan III dan IV tahun berjalan sehingga kinerja yang diharapkan masih belum tercapai	Sebagai evaluasi untuk perencanaan pada tahun berikutnya
25	5.02.0.00.0.00.01.0000 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	435.146.370.980,00	3.293.708.468,00	0,757 %	22,87		
26	5.02.0.00.0.00.02.0000 BADAN PENDAPATAN DAERAH	27.824.180.914,00	2.039.187.213,00	7,329 %	22,55	Penambahan untuk pembelian sarana pendukung (kendaraan roda 4 yang masa penggunaannya melebihi masa pakai)	
27	5.03.5.04.0.00.01.0000 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	17.147.291.487,00	2.106.088.414,00	12,282 %	23,39	Penambahan untuk pengelolaan mutasi ASN, pengelolaan kenaikan pangkat, fasilitasi lembaga profesi ASN, pemberian penghargaan bagi ASN, pembinaan disiplin ASN, dan bantuan biaya pendidikan S2 bagi jabatan peneliti	Dilakukan penyesuaian pada anggaran perubahan
28	6.01.0.00.0.00.01.0000 INSPEKTORAT	24.566.216.702,00	2.791.297.496,00	11,362 %	20,36	Perjalanan dinas dalam daerah untuk keperluan pengawasan masih belum	Dilakukan penyesuaian pada anggaran perubahan

No	Perangkat Daerah	Anggaran	Realisasi		Tingkat Capaian Kinerja (%)	Permasalahan	Rekomendasi Tindak Lanjut
			Keuangan (Rp)	Keuangan (%)			
1	2	3	4	5	6	7	8
						memadai dibandingkan dengan tugas pengawasan yang dilaksanakan selama satu tahun	
29	7.01.0.00.0.00.01.0000 KECAMATAN TANJUNG	23.799.307.779,00	2.272.258.660,00	9,548 %	20,10	Anggaran perjalanan dinas, penyediaan BBM, pembayaran rekening listrik, pemeliharaan kendaraan dinas belum mencukupi untuk mendukung kegiatan selama satu tahun.	Diusulkan pada APBD Perubahan. Untuk sarpras kelurahan akan dilaksanakan pada tahun berikutnya.
30	7.01.0.00.0.00.02.0000 KECAMATAN MURUNG PUDAK	21.545.995.896,00	2.464.195.719,00	11,437 %	26,79	Anggaran perjalanan dinas, penyediaan BBM belum mencukupi untuk mendukung kegiatan selama satu tahun. Pemeliharaan gedung kantor seperti pengecatan dan perbaikan pagar harus segera dilakukan.	Diusulkan pada APBD Perubahan. Untuk sarpras kelurahan akan dilaksanakan pada tahun berikutnya.
31	7.01.0.00.0.00.03.0000 KECAMATAN TANTA	5.477.714.767,00	918.048.738,00	16,760 %	22,63	Anggaran perjalanan dinas, pemeliharaan kendaraan dinas dan pembayaran rekening listrik belum mencukupi untuk mendukung kegiatan selama satu tahun.	Diusulkan pada APBD Perubahan.
32	7.01.0.00.0.00.04.0000 KECAMATAN MUARA HARUS	5.148.961.598,00	921.151.979,00	17,890 %	28,77	Anggaran perjalanan dinas, penyediaan BBM belum mencukupi untuk mendukung kegiatan selama satu tahun.	Diusulkan pada APBD Perubahan.
33	7.01.0.00.0.00.05.0000 KECAMATAN BANUA LAWAS	4.645.722.239,00	769.886.906,00	16,572 %	28,62	Anggaran perjalanan dinas, penyediaan BBM dan pemeliharaan kendaraan dinas belum mencukupi untuk mendukung kegiatan selama satu tahun.	Diusulkan pada APBD Perubahan.
34	7.01.0.00.0.00.06.0000 KECAMATAN KELUA	7.136.266.291,00	1.275.221.006,00	17,870 %	21,16	Anggaran penyediaan BBM belum mencukupi untuk mendukung kegiatan selama satu tahun	Diusulkan pada APBD Perubahan.
35	7.01.0.00.0.00.07.0000 KECAMATAN PUGAAN	4.390.995.643,00	660.616.537,00	15,045 %	25,33	Anggaran perjalanan dinas, belanja cetak, penyediaan BBM dan pemeliharaan kendaraan dinas belum	Diusulkan pada APBD Perubahan.

No	Perangkat Daerah	Anggaran	Realisasi		Tingkat Capaian Kinerja (%)	Permasalahan	Rekomendasi Tindak Lanjut
			Keuangan (Rp)	Keuangan (%)			
1	2	3	4	5	6	7	8
						mencukupi untuk mendukung kegiatan selama satu tahun.	
36	7.01.0.00.0.00.08.0000 KECAMATAN JARO	3.956.522.377,00	813.327.729,00	20,557 %	29,43	Anggaran perjalanan dinas, pembayaran rekening air dan makan minum harian belum mencukupi untuk mendukung kegiatan selama satu tahun.	Diusulkan pada APBD Perubahan.
37	7.01.0.00.0.00.09.0000 KECAMATAN MUARA UYA	6.264.841.559,00	700.273.377,00	11,178 %	49,33	Anggaran perjalanan dinas, penyediaan BBM dan pemeliharaan kendaraan dinas belum mencukupi untuk mendukung kegiatan selama satu tahun.	Diusulkan pada APBD Perubahan.
38	7.01.0.00.0.00.10.0000 KECAMATAN HARUAI	3.973.690.049,00	736.453.591,00	18,533 %	26,86	Anggaran perjalanan dinas dan makan minum harian belum mencukupi untuk mendukung kegiatan selama satu tahun.	Diusulkan pada APBD Perubahan.
39	7.01.0.00.0.00.11.0000 KECAMATAN UPAU	5.408.840.663,00	620.154.408,00	11,466 %	27,57	Anggaran perjalanan dinas dan penyediaan BBM belum mencukupi untuk mendukung kegiatan selama satu tahun.	Diusulkan pada APBD Perubahan.
40	7.01.0.00.0.00.12.0000 KECAMATAN BINTANG ARA	3.679.587.363,00	639.352.151,00	17,376 %	81,05	Anggaran perjalanan dinas, belanja cetak, penyediaan BBM dan pemeliharaan kendaraan dinas belum mencukupi untuk mendukung kegiatan selama satu tahun.	Diusulkan pada APBD Perubahan.
41	8.01.0.00.0.00.01.0000 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	12.921.929.043,00	1.285.279.052,00	9,946 %	12,04		
Total		3.080.469.459.912,00	259.137.284.825,00	8,41 %	23,00 %		

Sumber: SIPD 2025, Simolek Pede 2025 dan hasil analisis

BAB III

PERUBAHAN KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH

***PERUBAHAN RKPD
KABUPATEN TABALONG
TAHUN 2025***

BAB III

KERANGKA EKONOMI DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH

Penyusunan Perubahan RKPD Tahun 2025 digunakan sebagai dasar dalam penyusunan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA), Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan (PPASP) dan Rencana Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RPAPBD) Tahun 2025, di mana dalam perubahan RKPD Kabupaten Tabalong Tahun 2025 memuat hal-hal sebagai berikut:

1. Perubahan asumsi ekonomi makro daerah yang meliputi pertumbuhan ekonomi, inflasi, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), dan tingkat ketimpangan pendapatan (Gini Rasio).
2. Perubahan asumsi kebijakan keuangan daerah yang telah ditetapkan sebelumnya, yaitu perubahan prediksi pendapatan daerah, perubahan prediksi belanja daerah, dan perubahan prediksi pembiayaan.
3. Program dan kegiatan yang dapat diusulkan untuk ditampung dalam Perubahan APBD Tahun 2025 dengan mempertimbangkan sisa waktu pelaksanaan Perubahan APBD yang sifatnya sangat *urgent* dan disesuaikan dengan skala prioritas serta capaian target kinerja program dan kegiatan yang berubah, baik berkurang atau bertambah.

3.1. Perubahan Kerangka Ekonomi Daerah

3.1.1. Perubahan Ekonomi Makro Daerah

Pembangunan suatu daerah akan terpengaruh oleh kebijakan ekonomi makro yang ada di daerah tersebut serta bagaimana kebijakan ekonomi makro yang ada di tingkat Provinsi dan Nasional. Perkembangan kondisi ekonomi daerah dapat dilihat dari indikator ekonomi makro serta perekonomian daerah. Sasaran indikator ekonomi makro Kabupaten Tabalong sebagaimana tertuang dalam RKPD Kabupaten Tabalong Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Pertumbuhan ekonomi sebesar 6,74%
2. Inflasi sebesar 2,00% - 4,00%

3. Tingkat Kemiskinan sebesar 4,53% - 5,10%
4. Indeks Pembangunan Manusia sebesar 76,08 - 77,02
5. Gini Rasio sebesar 0,244 - 0,344
6. Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 2,60% - 3,60%
7. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup sebesar 71,96

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi capaian sasaran tahun 2024, perkembangan kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah serta rencana perubahan program dan kegiatan di tahun 2025, maka perlu dilakukan koreksi terhadap beberapa target sasaran indikator makro daerah Kabupaten Tabalong.

3.1.1.1. Pertumbuhan Ekonomi

Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan perekonomian Indonesia berdasarkan besaran Produk Domestik Bruto (PDB) atas dasar harga berlaku triwulan I-2025 mencapai Rp 5.665,9 triliun dan atas dasar harga konstan 2010 Rp 3.264,5 triliun. Ekonomi Indonesia triwulan I-2025 terhadap triwulan I-2024 tumbuh sebesar 4,87 % (y-on-y). Dari sisi produksi, Penyumbang utama pertumbuhan ekonomi Triwulan 1-2025 adalah Pertanian, Industri Pengolahan, dan Perdagangan. Komponen pertanian sendiri mengalami pertumbuhan ekonomi tertinggi sebesar 10,52 %. Sementara dari sisi pengeluaran, Komponen penyumbang utama pertumbuhan ekonomi Triwulan 1-2025 adalah Konsumsi Rumah Tangga dan Ekspor, dimana Komponen ekspor mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 6,78 %.

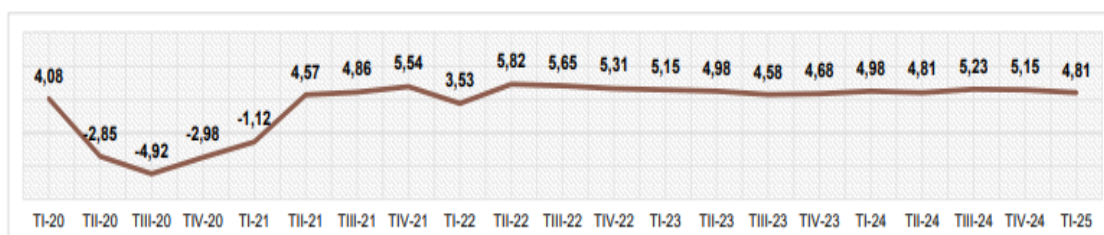


Gambar 3.1
Pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB)
Triwulanan Nasional (% , y-on-y)

Sumber: BPS Indonesia

Ditengah kondisi geopolitik internasional yang kurang stabil, kondisi perekonomian Indonesia masih menunjukkan perkembangan yang kondusif ditopang oleh faktor kuatnya permintaan domestik. Hal ini diperlihatkan dari kinerja ekonomi di semua provinsi yang menunjukkan pertumbuhan positif pada triwulan I-2025, dengan pertumbuhan (y-on-y) tertinggi tercatat pada kelompok provinsi di Pulau Sulawesi sebesar 6,40%; disusul Pulau Jawa sebesar 4,99%; Pulau Sumatra sebesar 4,85%; Pulau Kalimantan sebesar 4,32%; kelompok provinsi di Pulau Bali-Nusa Tenggara sebesar 3,12% dan terakhir kelompok provinsi Maluku dan Papua mengalami pertumbuhan ekonomi sebesar 1,69%.

Sementara di Kalimantan Selatan, ekonomi pada triwulan I 2025 tumbuh 4,81% (y-on-y), dimana angka pertumbuhan ekonomi triwulan I 2025 ini mengalami penurunan dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi dari triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 5,15% (y-on-y). Hal ini sejalan dengan masih tingginya permintaan batu bara dari negara mitra dagang utama seiring dengan peningkatan kebutuhan energi listrik. Selain itu, kuatnya permintaan CPO dari negara mitra dagang, serta tingginya permintaan domestik untuk sektor pangan dan energi, sejalan dengan pemilu dan Bulan Ramadan yang jatuh pada triwulan I 2025 juga mendorong kinerja LU Pengolahan. Secara *year-on-year*, realisasi Belanja Pemerintah melalui APBD tumbuh positif, terutama pada jenis Belanja Pegawai seiring direalisasikannya THR (Gaji ke-14) di triwulan I 2025. Namun sebaliknya, belanja pemerintah melalui APBN mengalami kontraksi, terutama pada kelompok Belanja Barang, sebagai dampak dari kebijakan penyesuaian belanja yang sedang diterapkan.



Gambar 3.2
Pertumbuhan PDRB Kalimantan Selatan Triwulanan (% y-on-y)
Sumber: BPS Provinsi Kalsel

Adapun pertumbuhan ekonomi Provinsi Kalimantan Selatan berada pada urutan kedua tertinggi dibandingkan dengan provinsi lain di wilayah Pulau Kalimantan.

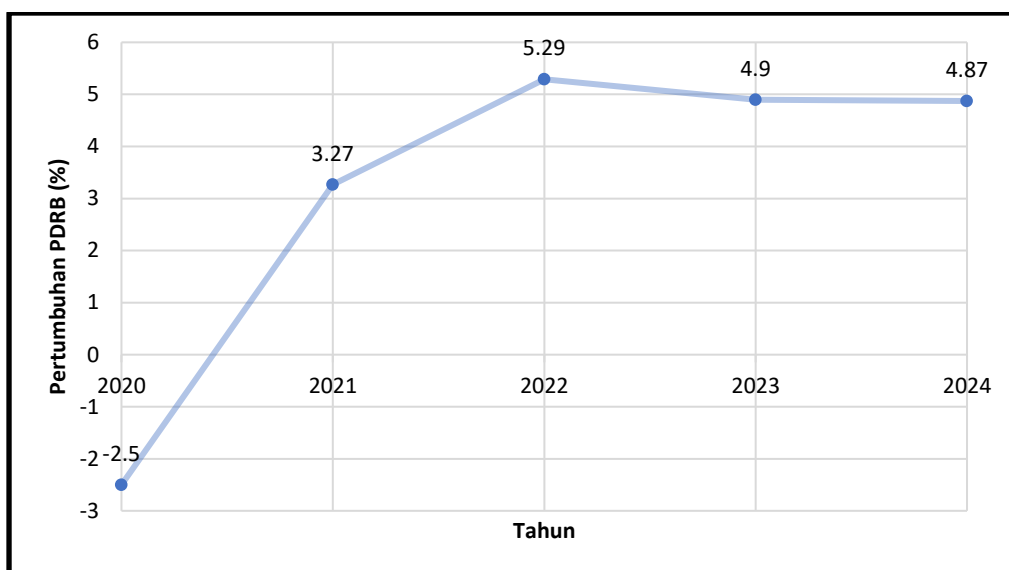
Tabel 3.1
Perbandingan Pertumbuhan PDRB Regional Kalimantan Triwulan I 2025 (%)

No.	Provinsi	Pertumbuhan PDRB	
		Quarter to Quarter (%)	Year on Year (%)
1	Kalimantan Timur	-1,77	4,08
2	Kalimantan Tengah	-6,57	4,04
3	Kalimantan Barat	-0,50	5,00
4	Kalimantan Selatan	-5,48	4,81
5	Kalimantan Utara	-3,07	4,06
Kalimantan		-3,48	4,40

Bank Indonesia memprakirakan Perekonomian Provinsi Kalimantan Selatan 2025 diprakirakan tetap kuat walaupun sedikit melambat dibandingkan dengan tahun sebelumnya, terutama ditopang oleh Konsumsi Rumah Tangga dan Investasi. Di sisi penawaran, perlambatan pertumbuhan ekonomi diprakirakan bersumber dari penurunan kinerja LU Pertambangan, LU Konstruksi, dan LU Perdagangan. Perlambatan LU Pertambangan terutama disebabkan oleh melambatnya permintaan batu bara negara mitra dagang utama, Tiongkok dan India, di tengah peningkatan produksi dalam negeri mitra dagang dan masifnya pengembangan *renewable energy*. Sementara perlambatan LU Konstruksi dan LU Perdagangan diprakirakan sejalan dengan kebijakan efisiensi anggaran pemerintah.

Namun, pertumbuhan ekonomi diperkirakan tetap tinggi didorong oleh kinerja LU Pertanian dan LU Industri Pengolahan. Produksi padi dan tandan buah segar (TBS) diproyeksikan meningkat sejalan dengan penambahan luas lahan panen didukung program optimalisasi lahan, kondisi cuaca yang lebih kondusif dibandingkan tahun sebelumnya, serta implementasi kebijakan B40. Dari sisi pengeluaran, moderasi ekonomi Kalimantan Selatan 2025 terutama dipengaruhi oleh tekanan kinerja net ekspor dan Konsumsi Pemerintah. Ekspor luar negeri diperkirakan melambat akibat moderasi permintaan negara mitra dagang utama di tengah harga komoditas yang diperkirakan menurun. Konsumsi Pemerintah diperkirakan melambat sejalan dengan berakhirnya momen Pilpres dan Pilkada pada tahun 2024. Namun, Konsumsi Rumah Tangga dan Investasi diperkirakan masih tumbuh kuat ditopang daya beli masyarakat yang tumbuh stabil dan berlanjutnya pengerjaan berbagai proyek infrastruktur Pemerintah maupun swasta. Lebih lanjut, daya beli masyarakat diperkirakan terjaga sejalan dengan kebijakan pemerintah menaikkan gaji ASN dan UMP masing-masing sebesar 8% dan 6,5% pada 2025.

Secara agregat, perekonomian Kabupaten Tabalong selama 5 tahun terakhir berfluktuasi. Pada 2020, perekonomian dunia mengalami *shock* akibat adanya pandemi COVID-19. Mulai tahun 2021, aktivitas ekonomi mulai mengalami peningkatan, berbagai upaya pemulihan ekonomi di masa pandemi COVID-19 ini terus dilakukan. Pemerintah pun turut berperan serta aktif mendorong pelaku usaha untuk terus meningkatkan produksinya. Hal ini berdampak positif karena hampir semua lapangan usaha terus menunjukkan arah positif dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2024. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tabalong tahun 2024 sebesar 4,87%. Kondisi pertumbuhan ekonomi Tabalong dari tahun 2020 hingga tahun 2024 dapat dilihat pada grafik berikut



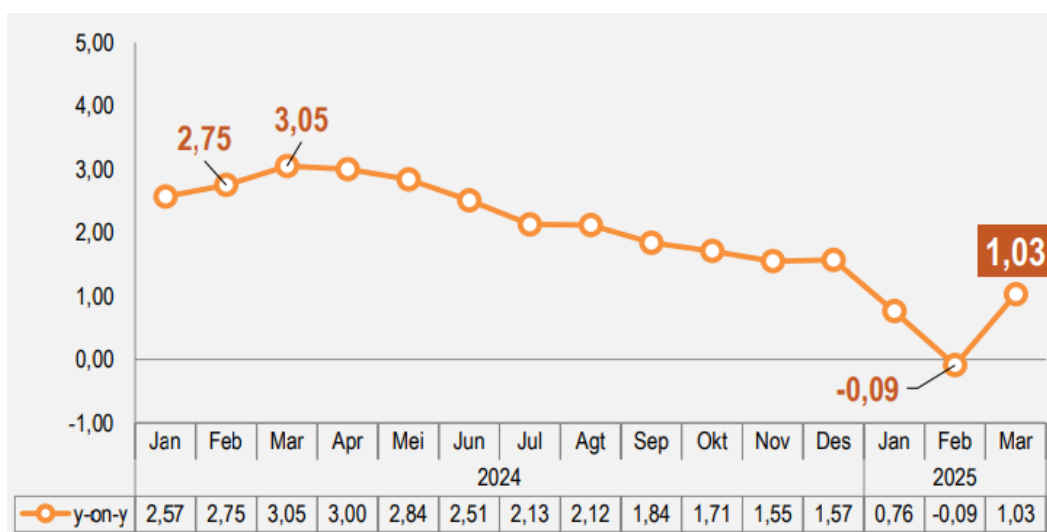
Gambar 3.3
Pertumbuhan PDRB Kabupaten Tabalong Tahun 2020-2024

3.1.1.2. Inflasi

Inflasi adalah kenaikan harga barang dan jasa secara umum di mana barang dan jasa tersebut merupakan kebutuhan pokok masyarakat atau turunnya daya jual mata uang suatu negara. Secara nasional, pada Maret 2025 terjadi inflasi *year-on-year* (y-on-y) sebesar 1,03% dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 107,22. Inflasi provinsi y-on-y tertinggi terjadi di Provinsi Papua Pegunungan sebesar 8,05% dengan IHK sebesar 115,26 dan terendah terjadi Provinsi Papua Barat Daya sebesar 0,24% dengan IHK sebesar 104,07. Sementara deflasi provinsi y-on-y terdalam terjadi di Provinsi Papua Barat sebesar 0,23% dengan IHK sebesar 106,37 dan terendah terjadi di Provinsi Bengkulu sebesar 0,22% dengan IHK sebesar 106,07.

Inflasi y-on-y terjadi karena adanya kenaikan harga yang ditunjukkan oleh naiknya sebagian besar indeks kelompok pengeluaran, yaitu: kelompok makanan, minuman, dan tembakau sebesar 2,07%; kelompok pakaian dan alas kaki sebesar 1,41%; kelompok perlengkapan, peralatan, dan pemeliharaan rutin rumah tangga sebesar 0,95%; kelompok kesehatan sebesar 1,80%; kelompok transportasi sebesar 0,83%; kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya sebesar 1,17%; kelompok pendidikan sebesar 1,89%; kelompok

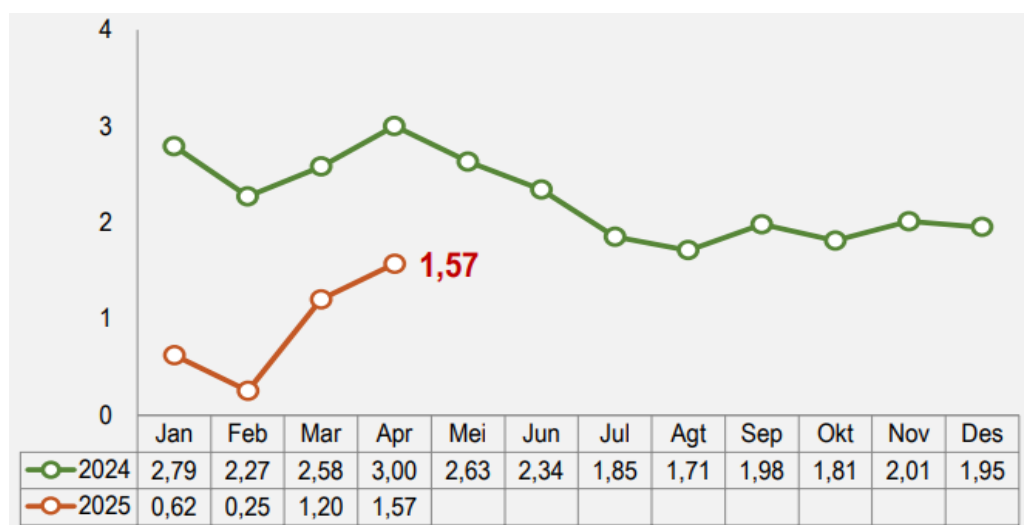
penyediaan makanan dan minuman/restoran sebesar 2,26%; dan kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 8,71%. Sementara kelompok pengeluaran yang mengalami penurunan indeks, yaitu: kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan sebesar 0,24% dan kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga sebesar 4,68%.



Gambar 3.4
Inflasi Nasional Bulanan (% y-on-y)
Sumber: BPS

Inflasi yang terjaga ini merupakan hasil dari konsistensi kebijakan moneter serta eratnya sinergi pengendalian inflasi antara Bank Indonesia dan Pemerintah (Pusat dan Daerah) dalam Tim Pengendalian Inflasi Pusat dan Daerah (TPIP dan TPID) melalui penguatan Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) di berbagai daerah. Ke depan, Bank Indonesia meyakini inflasi akan tetap terkendali dalam kisaran sasaran $2,5 \pm 1\%$ pada 2024 dan 2025.

Sementara di Provinsi Kalimantan Selatan, pada April 2025 terjadi inflasi year on year (y-on-y) sebesar 1,57% dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 108,76. Inflasi tertinggi terjadi di Kabupaten Tabalong sebesar 3,04% dengan IHK sebesar 108,32 dan terendah terjadi di Kabupaten Hulu Sungai Tengah sebesar 0,30% dengan IHK sebesar 110,89.



Gambar 3.5
Inflasi Provinsi Kalimantan Selatan Bulanan (% , y-on-y)
Sumber: BPS Provinsi Kalsel

Bank Indonesia memperkirakan, secara keseluruhan 2025, inflasi Provinsi Kalimantan Selatan diperkirakan lebih tinggi dibandingkan dengan tahun 2024 namun masih berada dalam rentang sasaran $2,5\% \pm 1\%$ (yoy). Meningkatnya tekanan inflasi pada tahun 2025 terutama disebabkan oleh realisasi inflasi pangan tahun 2024 yang rendah. Perkiraan tekanan inflasi yang lebih tinggi ditopang oleh peningkatan seluruh kelompok, terutama dari kelompok makanan, minuman, dan tembakau; kelompok transportasi; dan kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga. Inflasi kelompok makanan, minuman, dan tembakau diperkirakan meningkat salah satunya didorong oleh kebijakan kenaikan Harga Jual Eceran (HJE) rokok yang mulai diterapkan pada awal 2025. Kelompok transportasi diperkirakan meningkat didorong oleh harga BBM nonsubsidi yang terdampak fluktuasi harga minyak dunia

Inflasi Kota Tanjung sendiri pada bulan April 2025 tercatat sebesar 3,04% (y-on-y), mengalami deflasi sebesar 1,28% (m-to-m). Komoditas yang dominan memberikan andil/sumbangan inflasi y-on-y pada April 2025, antara lain: Kelompok Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya dengan andil 1,75%. Komoditas penyumbang utama inflasi pada kelompok ini adalah Emas Perhiasan. Kelompok Kesehatan

dengan andil 0,84%. Komoditas penyumbang utama inflasi pada kelompok ini adalah Tarif Rumah Sakit. Kelompok Perumahan, air, Listrik, dan bahan bakar rumah tangga dengan andil 0,24%. Komoditas penyumbang utama inflasi pada kelompok ini adalah Taman Kanak-Kanak.

Kondisi perkembangan ekonomi baik secara global, nasional, regional maupun lokal sebagaimana telah diuraikan sebelumnya menjadi pertimbangan perlu dilakukannya penyesuaian terhadap target-target kinerja dalam lingkup yang telah ditetapkan dalam RKPD Tahun 2025. Selain itu, realisasi kinerja yang telah dicapai pada tahun 2024 juga turut menjadi pertimbangan sehingga target kinerja khususnya yang terkait dengan makro ekonomi daerah perlu dilakukan penyesuaian. Berikut adalah perubahan target makro ekonomi Kabupaten Tabalong tahun 2025.

Tabel 3.2
Perubahan Target Ekonomi Makro Tahun 2025

No.	Indikator	Realisasi 2024	Target 2025	Perubahan Target 2025
1	Pertumbuhan Ekonomi (%)	4,87	6,74	5,00 - 5,49
2	Tingkat Kemiskinan (%)	5,64	4,35 – 5,1	5,63 - 5,26
3	Indeks Pembangunan Manusia	75,97	76,08-77,20	76,08 - 78,08
4	Gini Rasio	-	0,244-0,344	0,280 - 0,270
5	Tingkat Pengangguran (%)	3,44	2,60-3,60	3,43 - 3,31
6	Inflasi (%)	2,24	2,0 – 4,0	2,00 - 4,00
7	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	73,98	71,96	74,00

3.1.2. Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah

Selama 78 tahun kemerdekaan, berbagai kemajuan telah berhasil dicapai oleh Bangsa Indonesia. Namun demikian, Indonesia masih terjebak sebagai negara berpendapatan menengah (*middle income trap*) yang diwarnai dengan kesenjangan antarwilayah dan antarkelompok pendapatan. Tantangan ke depan yang perlu

diantisipasi terutama pergeseran demografi, perubahan teknologi yang cepat, perubahan geopolitik dan geoekonomi, serta perubahan iklim. Untuk merespons berbagai tantangan tersebut, perlu optimalisasi modal dasar yang dimiliki, antara lain bonus demografi, modal sosial budaya, kekayaan alam, dan kekuatan maritim, sehingga cita-cita 100 tahun Indonesia merdeka atau Indonesia Emas 2045 menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia yang bersatu, berdaulat, maju dan berkelanjutan di tahun 2045 dapat terwujud.

Kabupaten Tabalong dalam hal ini menghadapi beberapa permasalahan yang perlu diatasi untuk memperkuat daya saing daerah dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Beberapa permasalahan tersebut diantaranya:

1. Keterbatasan infrastruktur: Masih ada keterbatasan dalam infrastruktur dasar seperti jalan raya, jembatan, dan fasilitas air bersih yang menghambat aksesibilitas dan distribusi barang dan layanan publik.
2. Ketimpangan sosial dan ekonomi: ketimpangan sosial dan ekonomi di beberapa bagian wilayah Kabupaten Tabalong masih perlu dikendalikan.
3. Pengelolaan sumber daya alam yang tidak lestari: Perlu adanya pengelolaan yang lebih baik untuk sumber daya alam agar tetap lestari dan berkelanjutan.
4. Peningkatan kesempatan kerja dan pendidikan: diperlukan peningkatan kesempatan kerja dan pendidikan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
5. Peningkatan pelayanan kesehatan dan infrastruktur dasar: Peningkatan pelayanan kesehatan dan infrastruktur dasar juga menjadi prioritas dalam pembangunan daerah.

Mengacu pada berbagai permasalahan pembangunan daerah yang masih dihadapi Kabupaten Tabalong, diperlukan arah pembangunan yang lebih strategis, inklusif, dan berkelanjutan. Berbagai tantangan tersebut menegaskan bahwa pembangunan

Kabupaten Tabalong ke depan tidak hanya berfokus pada pencapaian pertumbuhan ekonomi semata, tetapi juga harus mampu meningkatkan kualitas sumber daya manusia, memperkuat daya saing ekonomi berbasis potensi lokal, memperbaiki tata kelola pemerintahan, menyediakan infrastruktur pendukung, serta menjamin kelestarian lingkungan.

Berdasarkan kondisi dan perkembangan tersebut, maka tantangan sekaligus prospek yang dihadapi pada tahun 2025 adalah:

1. Pemulihan ekonomi melalui peningkatan produksi komoditas pertanian dan perkebunan serta menciptakan iklim yang kondusif bagi investasi dan dunia usaha.
2. Peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) melalui peningkatan derajat kesehatan dan tingkat pendidikan.
3. Tumbuhnya ekonomi melalui peningkatan daya saing sektor sekunder dan tersier yang mempunyai prospek besar dan sebagai mesin penggerak ekonomi dalam menciptakan pertumbuhan seperti sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan; sektor industri pengolahan; sektor perdagangan besar dan eceran serta informasi dan komunikasi yang berdampak manfaat luas dalam mendorong investasi dan penciptaan lapangan kerja.
4. Besarnya jumlah angkatan kerja yang berpeluang terserap sebagai tenaga kerja lokal.
5. Letak wilayah yang strategis sebagai daerah penyangga IKN yang didukung penguatan dan optimalisasi infrastruktur beserta jaringannya untuk mendorong peningkatan perekonomian daerah.
6. Membangun kelembagaan yang kuat dalam tata kelola pemerintahan.

3.1.3. Strategi dan Arah Kebijakan Penguatan Ekonomi Makro Daerah

Berdasarkan perkembangan ekonomi makro tahun 2025 maka perlu ditindaklanjuti melalui strategi dan arah kebijakan perekonomian daerah untuk menghadapi tantangan dan peluang dalam situasi yang

masih penuh ketidakpastian. Adapun strategi dan arah kebijakan ekonomi makro yang akan ditempuh adalah:

1. Meningkatkan kualitas SDM dari sisi kesehatan dan pendidikan agar terciptanya SDM yang berkualitas dan berdaya saing.
2. Mendorong peningkatan ketersediaan cadangan pangan dan peningkatan produksi sektor pertanian serta stimulus atau insentif ekonomi bagi dunia usaha.
3. Terus mendorong pertumbuhan ekonomi melalui percepatan transformasi struktural sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan untuk meningkatkan produksi, produktivitas dan inovasi pangan, revitalisasi sektor industri pengolahan, transformasi sektor perdagangan besar dan eceran serta informasi dan komunikasi dalam mendorong investasi dan penciptaan lapangan kerja.
4. Pemanfaatan tenaga kerja lokal melalui desain program yang tepat agar tercipta sumber daya manusia yang berkualitas dan berkarakter yang sesuai dengan permintaan pasar.
5. Meningkatkan infrastruktur yang berkualitas dan berkelanjutan melalui pembangunan infrastruktur dan teknologi informasi untuk mendorong pengembangan wilayah perkotaan dan perdesaan dalam memperluas akses ekonomi masyarakat dan mendorong perkembangan ekonomi daerah.
6. Optimalisasi kinerja pemerintah daerah melalui penguatan (*reinforcement*) implementasi tata kelola pemerintahan.
7. Koordinasi kebijakan yang erat dengan Pemerintah Pusat dan Daerah melalui Tim Pengendalian Inflasi Pusat dan Daerah (TPIP dan TPID) dan Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) dalam mengendalikan inflasi.

Arah kebijakan pembangunan daerah juga menyesuaikan visi, misi, dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih, serta program Asta Cipta. Perubahan dalam arah kebijakan pembangunan daerah untuk Kabupaten Tabalong menyelaraskan dengan Visi Kabupaten Tabalong untuk Tahun 2025-2029 yaitu “Menuju Tabalong

SMaRT”, dimana pencapaian Visi pembangunan jangka menengah Kabupaten Tabalong Tahun 2025-2029 dilaksanakan melalui 4 (empat) misi yaitu :

1. Mewujudkan Masyarakat yang Sejahtera
2. Mendorong Kemajuan Daerah
3. Mengembangkan Kehidupan yang Religius
4. Menjadi Daerah yang Terdepan

Selanjutnya arah kebijakan pembangunan Kabupaten Tabalong juga searah dengan program prioritas kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih sebagai berikut:

1. Satu Desa Satu Wifi Gratis: Program ini merupakan salah satu langkah untuk mendukung penerapan konsep *Smart City* di Kabupaten Tabalong yang nantinya diharapkan dapat meningkatkan efesiensi pelayanan publik, mendorong partisipasi masyarakat, dan menciptakan lingkungan yang berkelanjutan.
2. Satu Desa Satu Da'i: Program pembinaan agama yang dapat dijalankan untuk semua kelompok usia salah satunya adalah dengan pelatihan Da'i yang diharapkan akan mencetak generasi yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga kuat dalam nilai-nilai spiritual yang sejalan dengan Visi "Tabalong SMaRT"
3. Tabalong Pasti Sehat: Upaya mewujudkan Tabalong Pasti Sehat, diantaranya dengan *Universal Health Coverage* (UHC) atau Cakupan Kesehatan Semesta mencapai 100% dan bantuan biaya bagi pendamping pasien serta layanan kesehatan langsung ke rumah untuk lansia, disabilitas dan penderita stroke ringan.
4. Mencetak 15.000 Tenaga Terampil: Pengembangan SDM yang kompeten dan terampil adalah kunci untuk mendukung kemajuan daerah, melalui peningkatan grade Balai Latihan Kerja untuk mendukung tercetaknya 15.000 tenaga kerja terampil.
5. 1.000 Beasiswa Sarjana: Menyediakan beasiswa untuk pemuda/pemudi agar bisa dan memastikan tidak ada keterhalangan biaya dalam melanjutkan studi keperguruan tinggi.

6. Jalan dan Jembatan Mantap: Program ini bertujuan untuk meningkatkan aksesibilitas dan memperlancar distribusi barang dan jasa, juga mendukung mobilitas masyarakat dan pertumbuhan ekonomi lokal.
7. Kredit Modal untuk UMKM dan Petani: program ini merupakan upaya strategis untuk meningkatkan kapasitas dan kemandirian ekonomi masyarakat di tingkat daerah, dengan tercapainya kemandirian ekonomi diharapkan tercipta masyarakat yang lebih mandiri, inklusif, dan berdaya saing, sehingga mampu berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi nasional secara berkelanjutan.

Selain itu perubahan arah kebijakan pembangunan daerah Kabupaten Tabalong juga memastikan kesesuaian terhadap beberapa tema atau isu pembangunan yang menjadi prioritas nasional antara lain :

1. penguatan sumber daya manusia, pendidikan, dan kesehatan;
2. program Makan Bergizi Gratis (MBG);
3. pencegahan stunting dan kemiskinan ekstrim;
4. pengendalian Inflasi di daerah;
5. peningkatan pertumbuhan perekonomian daerah;
6. dukungan swasembada pangan; dan
7. pengembangan industri kerajinan dan memfasilitasi dalam mempromosikan dan memasarkan hasil industri kerajinan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

3.2. Perubahan Kebijakan Keuangan Daerah

Efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan daerah terus didorong untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Tabalong. Dibandingkan dengan target dalam RKPD 2025, pendapatan daerah diproyeksikan mengalami peningkatan sebesar 1,00 %, dengan peningkatan komponen Pendapatan Asli Daerah sebesar 3,16 %, Pendapatan Transfer 6,54 %, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah mengalami penurunan sebesar 94,62 %.

Dari sisi belanja, secara umum pada tahun 2025 diproyeksikan akan mengalami kenaikan dibanding dengan belanja pada APBD induk. Selain hal tersebut, belanja daerah pada Perubahan RKPD Tahun 2025 akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan pendanaan yang wajib dan mengikat, serta kegiatan-kegiatan pembangunan yang bersifat prioritas dan strategis, dengan memperhatikan target-target yang tertuang pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tabalong Tahun 2025-2029 sebagai *guidance* pencapaian visi dan misi Bupati Tabalong.

Kebutuhan belanja pembangunan akan selalu mempertimbangkan kapasitas fiskal daerah (APBD) sebagai salah satu penopang strategi dalam implementasi RKPD yang akan selalu berdampingan dengan sumber-sumber pendanaan non APBD, seperti APBN, hibah, kemitraan swasta dan swadaya masyarakat sehingga kebutuhan fiskal daerah diharapkan akan terjaga dan digunakan secara efektif, efisien dan menerapkan asas akuntabilitas.

3.2.1. Perubahan Kebijakan Pendapatan Tahun 2025

Perubahan kebijakan pendapatan daerah tahun 2025 didasarkan pada perubahan asumsi pendapatan yang telah ditetapkan sebelumnya.

3.2.1.1. Realisasi Pendapatan Daerah

Realisasi pendapatan daerah sampai dengan triwulan I tahun 2025 adalah sebesar **Rp670.740.224.552,85** dari target APBD **Rp2.994.834.420.138,00** atau terealisasi sebesar **22,40** %.

Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Tabalong sampai dengan triwulan I Tahun 2025 dapat dilihat pada **Tabel 3.3** di bawah ini.

Tabel 3.3
Realisasi Pendapatan Daerah Sampai Dengan Triwulan I
Tahun Anggaran 2025

No	URAIAN	TARGET RKPD 2025 (Rp)	TARGET APBD PERGESERAN II TAHUN 2025 (Rp)	Realisasi s/d Triwulan I Tahun 2025 (Rp)	%
1	2	3	4	5	6
4	PENDAPATAN DAERAH	2.729.686.901.073,00	2.994.834.420.138,00	670.740.244.552,85	22,40%
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	280.885.897.073,00	280.885.897.073,00	60.855.995.839,85	21,67%
4.1.01	Pajak Daerah	133.936.323.000,00	133.936.323.000,00	29.133.271.672,00	21,75%
4.1.02	Retribusi Daerah	95.853.969.998,00	95.983.969.998,00	17.678.891.914,00	18,42%
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	20.150.042.800,00	20.150.042.800,00	-	0,00%
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	30.945.561.275,00	30.815.561.275,00	14.043.832.253,85	45,57%
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	2.308.801.004.000,00	2.500.069.238.065,00	603.899.843.961,00	24,16%
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	2.110.851.004.000,00	2.302.119.238.065,00	553.107.706.840,00	24,03%
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	197.950.000.000,00	197.950.000.000,00	50.792.137.121,00	25,66%
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	140.000.000.000,00	213.879.285.000,00	5.984.404.752,00	2,80%
4.3.01	Pendapatan Hibah	140.000.000.000,00	213.879.285.000,00	5.984.404.752,00	2,80%

Sumber : BPKAD, 2025

3.2.1.2. Perubahan Asumsi Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah yang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah, Dana Transfer, dan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah terhadap kebijakan pendapatan daerah tahun anggaran 2025 yang telah ditetapkan sebelumnya menjadi pertimbangan dalam melakukan perubahan pendapatan daerah dalam rangka Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD) Tahun Anggaran 2025.

Proyeksi Perubahan Pendapatan Daerah Kabupaten Tabalong Tahun Anggaran 2025 dapat dilihat pada **Tabel 3.4** di bawah ini:

Tabel 3.4
Proyeksi Perubahan Pendapatan Daerah dalam Perubahan RKPD
Kabupaten Tabalong Tahun Anggaran 2025

KODE	URAIAN	RKPD 2025 (Rp)	APBD PERGESERAN II 2025 (Rp)	PERUBAHAN RKPD 2025 (Rp)	PENAMBAHAN/ PENGURANGAN DARI RKPD 2025
1	2	3	4	5	6
4	PENDAPATAN DAERAH	2.729.686.901.073,00	2.994.834.420.138,00	2.965.720.396.578,85	236.033.495.505,85
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	280.885.897.073,00	280.885.897.073,00	290.230.809.786,85	9.344.912.713,85
4.1.01	Pajak Daerah	133.936.323.000,00	133.936.323.000,00	135.211.500.000,00	1.275.177.000,00
4.1.02	Retribusi Daerah	95.853.969.998,00	95.983.969.998,00	24.797.637.145,00	(71.056.332.853,00)
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	20.150.042.800,00	20.150.042.800,00	14.564.005.726,00	(5.586.037.074,00)
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	30.945.561.275,00	30.815.561.275,00	115.657.666.915,85	84.712.105.640,85
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	2.308.801.004.000,00	2.500.069.238.065,00	2.461.610.301.792,00	152.809.297.792,00
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	2.110.851.004.000,00	2.302.119.238.065,00	2.303.998.340.065,00	193.147.336.065,00
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	197.950.000.000,00	197.950.000.000,00	157.611.961.727,00	(40.338.038.273,00)
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	140.000.000.000,00	213.879.285.000,00	213.879.285.000,00	73.879.285.000,00
4.3.01	Pendapatan Hibah	140.000.000.000,00	213.879.285.000,00	213.879.285.000,00	73.879.285.000,00

Sumber : SIPD, 2025

Berdasarkan data diatas, Pendapatan daerah diproyeksikan mengalami peningkatan sebesar 8,65 % dibandingkan dengan yang ditargetkan sebelumnya pada RKPD 2025, dengan asumsi-asumsi sebagai berikut:

1. Pendapatan Asli Daerah ditargetkan mengalami peningkatan sebesar 3,33 %, dimana Pajak Daerah mengalami peningkatan sebesar 0,95 %, Retribusi Daerah mengalami penurunan sebesar 74,13 %, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan diproyeksikan juga mengalami penurunan sebesar 27,72 %, sedangkan komponen Lain-Lain PAD yang sah mengalami peningkatan sebesar 273,75 %. Adanya penurunan sebesar 74,13 % pada Retribusi Daerah dan peningkatan sebesar 273,75 % pada komponen Lain-Lain PAD yang sah disebabkan karena pendapatan pelayanan kesehatan kapitasi atau non kapitasi

tidak lagi dicatat sebagai retribusi pelayanan kesehatan, namun dimasukkan ke dalam pendapatan jasa layanan BLUD yang masuk dalam komponen Lain-Lain PAD yang sah.

2. Pendapatan Transfer diproyeksikan akan mengalami kenaikan sebesar 6,62 % yang terdiri dari peningkatan pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebesar 9,15 %, sedangkan untuk pendapatan transfer antar daerah mengalami penurunan sebesar 20,38 %.
3. Lain Lain Pendapatan Daerah yang Sah diproyeksikan mengalami kenaikan sebesar 52,77 %.

Pendapatan Daerah Tahun 2025 diproyeksikan akan mengalami kenaikan dan akan ditempuh beberapa kebijakan untuk mengoptimalisasi Pendapatan Daerah sebagai berikut:

1. Intensifikasi dan ekstensifikasi pajak daerah terutama dalam perluasan dan penguatan basis data pajak daerah seperti pendataan wajib pajak baru, peningkatan penyebarluasan informasi perpajakan terkait Perda Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dan pembaharuan perundang-undangan yang mengatur tentang pemungutan pajak daerah. Selain hal tersebut, upaya peningkatan penerimaan pajak daerah juga dilakukan melalui perluasan sistem pembayaran, pemberlakuan sanksi administratif, dan kebijakan relaksasi untuk memicu kesadaran masyarakat membayar pajak daerah.
2. Optimalisasi pemanfaatan Dana Perimbangan dari Dana Alokasi Khusus.
3. Optimalisasi penerimaan dari pendapatan transfer antar daerah, dengan menggali potensi Kabupaten Tabalong dengan mendukung pemungutan pajak provinsi yang bersumber dari Kabupaten Tabalong dan perluasan basis datanya.
4. Perluasan basis pajak daerah yang akurat dan akuntabel dengan langkah awal melakukan *cleansing* data piutang pajak daerah dan sensus piutang pajak daerah.

5. Perbaiki sistem dan sumberdaya administrasi pengelolaan pendapatan daerah yang berkesinambungan.

3.2.2. Perubahan Kebijakan Belanja Daerah Tahun 2025

Belanja daerah merupakan pengeluaran yang dilakukan pemerintah daerah dalam rangka memenuhi kebutuhan dan melaksanakan kewajiban daerah dalam periode tertentu. Belanja Daerah meliputi Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga, dan Belanja Transfer diarahkan untuk menjamin terlaksananya prioritas-prioritas pembangunan yang secara nyata berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi dan berorientasi pada kepentingan publik secara langsung. Terutama untuk pemulihan ekonomi daerah, Belanja Daerah mengacu tema pembangunan tahun 2025 dan diarahkan pada kegiatan prioritas dan strategis yang memberikan dampak langsung kepada kesejahteraan masyarakat serta reformasi struktural seperti dukungan pada sektor kesehatan, sektor pendidikan, sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), sektor pertanian, sektor infrastruktur dan sektor pendukung lainnya.

3.2.2.1. Realisasi Belanja Daerah

Realisasi belanja daerah sampai dengan triwulan I tahun 2025 adalah sebesar **Rp321.934.138.400,00** dari target APBD (Pergeseran II) **Rp3.080.469.459.912,00** atau terealisasi sebesar **10,45** %.

Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Tabalong sampai dengan Triwulan I Tahun Anggaran 2025 dapat dilihat pada **Tabel 3.5** di bawah ini.

Tabel 3.5
Target dan Realisasi Belanja Daerah Sampai Dengan Triwulan I
Tahun Anggaran 2025

No	URAIAN	RKPD 2025 (Rp)	PERGESERAN II APBD 2025 (Rp)	Realisasi s/d Triwulan I Tahun 2025 (Rp)	Persentase Realisasi (dibanding Pergeseran APBD)
5	BELANJA DAERAH	2.854.501.325.821,00	3.080.469.459.912,00	321.934.138.400,00	10,45%
5.1	Belanja Operasi	1.712.677.092.057,00	1.790.969.250.845,72	224.728.058.421,00	12,55%
5.1.01	Belanja Pegawai	884.539.661.871,00	947.446.505.967,00	154.756.223.848	16,33%
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	787.994.431.686,00	791.708.620.535,72	66.682.884.270	8,42%
5.1.03	Belanja Bunga	6.349.580.000,00	6.349.580.000,00	911.750.303	14,36%
5.1.04	Belanja Subsidi	10.000.000,00	1.092.282.978,00	-	0,00%
5.1.05	Belanja Hibah	21.690.368.500,00	30.869.080.500,00	1.955.000.000	6,33%
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	12.093.050.000,00	13.503.180.865,00	422.200.000	3,13%
5.2	Belanja Modal	818.372.056.764,00	894.945.694.162,28	46.347.703.290,00	5,18%
5.2.01	Belanja Modal Tanah	48.710.000.000,00	20.027.373.160,00	791.340.000	3,95%
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	112.548.944.587,00	108.248.047.551,00	1.721.689.676	1,59%
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	213.523.317.067,00	184.656.174.562,28	12.884.090.229	6,98%
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	440.328.368.502,00	576.948.969.181,00	30.950.583.385	5,36%
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	903.326.608,00	3.588.179.708,00	-	0,00%
5.2.06	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	2.358.100.000,00	1.476.950.000,00	-	0,00%
5.3	Belanja Tidak Terduga	10.050.000.000,00	69.076.433.904,00	55.000.000,00	0,08%
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	10.050.000.000,00	69.076.433.904,00	55000000	0,08%
5.4	Belanja Transfer	313.402.177.000,00	325.478.081.000,00	50.803.376.689,00	15,61%
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	22.678.000.000,00	22.993.000.000,00	-	0,00%
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	290.724.177.000,00	302.485.081.000,00	50.803.376.689	16,80%

Sumber : BPKAD, 2025

3.2.2.2. Perubahan Asumsi Belanja Daerah

Perubahan arah kebijakan belanja daerah Kabupaten Tabalong sebagai berikut :

1. Kenaikan belanja diutamakan pada perangkat daerah yang terkait langsung *major project* pemulihan ekonomi dan sosial.
2. Belanja daerah dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang terdiri atas urusan wajib terkait pelayanan dasar, urusan wajib yang tidak terkait dengan pelayanan dasar dan urusan lain yang berpedoman pada ketentuan perundang-undangan.
3. Belanja daerah diarahkan untuk mendukung percepatan pencapaian visi dan misi pembangunan Kabupaten Tabalong dengan tetap memperhatikan aspek efektivitas, efisiensi, transparansi dan akuntabilitas.
4. Penguatan efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran dalam pencapaian sasaran pembangunan dan menambah ruang gerak prioritas.
5. Belanja daerah berorientasi pada pencapaian kinerja. Program dan kegiatan harus memberikan informasi yang jelas dan terukur serta memiliki korelasi langsung dengan keluaran yang diharapkan dari program dan kegiatan dimaksud ditinjau dari aspek indikator dan target kinerjanya.
6. Belanja Daerah diarahkan untuk mendanai belanja yang bersifat wajib dan mengikat untuk menjamin kelangsungan pemenuhan pelayanan dasar masyarakat serta mengupayakan peningkatan proporsi Belanja Modal.
7. Belanja Daerah diarahkan untuk pemenuhan sarana pendukung aparatur untuk meningkatkan kinerja dan pelayanan publik (rehab kantor dan peremajaan kendaraan dinas).

8. Belanja Pengadaan Pakaian bagi ASN (PDH, Batik dan Olahraga) hanya dianggarkan untuk 1 (satu) jenis kecuali yang bersifat khusus.

Adapun rincian perubahan belanja daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.6
Proyeksi Perubahan Belanja Daerah pada Perubahan RKPD
Kabupaten Tabalong Tahun Anggaran 2025

KODE	URAIAN	RKPD 2025	PERGESERAN APBD II 2025	PERUBAHAN RKPD 2025	PENAMBAHAN/ PENGURANGAN DARI RKPD 2025
1	2	3	4	5	6
5	BELANJA	2.854.501.325.821,00	3.080.469.459.912,00	3.597.627.682.731,19	743.126.356.910,19
5.1	BELANJA OPERASI	1.712.677.092.057,00	1.790.969.250.845,72	2.009.006.471.335,39	296.329.379.278,39
5.1.01	Belanja Pegawai	884.539.661.871,00	947.446.505.967,00	944.946.864.665,00	60.407.202.794,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	787.994.431.686,00	791.708.620.535,72	989.213.439.180,39	201.219.007.494,39
5.1.03	Belanja Bunga	6.349.580.000,00	6.349.580.000,00	6.346.580.000,00	(3.000.000,00)
5.1.04	Belanja Subsidi	10.000.000,00	1.092.282.978,00	1.092.282.978,00	1.082.282.978,00
5.1.05	Belanja Hibah	21.690.368.500,00	30.869.080.500,00	54.542.123.647,00	32.851.755.147,00
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	12.093.050.000,00	13.503.180.865,00	12.865.180.865,00	772.130.865,00
5.2	BELANJA MODAL	818.372.056.764,00	894.945.694.162,28	1.205.575.390.626,61	387.203.333.862,61
5.2.01	Belanja Modal Tanah	48.710.000.000,00	20.027.373.160,00	33.410.126.410,00	(15.299.873.590,00)
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	112.548.944.587,00	108.248.047.551,00	178.632.269.120,11	66.083.324.533,11
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	213.523.317.067,00	184.656.174.562,28	247.951.104.945,50	34.427.787.878,50
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	440.328.368.502,00	576.948.969.181,00	739.107.933.894,00	298.779.565.392,00
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	903.326.608,00	3.588.179.708,00	3.902.786.257,00	2.999.459.649,00
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	2.358.100.000,00	1.476.950.000,00	2.571.170.000,00	213.070.000,00
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	10.050.000.000,00	69.076.433.904,00	12.792.339.769,19	2.742.339.769,19
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	10.050.000.000,00	69.076.433.904,00	12.792.339.769,19	2.742.339.769,19
5.4	BELANJA TRANSFER	313.402.177.000,00	325.478.081.000,00	370.253.481.000,00	56.851.304.000,00
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	22.678.000.000,00	22.993.000.000,00	20.446.400.000,00	(2.231.600.000,00)
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	290.724.177.000,00	302.485.081.000,00	349.807.081.000,00	59.082.904.000,00

Sumber : SIPD, 2025

3.2.3. Perubahan Proyeksi Pembiayaan Daerah

3.2.3.1 Realisasi Pembiayaan Daerah

Pembiayaan daerah adalah transaksi keuangan atas semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan daerah digunakan untuk menutup defisit atau untuk memanfaatkan surplus anggaran dalam APBD. Realisasi pembiayaan Kabupaten Tabalong Tahun sampai dengan triwulan I Tahun 2025 disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 3.7
Realisasi Pembiayaan Daerah Sampai Dengan Triwulan I Tahun 2025

KODE	URAIAN	RKPD 2025	PERGESERAN II APBD 2025	Realisasi s/d Triwulan I Tahun 2025 (Rp)	%
1	2	3	4	5	6
6	PEMBIAYAAN DAERAH				
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	169.107.740.064,00	129.928.355.090,00	-	0,00%
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	169.107.740.064,00	129.928.355.090,00	-	0,00%
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	44.293.315.316,00	44.293.315.316,00	6.538.628.829,00	14,76%
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	18.138.800.000,00	18.138.800.000,00	-	0,00%
6.2.03	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	26.154.515.316,00	26.154.515.316,00	6.538.628.829,00	25,00%
	Pembiayaan Netto	124.814.424.748,00	85.635.039.774,00	(6.538.628.829,00)	(7,64%)

3.2.3.2 Proyeksi Perubahan Pembiayaan Daerah

Kebijakan pembiayaan mengalami perubahan dari rencana kerja pemerintah daerah. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.8
Proyeksi Perubahan Pembiayaan Daerah pada Perubahan RKPD Kabupaten Tabalong Tahun Anggaran 2025

KODE	URAIAN	RKPD 2025	PERGESERAN II APBD 2025	PERUBAHAN RKPD 2025	BERTAMBAH/ (BERKURANG)
1	2	3	4	5	6
6	PEMBIAYAAN DAERAH				
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	169.107.740.064,00	129.928.355.090,00	676.200.601.468,34	507.092.861.404,34
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	169.107.740.064,00	129.928.355.090,00	676.200.601.468,34	507.092.861.404,34
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	44.293.315.316,00	44.293.315.316,00	44.293.315.316,00	-
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	18.138.800.000,00	18.138.800.000,00	18.138.800.000,00	-

KODE	URAIAN	RKPD 2025	PERGESERAN II APBD 2025	PERUBAHAN RKPD 2025	BERTAMBAH/ (BERKURANG)
1	2	3	4	5	6
6.2.03	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	26.154.515.316,00	26.154.515.316,00	26.154.515.316,00	-
	Pembiayaan Netto	124.814.424.748,00	85.635.039.774,00	631.907.286.152,34	507.092.861.404,34

Sumber : SIPD 2025

Secara lengkap struktur Perubahan RKPD Tahun 2025 dapat dilihat pada Tabel berikut:



Tabel 3.9
Ringkasan Pendanaan Perubahan RKPD Kabupaten Tabalong Tahun 2025

No.	Uraian	RKPD 2025 SEBELUM PERUBAHAN	RKPD 2025 SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ (BERKURANG)
1	2	4	5	6
4	PENDAPATAN DAERAH			
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	280.885.897.073,00	290.230.809.786,85	9.344.912.713,85
4.1.01	Pajak Daerah	133.936.323.000,00	135.211.500.000,00	1.275.177.000,00
4.1.02	Retribusi Daerah	95.853.969.998,00	24.797.637.145,00	(71.056.332.853,00)
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	20.150.042.800,00	14.564.005.726,00	(5.586.037.074,00)
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	30.945.561.275,00	115.657.666.915,85	84.712.105.640,85
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	2.308.801.004.000,00	2.461.610.301.792,00	152.809.297.792,00
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	2.110.851.004.000,00	2.303.998.340.065,00	193.147.336.065,00
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	197.950.000.000,00	157.611.961.727,00	(40.338.038.273,00)
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	140.000.000.000,00	213.879.285.000,00	73.879.285.000,00
4.3.01	Pendapatan Hibah	140.000.000.000,00	213.879.285.000,00	73.879.285.000,00
	Jumlah Pendapatan	2.729.686.901.073,00	2.965.720.396.578,85	236.033.495.505,85

No.	Uraian	RKPD 2025 SEBELUM PERUBAHAN	RKPD 2025 SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ (BERKURANG)
1	2	4	5	6
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI	1.712.677.092.057,00	2.009.006.471.335,39	296.329.379.278,39
5.1.01	Belanja Pegawai	884.539.661.871,00	944.946.864.665,00	60.407.202.794,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	787.994.431.686,00	989.213.439.180,39	201.219.007.494,39
5.1.03	Belanja Bunga	6.349.580.000,00	6.346.580.000,00	(3.000.000,00)
5.1.04	Belanja Subsidi	10.000.000,00	1.092.282.978,00	1.082.282.978,00
5.1.05	Belanja Hibah	21.690.368.500,00	54.542.123.647,00	32.851.755.147,00
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	12.093.050.000,00	12.865.180.865,00	772.130.865,00
5.2	BELANJA MODAL	818.372.056.764,00	1.205.575.390.626,61	387.203.333.862,61
5.2.01	Belanja Modal Tanah	48.710.000.000,00	33.410.126.410,00	(15.299.873.590,00)
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	112.548.944.587,00	178.632.269.120,11	66.083.324.533,11
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	213.523.317.067,00	247.951.104.945,50	34.427.787.878,50
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	440.328.368.502,00	739.107.933.894,00	298.779.565.392,00

No.	Uraian	RKPD 2025 SEBELUM PERUBAHAN	RKPD 2025 SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ (BERKURANG)
1	2	4	5	6
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	903.326.608,00	3.902.786.257,00	2.999.459.649,00
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	2.358.100.000,00	2.571.170.000,00	213.070.000,00
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	10.050.000.000,00	12.792.339.769,19	2.742.339.769,19
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	10.050.000.000,00	12.792.339.769,19	2.742.339.769,19
5.4	BELANJA TRANSFER	313.402.177.000,00	370.253.481.000,00	56.851.304.000,00
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	22.678.000.000,00	20.446.400.000,00	(2.231.600.000,00)
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	290.724.177.000,00	349.807.081.000,00	59.082.904.000,00
	Jumlah Belanja	2.854.501.325.821,00	3.597.627.682.731,19	743.126.356.910,19
	Total Surplus/(Defisit)	(124.814.424.748,00)	(631.907.286.152,34)	(507.092.861.404,34)
6	PEMBIAYAAN DAERAH			
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	169.107.740.064,00	676.200.601.468,34	507.092.861.404,34
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	169.107.740.064,00	676.200.601.468,34	507.092.861.404,34
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	44.293.315.316,00	44.293.315.316,00	0,00

No.	Uraian	RKPD 2025 SEBELUM PERUBAHAN	RKPD 2025 SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ (BERKURANG)
1	2	4	5	6
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	18.138.800.000,00	18.138.800.000,00	0,00
6.2.03	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	26.154.515.316,00	26.154.515.316,00	0,00
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	44.293.315.316,00	44.293.315.316,00	0,00
	Pembiayaan Netto	124.814.424.748,00	631.907.286.152,34	507.092.861.404,34
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	2.898.794.641.137,00	3.641.920.998.047,19	743.126.356.910,19

Sumber : BPKAD dan Bapenda (SIPD) Tahun 2025

BAB IV

SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

**PERUBAHAN RKPD
KABUPATEN TABALONG
TAHUN 2025**

BAB IV

SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Tabalong

Perencanaan pembangunan Kabupaten Tabalong pada Tahun 2025 merupakan perencanaan pembangunan yang diimplementasikan dalam kebijakan dalam rangka peningkatan daya saing daerah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkelanjutan dengan sumber daya manusia sebagai motor penggerak. Sesuai dengan amanat Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2025-2045, pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah tahun 2025-2029 bahwa visi pembangunan jangka menengah adalah Menuju Tabalong SMaRT (Sejahtera, Maju, Religius, dan Terdepan). Dalam mewujudkan visi dan misi tersebut, diperlukan upaya yang optimal, kolaborasi antar pemangku kepentingan dan sinergitas pemerintah pusat dan daerah.

Sasaran dan prioritas pembangunan mempertimbangkan hasil kinerja pada tahun 2024 serta rencana kerja pemerintah, prioritas RKPD 2025 Provinsi Kalimantan Selatan, RPJMD Kabupaten Tabalong Tahun 2025-2029, rekapitulasi pokok-pokok pikiran DPRD Kabupaten Tabalong dan kebijakan *top down* maupun *bottom up* dari hasil musrenbang tingkat kabupaten, provinsi dan nasional.

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 03 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2025-2029, telah ditetapkan visi pembangunan sebagai arah pembangunan Kabupaten Tabalong lima tahun, yaitu **“Menuju Tabalong SMaRT”**

Makna dari pernyataan visi tersebut dijelaskan sebagai berikut:

Kabupaten Tabalong Sejahtera; Menggambarkan kondisi masyarakat Tabalong yang terpenuhi kebutuhan dasarnya, memiliki akses yang baik terhadap layanan kesehatan, pendidikan, dan ekonomi yang stabil.

Kabupaten Tabalong Maju; Menunjukkan Kabupaten Tabalong berupaya untuk terus berkembang dan meningkatkan kualitas hidup masyarakatnya

untuk mewujudkan kemajuan dalam berbagai bidang, termasuk ekonomi, infrastruktur, teknologi, dan sumber daya manusia.

Kabupaten Tabalong Religius; Tabalong berkomitmen untuk menjaga dan mengembangkan kehidupan sosial yang harmonis, berdasarkan prinsip-prinsip keagamaan yang kuat dengan menegaskan pentingnya nilai-nilai agama dalam semua aspek kehidupan.

Kabupaten Tabalong Terdepan; Tabalong bercita-cita menjadi pelopor dan menjadi yang terbaik atau unggul dalam berbagai aspek, baik dalam hal pelayanan publik, inovasi, pendidikan, maupun pembangunan berkelanjutan.

Pencapaian visi pembangunan jangka menengah Kabupaten Tabalong dilaksanakan melalui 4 (empat) misi, yaitu:

1. Mewujudkan Masyarakat yang Sejahtera

Misi ini merupakan upaya untuk menciptakan kondisi di mana masyarakat Kabupaten Tabalong dapat hidup dengan kualitas yang baik, menikmati stabilitas ekonomi, sosial, dan budaya, serta memperoleh akses terhadap kebutuhan dasar, layanan publik, dan peluang pengembangan diri. Fokus utama adalah menciptakan keseimbangan antara pembangunan ekonomi, keberlanjutan lingkungan, dan kehidupan yang harmonis sesuai dengan nilai-nilai lokal yang religius dan inklusif. Langkah-langkah yang diupayakan untuk mengembangkan daerah yang religius:

- a) meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui akses yang lebih baik terhadap layanan kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial;
- b) mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, dengan fokus pada pengurangan kemiskinan dan peningkatan pendapatan masyarakat; dan
- c) mengembangkan program-program yang mendukung kemandirian ekonomi masyarakat, termasuk pemberdayaan UMKM dan pertanian.

2. Mendorong Kemajuan Daerah

Misi ini melakukan berbagai upaya strategis, terencana, dan berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat serta memajukan aspek ekonomi, sosial, budaya, dan lingkungan di Kabupaten Tabalong. Tujuan utama adalah menciptakan daerah yang maju, berdaya saing, dan mampu mengoptimalkan potensi lokal untuk kesejahteraan masyarakat sesuai dengan visi "**Menuju Tabalong SMaRT**" (Sejahtera, Maju, Religius, dan Terdepan). Langkah-langkah yang diupayakan untuk mendorong kemajuan daerah;

- a) membangun infrastruktur yang modern dan memadai untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat;
- b) memanfaatkan teknologi dan inovasi dalam pengelolaan sumber daya, pelayanan publik, dan pengembangan industri lokal; dan
- c) meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan dan pelatihan yang relevan dengan kebutuhan pasar kerja.

3. Mengembangkan Kehidupan yang Religius

Misi ini merupakan upaya sistematis untuk membangun masyarakat yang menjunjung tinggi nilai-nilai agama, menerapkan ajaran keimanan dalam kehidupan sehari-hari, serta menciptakan harmoni sosial berbasis toleransi dan keberagaman. Hal ini bertujuan menjadikan religiusitas sebagai fondasi dalam membangun karakter masyarakat dan mendukung pembangunan daerah. Langkah-langkah yang diupayakan untuk mengembangkan daerah yang religius:

- a) menjaga dan memperkuat nilai-nilai keagamaan dalam kehidupan sosial masyarakat, serta mendorong kerukunan antar umat beragama;
- b) memfasilitasi kegiatan keagamaan dan sosial yang mendukung pengembangan moral dan spiritual masyarakat; dan
- c) mengintegrasikan nilai-nilai religius dalam kebijakan pembangunan daerah, sehingga setiap program yang dijalankan sejalan dengan prinsip-prinsip keagamaan.

4. Menjadi Daerah yang Terdepan

Misi ini merupakan upaya untuk menjadikan Kabupaten Tabalong menjadi wilayah yang unggul dan inovatif untuk bersaing dalam berbagai aspek pembangunan di tingkat regional maupun nasional. Hal ini mencakup upaya terbaik dalam memberikan layanan publik yang prima, pembangunan infrastruktur yang modern dan inklusif, serta daya saing ekonomi yang tinggi dengan tetap mempertahankan identitas lokal dengan prinsip keberlanjutan. Langkah-langkah yang diupayakan untuk menjadi daerah yang terdepan:

- a) menjadi pionir dalam inovasi dan penerapan teknologi untuk meningkatkan efisiensi pelayanan publik dan pengelolaan birokrasi daerah melalui sistem meritokrasi;
- b) meningkatkan daya saing daerah dengan mengembangkan potensi lokal dan memperluas jaringan kerjasama, baik di tingkat regional maupun nasional; dan
- c) berkomitmen untuk memberikan pelayanan publik yang terbaik, dengan standar yang tinggi dalam transparansi, akuntabilitas, dan responsivitas.

Adapun tema pembangunan jangka menengah Kabupaten Tabalong Tahun 2025-2029 yaitu:

“Penguatan Pondasi dalam Mewujudkan Pembangunan Berbasis Potensi Lokal untuk Tabalong yang Sejahtera, Maju, Religius dan Terdepan dengan prinsip Berdaya Saing, Berkelanjutan, dan Inklusif”.

Hubungan visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan untuk 5 (lima) tahun dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.1
Hubungan Visi/Misi dan Tujuan/Sasaran Pembangunan
Kabupaten Tabalong

Visi	Misi	Tujuan	Sasaran
MENUJU TABALONG SMaRT (SEJAHTERA, MAJU, RELIGIUS DAN TERDEPAN)	Mewujudkan Masyarakat yang Sejahtera	Meningkatkan kualitas hidup masyarakat.	Meningkatnya kualitas pendidikan dan derajat kesehatan masyarakat.
			Menurunnya tingkat kemiskinan dan terkendalinya ketimpangan.
			Menurunnya tingkat pengangguran.
		Meningkatkan perekonomian berbasis potensi unggulan daerah yang inklusif.	Berkembangnya sektor unggulan daerah.
			Meningkatnya investasi dan kewirausahaan.
	Mendorong Kemajuan Daerah	Mewujudkan wilayah yang berkembang seimbang dan berkelanjutan.	Meningkatnya kualitas layanan infrastruktur daerah.
			Meningkatnya kualitas pembangunan desa.
			Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan ketangguhan daerah dalam menghadapi bencana dan perubahan iklim.
	Mengembangkan Kehidupan yang Religius	Menciptakan masyarakat yang berkarakter kuat, berakhlak mulia, dan hidup dalam harmoni	Meningkatnya toleransi dan kerukunan antarumat beragama
			Meningkatnya kemajuan kebudayaan.
	Menjadi Daerah yang Terdepan	Menjadi daerah yang terdepan dalam inovasi, pembangunan, dan pelayanan publik.	Meningkatnya pengarusutamaan gender dalam pembangunan.
			Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang profesional dan bersih.
			Meningkatnya penerapan inovasi dalam pembangunan.

Sumber: Rancangan Akhir RPJMD Kab. Tabalong Tahun 2025-2029

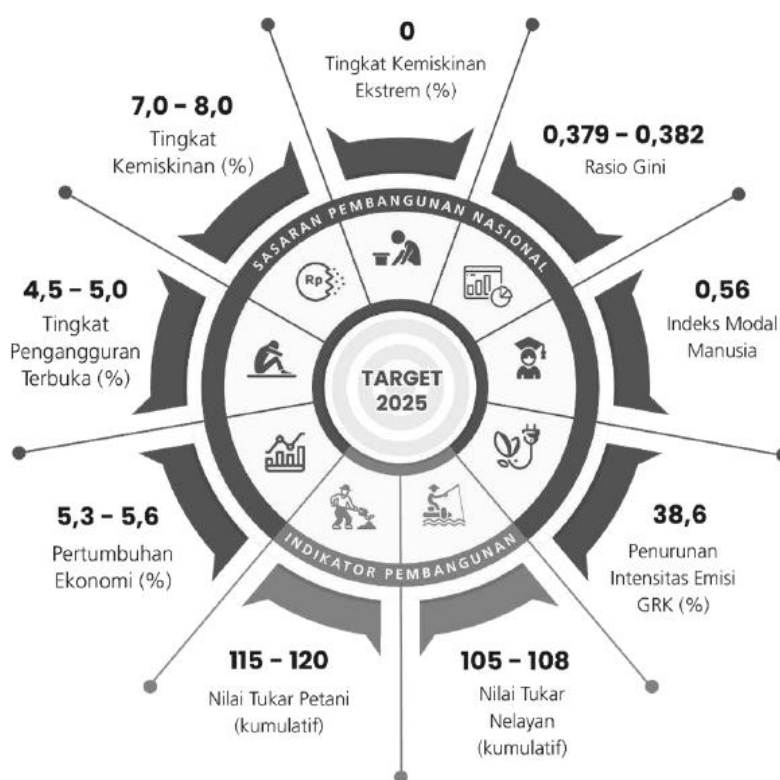
4.2. Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun 2025

4.2.1 Prioritas Pembangunan Nasional dalam RKP Tahun 2025

Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025 merupakan perencanaan tahunan di masa transisi yang menjadi tahap awal pelaksanaan berbagai agenda pembangunan untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045. Dengan mempertimbangkan arahan Presiden, kerangka ekonomi makro, kesinambungan pembangunan, hasil evaluasi kinerja pembangunan tahun 2023, isu strategis yang menjadi perhatian, serta forum konsultasi publik, ditetapkan tema RKP Tahun 2025 adalah **"Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan"**.

Sasaran pembangunan nasional tahun 2025 diarahkan untuk meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi, Indeks Modal Manusia, Nilai Tukar Petani, Nilai Tukar Nelayan, dan menurunkan Tingkat Pengangguran Terbuka, Rasio Gini, Tingkat Kemiskinan, Tingkat Kemiskinan Ekstrem, serta Intensitas Emisi Gas Rumah Kaca.

Target indikator sasaran pembangunan nasional tahun 2025 ditunjukkan pada infografis sebagai berikut:



Gambar 4.1

Target Indikator Sasaran Pembangunan Nasional Tahun 2025

Untuk menciptakan fondasi yang kuat dalam mengawal pencapaian Indonesia Emas 2045, serta untuk mencapai target sasaran pembangunan nasional tahun 2025, ditetapkan prioritas nasional sebagai berikut:

Prioritas Nasional

PRIORITAS NASIONAL 1 Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	PRIORITAS NASIONAL 5 Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
PRIORITAS NASIONAL 2 Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.	PRIORITAS NASIONAL 6 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan.
PRIORITAS NASIONAL 3 Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	PRIORITAS NASIONAL 7 Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.
PRIORITAS NASIONAL 4 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda dan penyandang disabilitas.	PRIORITAS NASIONAL 8 Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

Tema RKP Tahun 2025 adalah **“Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”** yang difokuskan pada perkuatan fondasi transformasi dalam perkuatan beberapa komponen, yaitu:

1. infrastruktur berkualitas yang berfokus pada infrastruktur untuk peningkatan produktivitas;
2. sumber daya manusia berkualitas, yang berdaya saing dan produktif; dan
3. ekonomi inklusif dan berkelanjutan, melalui peningkatan pertumbuhan ekonomi yang menciptakan lapangan kerja berkualitas, menurunkan ketimpangan, dan penciptaan produk ramah lingkungan.

Kebijakan dan strategi pembangunan nasional pada RKP Tahun 2025 diterjemahkan ke dalam lima agenda pembangunan, yaitu:

1. Transformasi Sosial, dengan arah kebijakan:
 - 1) Meningkatkan akses kesehatan untuk semua, melalui: (a) peningkatan kesehatan dan gizi masyarakat; (b) pengendalian penyakit dan pembudayaan hidup sehat; (c) penguatan kapasitas ketahanan kesehatan; dan (d) penguatan pelayanan kesehatan dan tata Kelola.

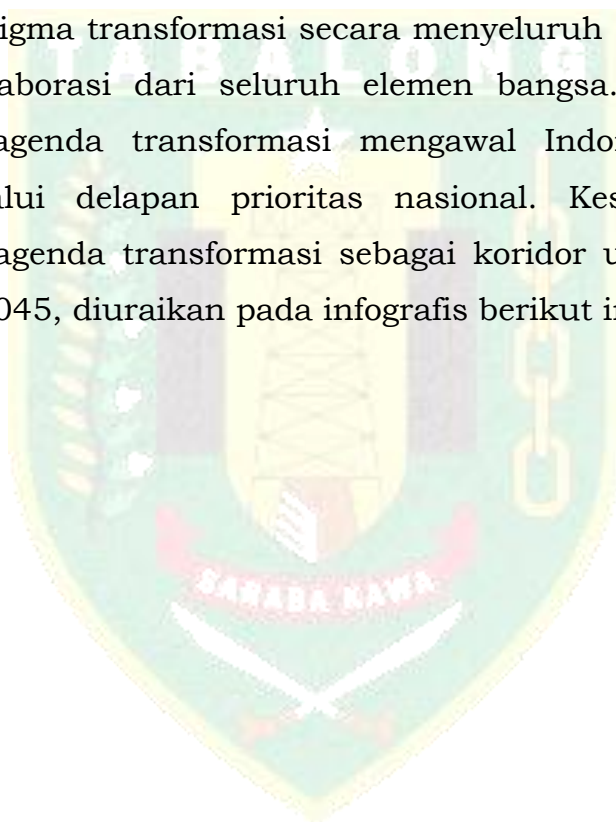
- 2) Meningkatkan akses pendidikan berkualitas yang merata, melalui: (a) percepatan wajib belajar 13 tahun (1 tahun pra sekolah dan 12 tahun pendidikan dasar dan pendidikan menengah); (b) pemerataan akses pendidikan tinggi berkualitas dan pengembangan *Science, Technology, Engineering, Art, Mathematics* (STEAM); (c) peningkatan kualitas pengajaran dan pembelajaran; (d) penguatan pengelolaan pendidik dan tenaga kependidikan berkualitas; (e) penguatan sistem tata kelola pendidikan; dan (f) peningkatan produktivitas, daya saing, dan kemampuan kerja.
 - 3) Perlindungan sosial yang adaptif yang berfokus pada peletakan fondasi awal reformasi perlindungan sosial menjadi lebih adaptif dan inklusif, sehingga dapat memberikan perlindungan kepada seluruh penduduk sesuai kondisi kerentanan, serta mendorong penduduk miskin dan rentan untuk mencapai kesejahteraan yang berkesinambungan, melalui: (a) Satu Sistem Registrasi Sosial Ekonomi; (b) Integrasi Bantuan Sosial, Jaminan Sosial, dan Pemberdayaan Masyarakat yang Adaptif; (c) Reformasi Sistem Jaminan Sosial Nasional; (d) Pengembangan Ekonomi Perawatan (*Care Economy*) untuk Perluasan Perlindungan Sosial dan Kesejahteraan; dan (e) Inklusi sosial untuk Kesejahteraan Penyandang Disabilitas, Lanjut Usia, dan Kelompok Rentan Lainnya.
2. Transformasi Ekonomi, dengan arah kebijakan:
- 1) Iptek, Inovasi, dan Produktivitas Ekonomi melalui: (a) penguatan industri dasar; (b) hilirisasi industri berbasis mineral penting; (c) hilirisasi industri berbasis sumber daya hayati; (d) pengembangan industri *medium-high technology*; (e) penguatan produktivitas industri padat karya terampil; (f) produktivitas UMKM dan koperasi; (g) pengembangan ekonomi biru Indonesia sebagai sumber pertumbuhan baru; (h) pembangunan destinasi pariwisata yang berkualitas dan berkelanjutan; (i) penguatan ekosistem ekonomi kreatif berbasis kekayaan budaya dan intelektual; (j) peningkatan produktivitas BUMN; (k) penguatan ekonomi dan keuangan syariah; (l) peningkatan

- produktivitas tenaga kerja; (m) peningkatan kontribusi iptek dan inovasi dalam pembangunan nasional; serta (n) peningkatan produktivitas sektor pertanian.
- 2) Penerapan Ekonomi Hijau dilaksanakan melalui (a) percepatan transisi energi, (b) ekonomi sirkular industri, (c) pengembangan pekerjaan hijau (*green jobs*), dan (d) pengelolaan hutan lestari.
 - 3) Percepatan transformasi digital dilaksanakan melalui (a) penguatan fondasi utama transformasi digital; (b) digitalisasi sektor ekonomi dan sektor strategis; (c) pemerintah digital; (d) penguatan faktor pendukung dan akselerator transformasi digital.
 - 4) Integrasi Ekonomi Domestik dan Global, dilakukan melalui (a) pengembangan pusat pertumbuhan terintegrasi; (b) optimalisasi backbone integrasi ekonomi; (c) perkuatan sistem logistik nasional; (d) peningkatan investasi untuk integrasi ekonomi domestik dan global; serta (e) peningkatan perdagangan domestik, antarwilayah, dan ekspor serta peningkatan partisipasi dalam rantai nilai global.
 - 5) Mewujudkan perkotaan dan perdesaan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi melalui: (a) wilayah metropolitan; (b) pembangunan Ibu Kota Nusantara; dan (c) peningkatan kemandirian perdesaan yang berkelanjutan.
3. Transformasi Tata Kelola, dengan arah kebijakan:
- 1) Penguatan Tata Kelola Regulasi dan Pembentukan Lembaga Tunggal Pengelola Regulasi;
 - 2) Transformasi dan Digitalisasi Pelayanan Publik;
 - 3) Penataan Proses Bisnis dan Kelembagaan Pembangunan;
 - 4) Transformasi Manajemen ASN;
 - 5) Transformasi Kesejahteraan, Sistem Penggajian Tunggal dan Pensiunan ASN;
 - 6) Sistem Anti Korupsi dan Akuntabilitas Pembangunan; dan
 - 7) Penguatan Integritas Partai Politik.
4. Supremasi Hukum, Stabilitas, dan Kepemimpinan Indonesia, dengan arah kebijakan:

- 1) Hukum Berkeadilan, Keamanan Nasional Tangguh, dan Demokrasi Substansial berfokus pada penguatan fondasi transformasi melalui pembaharuan substansi, dan transformasi kelembagaan hukum pada isu-isu strategis seperti sistem penegakan hukum, pemberantasan korupsi, penghormatan dan perlindungan hak asasi manusia, serta budaya hukum.
 - 2) Stabilitas Ekonomi Makro diarahkan untuk menjadi pemampu (*enabler*) dalam rangka mendorong akselerasi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkualitas melalui bauran kebijakan fiskal, moneter, makroprudensial, sistem pembayaran, dan sektor keuangan.
 - 3) Ketangguhan Diplomasi dan Pertahanan Berdaya Gantar Kawasan, diarahkan kepada penguatan tata kelola bagi pelaksanaan kebijakan ke depan, yaitu berupa fondasi dan modalitas diplomasi, termasuk diantaranya penguatan infrastruktur diplomasi dan kelembagaan, konsolidasi kebijakan, serta langkah-langkah untuk memperkuat sinergi diplomasi yang didukung oleh berbagai pemangku kepentingan.
5. Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi, dengan arah kebijakan:
- 1) Beragama Maslahat dan Berkebudayaan Maju. Pencapaian indikator dilakukan melalui dua upaya. Upaya pertama yakni, penguatan beragama maslahat dan layanan keagamaan transformatif.
 - 2) Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender, dan Masyarakat Inklusif dengan kebijakan yang diarahkan pada penguatan ketangguhan keluarga, peningkatan kesetaraan gender, serta perwujudan masyarakat inklusif yang memperhatikan perbedaan karakteristik dan kebutuhan berbagai kelompok.
 - 3) Lingkungan Hidup Berkualitas yang diarahkan pada peningkatan Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati, Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH), persentase rumah tangga dengan akses sanitasi aman, persentase timbulan sampah terolah di fasilitas pengolahan sampah.
 - 4) Berketahanan Energi, Air, dan Kemandirian Pangan.

4.2.2 Keterkaitan RKP Tahun 2025 dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025–2045

Arah pembangunan Indonesia ditujukan untuk mengawal pencapaian cita-cita 100 tahun Indonesia merdeka atau Indonesia Emas 2045, menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia yang bersatu, berdaulat, maju, dan berkelanjutan di tahun 2045. Sebagaimana disampaikan pada bagian awal, bahwa RKP Tahun 2025 berkedudukan sangat strategis, karena memuat fondasi awal untuk dapat menghubungkan transisi estafet pembangunan menuju Indonesia Emas 2045. Peta jalan menuju Indonesia Emas 2045 mengusung paradigma transformasi secara menyeluruh di berbagai bidang, berlandaskan kolaborasi dari seluruh elemen bangsa. Langkah konkret operasionalisasi agenda transformasi mengawal Indonesia Emas 2045 diwujudkan melalui delapan prioritas nasional. Keselarasan prioritas nasional dengan agenda transformasi sebagai koridor untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045, diuraikan pada infografis berikut ini:





Gambar 4.2
Integrasi RPJPN Tahun 2025-2024 dengan RKP Tahun 2025

Percepatan Pembangunan

Percepatan pembangunan sarana prasarana Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara dan infrastruktur pendukungnya diharapkan menjadi salah satu sumber pertumbuhan ekonomi Wilayah Kalimantan sehingga dapat tumbuh 5,8%-6,1% pada tahun 2025. Selain itu, kinerja industri diharapkan terus meningkat di beberapa provinsi seiring dengan percepatan hilirisasi industri berbasis komoditas nilai tambah tinggi, antara lain industri bauksit, nikel, rumput laut, sawit, dan karet; penguatan industri dasar seperti industri kimia dasar; serta pengembangan industri teknologi menengah tinggi seperti industri elektronik dan digital, serta industri kimia hilir dan farmasi. Pengembangan dan operasionalisasi infrastruktur pendukung Kawasan seperti jalan tol, pelabuhan, dan bandara yang telah dibangun juga diharapkan akan memberikan dorongan kinerja ekonomi Wilayah Kalimantan.

Sasaran Utama pada Prioritas Nasional 1

Untuk mengawal keberhasilan proses Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia, telah dirumuskan sasaran dan indikator pembangunan pada tahun 2025 sebagai berikut:

Tabel 4.2
Sasaran Utama pada Prioritas Nasional 1

No	Sasaran dan Indikator	Baseline 2023	Target 2025
Terwujudnya kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang berlandaskan Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia			
1	Indeks Demokrasi Indonesia	79,51	81.69-85.23
2	Indeks Aktualisasi Pancasila	75.53 a) (2022)	79.37 a)
3	Indeks Komunikasi Pembangunan dan Informasi Publik	69,8	71-80 (kategori baik)
4	Indeks Hak Asasi Manusia	2.70 (2022)	2,75

Arah Kebijakan Prioritas Nasional 1

Untuk mendukung tercapainya sasaran terwujudnya kehidupan bermasyarakat dan bernegara yang berlandaskan Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia, dilaksanakan serangkaian arah kebijakan:

- 1) memperkuat ideologi Pancasila;
- 2) penguatan demokrasi;
- 3) pemantapan komunikasi pembangunan dan informasi publik;
- 4) kepemimpinan nasional yang berasaskan Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia; serta
- 5) transformasi akses terhadap keadilan dan pengarusutamaan hak asasi manusia.

Sasaran Utama pada Prioritas Nasional 2

Untuk mengawal keberhasilan proses pemantapan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru, telah dirumuskan sasaran pembangunan pada tahun 2025 sebagai berikut:

Tabel 4.3
Sasaran Utama pada Prioritas Nasional 2

No	Sasaran dan Indikator	Baseline 2023	Target 2025
Terjaganya kedaulatan negara dan penguatan stabilitas keamanan nasional sebagai fondasi pelaksanaan pembangunan			
1	Asia Power Index (<i>Military Capability</i>)	14,6 (2022)	16
2	Asia Power Index (<i>Diplomatic Influence</i>)	60,42	61,54
3	Asia Power Index (Economic Relationship)	12,6	12,6 a)
4	Proporsi Penduduk yang Merasa Aman Berjalan Sendirian di Area Tempat Tinggalnya (%)	62,8 (2020)	63,5
5	Global Cybersecurity Index	94,88	94,92
6	Indeks Keamanan Laut Nasional	56	60
Meningkatkan kemandirian bangsa dalam memenuhi kebutuhan pangan, energi, dan air secara berkelanjutan			
7	Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (%)	8,53	7,21
8	Indeks Ketahanan Energi	6,64	6,77
9	Porsi EBT dalam Bauran Energi Primer (%)	13,2	20
10	Indeks Ketahanan Sumber Daya Air Nasional	3,48 (2022)	3,45-3,60
11	Kapasitas tampungan air (m3/kapita)	60,43	63,40

No	Sasaran dan Indikator	Baseline 2023	Target 2025
12	Akses rumah tangga perkotaan terhadap air siap minum perpipaan (%)	24 (2020)	39,20
13	Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman (%)	10,21	12,5
Terwujudnya perekonomian nasional yang progresif, inklusif dan berkelanjutan			
14	Posisi ekonomi syariah Indonesia di tingkat global (peringkat)	3	3
15	Indeks Ekonomi Hijau	59,17 (2020)	70,8
16	Timbunan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah (%)	15 (13 terdaur ulang) (2022)	24 (16 terdaur ulang)
17	Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	0,35 (2020)	0,44
18	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	72,54	76,49
19	Persentase Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) - Kumulatif (%) - Tahunan (%)	27,8 35,53 (2022)	28,12 36,65
20	Kontribusi PDB Maritim (%)	7,92 (2022)	8,1
21	<i>Indonesia Blue Economy Index</i>	34,25	38,76
22	Indeks Daya Saing Digital di Tingkat Global (peringkat)	45	45

Arah Kebijakan Prioritas Nasional 2

Dalam rangka mewujudkan sasaran-sasaran pembangunan pada Prioritas Nasional 2, dilaksanakan arah kebijakan sebagai berikut:

- 1) Terjaganya kedaulatan negara dan penguatan stabilitas keamanan nasional sebagai fondasi pelaksanaan pembangunan, dilaksanakan melalui (a) penguatan pertahanan negara; (b) pembangunan dan pengembangan industri pertahanan; (c) penguatan sistem keamanan negara; (d) profesionalisme pelayanan kepolisian; (e) penguatan keamanan laut dan hidrooseanografi; (f) keamanan siber, sandi, dan sinyal; (g) penguatan infrastruktur dan jejaring *smart diplomacy*; (h) diplomasi ekonomi; dan (i) hubungan internasional yang kondusif.
- 2) Meningkatnya kemandirian bangsa dalam memenuhi kebutuhan pangan, energi, dan air secara berkelanjutan, dilaksanakan melalui (a) swasembada pangan; (b) swasembada energi; (c) swasembada air; (d)

pemenuhan akses air minum aman; serta (e) percepatan pemenuhan akses sanitasi aman untuk masyarakat;

- 3) Terwujudnya perekonomian nasional yang progresif, inklusif, dan berkelanjutan, dilaksanakan melalui (a) ekonomi syariah; (b) ekonomi digital; (c) ekonomi sirkular industri; (d) pengelolaan keanekaragaman hayati ekosistem, spesies, dan genetik; (e) peningkatan kualitas lingkungan hidup dan tata ruang; (f) penerapan ekonomi sirkular dari sumber sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga secara partisipatif (hulu); (g) penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga (hilir); (h) pembangunan rendah karbon; (i) tenaga kerja hijau; (j) pengelolaan hutan lestari; serta (k) pengembangan ekonomi biru sebagai sumber pertumbuhan baru.

Sasaran Utama pada Prioritas Nasional 3

Untuk mengawal keberhasilan proses pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi, telah dirumuskan sasaran pembangunan pada tahun 2025 sebagai berikut:

Tabel 4.4
Sasaran Utama pada Prioritas Nasional 3

No	Sasaran dan Indikator	Baseline 2023	Target 2025
Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur			
1	Stok Infrastruktur terhadap PDB (%)	43 (2019)	51 a)
Meningkatnya Total Aset Sektor Keuangan terhadap PDB			
2	Total Aset Sektor Keuangan/PDB (%)	128,5	136,7
3	Aset Perbankan/PDB (%)	61,52	66,9
4	Aset Dana Pensiun/PDB (%)	7,0 (2022)	8,0
5	Aset Asuransi/PDB (%)	8,82	9,1
6	Kapitalisasi Pasar Modal/PDB (%)	55,84	57,8
7	Total Kredit/PDB (%)	33,94	37,8
8	Inklusi Keuangan (%)	88,70	91
Meningkatnya Lapangan Kerja yang Berkualitas			
9	Penyediaan Lapangan Kerja per Tahun (Juta orang)	4,55	3.00-3.50
10	Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDB (%)	1.07 (2021)	1,10

No	Sasaran dan Indikator	Baseline 2023	Target 2025
11	Proporsi Jumlah Usaha Kecil dan Menengah (%)	1.32 (2019)	1,44
12	Rasio Kewirausahaan (%)	3,04	3,14
Meningkatnya Nilai Tambah Pariwisata			
13	Rasio PDB Pariwisata (%)	3.60 (2022)	4,60
14	Devisa Pariwisata (Miliar USD)	14,63	22,10
Meningkatnya Proporsi PDB Ekonomi Kreatif			
15	Proporsi PDB Ekonomi Kreatif (%)	6,77	7,92

Arah Kebijakan Prioritas Nasional 3

Dalam rangka mewujudkan sasaran-sasaran pembangunan pada Prioritas Nasional 3, dilaksanakan arah kebijakan sebagai berikut:

- 1) Melanjutkan pengembangan infrastruktur, dilaksanakan melalui serangkaian arah kebijakan, yaitu: (a) penguatan konektivitas dan layanan transportasi; (b) penguatan konektivitas dan transisi energi Listrik; (c) penguatan konektivitas dan ekosistem digital; serta (d) pengembangan pengairan dan irigasi.
- 2) Meningkatnya total aset sektor keuangan terhadap produk domestik bruto dilaksanakan melalui arah kebijakan pendalaman sektor keuangan.
- 3) Meningkatnya lapangan kerja yang berkualitas dilaksanakan melalui arah kebijakan peningkatan produktivitas usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi. Peningkatan produktivitas utamanya difokuskan pada penciptaan ekosistem usaha yang dapat mendorong usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi untuk tumbuh dan berkembang.
- 4) Meningkatnya nilai tambah pariwisata dilaksanakan arah kebijakan pembangunan pariwisata berkualitas dan berkelanjutan.
- 5) Meningkatnya proporsi produk domestik bruto ekonomi kreatif dilaksanakan arah kebijakan penguatan ekosistem ekonomi kreatif berbasis kekayaan intelektual.

Sasaran Utama pada Prioritas Nasional 4

Untuk mengawal keberhasilan proses pembangunan sumber daya manusia, sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan

penyanggah disabilitas, telah dirumuskan sasaran pembangunan pada tahun 2025 sebagai berikut:

Tabel 4.5
Sasaran Utama pada Prioritas Nasional 4

No	Sasaran dan Indikator	Baseline 2023	Target 2025
Pendidikan Berkualitas yang Merata			
1	Rata-rata nilai PISA - Membaca - Matematik - Sains	359 (2022) 366 (2022) 383 (2022)	396 404 416
2	Rata-rata Nilai Asesmen Tingkat Nasional: - Literasi Membaca - Numerasi	60.89 51.36	62.89 54.36
3	Rata-rata lama sekolah penduduk usia 15 tahun ke atas (Tahun)	9,13	9,33
4	Harapan Lama Sekolah (tahun)	13,15	13,32
5	Angka Partisipasi Kasar Pendidikan Tinggi (%)	31,45	33,94
6	Proporsi penduduk berusia 15 tahun ke atas yang berkualifikasi pendidikan tinggi (%)	10,12	11,12
7	Persentase pekerja lulusan pendidikan menengah dan tinggi yang bekerja di bidang keahlian menengah tinggi (%)	66.30	66,78
Kesehatan untuk Semua			
8	Usia Harapan Hidup (Tahun)	72,13	74,43
9	Angka Kelahiran Total (<i>Total Fertility Rate</i>) (Rata-rata kelahiran per wanita usia subuh 15-49 tahun)	2,14 (2023)	2,12
10	Angka kematian Ibu (per 100.000 kelahiran hidup)	189 (2020)	122
11	Prevalensi <i>Stunting</i> (pendek dan sangat pendek) pada balita (%)	21,5	18,8
12	Insidensi Tuberkulosis (per 100.000 penduduk)	385 (2022)	272
13	Cakupan kepersertaan jaminan kesehatan nasional (%)	95 (2023)	98
Keluarga Berkualitas, Kesenjangan Gender, dan Masyarakat Inklusif			
14	Indeks Ketimpangan Gender	0,447	0,424
15	Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga	69.53 (2022)	70,29

No	Sasaran dan Indikator	Baseline 2023	Target 2025
16	Indeks Perlindungan Anank	63,83 a)	65,2
17	Indeks Pembangunan Pemuda	60,59	64,56
18	Indeks Pembangunan gender	91,85	92,15
19	Mobilitas Penduduk lanjut Usia (%)	92,94	94
20	Mobilitas Penduduk Penyandang Disabilitas (%)	68,42	69
Iptek, Inovasi, dan Produktivitas Ekonomi			
21	Peringkat Indeks Inovasi Global	61	60
22	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	5,32	4,50-5,00
23	Pengeluaran Iptek dan Inovasi (% PDB)	0,28 (2022)	0,30
24	Tingkat Partisipasi angkatan kerja perempuan (%)	54,52	56,3
25	Peringkat pada SEA Games	3 (2023)	3

Arah Kebijakan Prioritas Nasional 4

Pembangunan dan pembentukan modal manusia diarahkan untuk menjamin setiap anak sejak dalam kandungan, termasuk anak dalam kondisi khusus, dapat tumbuh, berkembang, dan terlindungi dari kekerasan serta didukung oleh lingkungan keluarga. dan masyarakat yang kondusif. Pembentukan modal manusia tersebut dapat terwujud apabila setiap individu sehat, terdidik, dan terlindungi. Dalam rangka mewujudkan sasaran-sasaran pembangunan, dilaksanakan arah kebijakan sebagai berikut:

- (1) Pendidikan berkualitas yang merata akan dicapai melalui: (a) percepatan wajib belajar 13 tahun (1 tahun prasekolah dan 12 tahun pendidikan dasar dan pendidikan menengah); (b) peningkatan kualitas pengajaran dan pembelajaran; (c) penguatan pengelolaan pendidik dan tenaga kependidikan berkualitas; (d) penguatan sistem tata kelola pendidikan; (e) penguatan pendidikan tinggi dan pengembangan bidang *science, technology, engineering, art, and mathematics*; serta (f) penguatan budaya literasi untuk kreativitas, dan inovasi.
- (2) Kesehatan untuk semua akan dicapai melalui: (a) peningkatan kesehatan dan gizi Masyarakat; (b) pengendalian penyakit dan pembudayaan hidup

- sehat; (c) penguatan kapasitas ketahanan Kesehatan; serta (d) penguatan pelayanan kesehatan dan tata kelola, yang komprehensif.
- (3) Keluarga berkualitas, kesetaraan gender, dan masyarakat inklusif akan dicapai melalui: (a) peningkatan ketangguhan keluarga; (b) peningkatan kualitas perlindungan anak; (c) peningkatan kualitas pemuda; (d) peningkatan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan dari kekerasan; serta (e) peningkatan kesetaraan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas dan lanjut usia.
- (4) Iptek, inovasi, dan produktivitas ekonomi akan dicapai melalui: (a) penguatan Pendidikan dan pelatihan vokasi dan produktivitas Iknoga kerja; (b) peningkatan kontribusi iptek dan inovasi dalam pembangunan nasional; (c) pengembangan manajemen talenta nasional, serta (d) peningkatan prestasi olahraga.

Sasaran Utama pada Prioritas Nasional 5

Untuk mengawal keberhasilan proses pembangunan hilirisasi dan industri berbasis sumber daya alam dalam meningkatkan nilai tambah dalam negeri, telah dirumuskan sasaran pembangunan pada tahun 2025 sebagai berikut:

Tabel 4.6
Sasaran Utama pada Prioritas Nasional 5

No	Sasaran dan Indikator	Baseline 2023	Target 2025
Meningkatnya Nilai Tambah, Produktivitas dan Daya Saing Industri Pengolahan			
1	Rasio PDB Industri Pengolahan	18,67	20,8
Integrasi Ekonomi Domestik dan Global			
2	Biaya Logistik (% PDB)	14,29 (2022)	13,5
3	Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PDB)	29,3	30,1-30,2
4	Ekspor Barang dan Jasa (% PDB)	21,7	21,0-21,6

Arah Kebijakan Prioritas Nasional 5

Prioritas Nasional 5 ditujukan untuk membangun fondasi industrialisasi yang bernilai tambah tinggi di dalam negeri, terintegrasi antarwilayah, dan berdaya saing global sehingga mampu menjadi pengungkit perekonomian regional dan nasional. Dalam rangka mewujudkan sasaran-

sasaran pembangunan pada Prioritas Nasional 5, dilaksanakan arah kebijakan sebagai berikut:

- 1) Meningkatnya nilai tambah, produktivitas dan daya saing industri pengolahan dilaksanakan melalui: (a) pengembangan hilirisasi berbasis sumber daya alam unggulan, industri padat karya terampil, padat teknologi dan inovasi, serta berorientasi ekspor sebagai industri strategis nasional, termasuk di dalamnya penguatan industri dasar; dan (b) pengembangan aglomerasi industri di kawasan industri/kawasan ekonomi khusus prioritas sebagai pusat pertumbuhan baru.
- 2) Integrasi ekonomi domestik dan global dilaksanakan serangkaian arah kebijakan pengembangan integrasi ekonomi domestik dan global melalui: (a) optimalisasi *backbone* integrasi ekonomi dan perkuatan sistem logistik nasional; (b) peningkatan investasi untuk integrasi ekonomi domestik dan global; serta (c) peningkatan perdagangan domestik, antarwilayah, dan ekspor serta peningkatan partisipasi dalam rantai nilai global.

Selain intervensi yang telah dijabarkan, pembangunan fondasi industrialisasi yang bernilai tambah tinggi, terintegrasi antarwilayah, dan berdaya saing global juga akan didukung oleh tiga program yang menjadi penekanan, yaitu (1) Pembangunan Sarana dan Prasarana Dalam dan Luar KI/KEK Prioritas; (2) Pengembangan Hilirisasi Industri Berbasis Sumber Daya Hayati (Sarvit, Kelapa, Rumput Laut); serta (3) Pengembangan Industri *Medium-High Technology* (Industri Alat Angkut, Industri Elektronika dan Digital, Industri Kimia dan Farmasi).

Sasaran Utama pada Prioritas Nasional 6

Untuk mengawal keberhasilan proses membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan, telah dirumuskan sasaran pembangunan pada tahun 2025 sebagai berikut:

Tabel 4.7
Sasaran Utama pada Prioritas Nasional 6

No	Sasaran dan Indikator	Baseline 2023	Target 2025
Perlindungan sosial yang adaptif			
1	Tingkat Kemiskinan	9,03 (2024)	7,0 – 8,0
2	Tingkat Kemiskinan Ekstrem	0,83 (2024)	0
3	Terwujudnya perlindungan sosial yang adaptif bagi seluruh penduduk (%)	0	15,00
4	Cakupan Kepersetaan jaminan sosial ketenagakerjaan (%)	31,48	43,19
5	Persentase penyandang disabilitas yang bekerja di sektor formal (%)	19,71	22
Meningkatnya akses hunian layak, terjangkau, dan berkelanjutan			
6	Rumah tangga dengan akses hunian layak, terjangkau, dan berkelanjutan (%)	63,15	67
Mewujudkan pembangunan kemandirian perdesaan dari bawah sebagai sumber pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan			
7	Persentase desa mandiri (%)	3,9 (2021)	4,00
Perkotaan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi			
8	Proporsi kontribusi PDRB wilayah metropolitan terhadap nasional (%)	44,13 (2022)	44,35

Arah Kebijakan Prioritas Nasional 6

Dalam rangka mewujudkan sasaran-sasaran pembangunan Prioritas Nasional 6, dilaksanakan arah kebijakan sebagai berikut:

- 1) Perlindungan sosial yang adaptif dilaksanakan melalui: (a) satu sistem registrasi sosial ekonomi; (b) reformasi sistem jaminan sosial nasional; (c) integrasi bantuan sosial, jaminan sosial, dan pemberdayaan masyarakat yang adaptif; (d) pengembangan ekonomi perawatan (*care economy*) untuk perluasan perlindungan sosial dan kesejahteraan; serta (e) inklusi sosial untuk kesejahteraan kelompok rentan.
- 2) Meningkatnya akses hunian layak, terjangkau, dan berkelanjutan dilaksanakan melalui penyediaan perumahan dan kawasan permukiman.
- 3) Mewujudkan pembangunan kemandirian perdesaan dari bawah sebagai sumber pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dilaksanakan melalui peningkatan kemandirian perdesaan yang berkelanjutan.

- 4) Perkotaan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi dilaksanakan melalui pembangunan wilayah metropolitan dan pembangunan ibu kota nusantara.

Sasaran Utama pada Prioritas Nasional 7

Untuk mengawal keberhasilan proses memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan, telah dirumuskan sasaran dan indikator pembangunan pada tahun 2025 sebagai berikut:

Tabel 4.8
Sasaran Utama pada Prioritas Nasional 7

No	Sasaran dan Indikator	Baseline 2023	Target 2025
Terwujudnya supremasi hukum yang transparan, adil dan tidak memihak melalui tersusunnya fondasi kelembagaan hukum dan sistem antikorupsi			
1	Indeks Pembangunan Hukum	0,66 (2022)	0,69
2	Indeks Persepsi Korupsi	34	38
3	Indeks Materi Hukum	0,48 (2022)	0,51
4	Indeks Integritas Nasional	70,97	74,52
Terwujudnya birokrasi pemerintahan yang adaptif dan melayani			
5	Indeks pelayanan publik	3,78	3,68a)
6	Indeks Sistem Pemerintahan Bebas Elektronik	2,79	3,00
7	Indeks Pelayanan dan Perlindungan WNI di Luar Negeri	92,27	94
Terwujudnya masyarakat yang bebas dari penyalahgunaan narkoba			
8	Angka Prevalensi Penyalahgunaan Narkotika	1,73	1,7
Menekan potensi kerugian ekonomi, sosial, dan lingkungan akibat tindakan judi dan penyelundupan			
9	Clearance rate tindak pidana judi	33,28	35,00
10	Clearance rate tindak pidana penyelundupan	5,88	7,00
Terwujudnya tata kelola BUMN yang baik untuk meningkatkan kontribusi BUMN sebagai agen pembangunan			
11	Return on Asset (ROA) BUMN (%)	3,1 (2022)	3,4
Tercapainya peningkatan pendapatan negara yang optimal sesuai dengan potensi perekonomian dengan tetap menjaga iklim investasi			
12	Rasio Pendapatan Negara terhadap PDB	13,3	12,30-12,36
13	Rasio Penerimaan Perpajakan terhadap PDB (%)	10,31	10,1-10,3
Tercapainya tingkat inflasi yang rendah dan stabil untuk mendukung stabilitas serta pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan			
14	Tingkat Inflasi (%)	2,61	2,5 ± 1,0

Arah Kebijakan Prioritas Nasional 7

Dalam rangka mewujudkan sasaran-sasaran pembangunan Prioritas Nasional 7, dilaksanakan arah kebijakan sebagai berikut:

- 1) Terwujudnya supremasi hukum yang transparan, adil, dan tidak memihak melalui tersusunnya fondasi kelembagaan hukum dan sistem antikorupsi dilaksanakan melalui serangkaian arah kebijakan: (a) reformasi politik; (b) reformasi hukum; (c) pencegahan dan pemberantasan korupsi; (d) penguatan kelembagaan hukum; serta (e) transformasi sistem penuntutan dan *advocate general*.
- 2) Terwujudnya birokrasi pemerintahan yang adaptif dan melayani dilaksanakan melalui serangkaian arah kebijakan: (a) reformasi tata kelola pemerintahan; (b) inklusivitas dan transformasi digital layanan publik; dan (c) perlindungan warga negara Indonesia di luar negeri, tenaga kerja Indonesia, dan keamanan insani.
- 3) Terwujudnya masyarakat yang bebas dari penyalahgunaan narkoba dilaksanakan melalui arah kebijakan pencegahan dan pemberantasan narkoba.
- 4) Menekan potensi kerugian ekonomi, sosial, dan lingkungan akibat tindakan judi dan penyelundupan dilaksanakan melalui arah kebijakan penanggulangan judi dan penyelundupan.
- 5) Terwujudnya tata kelola Badan Usaha Milik Negara yang baik untuk meningkatkan kontribusi Badan Usaha Milik Negara sebagai agen pembangunan dilaksanakan melalui arah kebijakan peningkatan produktivitas Badan Usaha Milik Negara.
- 6) Tercapainya peningkatan pendapatan negara yang optimal sesuai potensi perekonomian dengan tetap menjaga iklim investasi diwujudkan dengan serangkaian arah kebijakan optimalisasi pendapatan negara yang sejalan dengan upaya untuk mewujudkan reformasi fiskal secara komprehensif, melalui optimalisasi belanja negara serta perluasan sumber dan pengembangan inovasi pembiayaan.

Tercapainya tingkat inflasi yang rendah dan stabil untuk mendukung stabilitas serta pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan

diwujudkan dengan pengendalian inflasi yang dilaksanakan utamanya melalui pengendalian komponen inflasi harga bergejolak.

Sasaran Utama pada Prioritas Nasional 8

Dalam upaya memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan alam dan budaya, serta meningkatkan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur, pada tahun 2025 dirumuskan sasaran pembangunan sebagai berikut:

Tabel 4.9
Sasaran Utama pada Prioritas Nasional 8

No	Sasaran dan Indikator	Baseline 2023	Target 2025
Beragama Maslahat dan Berkebudayaan Maju			
1	Indeks Pembangunan Masyarakat (IPMas)	62,85 (2021)	71,07
2	Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)	57,13	58,39
3	Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)	76,02	76,77
Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim			
4	Proporsi Kerugian Ekonomi Langsung Akibat Bencana Relatif terhadap PDB (%)	0,14 (2022)	0,137

Arah Kebijakan Prioritas Nasional 8

Dalam rangka mewujudkan sasaran pembangunan Prioritas Nasional 8, dilaksanakan arah kebijakan sebagai berikut:

- 1) Beragama maslahat dan berkebudayaan maju, dilaksanakan melalui: (a) penguatan kerukunan umat beragama dan layanan keagamaan transformatif untuk mewujudkan kehidupan beragama maslahat; dan (b) pelestarian dan pemajuan kebudayaan serta penguatan karakter bangsa.
- 2) Resiliensi terhadap bencana dan perubahan iklim, dilaksanakan melalui: (a) pembangunan berketahanan iklim; dan (b) pengelolaan risiko bencana yang efisien dan tepat guna.

4.2.3 Pelaksanaan Program Strategis Nasional

Dengan ditetapkannya RPJMN Tahun 2025-2029, maka dilakukan penyelarasan rencana pembangunan daerah dengan nasional. Penyelarasan

perlu dilakukan untuk mewujudkan visi pembangunan nasional dan visi pembangunan daerah.

Salah satu hal yang perlu diselaraskan dan didukung oleh pemerintah daerah selain kebijakan yang termuat dalam RPJMN Tahun 2025-2029, yaitu pelaksanaan Program Strategis Nasional. Program Strategis Nasional adalah penerjemahan program/proyek yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) yang mencakup Prioritas Nasional (PN), Program Prioritas (PP), Kegiatan Prioritas (KP), Proyek Prioritas (ProP), dan Proyek Strategis Nasional (PSN) yang memiliki sifat strategis dan menjadi tanggung jawab pemerintahan daerah dalam upaya meningkatkan pertumbuhan dan pemerataan pembangunan yang berkualitas dan berkelanjutan, penurunan kemiskinan, dan peningkatan produktivitas sumber daya manusia serta menjaga keamanan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Program Strategis Nasional, meliputi:

- a. Penanggulangan Kemiskinan dengan proyek/kegiatan:
 - 1) Optimalisasi Pelaksanaan Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan
 - 2) Kemiskinan Ekstrem;
 - 3) Sekolah Rakyat; dan
 - 4) Pembangunan 3 Juta Rumah.
- b. Ketahanan Pangan dengan proyek/kegiatan Pengadaan dan Pengelolaan Gabah/Beras Dalam Negeri serta Penyaluran Cadangan Beras Pemerintah.
- c. Kesehatan Untuk Semua dengan proyek/kegiatan:
 - 1) Jaminan Kesehatan Nasional; dan
 - 2) Makan Bergizi Gratis.
- d. Perluasan Akses Pendidikan dengan proyek/kegiatan Pembangunan dan Revitalisasi Pendidikan Dasar dan Menengah.
- e. Pertumbuhan Ekonomi dengan proyek/kegiatan:
 - 1) Pengendalian Inflasi;
 - 2) Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih; dan
 - 3) Kemudahan perizinan di daerah.

- f. Program Strategis Nasional dengan proyek/kegiatan lainnya yang ditetapkan oleh Presiden.

Pemerintah Daerah Kabupaten Tabalong akan melaksanakan Program Strategis Nasional sesuai dengan kewenangan dan berpedoman pada peraturan yang berlaku. Dukungan pelaksanaan tersebut masuk kedalam perencanaan dan penganggaran baik jangka menengah maupun tahunan. Program perangkat daerah yang mendukung PSN bersifat indikatif dan dapat berubah dan disesuaikan berdasarkan arahan pemerintah pusat pada penyusunan RKPD dan APBD.

4.2.4 Tema dan Sasaran Pembangunan Wilayah Nasional Tahun 2025

Tahun 2025 merupakan gerbang awal menuju pencapaian visi Indonesia Emas 2045, sebuah cita-cita luhur untuk membangun bangsa yang bersatu, berdaulat, maju, dan berkelanjutan. Salah satu tujuan utama pembangunan nasional yaitu mengurangi kesenjangan antara Kawasan Barat Indonesia dan Kawasan Timur Indonesia. Untuk mencapai tujuan pengurangan kesenjangan antarwilayah, kebijakan pembangunan kewilayahan dan sarana prasarana akan difokuskan pada pengembangan wilayah yang lebih merata dan berkeadilan, termasuk keselarasan pembangunan perkotaan, sebagai pusat aglomerasi kegiatan dan pertumbuhan, serta perdesaan sebagai lokus pengembangan ekonomi berbasis sumber daya alam yang berkelanjutan. Hal ini juga didukung dengan penyediaan infrastruktur yang berkualitas dan ramah lingkungan.

Dalam membangun fondasi pemerataan kewilayahan, dibutuhkan intervensi kebijakan berbasis pulau melalui penyiapan tema pembangunan wilayah sesuai dengan keunggulan daerah. Kebijakan tersebut dirinci hingga tingkat provinsi untuk mengurangi kesenjangan wilayah melalui pelaksanaan delapan prioritas nasional, yaitu:

- 1) memperkuat Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM);
- 2) memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru;

- 3) melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi melalui Peran Aktif Koperasi;
- 4) memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda, dan Penyandang Disabilitas;
- 5) melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri;
- 6) membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan;
- 7) memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan; serta
- 8) memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat yang Adil dan Makmur.

Implementasi Prioritas Nasional didukung pula dengan penerapan kebijakan umum yang berfokus pada Penguatan Ekosistem Percepatan Pembangunan Daerah serta Pemenuhan Infrastruktur dan Layanan Dasar sebagai fondasi dalam mempercepat pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan.

Adapun sasaran dan prioritas pembangunan wilayah yang ditetapkan untuk Provinsi Kalimantan Selatan yaitu:

Tabel 4.10
Sasaran dan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2025

Prioritas Nasional	Highlight Indikasi Intervensi*
Prioritas Nasional 1: Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia	• Pendidikan dan pelatihan pembinaan ideologi Pancasila • Peningkatan kapasitas SDM, kelembagaan, dan lingkungan pendukung masyarakat sipil • Pelaksanaan keterbukaan informasi publik

Prioritas Nasional	Highlight Indikasi Intervensi*
Prioritas Nasional 2: Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	• Bantuan penyediaan bibit ikan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Utara, dan Kabupaten Tanah Bumbu • Pengembangan Kawasan Tanaman Perkebunan • Penguatan sarana dan prasarana pascapanen tanaman Perkebunan • Penguatan input peternakan melalui bibit unggul • Verifikasi kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut • Penguatan Bendungan Riam Kiwa
Prioritas Nasional 3: Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi melalui Peran Aktif Koperasi	• Pembangunan jalan ruas Anjir Pasar (Bts Prov Kalteng) - Serapat - Bts. Kota Banjarmasin; • Preservasi jalan ruas Walangsi - Kaparkias dan Pagatan - Batulicin • Penguatan dan perluasan infrastruktur TIK • Pemasangan sambungan baru listrik bagi rumah tangga belum berlistrik yang tidak mampu atau berada di daerah 3T
Prioritas Nasional 4: Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesejahteraan Gender, Serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda, dan Penyandang Disabilitas	• Pelaksanaan Wajib Belajar 13 Tahun yang mencakup 1 Tahun prasekolah (TK/RA/BA) serta 12 Tahun pendidikan dasar dan pendidikan menengah, dengan fokus terutama pada peningkatan partisipasi dan tingkat penyelesaian jenjang pendidikan menengah • Melanjutkan penyediaan bantuan pendidikan afirmasi melalui Program Indonesia Pintar • Rehabilitasi ruang kelas rusak dan berat • Peningkatan akses, kualitas, dan relevansi pendidikan vokasi sesuai dengan potensi ekonomi lokal • Penguatan intervensi pembinaan serta fasilitasi talenta riset dan inovasi • Peningkatan sinergi pendanaan, tata kelola kelembagaan, dan koordinasi pelaksanaan MTN riset dan inovasi • Pembinaan talenta, penyelenggaraan ajang dan festival, serta pemberian penghargaan untuk talenta seni budaya • Pengembangan sistem pembinaan prabibit, bibit, dan talenta potensial bidang olahraga • Dukungan peningkatan pemenuhan standar sarana prasarana dan alat kesehatan untuk Rumah Sakit Umum Daerah Ulin dan Rumah Sakit Umum Daerah dr. H. Moch. Ansari Saleh di Kota Banjarmasin • Peningkatan kesetaraan gender, khususnya melalui perlindungan perempuan dan anak dari kekerasan serta pencegahan perkawinan anak • Pemenuhan ketersediaan alat/obat kontrasepsi (alokan) di fasyankes • Pemberdayaan kampung keluarga berkualitas • Keluarga dengan baduta yang mendapatkan fasilitasi dan pembinaan pengasuhan 1.000 HPK • PIK Remaja dan BKR yang mendapat fasilitasi dan pembinaan edukasi kespro dan gizi bagi remaja • Penduduk penerima bantuan iuran PBI JKN • Layanan pengendalian faktor risiko penyakit malaria • Pencegahan dan penurunan stunting dan bantuan pangan bergizi bagi ibu hamil dan balita • Layanan survei faktor risiko penyakit TB dan HIV/AIDS Pengendalian penyakit kusta • Peningkatan Sarana, Prasarana, dan Alat Kesehatan sesuai standar di RSUD • Pengembangan layanan unggulan KJSU KIA minimal di 1 RSUD • Pembinaan mutu RS untuk mencapai akreditasi paripurna • Pengembangan sentra pembinaan olahraga prestasi daerah

Prioritas Nasional	Highlight Indikasi Intervensi*
	• Pencegahan perilaku berisiko pemuda • Peningkatan partisipasi aktif dan kepemimpinan pemuda • Asistensi rehabilitasi sosial penyandang disabilitas dan lansia • Memberi makan bergizi gratis di sekolah dan pesantren, serta bantuan gizi untuk ibu hamil, ibu menyusui, dan anak balita
Prioritas Nasional 5: Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	• Peningkatan adopsi teknologi dan pemanfaatan riset/inovasi industri padat karya terampil (makanan, minuman, tekstil dan produk tekstil, serta alas kaki) • Peningkatan adopsi teknologi, riset, inovasi di industri nikel, tembaga, dan bauksit
Prioritas Nasional 6: Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	• Bantuan pembangunan rumah susun untuk hunian Aparatur Sipil Negara dan mahasiswa di Kota Banjarbaru • Perencanaan kawasan untuk mewujudkan sistem perkotaan nasional • Peningkatan layanan perkotaan untuk mewujudkan perkotaan yang layak huni, inklusif, dan berbudaya • Peningkatan pertumbuhan ekonomi dan kualitas ketenagakerjaan untuk mendorong perkotaan yang maju dan menyejahterakan • Bantuan PSU Bidang Perumahan • Bantuan pembangunan rumah swadaya • Bantuan pembangunan rumah susun hunian MBR/pekerja • Fasilitasi subsidi selisih bunga dan bantuan uang muka • Fasilitasi penyaluran bantuan pendanaan perumahan • Pemugaran dan peremajaan permukiman kumuh • Sarana pelayanan dasar desa dan perdesaan • Sarana dan prasarana konektivitas transportasi desa dan perdesaan • Sarana dan prasarana produk unggulan dan kegiatan ekonomi desa dan perdesaan • Pendampingan desa • Pelaksanaan reforma agraria melalui redistribusi tanah dan pemberdayaan masyarakat subjek reforma agrarian • Keluarga yang mendapat Bantuan Sosial Bersyarat • KPM yang memperoleh Bantuan Sosial Sembako • Kewirausahaan dan ketenagakerjaan pemuda di sektor pertanian • Peningkatan kualitas lingkungan dan ketangguhan bencana untuk mewujudkan perkotaan yang hijau dan tangguh
Prioritas Nasional 7: Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	• Pelatihan pengelolaan dan pemanfaatan potensi ekonomi untuk meningkatkan PAD • Rekomendasi kebijakan percepatan dan perluasan digitalisasi pmda • Pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah (PDRD) yang lebih efektif • Penguatan basis data potensi objek PDRD • Tata kelola penerimaan SDA Migas, Non-SDA, dan SDA Nonmigas yang bernilai tambah tinggi • Tata kelola pengelolaan asset • novasi layanan berbasis IT untuk meningkatkan kepatuhan • Penguatan kode etik, demokrasi internal, sistem kaderisasi, sistem rekrutmen, dan tata kelola keuangan pada partai politik

Prioritas Nasional	Highlight Indikasi Intervensi*
Prioritas Nasional 8: Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat yang Adil dan Makmur	• Penguatan instrumen peringatan dini bencana • Penyediaan sumber daya manusia berkompeten dan penyediaan sarana prasarana pencarian dan pertolongan • Revitalisasi dana sosial keagamaan untuk pengentasan kemiskinan

4.2.5 Prioritas Pembangunan Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2025

Arah Isu strategis pembangunan Provinsi Kalimantan Selatan untuk penyusunan perencanaan Tahun 2025 diidentifikasi berdasarkan data-data dan pencapaian target pada Tahun 2023 serta isu strategis yang muncul berdasarkan kebijakan nasional. Merujuk pada hasil tersebut, maka dilakukan inventarisasi permasalahan per urusan sebagai upaya identifikasi kendala dan hambatan dalam pelaksanaannya. Dari hasil identifikasi tersebut, secara garis besar dapat diangkat beberapa isu-isu strategis daerah sebagai berikut:

Tabel 4.11
Isu-isu strategis dan Fokus Pembangunan
Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2025

No	Isu Strategis	Fokus
1	Daya Saing Sumber Daya Manusia (SDM) yang Masih Rendah	1. Belum optimalnya kualitas pendidikan
		2. Belum optimalnya kualitas kesehatan
		3. Belum optimalnya keterampilan dan kompetensi Tenaga Kerja
		4. Masih adanya pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial
		5. Masih belum optimalnya peran pemuda dalam pembangunan
2	Fondasi Perekonomian Bebas Sumber Daya Alam Terbarukan yang Masih Belum Kuat	1. Masih rendahnya produktivitas daerah, sebagai akibat dari belum optimalnya hilirisasi
		2. Konsumsi masyarakat masih fokus pada kebutuhan dasar
		3. Konsumsi terhadap substitusi impor untuk bahan baku dan bahan penolong masih tinggi
		4. Sistem distribusi yang belum menghadirkan efisiensi daerah sebagai akibat dari skala produksi yang belum mencapai skala ekonomi kawasan
3	Pembangunan Infrastruktur Perekonomian Berbasis Kewilayahan	1. Belum optimalnya penyediaan infrastruktur perekonomian dan integrasinya terhadap pusat-pusat pertumbuhan ekonomi
		2. Keterkaitan antar moda masih belum optimal

No	Isu Strategis	Fokus
	Berkelanjutan Yang Belum Merata	
4	Belum optimalnya Pemenuhan Infrastruktur Dasar	1. Pemenuhan akses infrastruktur dasar yang belum merata
5	Belum Optimalnya Pengelolaan Lingkungan Hidup Berketahanan Iklim dan Ketahanan Bencana	1. Penurunan Indeks Kualitas Air 2. Peningkatan luas lahan kritis pada kawasan hutan maupun di luar kawasan hutan 3. Masih terjadinya banjir dan kebakaran hutan dan lahan diberbagai wilayah Kalimantan Selatan 4. Indeks risiko bencana Indonesia (IRBI) di Kalimantan Selatan 5. Konsep mitigasi bencana yang belum optimal 6. Peningkatan pelayanan SPM Bencana secara lintas sektor
6	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	1. Indeks Profesionalitas ASN Provinsi Kalimantan Selatan masih rendah 2. Masih belum optimalnya pelayanan masyarakat berbasis elektronik 3. Masih tingginya persepsi masyarakat terhadap korupsi 4. Masih belum optimalnya profesionalisme ASN 5. Masih Belum optimalnya penerapan informasi publik (SAKIP)

Arah kebijakan pembangunan nasional merupakan pedoman untuk merumuskan prioritas dan sasaran pembangunan daerah serta rencana program, kegiatan, sub kegiatan pembangunan daerah yang dilakukan melalui pendekatan politik, teknokratik, partisipatif, *bottom up* dan *top down*. Keberhasilan pembangunan nasional adalah keberhasilan dari pencapaian semua sasaran dan prioritas serta program, kegiatan, sub kegiatan pembangunan daerah yang ditetapkan dalam RKPD dan dilaksanakan secara nyata oleh semua pemangku kepentingan.

Tahun 2025 merupakan tahun pertama transisi pelaksanaan RPJPN Tahun 2025 – 2045 dan RPJMN Tahun 2025 – 2029. Pada rancangan RPJMN Tahun 2025 – 2029, arah kebijakan difokuskan pada Perkuatan Fondasi Transformasi. Perkuatan transformasi meliputi transformasi sosial, transformasi ekonomi, transformasi tata kelola, supremasi hukum, stabilitas dan kepemimpinann Indonesia, serta ketahanan sosial budaya dan ekologi.

Berdasarkan RPJMD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2021 – 2026, tema Pembangunan RKPD Tahun 2025 yaitu “Pemantapan Kualitas Daya Saing Daerah Menuju Kemandirian melalui intensitas kerjasama yang

Mendukung Pembangunan”. Merujuk pada kebijakan nasional dan isu-isu strategis yang telah dirangkum, maka tema Pembangunan RKPD Tahun 2025 telah dilakukan penyesuaian menjadi:

“PEMANTAPAN DAYA SAING DAERAH DENGAN PENINGKATAN KUALITAS SARANA PRASARANA UNTUK MENDUKUNG KALIMANTAN SELATAN SEBAGAI GERBANG LOGISTIK KALIMANTAN”.

Tema Pembangunan tahun 2025 memiliki makna penting yang diwakili 3 kata kunci (*key words*), yaitu:

1. Pemantapan Daya Saing Daerah: Menunjukkan pentingnya daya saing daerah dalam konteks lingkungan pendukung, sumber daya manusia, pasar, dan ekosistem inovasi. Dalam hal ini, fokus dilakukan untuk mendukung pengembangan peran Kalimantan Selatan sebagai gerbang logistik guna memperkuat pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
2. Peningkatan Kualitas Sarana Prasarana: meningkatkan kuantitas dan kualitas infrastruktur serta fasilitas pendukung seperti jalan, jembatan, pelabuhan, bandara, terminal, gudang, pasar dan lainnya. Hal ini bertujuan untuk memastikan kelancaran dan efisiensi distribusi barang/jasa dalam kegiatan logistik.
3. Pembangunan Gerbang Logistik Kalimantan: mengembangkan Kalimantan Selatan sebagai gerbang logistik regional yang akan menjadi titik penting dalam rantai pasok regional (produksi skala regional), memfasilitasi pergerakan barang secara efisien dan berkelanjutan (distribusi).

Berdasarkan ketiga poin tersebut maka tema Tahun 2025 memiliki makna bahwa pembangunan Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2025 bertujuan dalam meningkatkan daya saing daerah untuk mendukung pembangunan ekonomi inklusif dengan memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan, kesetaraan, keberlanjutan, dan mengutamakan potensi dan sektor unggulan Provinsi Kalimantan Selatan melalui peningkatan kuantitas dan kualitas infrastruktur serta fasilitas pendukung.

Perencanaan pembangunan Tahun 2025 sesuai dengan arah kebijakan pada RPJMD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2021 – 2026 diarahkan pada **“Pengembangan Kualitas SDM dan Prasarana Wilayah Mendukung perekonomian berkelanjutan Berpedoman pada Pencapaian Pembangunan Global (SDGs)”**. Sehingga, dalam perumusan prioritas juga telah diselaraskan terhadap dokumen TPB/SDGs melalui pengintegrasian 17 goal SDGs kedalam 5 Prioritas Daerah RKPD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2025. Selain pengintegrasian 17 Goal SDGs kedalam prioritas daerah, menjadikan isu SDGs/TPB sebagai isu pembangunan Bersama juga menjadi salah satu bentuk tindak lanjut dari monitoring dan evaluasi capaian TPB/SDGs Provinsi Kalimantan Selatan yang telah dilakukan. Seperti pada data pada tahun 2018 – 2020, di dalam isu SDGs/TPB Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2023 yang menjadi fokus perhatian ada pada 2 pilar, tujuan TPB dengan status capaian tidak tercapai terbanyak di Provinsi Kalimantan Selatan masih terus ada pada Tujuan 4 Pendidikan yang Berkualitas serta pada Tujuan 8 Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi.

Berdasarkan tema tersebut, maka dapat ditarik beberapa arah prioritas pembangunan pada Tahun 2025 sebagai berikut:

1. Peningkatan Kualitas Infrastruktur Dasar:

- Jalan: Memperbaiki dan membangun jalan yang menghubungkan Kawasan industri, pelabuhan, dan pusat-pusat ekonomi lainnya.
- Jembatan: Membangun jembatan yang menghubungkan pulau-pulau di Kalimantan Selatan dan meningkatkan konektivitas antar daerah.
- Pelabuhan: Memperluas dan meningkatkan kapasitas pelabuhan untuk mendukung kegiatan logistik dan perdagangan internasional.
- Akses internet dan telekomunikasi: Meningkatkan akses internet dan telekomunikasi di seluruh wilayah Kalimantan Selatan untuk mendukung kegiatan ekonomi dan sosial.
- Air bersih dan sanitasi: Menyediakan air bersih dan sanitasi yang layak bagi masyarakat di seluruh wilayah Kalimantan Selatan.

2. Pengembangan Kawasan Industri dan Logistik:

- Membangun kawasan industri yang terintegrasi dengan

- pelabuhan: Membangun kawasan industri yang dilengkapi dengan infrastruktur yang memadai dan terhubung dengan pelabuhan untuk memudahkan kegiatan logistik.
- Meningkatkan konektivitas antar kawasan industri dan logistik: Meningkatkan konektivitas antar kawasan industri dan logistik melalui pembangunan jalan, jembatan, dan jaringan kereta api.
- Memberikan insentif bagi investor: Memberikan insentif bagi investor yang berinvestasi di kawasan industri dan logistik, seperti keringanan pajak dan kemudahan perizinan.

3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia:

- Meningkatkan pendidikan dan pelatihan untuk tenaga kerja: Meningkatkan pendidikan dan pelatihan untuk tenaga kerja agar memiliki keterampilan dan keahlian yang dibutuhkan oleh industri dan sektor logistik.
- Meningkatkan keterampilan dan keahlian tenaga kerja: Memberikan pelatihan dan pendidikan kepada tenaga kerja untuk meningkatkan keterampilan dan keahlian mereka di bidang-bidang seperti teknologi informasi, bahasa asing, dan manajemen.
- Menciptakan lapangan kerja yang berkualitas: Menciptakan lapangan kerja yang berkualitas dengan gaji yang layak bagi masyarakat Kalimantan Selatan.

4. Peningkatan Daya Saing Produk Lokal:

- Memberikan bantuan modal dan pelatihan bagi UMKM: Memberikan bantuan modal dan pelatihan bagi UMKM untuk meningkatkan kualitas produk dan daya saing mereka di pasar.
- Membuka akses pasar bagi produk lokal: Membantu UMKM untuk memasarkan produk mereka di pasar lokal, nasional, dan internasional.
- Meningkatkan promosi produk lokal: Melakukan promosi produk lokal melalui berbagai media seperti pameran, iklan, dan internet.

Berdasarkan tema RKPD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2025 dan rumusan prioritas, maka dapat dijabarkan kebijakan pembangunan daerah tersebut ke dalam 5 Prioritas Daerah (PD) sebagai berikut:

PD 1: Penguatan Sektor Industri, UMKM, Pertanian dan Pariwisata Didukung Tenaga Kerja Berkualitas dan Energi Berkelanjutan

1. Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Teknologi Pertanian
2. Peningkatan Rantai Pasok Untuk Mendukung Hilirisasi Industri Berbasis Sumber Daya Alam Berkelanjutan
3. Peningkatan Pariwisata, ekonomi kreatif, UMKM Berbasis Digital dan Berdaya Saing
4. Peningkatan Kompetensi Tenaga Kerja yang Berdaya Saing
5. Pengembangan Energi Baru Terbarukan (EBT)

PD 2: Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing

1. Peningkatan Angka Rata-Rata Lama Sekolah
2. Peningkatan Indeks Pembangunan Pemuda
3. Pemerataan Akses Layanan Kesehatan
4. Penurunan Prevalensi Stunting
5. Penurunan Angka Pernikahan Anak
6. Peningkatan Prestasi Olahraga
7. Pengembangan Budaya Daerah

PD 3: Pemantapan Infrastruktur Dasar dan Ekonomi

1. Pemenuhan Pencapaian Infrastruktur Dasar
2. Pembangunan Sarana dan Prasarana Menunjang Konektivitas antar Wilayah
3. Pengembangan Kawasan Prioritas dan Pedesaan yang Terintegrasi dengan Infrastruktur sebagai Gerbang Logistik Kalimantan

PD 4: Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Fokus pada Pelayanan Publik dan Investasi

1. Penguatan Reformasi Birokrasi
2. Perencanaan Penganggaran yang Responsif Gender dan Inklusif

3. Pengembangan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dalam Rangka Meningkatkan Pelayanan Publik
4. Pengembangan Satu Data Kalsel
5. Peningkatan Penggunaan Produksi Dalam Negeri (PDN)
6. Revitalisasi BLUD
7. Meningkatkan Investasi yang Berdampak ke Daerah

PD 5: Meningkatkan Pengelolaan Lingkungan Hidup untuk Mendukung Ketahanan Bencana

1. Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup
2. Penguatan Mitigasi dan Pemulihan Pasca Bencana

Tabel 4.12
Indikator Ekonomi Makro Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2025

No	Indikator	Kalsel 2022	Kalsel 2023	Outlook Kalsel 2024	Sasaran Kalsel 2025
1	2	3	4	5	6
1	Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,11	4,84	4,51 - 5,27	4,97 - 5,28
2	PDRB ADHK 2010 Perkapita (Juta rupiah/orang)	34,04	35,34	35,76 - 37,67	38,14 - 38,25
4	PDRB ADHB Perkapita (Juta rupiah/orang)	60,08	63,77	66,27 - 68,50	71,70 - 71,91
3	Asumsi: - Jumlah Penduduk (orang) (Sumber Proyeksi Proyeksi Penduduk Indonesia 2020-2050 Hasil Sensus Penduduk 2020) - Laju Pertumbuhan Penduduk (%)	4.182.080 1,44	4.222.330 1,22	4.273.400 1,19	4.323.330 1,17
4	Angka Inflasi (%)	6,99	3,75	2,00 - 4,00	3,3 - 4,1
5	Kontribusi Sektor Pertambangan	32,05	30,82	30,38 - 26,88	22,58 - 22,53
6	Kontribusi Sektor Pertanian dalam arti luas terhadap PDRB ADHB (%)	11,4	11,37	11,25 - 12,86	12,51 - 13,01
7	Kontribusi Industri Pengolahan terhadap PDRB ADHB (%)	11,39	10,75	10,2 - 11,49	12,15 - 12,65
8	Kontribusi Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum terhadap PDRB ADHB (%)	1,79	1,86	1,90 - 2,26	2,26 - 2,45

No	Indikator	Kalsel 2022	Kalsel 2023	Outlook Kalsel 2024	Sasaran Kalsel 2025
1	2	3	4	5	6
9	ICOR (Rasio PMTB terhadap Perubahan PDRB ADHK 2010)	4,61	4,9	5,45 - 4,75	4,81 - 4,54
10	Indeks Williamson	0,516	0,504	0,417	0,492
11	Indeks Pembangunan Manusia	74	72,2	72,65	75,2
12	Harapan Lama Sekolah (Tahun)	12,82	13,07	13,2	13,33
13	Rata - rata Lama Sekolah (Tahun)	8,46	8,55	8,65	8,74
14	Pengeluaran Per Kapita (Ribuan Rupiah/Orang/ Tahun)	12.469	12.953	12.266	13.000
15	Umur Harapan Hidup (Tahun)	69,13	69.42.00	71,05	74,4
16	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) (%)	4,20 - 4,74	4,22	4,05 - 4,59	3,86 - 4,25
17	Persentase Penduduk Miskin (P0) (%)	4,61	4,4	4,4	3,64 - 3,94
18	Gini Ratio	0,317	0,313	0,310 - 0,320	0,307- 0,312
19	Indeks Modal Manusia (IMM)	0,528	0,53	-	0,55
20	Penurunan Intesitas Emisi GRK	-	-	-	75,97

Sumber: RPKPD Prov. Kalsel Tahun 2025

Capaian pembangunan harus berkontribusi terhadap indikator makro daerah sebagai salah satu indikator keberhasilan pembangunan suatu daerah. Oleh karena itu, pembangunan di Provinsi Kalimantan Selatan harus mampu menjawab berbagai permasalahan yang berkembang dan fokus terhadap sasaran prioritas. Kelima rumusan prioritas pembangunan Kalimantan Selatan kemudian diselaraskan dengan sasaran pembangunan pada Tahun 2025.

Kebijakan pembangunan kewilayahan Provinsi Kalimantan Selatan mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2023 - 2042 yang melingkupi kebijakan pengembangan wilayah, struktur dan pola ruang. Penyusunan RPKPD Tahun 2025 ini terintegrasi dengan pelaksanaan RTRW Provinsi Kalimantan Selatan periode kedua yaitu Tahun 2025 - 2029.

Agar pembangunan dengan basis kewilayahan berjalan efektif maka diperlukan kebijakan perencanaan pengembangan wilayah yang memiliki sistem yang saling terintegrasi antar wilayah kabupaten/kota. Melalui konsep ini, dapat dilakukan pembagian 3 (tiga) klaster pengembangan wilayah. Pembagian klaster tersebut didasarkan pada beberapa hal yaitu adanya aglomerasi pusat-pusat kegiatan, keterkaitan fungsional dan potensi pengembangan wilayah antar kabupaten/kota yang dideliniasi berdasarkan batas administrasi wilayah serta sinkronisasi arah pengembangannya dengan konsep pengembangan Kawasan-kawasan strategis di Provinsi Kalimantan Selatan. Pembagian wilayah pengembangan ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas perencanaan pembangunan terintegrasi antar wilayah kabupaten/kota yang disesuaikan dengan sektor-sektor unggulan maupun potensi daerah masing-masing.

Adapun 3 (tiga) klaster wilayah tersebut seperti yang ditampilkan pada di bawah terbagi menjadi:

1. Klaster Banjarbakula dan sekitarnya yang meliputi wilayah administrasi Kota Banjarmasin, Kota Banjarbaru, Kabupaten Banjar, Kabupaten Barito Kuala, dan Kabupaten Tanah Laut.
2. Klaster Banua Anam meliputi wilayah administrasi Kabupaten Tabalong, Kabupaten Balangan, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, dan Kabupaten Tapin.
3. Klaster Saijaan – Bersujud meliputi wilayah administrasi Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Kotabaru.

Dalam rangka melaksanakan prioritas di atas, dikembangkan Strategi dan arah kebijakan Pembangunan tahun 2025 sebagai berikut:

1. Peningkatan Daya Saing Daerah dengan strategi:
 - a. Peningkatan Lingkungan Pendukung dengan arah kebijakan sebagai berikut:
 - Meningkatkan ketersediaan dan kualitas sarana dan prasarana dasar dan perekonomian: pembangunan dan pengembangan infrastruktur dasar maupun infrastruktur yang mendorong aktivitas perekonomian.

- Meningkatkan stabilitas ekonomi makro: Meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui transformasi ekonomi, penciptaan nilai tambah produk, dan perkuatan investasi.
 - Memberikan insentif bagi investor: Memberikan insentif bagi investor yang berinvestasi di kawasan industri dan logistik, seperti keringanan pajak dan kemudahan perizinan.
- b. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, dengan arah kebijakan sebagai berikut:
- Meningkatkan pendidikan dan pelatihan untuk tenaga kerja: Meningkatkan pendidikan dan pelatihan untuk tenaga kerja agar memiliki keterampilan dan keahlian yang dibutuhkan oleh industri dan sektor logistik.
 - Meningkatkan keterampilan dan keahlian tenaga kerja: Memberikan pelatihan dan pendidikan kepada tenaga kerja untuk meningkatkan keterampilan dan keahlian mereka di bidang-bidang seperti teknologi informasi, bahasa asing, dan manajemen.
 - Menciptakan lapangan kerja yang berkualitas: Menciptakan lapangan kerja yang berkualitas dengan gaji yang layak bagi masyarakat Kalimantan Selatan.
- c. Peningkatan dan Pengembangan Pasar Barang dan Jasa dengan arah kebijakan:
- Memberikan bantuan modal dan pelatihan bagi UMKM: Memberikan bantuan modal dan pelatihan bagi UMKM untuk meningkatkan kualitas produk dan daya saing mereka di pasar.
 - Membuka akses pasar bagi produk lokal: Membantu UMKM untuk memasarkan produk mereka di pasar lokal, nasional, dan internasional.
 - Meningkatkan promosi produk lokal: Melakukan promosi produk lokal melalui berbagai media seperti pameran, iklan, dan internet.
- d. Peningkatan Ekosistem Inovasi, dengan arah kebijakan:
- Mendorong pengembangan kajian dan inovasi untuk menciptakan diversifikasi pengetahuan dan ide inovatif dalam mendorong

perkuatan perencanaan, kelembagaan, dan konsep-konsep pembangunan baru.

2. Peningkatan Kualitas Sarana Prasarana dengan strategi:

a. Peningkatan Konektivitas Wilayah dengan arah kebijakan:

- Memperbaiki dan membangun jalan yang menghubungkan Kawasan industri, pelabuhan, dan pusat-pusat ekonomi lainnya.
- Membangun jembatan yang menghubungkan pulau-pulau di Kalimantan Selatan dan meningkatkan konektivitas antar daerah.
- Memperluas dan meningkatkan kapasitas pelabuhan untuk mendukung kegiatan logistik dan perdagangan internasional.
- Meningkatkan akses internet dan telekomunikasi di seluruh wilayah Kalimantan Selatan untuk mendukung kegiatan ekonomi dan sosial.

b. Peningkatan Layanan Infrastruktur Dasar dengan arah kebijakan sebagai berikut:

- Peningkatan cakupan Layanan Air Bersih
- Peningkatan Layanan Sanitasi Layak, dan
- Pengurangan kawasan kumuh perkotaan.

3. Perwujudan Gerbang Logistik dengan strategi

a. Optimalisasi dan Integrasi Pusat Kegiatan, dengan arah kebijakan:

- Mengembangkan pusat-pusat pertumbuhan baru berbasis wilayah
- Mendorong pengembangan konektivitas antar kawasan-kawasan sentra bahan baku dan pendukung pendukung produksi lainnya pembangunan jalan, jembatan, dan jaringan kereta api.

b. Optimalisasi Kawasan Industri dan Jalur Logistik dengan arah kebijakan sebagai berikut:

- Membangun kawasan industri yang terintegrasi dengan pelabuhan, kawasan industri yang dilengkapi dengan infrastruktur yang memadai dan terhubung dengan pelabuhan untuk memudahkan kegiatan logistik.
- Meningkatkan sistem Distribusi barang dan jasa antar kawasan seperti terminal barang, pusat distribusi yang efektif.

Berbagai macam metode dan pendekatan perencanaan dalam pembangunan diharapkan dapat memberikan dampak yang signifikan terhadap masyarakat. Capaian pembangunan harus berkontribusi terhadap indikator makro daerah sebagai salah satu indikator keberhasilan pembangunan suatu daerah. Oleh karena itu, pembangunan di Provinsi Kalimantan Selatan harus mampu menjawab berbagai permasalahan yang berkembang dan fokus terhadap sasaran prioritas. Kelima rumusan prioritas pembangunan Kalimantan Selatan kemudian diselaraskan dengan sasaran pembangunan yang kemudian dijabarkan ke dalam program prioritas untuk mencapai target indikator kinerja program daerah pada Tahun 2025 sebagaimana disajikan pada Tabel berikut:



Tabel 4.13
Program Prioritas Daerah RPJMD Tahun 2021 – 2026 dan RPJMD Tahun 2025 – 2029

No	Sasaran	Prioritas Daerah	Sub-Prioritas	RPJMD 2021-2026			RPJMD 2025-2029			Program Prioritas P-RKPD 2025	OPD
				Indikator	Tahun 2025		Indikator	Tahun 2025			
					Target	Satuan		Target	Satuan		
1	•Meningkatnya Nilai Tambah Hasil Industri, Perdagangan, Pertanian, Kehutanan, Perikanan, dan Pariwisata •Meningkatnya Partisipasi Angkatan Kerja •Meningkatnya Pendapatan Masyarakat	PD 1: Penguatan Sektor Industri, UMKM, Pertanian, dan Pariwisata Didukung Tenaga Kerja Berkualitas dan Energi Berkelanjutan	1. Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Teknologi Pertanian	LPE Sektor Pertanian dan Perikanan (%)	3,5-4,2	%	LPE Sektor Pertanian dan Perikanan (%)	4,19	%	1. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian 2. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian 3. Program Penyuluhan Pertanian 4. Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner 5. Program Perizinan Usaha Pertanian 6. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap 7. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya 8. Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan 9. Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan 10. Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat 11. Program Penanganan Kerawanan Pangan 12. Program Pengawasan Keamanan Pangan 13. Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian 14. Program Perekonomian dan Pembangunan 15. Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) 16. Program Penyelenggaraan Jalan	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, Disbunak, Dislutkan, Dinas PUPR, Biro Perekonomian
				Persentase peningkatan produktivitas tanaman pangan dan hortikultura (%)	1,42	%					
				Produktivitas tanaman perkebunan (karet) per hektar per tahun	76,5	%					
				Persentase peningkatan produksi peternakan (%)	8	%					
				Jumlah total produksi perikanan (tangkap) dari seluruh kabupaten/kota di wilayah provinsi (Ton)	221	Ton					
				Jumlah total produksi perikanan (budidaya) dari seluruh kabupaten/kota di wilayah provinsi (Ton)	187,465	Ton					
				Nilai tukar petani (%)	103,69	%					
			2. Peningkatan Rantai Pasok Untuk	LPE Sektor Industri Pengolahan (%)	4,5-5,25	%	LPE Sektor Industri Pengolahan (%)	11,68-12,46	%	17. Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Dinas Perindustrian, Dinas

No	Sasaran	Prioritas Daerah	Sub-Prioritas	RPJMD 2021-2026			RPJMD 2025-2029			Program Prioritas P-RKPD 2025	OPD
				Indikator	Tahun 2025		Indikator	Tahun 2025			
					Target	Satuan		Target	Satuan		
			Mendukung Hilirisasi Industri Berbasis Sumber Daya Alam Berkelanjutan	LPE Sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor (%)	8,2 – 9,1	%	LPE Sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor (%)	6,37	%	18.Program Pengendalian Izin Industri 19.Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional 20.Program Pengembangan Ekspor 21.Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan 22.Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan 23.Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri 24.Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal 25.Program Promosi Penanaman Modal 26.Program Pelayanan Penanaman Modal 27.Program Pengendalian dan Pelaksanaan Penanaman Modal 28.Program Pengelolaan dan Sistem Informasi Penanaman Modal 29.Program Perekonomian dan Pembangunan 30.Program Pengelolaan Hutan	Perdagangan, Dinas PMPTSP, Dinas Kehutanan, Biro Perekonomian
				Kontribusi Sektor Perdagangan Terhadap PDRB (%)	13	%					
				Peningkatan Nilai Ekspor Non Migas (%)	12	%	Persentase Ekspor Barang dan Jasa terhadap PDRB (%)	77,74	%		
				Nilai Realisasi PMA dan PMDN (Triliun Rupiah)	14,55	Triliun Rupiah	Persentase Pembentukan Modal Tetap Bruto terhadap PDRB (%)	21,43	%		
			3. Peningkatan Pariwisata, Ekonomi Kreatif, UMKM Berbasis Digital dan Berdaya Saing	LPE Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum (%)	7,8 – 8,25	%				31.Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata 32.Program Pemasaran Pariwisata 33.Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 34.Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)	Dinas Pariwisata, Dinas Koperasi dan UMKM, Dinas PMD, Dinas Kehutanan, Diskominfo, Biro Perekonomian
				Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan (%)	5	%					

No	Sasaran	Prioritas Daerah	Sub-Prioritas	RPJMD 2021-2026			RPJMD 2025-2029			Program Prioritas P-RKPD 2025	OPD			
				Indikator	Tahun 2025		Indikator	Tahun 2025						
					Target	Satuan		Target	Satuan					
				Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke provinsi (%)	10	%				35.Program Pengembangan UMKM 36.Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi 37.Program Pendidikan dan Pelatihan Koperasi 38.Program Peningkatan Kerjasama Desa 39.Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan 40.Program Perekonomian dan Pembangunan 41.Program Pengelolaan Hutan 42.Program Pengelolaan Aplikasi Informatika				
				Tingkat hunian akomodasi (%)	52	%								
				Persentase peningkatan pendapatan produk kreatif (%)	5	%								
				Pengeluaran Per Kapita (Rp/org/thn)	12.320.671	Rp/org/thn	PDRB per Kapita	68,94-69,92	Ribu Rupiah					
			4. Peningkatan Kompetensi Tenaga Kerja yang Berdaya Saing	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (%)	70,38	%				43.Program Perencanaan Tenaga Kerja 44.Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja 45.Program Penempatan Tenaga Kerja 46.Program Hubungan Industrial 47.Program Pengawasan Ketenagakerjaan 48.Program Pengelolaan Pendidikan 49.Program Pengembangan Kurikulum	Dinasakertrans, Disdikbud			
				Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	3,88	%	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	3,63–4,18	%					
				Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi (%)	21,63	%								
			5. Pengembangan Energi Baru Terbarukan (EBT)	Bauran Energi (%)	19,6	%	Porsi EBT dalam Bauran Energi (%)	15	%	50. Program Pengelolaan Energi Terbarukan	Dinas ESDM			
			2	•Meningkatnya Akses Pendidikan	PD 2: Pemantapan Kualitas Sumber Daya	1. Peningkatan Angka Rata-Rata Lama Sekolah	Angka Rata-Rata Lama Sekolah (%)	8,74	%				51.Program Pengelolaan Pendidikan 52.Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Disdikbud, DP3A KB

No	Sasaran	Prioritas Daerah	Sub-Prioritas	RPJMD 2021-2026			RPJMD 2025-2029			Program Prioritas P-RKPD 2025	OPD
				Indikator	Tahun 2025		Indikator	Tahun 2025			
					Target	Satuan		Target	Satuan		
	•Meningkatnya Kualitas Kepemudaan •Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat •Menurunnya Pernikahan Anak •Meningkatnya Prestasi dan Partisipasi Masyarakat di Bidang Olahraga •Meningkatnya Pembangunan Kebudayaan	Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing	2. Peningkatan Indeks Pembangunan Pemuda	Indeks Pembangunan Pemuda (IPP)	53.995	Indeks				53.Program Pengelolaan Pendidikan 54.Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Disdikbud, Dispora
			3. Pemerataan Akses Layanan Kesehatan	Usia Harapan Hidup (tahun)	71,99	Tahun				55.Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat 56.Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan 57.Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Dinkes, RSULIN, RSANSAL, RSJ, SAMLHI, RSGM
			4. Penurunan Prevalensi Stunting	Prevalensi Stunting (%)	14	%				58. Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat 59. Program Pengawasan Keamanan Pangan 60. Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan 61. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial 62. Program Rehabilitasi Sosial 63. Program Pemberdayaan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan 64. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah 65. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum 66. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat 67. Program Ketahanan Rakyat Anak (PHA) 69. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, Disbunak, Dislutkan, Dinsos, Dinas LH, Dinas PUPR, Dinas PMD, Biro Kesra, DP3A KB, Dinkes

No	Sasaran	Prioritas Daerah	Sub-Prioritas	RPJMD 2021-2026			RPJMD 2025-2029			Program Prioritas P-RKPD 2025	OPD
				Indikator	Tahun 2025		Indikator	Tahun 2025			
					Target	Satuan		Target	Satuan		
										70. Program Peningkatan Kapasitas SDM Kesehatan 71. Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman 72. Program Pengendalian Penduduk	
			5. Penurunan Angka Pernikahan Anak	Proporsi perempuan umur 20-24 tahun yang menikah sebelum usia 19 tahun	11,29	%				73. Program Peningkatan Kualitas Keluarga 74. Program Pemenuhan Hak Anak (PHA) 75. Program Perlindungan Perempuan 76. Program Perlindungan Khusus Anak	DP3A KB
			6. Peningkatan Prestasi Olahraga	Persentase masyarakat usia 7-60 tahun yang berolahraga	41	%	Persentase atlet yang masuk pelatnas	46,67	%	77. Program Pengembangan Kepemudaan	Dispora
						Persentase tenaga keolahragaan yang bersertifikat nasional/internasional	10,76	%			
						Persentase partisipasi masyarakat usia 10-60 tahun yang berolahraga	0,417	%			
				Jumlah Medali Emas	35	Buah	Persentase Pemuda yang Berolahraga	30,1	%		
			7. Pengembangan Budaya Daerah	Indeks Pembangunan Kebudayaan	64,74	Indeks				78. Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya 79. Program Pengembangan Kebudayaan 80. Program Pengembangan Kesenian Tradisional 81. Program Pembinaan Sejarah 82. Program Pengelolaan Permuseuman 83. Program Pembinaan Perpustakaan 84. Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno 85. Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	Disdikbud, Dispersip, Dinsos

No	Sasaran	Prioritas Daerah	Sub-Prioritas	RPJMD 2021-2026			RPJMD 2025-2029			Program Prioritas P-RKPD 2025	OPD
				Indikator	Tahun 2025		Indikator	Tahun 2025			
					Target	Satuan		Target	Satuan		
3	•Meningkatnya Akses Pelayanan Infrastruktur Dasar •Meningkatnya Konektivitas Antar Kawasan •Terwujudnya Pembangunan Kawasan Strategis Berdasarkan Keseimbangan Keruangan	PD 3: Pemantapan Infrastruktur Dasar dan Ekonomi	1. Pemenuhan Pencapaian Infrastruktur Dasar	Indeks Infrastruktur Dasar Wilayah	87,04	Indeks	Indeks Infrastruktur Dasar Wilayah	0,46	poin	1. Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) 2. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum 3. Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional 4. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah 5. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase 6. Program Pengelolaan Persampahan 7. Program Pengelolaan Aplikasi Informatika 8. Program Pengembangan Perumahan 9. Program Kawasan Permukiman 10. Program Peningkatan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU) 11. Program Pengelolaan Persampahan 12. Program Ketenagalistrikan	Dinas PUPR, Dinas Perkim, Dinas Kominfo, Dinas ESDM
			2. Pembangunan Sarana dan Prasarana Menunjang Konektivitas Antar Wilayah	Rasio Konektivitas	0,65	Indeks	Indeks Konektivitas	0,63	poin	1. Program Penyelenggaraan Jalan 2. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) 3. Program Penyelenggaraan Penataan Ruang 4. Program Penataan Bangunan Gedung	Dinas PUPR, Dinas Perhubungan

No	Sasaran	Prioritas Daerah	Sub-Prioritas	RPJMD 2021-2026			RPJMD 2025-2029			Program Prioritas P-RKPD 2025	OPD
				Indikator	Tahun 2025		Indikator	Tahun 2025			
					Target	Satuan		Target	Satuan		
			3. Pengembangan Kawasan Prioritas dan Pedesaan yang Terintegrasi dengan Infrastruktur sebagai Gerbang Logistik Kalimantan	Persentase Kesesuaian Tata Ruang	85,5	%				5. Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya 6. Program Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum 7. Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan 8. Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya 9. Program Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan 10. Program Penatagunaan Tanah 11. Program Penyelenggaraan Pelayanan Pertanahan 12. Program Pengelolaan Perkeretaapian 13. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	
4	•Meningkatnya Kapabilitas Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah •Meningkatnya Akses dan Kualitas Kesetaraan Gender	PD 4: Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Fokus pada Pelayanan Publik dan Investasi	1. Penguatan Reformasi Birokrasi	Indeks Reformasi Birokrasi	75,64	Indeks				14. Program Pengembangan Sumber Daya Manusia 15. Program Penataan Organisasi 16. Program Perekonomian dan Pembangunan 17. Program Fasilitasi dan Koordinasi Hukum 18. Program Kebijakan Administrasi Pembangunan 19. Program Pemerintahan dan Otonomi Daerah	BPSDM, Biro Organisasi, Biro Perekonomian dan Pembangunan, Biro Hukum, Biro Adbang, Biro Pemerintahan, BKD, Inspektorat, Bappeda, BKPAD, Setwan, Banuh, BRIDA, RSULIN,

No	Sasaran	Prioritas Daerah	Sub-Prioritas	RPJMD 2021-2026			RPJMD 2025-2029			Program Prioritas P-RKPD 2025	OPD	
				Indikator	Tahun 2025		Indikator	Tahun 2025				
					Target	Satuan		Target	Satuan			
	•Meningkatnya Kapabilitas Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah •Meningkatnya Pelayanan Publik •Meningkatnya Kapabilitas Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah •Meningkatnya Investasi yang Berdampak ke Daerah			Opini BPK	WTP	-				20.Program Kepegawaian Daerah 21.Program Penyelenggaraan Pengawasan 22.Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi 23.Program Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah 24.Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah 25.Program Pengelolaan Keuangan Daerah 26.Program Pengelolaan Pendapatan Daerah 27.Program Pengelolaan Barang Milik Daerah 28.Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD 29.Program Pelayanan Penghubung 30.Program Penelitian dan Pengembangan Daerah 31.Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi (BLUD) 32.Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	RSANSAL, RSJ, RSAMLHI, RSGM	
				SAKIP	A	Indeks						
				Indeks Pembangunan Gender (IPG)	89,16	Indeks				33.Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan		DP3A KB
				Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	78,21	Indeks						

No	Sasaran	Prioritas Daerah	Sub-Prioritas	RPJMD 2021-2026			RPJMD 2025-2029			Program Prioritas P-RKPD 2025	OPD
				Indikator	Tahun 2025		Indikator	Tahun 2025			
					Target	Satuan		Target	Satuan		
			3. Pengembangan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dalam Rangka Meningkatkan Pelayanan Publik	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	3,55	Indeks				34.Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik 35.Program Pengelolaan Aplikasi Informatika 36.Program Kebijakan dan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa	Dinas Kominfo, Biro PBJ
			4. Pengembangan Satu Data Kalsel	Meningkatnya Data Statistik Sektoral yang Akurat	250	Jenis				37.Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral 38.Program Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Dinas Kominfo, Bappeda
			5. Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (PDN)	Persentase Penggunaan Produk Dalam Negeri	Minimal 25%	%				39.Program Kebijakan dan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa 40.Program Perencanaan dan Pembangunan Industri 41.Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM) 42.Program Pengembangan UMKM 43.Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Biro PBJ, Dinas Perindustrian, Dinas Koperasi dan UMKM, Dinas Perdagangan
			6. Peningkatan Kualitas Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pada Dinas PMPTSP	88,75	%				44.Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Dinas PMPTSP
5	•Menurunnya Kerusakan dan Pencemaran Lingkungan •Menurunnya Emisi Gas Rumah Kaca	PD 5: Meningkatkan Pengelolaan Lingkungan Hidup untuk Mendukung Ketahanan Bencana	1. Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lahan	55,44	Indeks	Indeks Kualitas Lahan	70,37	poin	1. Program Perencanaan Lingkungan Hidup 2. Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup 3. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	Dinas LH, Dinas Kehutanan, Dislutkan, Dinas ESDM
			Indeks Kualitas Air	56,19	Indeks	Indeks Kualitas Air	70,45	poin			
			Indeks Kualitas Udara	88,97	Indeks	Indeks Kualitas Udara	70,97	poin			
			Indeks Kualitas Air Laut	71,6	Indeks	Indeks Kualitas Air Laut	75,52	poin			

No	Sasaran	Prioritas Daerah	Sub-Prioritas	RPJMD 2021-2026			RPJMD 2025-2029			Program Prioritas P-RKPD 2025	OPD
				Indikator	Tahun 2025		Indikator	Tahun 2025			
					Target	Satuan		Target	Satuan		
				Menurunnya Emisi Gas Rumah Kaca	26,6	%	Persentase Penurunan Emisi GRK	22,95	%	4. Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3) 5. Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH 6. Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat 7. Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat 8. Program Pengelolaan Persampahan 9. Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup 10. Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup 11. Program Pembinaan dan Pengawasan terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) 12. Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat 13. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat 14. Program Pengelolaan Hutan 15. Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya 16. Program Pengelolaan Hutan	
				Luas kawasan ekosistem pesisir kritis yang telah direhabilitasi (ha)	175,8	Ha					

No	Sasaran	Prioritas Daerah	Sub-Prioritas	RPJMD 2021-2026			RPJMD 2025-2029			Program Prioritas P-RKPD 2025	OPD
				Indikator	Tahun 2025		Indikator	Tahun 2025			
					Target	Satuan		Target	Satuan		
										17.Program Pengelolaan Sumber Daya Air 18.Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya 19.Program Pengembangan Perumahan	
			2. Penguatan Mitigasi dan Pemulihan Pasca Bencana	Meningkatnya Kapasitas Penanggulangan Bencana	0,63	%				20.Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) 21.Program Pengembangan Perumahan 22.Program Pengelolaan Hutan 23.Program Penanggulangan Bencana 24.Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat 25.Program Penanggulangan Bencana 26.Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	Dinas PUPR, Dinas Kehutanan, BPBD, Dinkes, UPT Dinkes, Dinsos, Dinas PMD

4.2.6 Arah Kebijakan Pembangunan Provinsi Kalimantan Selatan

Arah kebijakan pembangunan kabupaten/kota yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan dalam menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025 yang berbasis sinkronisasi perencanaan dan penganggaran, merupakan pedoman bagi pemerintah daerah kabupaten/kota se-Kalimantan Selatan. Arah kebijakan pembangunan Provinsi Kalimantan Selatan menjadi panduan pemerintah kabupaten/kota dalam menyelaraskan program dan kegiatan prioritas pembangunan provinsi dengan kabupaten/kota di Tahun 2025. Arah kebijakan pembangunan kabupaten/kota berdasarkan pada arah kebijakan pembangunan daerah Perubahan RPJMD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2021-2026 dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2015-2035.

A. Indikator Makro Kabupaten Kota

Arah kebijakan pembangunan kabupaten/kota pada dasarnya merupakan fokus kebijakan pembangunan yang memberi panduan bagi pemerintah daerah kabupaten/kota dalam upaya pencapaian sasaran prioritas Pembangunan provinsi. Dalam kerangka rencana pembangunan tahunan, arah kebijakan pembangunan difokuskan pada pencapaian target sasaran prioritas pembangunan Tahun 2025. Indikator makro pembangunan terdiri atas Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE), Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), Persentase Penduduk Miskin, Indeks Gini dan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup. Arah kebijakan pembangunan seluruh kabupaten dan kota di Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan diharapkan dapat mendukung pencapaian 6 (enam) indikator kinerja makro Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.

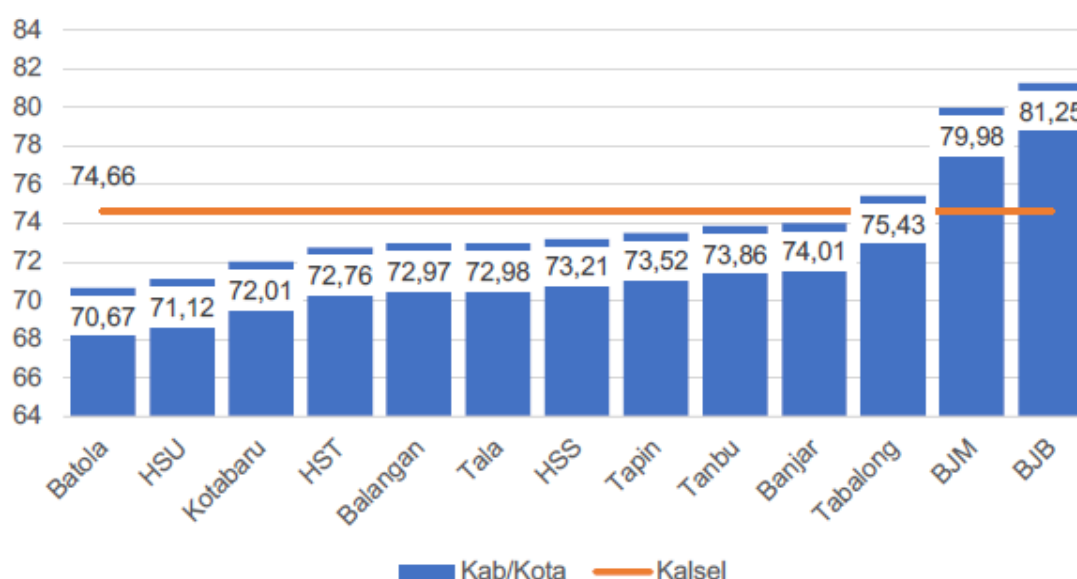
1) *Indeks Pembangunan Manusia (IPM).*

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indikator penting untuk mengukur kemajuan atau keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia di suatu daerah. Capaian IPM yang digunakan dalam Analisa ini merupakan data dari hasil *long form* sensus penduduk

tahun 2020 yang berimplikasi pada peningkatan nilai IPM di provinsi Kalimantan Selatan karena adanya penyesuaian pada salah satu komponen IPM, yaitu usia harapan hidup (UHH). Berdasarkan hasil analisis kuadran terhadap capaian IPM kabupaten/kota tahun 2023 dibandingkan capaian tahun 2022, maka capaian IPM kabupaten/kota dapat dikelompokkan dalam 4 (empat) kategori kuadran sebagai berikut:

- a) **Kuadran I.** Pada kelompok ini terdapat 7 (tujuh) kabupaten/kota dengan capaian IPM lebih rendah dan laju pertumbuhan IPM lebih tinggi dibanding capaian provinsi. Kelompok kabupaten/kota tersebut adalah Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kabupaten Barito Kuala, Kabupaten Banjar, Kabupaten Tapin, Kabupaten Balangan, Kabupaten Tanah Laut, dan Hulu Sungai Selatan.
- b) **Kuadran II.** Pada kelompok ini tidak ada kabupaten/kota dengan capaian IPM dan laju pertumbuhan IPM lebih tinggi dibanding capaian provinsi.
- c) **Kuadran III.** Pada kelompok ini terdapat 3 (tiga) kabupaten/kota dengan capaian IPM dan laju pertumbuhan IPM lebih rendah dibanding capaian provinsi, yaitu Kabupaten Tanah Bumbu, Kabupaten Kotabaru, dan Kabupaten Hulu Sungai Tengah.
- d) **Kuadran IV.** Pada kelompok ini terdapat 3 (tiga) kabupaten/kota dengan capaian IPM lebih tinggi dan laju pertumbuhan IPM lebih rendah dibanding capaian provinsi. Kelompok kabupaten/kota tersebut adalah Kabupaten Tabalong, Kota Banjarmasin, dan Kota Banjarbaru.

Pada tahun 2023, pencapaian pembangunan manusia di tingkat kabupaten/kota cukup bervariasi. Capaian IPM kabupaten/kota berkisar antara 70,67 (Kabupaten Barito Kuala) hingga 81,25 (Kota Banjarbaru). Hal ini menunjukkan masih adanya kesenjangan status capaian pembangunan manusia kabupaten/kota satu dan lainnya. Berdasarkan statusnya, terdapat 12 (dua belas) kabupaten/kota dengan status IPM “Tinggi”, dan 1 (satu) kota dengan status IPM “Sangat Tinggi”.



Gambar 4.3
Sebaran Indeks Pembangunan Manusia menurut
Kabupaten/Kota Tahun 2023

Dalam rangka menurunkan kesenjangan dan mewujudkan pemerataan pembangunan manusia pada kabupaten/kota di Kalimantan Selatan, upaya akselerasi dilaksanakan pada daerah di kuadran III (Prioritas 1) dan Kuadran I (Prioritas 2), melalui optimalisasi ke jejaring paket guna mengejar mendorong peningkatan rata-rata lama sekolah.

2) *Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)*

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator untuk melihat kemajuan suatu negara/daerah serta hasil dari pembangunan dilakukan selama periode tertentu. Pertumbuhan ekonomi juga menggambarkan tingkat kemakmuran masyarakat yang dilihat berdasarkan pendapatan per kapita atau pendapatan rata-rata dari penduduk sebuah negara/daerah. Berdasarkan hasil analisis kuadran terhadap capaian LPE dan Share Perekonomian kabupaten/kota tahun 2022, maka capaian LPE kabupaten/kota dapat dikelompokkan dalam 4 (empat) kategori kuadran sebagaimana berikut:

- a) **Kuadran I.** Pada kelompok ini terdapat 5 (lima) kabupaten/kota dengan capaian LPE lebih rendah dan Share Perekonomian lebih tinggi dibanding capaian provinsi. Kelompok kabupaten/kota tersebut

adalah Kabupaten Kotabaru, Kabupaten Tanah Bumbu, Kabupaten Balangan, Kabupaten Banjar, dan Kabupaten Tabalong.

- b) **Kuadran II.** Pada kelompok ini terdapat 1 (satu) kabupaten/kota dengan capaian LPE dan Share Perekonomian lebih tinggi dibanding capaian provinsi, yaitu Kota Banjarmasin.
- c) **Kuadran III.** Pada kelompok ini terdapat 5 (lima) kabupaten/kota dengan capaian LPE dan Share Perekonomian lebih rendah dibanding capaian provinsi. Kelompok kabupaten/kota tersebut adalah Kabupaten Barito Kuala, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kabupaten Tanah Laut, dan Kabupaten Tapin.
- d) **Kuadran IV.** Pada kelompok ini terdapat 2 (dua) kabupaten/kota dengan capaian capaian LPE lebih tinggi dan Share Perekonomian lebih rendah dibanding capaian provinsi, yaitu Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, dan Kota Banjarbaru.

Perkembangan perekonomian Kalimantan Selatan secara regional dilihat dengan menganalisis share dan pertumbuhan PDRB dari 13 kabupaten/kota dengan membagi daerah ke dalam empat kuadran berdasarkan nilai share dan pertumbuhan PDRB masing-masing. Perpotongan sumbu vertikal dan sumbu horizontal merupakan nilai share dan pertumbuhan rata-rata. Artinya kabupaten/kota yang berada di sebelah kanan sumbu vertikal (Kuadran II dan IV) merupakan kabupaten/kota yang memiliki pertumbuhan ekonomi di atas capaian Provinsi Kalimantan Selatan, sedangkan kabupaten/kota yang berada di sebelah atas sumbu horizontal adalah kabupaten/kota yang memiliki share perekonomian terhadap Provinsi di atas share rata-rata seluruh kabupaten/kota (kuadran I dan II).

Kabupaten/kota yang berada pada kuadran 1 dan 2 merupakan daerah penting bagi Provinsi Kalimantan Selatan, sharenya bagi pertumbuhan ekonomi Kalimantan Selatan cukup besar. Oleh karena itu, pertumbuhannya harus tetap dijaga karena wilayah-wilayah ini menjadi tulang punggung perekonomian Provinsi Kalimantan Selatan saat ini. Daerah-daerah yang harus menjadi prioritas untuk didorong adalah

wilayah yang berada pada kuadran 1. Pada kuadran 1 tingkat pertumbuhan dan share belum optimal namun masih memiliki potensi untuk dapat dikembangkan.

3) *Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)*

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) adalah persentase jumlah pengangguran terhadap angkatan kerja. Angka TPT yang tinggi menunjukkan tingginya angkatan kerja yang tidak terserap oleh pasar kerja. Berdasarkan hasil analisis kuadran terhadap capaian TPT kabupaten/kota tahun 2023 dibandingkan capaian tahun 2022, maka capaian kinerja TPT kabupaten/kota dapat dikelompokkan dalam 4 (empat) kategori kuadran sebagaimana berikut:

- a) **Kuadran I.** Pada kelompok ini terdapat 4 (empat) kabupaten/kota dengan capaian TPT lebih rendah dibanding capaian provinsi dan Besar Perubahan TPT diatas capaian provinsi. Kelompok kabupaten/kota tersebut adalah Kabupaten Balangan, Kabupaten Tabalong, Kabupaten Hulu Sungai Utara, dan Kabupaten Tanah Laut.
- b) **Kuadran II.** Pada kelompok ini terdapat 2 (dua) kabupaten/kota dengan capaian TPT lebih tinggi dibanding capaian provinsi dan Besar Perubahan TPT diatas capaian provinsi. Kelompok Kabupaten/kota tersebut adalah Kota Banjarbaru dan Kabupaten Kotabaru.
- c) **Kuadran III.** Pada kelompok ini terdapat 5 (lima) kabupaten/kota dengan capaian TPT lebih rendah dibanding capaian provinsi dan Besar Perubahan TPT dibawah capaian provinsi. Kelompok kabupaten/kota tersebut adalah Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kabupaten Barito Kuala, Kabupaten Banjar, dan Kabupaten Tapin.
- d) **Kuadran IV.** Pada kelompok ini terdapat 2 (dua) kabupaten/kota dengan capaian TPT lebih tinggi dibanding capaian provinsi dan Besar Perubahan TPT di bawah capaian provinsi. Kelompok kabupaten/kota tersebut adalah Kabupaten Tanah Bumbu dan Kota Banjarmasin.

Kondisi ketenagakerjaan di Kalimantan Selatan menunjukkan perbedaan di setiap kabupaten/kota. Hal ini ditunjukkan dengan Tingkat

Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) di 13 kabupaten/kota yang berada pada kisaran 64,00 persen hingga 75,34 persen. TPAK sebesar 64,00 persen dapat diartikan bahwa sekitar 64 dari 100 orang penduduk berusia kerja di suatu daerah telah aktif dalam kegiatan ekonomi atau mereka yang berusaha untuk masuk ke dalam dunia kerja.

Pada umumnya, permasalahan tingkat pengangguran terbuka di Kalimantan Selatan disebabkan oleh tingginya pertumbuhan angkatan kerja yang belum diringi dengan penciptaan lapangan kerja yang memadai. Daya serap pasar tenaga kerja belum mampu mengimbangi pertumbuhan angkatan kerja yang ada. Kualitas tenaga kerja di suatu wilayah dapat ditinjau dari sisi tingkat pendidikan penduduk yang berkesempatan untuk berada pada pasar tenaga kerja. Angkatan kerja di Provinsi Kalimantan Selatan pada tahun 2023 didominasi oleh mereka yang berpendidikan SD ke Bawah, yaitu sebesar 43,99 persen dari total Angkatan kerja. Hal ini mengindikasikan bahwa kualitas tenaga kerja di Kalimantan Selatan masih relatif rendah.

Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan terus berupaya untuk mengurangi tingkat pengangguran terbuka dengan penciptaan lapangan kerja di berbagai sektor juga dengan meningkatkan kompetensi dan daya saing sehingga angkatan kerja dapat memenuhi kualifikasi yang dibutuhkan pasar kerja. Kualitas sumber daya manusia yang unggul dan kompeten akan menjadikan Kalimantan Selatan sebagai provinsi yang berdaya saing tinggi.

4) *Persentase Penduduk Miskin*

Persentase penduduk miskin menunjukkan kelompok masyarakat dengan pengeluaran per kapita sebulannya berada dibawah garis kemiskinan. Berdasarkan hasil analisis kuadran terhadap capaian Persentase Penduduk Miskin kabupaten/kota tahun 2023 dibandingkan capaian tahun 2022, maka capaian Persentase Penduduk Miskin kabupaten/kota dapat dikelompokkan dalam 4 (empat) kategori kuadran sebagaimana berikut:

- a) **Kuadran I.** Pada kelompok ini terdapat 6 (enam) kabupaten/kota dengan capaian Persentase Penduduk Miskin lebih rendah dibanding capaian provinsi dan Besar Perubahan Persentase Penduduk Miskin di atas capaian provinsi. Kelompok kabupaten/kota tersebut adalah Kabupaten Banjar, Kabupaten Tapin, Kabupaten Tanah Laut, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Kabupaten Tanah Bumbu, dan Kota Banjarbaru.
- b) **Kuadran II.** Pada kelompok ini terdapat 5 (lima) kabupaten/kota dengan capaian Persentase Penduduk Miskin lebih tinggi dibanding capaian provinsi dan Besar Perubahan Persentase Penduduk Miskin di atas capaian provinsi. Kelompok Kabupaten/kota tersebut adalah Kabupaten Barito Kuala, Kabupaten Balangan, Kabupaten Tabalong, Kabupaten Hulu Sungai Utara, dan Kabupaten Hulu Sungai Tengah.
- c) **Kuadran III.** Pada kelompok ini tidak ada kabupaten/kota dengan capaian Persentase Penduduk Miskin lebih rendah dibanding capaian provinsi dan Besar Perubahan Persentase Penduduk Miskin di bawah capaian provinsi.
- d) **Kuadran IV.** Pada kelompok ini terdapat 2 (dua) kabupaten/kota dengan capaian Persentase Penduduk Miskin lebih tinggi dibanding capaian provinsi dan Besar Perubahan Persentase Penduduk Miskin di bawah capaian provinsi. Kelompok Kabupaten/kota tersebut adalah Kabupaten Kotabaru, dan Kota Banjarmasin.

Persentase penduduk miskin di Kalimantan Selatan menunjukkan perkembangan yang positif dengan tren konsisten menurun. Namun demikian permasalahan kemiskinan masih dialami oleh sejumlah kabupaten/kota dimana tingkat kemiskinan masih lebih tinggi dan laju penurunan kemiskinan yang lebih rendah dibanding provinsi. Permasalahan kemiskinan umumnya dialami oleh kabupaten dengan karakteristik wilayah didominasi perdesaan dan wilayah yang padat penduduknya.

Untuk itu Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan fokus mengurangi tingkat kemiskinan melalui program-program peningkatan

infrastruktur pelayanan dasar dan meningkatkan aksesibilitas masyarakat. Selain itu Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan terus berupaya mengoptimalkan pemutakhiran kualitas data yang digunakan sebagai dasar perencanaan program penanggulangan kemiskinan.

5) Indeks Gini

Indeks Gini Digunakan untuk mengukur tingkat ketimpangan pendapatan suatu wilayah secara menyeluruh. Indeks Gini berkisar antara 0 sampai 1. Apabila koefisien Gini bernilai 0 berarti pemerataan sempurna, sedangkan apabila bernilai 1 berarti ketimpangan benar-benar sempurna terjadi. Secara umum, ketimpangan pengeluaran penduduk kabupaten/kota di Kalimantan Selatan pada tahun 2023 dalam kategori rendah sampai moderat. Berdasarkan hasil analisis kuadran terhadap capaian indeks gini kabupaten/kota tahun 2023 dibandingkan capaian tahun 2022, maka capaian Persentase indeks gini kabupaten/kota dapat dikelompokkan dalam 4 (empat) kategori kuadran sebagaimana berikut:

- a) **Kuadran I.** Pada kelompok ini terdapat 6 (enam) kabupaten/kota dengan capaian indeks gini lebih rendah dibanding capaian provinsi dan Besar Perubahan indeks gini diatas capaian provinsi. Kelompok kabupaten/kota tersebut adalah Kabupaten Hulu Balangan, Kabupaten Tanah Laut, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kabupaten Tanah Bumbu, Kabupaten Tapin, dan Kabupaten Tabalong.
- b) **Kuadran II.** Pada kelompok ini terdapat 2 (dua) kabupaten/kota dengan capaian indeks gini lebih tinggi dibanding capaian provinsi dan Besar Perubahan indeks gini diatas capaian provinsi. Kelompok Kabupaten/kota tersebut adalah Kabupaten Kotabaru, dan Kota Banjarbaru.
- c) **Kuadran III.** Pada kelompok ini terdapat 3 (tiga) kabupaten/kota dengan capaian indeks gini lebih rendah dibanding capaian provinsi dan Besar Perubahan indeks gini dibawah capaian provinsi. Kelompok kabupaten/kota tersebut adalah Kabupaten Banjar, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, dan Kabupaten Barito Kuala.

d) **Kuadran IV.** Pada kelompok ini terdapat 1 (satu) kabupaten/kota dengan capaian indeks gini lebih tinggi dibanding capaian provinsi dan Besar Perubahan indeks gini di bawah capaian provinsi, yaitu Kota Banjarmasin.

6) *Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)*

IKLH (Indeks Kualitas Lingkungan Hidup) merupakan gambaran atau indikasi awal yang memberikankesimpulan cepat dari suatu kondisi lingkungan hidup pada lingkup dan periode tertentu. Berdasarkan hasil analisis kuadran terhadap capaian IPM kabupaten/kota tahun 2023 dibandingkan capaian tahun 2022, maka capaian IPM kabupaten/kota dapat dikelompokkan dalam 4 (empat) kategori kuadran sebagaimana berikut:

- a) **Kuadran I.** Pada kelompok ini terdapat 5 (lima) kabupaten/kota dengan capaian IKLH lebih rendah dan laju pertumbuhan IKLH lebih tinggi dibanding capaian provinsi. Kelompok kabupaten/kota tersebut adalah Kota Banjarmasin, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kabupaten Banjar, dan Kabupaten Tanah Bumbu.
- b) **Kuadran II.** Pada kelompok ini terdapat 2 (dua) kabupaten/kota dengan capaian IKLH dan laju pertumbuhan IKLH lebih tinggi dibanding capaian provinsi, yaitu Kabupaten Tabalong dan Kabupaten Kotabaru.
- c) **Kuadran III.** Pada kelompok ini terdapat 6 (enam) kabupaten/kota dengan capaian IKLH dan laju pertumbuhan IKLH lebih rendah dibanding capaian provinsi. Kelompok kabupaten/kota tersebut adalah Kota Banjarbaru, Kabupaten Barito Kuala, Kabupaten Tapin, Kabupaten Balangan, Kabupaten Tanah Laut, dan Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
- d) **Kuadran IV.** Pada kelompok ini tidak ada kabupaten/kota dengan capaian IKLH lebih tinggi dan laju pertumbuhan IKLH lebih rendah dibanding capaian provinsi.

7) Indeks Daya Saing Daerah (IDSD)

Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) merupakan instrumen pengukuran daya saing pada daerah yang dilakukan oleh Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN). Pengukuran IDSD Ini bertujuan untuk memperoleh sebuah ukuran daya saing daerah yang komprehensif yang dapat merefleksikan tingkat produktivitas daerah.

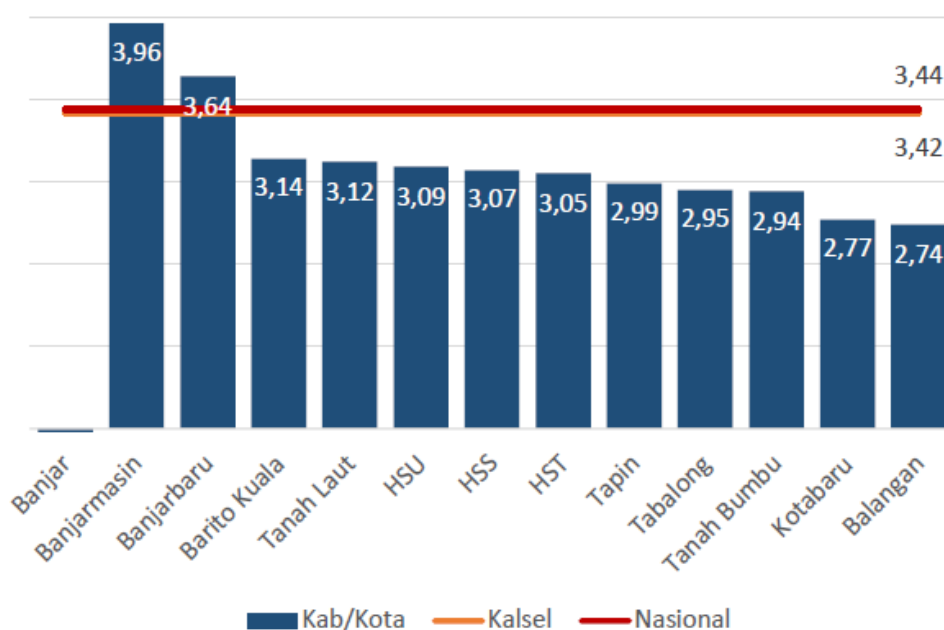
Kerangka pengukuran mengacu kepada *global competitiveness index* (GCI) 2019 (WEF, 2019), yang terdiri dari empat komponen pembentuk daya saing, yaitu lingkungan pendukung, sumber daya manusia, pasar, dan ekosistem inovasi. Keempat komponen tersebut ditopang oleh 12 pilar daya saing. Setiap pilar daya saing diukur dengan menggunakan indikator pembentuk daya saing. Komponen Lingkungan Pendukung meliputi empat pilar, yaitu institusi yang mengukur seberapa jauh iklim sosial, politik, hukum dan keamanan; infrastruktur yang dapat mendukung aktivitas perekonomian; adopsi TIK yang merupakan faktor determinan bagi kemajuan Industri 4.0; dan stabilitas ekonomi makro yang meliputi penciptaan nilai tambah, akumulasi kapital, tingkat konsumsi, kinerja sektoral, perekonomian, serta tingkat biaya hidup.

Komponen Sumber Daya Manusia meliputi dua pilar, yaitu kesehatan yang merepresentasikan kualitas hidup manusia yang diukur dari angka harapan hidup dan keterampilan yang erat keterkaitannya dengan penciptaan tenaga kerja produktif yang sesuai dengan kebutuhan dunia usaha. Komponen Pasar meliputi empat pilar, yaitu pasar produk yang mendorong efisiensi di dalam sistem produksi; pasar tenaga kerja yang mampu menekan pengangguran dengan merangsang terciptanya kesempatan kerja; sistem keuangan yang merefleksikan kemampuan sistem finansial perbankan dan nonperbankan di daerah untuk memediasi aktivitas perekonomian; dan ukuran pasar yang menguatkan struktur industri dalam menghasilkan nilai tambah akibat berkembangnya iptek.

Komponen Ekosistem Inovasi meliputi dua pilar, yaitu dinamisme bisnis yang menggambarkan kemudahan entitas bisnis memulai usaha

untuk penciptaan dan perluasan lapangan kerja serta kapabilitas inovasi yang mengukur kemampuan daerah dalam penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi serta penerapannya dalam aktivitas ekonomi bernilai tambah.

Indeks Daya Saing Daerah diarahkan menjadi data dasar yang dapat digunakan dalam menyusun kebijakan peningkatan daya saing daerah. Tabel berikut merupakan kondisi daya saing daerah berdasarkan kabupaten/kota di Kalimantan Selatan.



Gambar 4.4
Indeks Daya Saing Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2024

Berdasarkan data Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) di atas ditunjukkan bahwa Kota Banjarmasin memiliki daya saing daerah tertinggi dari kabupaten lainnya dan lebih baik dari rata-rata Provinsi dan Nasional. Kondisi ini merefleksikan bahwa Pembangunan di perkotaan masih lebih unggul dari daerah kabupaten, sehingga perlu percepatan pembangunan di kabupaten untuk mewujudkan kesetaraan antara wilayah perkotaan dan pedesaan.

B. Kebijakan Pembangunan Kewilayahan

Posisi Kalimantan Selatan yang dilalui oleh jalur ALKI II, serta ditetapkan sebagai Kalimantan Timur sebagai Ibu Kota Nusantara (IKN) dan

Kalimantan Tengah sebagai kawasan *food estate*, memberikan peluang dan potensi bagi Kalimantan Selatan untuk ikut menjadi wilayah maju yang berkelanjutan. Berdasarkan arahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025 – 2029, Kalimantan Selatan ditetapkan sebagai Gerbang Logistik Kalimantan. Oleh karena itu, Kalimantan Selatan perlu mempersiapkan diri dalam menyambut hal tersebut, baik kesiapan SDM nya maupun infrastrukturnya.

Pada tahun 2023, Bappeda telah melakukan penyusunan dokumen Rancangan Kewilayahan Provinsi Kalimantan Selatan, dimana di dalamnya memuat pembagian Kalimantan Selatan menjadi 3 (tiga) klaster wilayah untuk lebih memudahkan dalam perencanaan pembangunan dan untuk mengurangi kesenjangan antar wilayah di Kalimantan Selatan. Adapun pembagian klasterklaster tersebut, antara lain klaster A Banjarbakula (Kota Banjarmasin, Kota Banjarbaru, Kabupaten Barito Kuala, Kabupaten Banjar, dan Kabupaten Tanah Laut), klaster B Banua Anam (Kabupaten Tabalong, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Kabupaten Balangan, dan Kabupaten Tapin), dan klaster C Saijaan-Bersujud (Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Kotabaru).

Meskipun terbatas, lahan di wilayah Kalimantan Selatan memiliki potensi untuk dikembangkan sebagai areal pertanian, khususnya tanaman pangan dan perkebunan. Wilayah Kabupaten Tanah Laut, Kotabaru, Banjar, Barito Kuala, dan Tabalong merupakan wilayah yang memiliki potensi besar bagi pengembangan pertanian tanaman pangan. Ke depannya Provinsi Kalimantan Selatan dalam pengembangan sektor pertanian difokuskan kepada lembaga pengelola, peningkatan kualitas SDM, progres pengembangan kawasan, perkuatan teknologi, regulasi dan perijinan, serta konektivitas antar wilayah.

Di sektor industri, Kalimantan Selatan memiliki potensi industri baik yang berbasis sumber daya alam, khususnya industri pengolahan hasil hutan dan hasil pertanian, maupun yang memanfaatkan dan mengandalkan teknologi seperti industri mesin, serta industri kimia dasar

yang potensial untuk dikembangkan. Pembangunan industri diarahkan terutama untuk mengembangkan industri yang berorientasi ekspor dengan memanfaatkan potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia. Sehubungan dengan itu, pembangunan industri dikembangkan secara bertahap melalui peningkatan keterkaitan industri dengan pertanian dan jasa, sehingga meningkatkan nilai tambah dan memperkuat struktur ekonomi daerah.

Pariwisata juga merupakan sektor yang potensial untuk dikembangkan. Kalimantan Selatan memiliki potensi wisata yang beragam, baik wisata alam maupun budaya yang dapat dikembangkan secara lebih optimal dengan mempertimbangkan kekayaan alam provinsi yang terdiri atas sungai, hutan, serta latar belakang sejarah dan keanekaragaman seni dan budaya. Pengembangan sektor pariwisata akan mendorong industri ekonomi kreatif dan menarik sektorsektor lainnya seperti transportasi, akomodasi, dan rumah makan. Pengembangan sektor ini juga dapat mengungkit ekonomi rakyat.

Pembangunan infrastruktur merupakan bagian integral dari pembangunan daerah serta mendorong pertumbuhan ekonomi. Arah pengembangan infrastruktur Kalimantan Selatan difokuskan kepada optimalisasi kapasitas dan kualitas infrastruktur yang saat ini sudah tersedia, pengembangan infrastruktur baru dan perluasan layanan infrastruktur sesuai strategi peningkatan potensi ekonomi di kabupaten/kota, pengintegrasian pembangunan infrastruktur nasional, provinsi dan Kabupaten/Kota di Kalimantan Selatan, percepatan pembangunan infrastruktur strategis yang diharapkan sebagai primer over seperti bandar udara, pelabuhan, jalan strategis nasional, jalan kolektif primer dan jalan arteri primer dan pengembangan sektor strategis pendukung pembangunan infrastruktur, antara lain pengembangan industri baja dan industri semen.

Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas sangat penting untuk menyelaraskan pembangunan di daerah. Kualitas sumber daya manusia dapat dilihat dari indeks kualitas hidup atau Indeks

Pembangunan Manusia (IPM). Rendahnya IPM akan berakibat pada rendahnya produktivitas kerja dari penduduk. Produktivitas yang rendah berakibat pada rendahnya perolehan pendapatan. Rendahnya pendapatan menyebabkan tingginya jumlah penduduk miskin, sehingga rendahnya kualitas sumber daya manusia merupakan salah satu faktor penyebab terjadinya penduduk miskin. Arah pengembangan SDM Kalimantan Selatan difokuskan kepada SDM yang mendukung dalam sektor prioritas dalam pengembangan ekonomi daerah Kalimantan Selatan yaitu industri, pertanian dan pangan, pariwisata, dan digital.

1) Arah Kebijakan Kewilayahan

Dalam mendukung pertumbuhan ekonomi Kalimantan Selatan, pemerintah daerah mengembangkan dan memperkuat infrastruktur ekonomi pada enam Kawasan pusat pertumbuhan ekonomi provinsi. Keenam kawasan tersebut terbagi menjadi:

Tabel 4.14
Kebijakan Pembangunan Kewilayahan Provinsi Kalimantan Selatan

No	Tema Kawasan	Kab/Kota (Lokasi)	Arah Kebijakan Kewilayahan	Arah Pengembangan
KAWASAN STRATEGIS NASIONAL				
1	Kawasan Perkotaan Metropolitan Banjarbakula	Kota Banjarmasin, Kota Banjarbaru, Kabupaten Banjar, Kabupaten Barito, Kabupaten Barito Kuala, Kabupaten Tanah Laut		Mekengkapi fasilitas pendukung Mengembangkan infrastruktur strategis Mengembangkan perdagangan, jasa, industri, dan pariwisata investasi dan modal
2	Batulicin	Kabupaten Tanah Bumbu		
KAWASAN STRATEGIS PROVINSI DARI SUDUT KEPENTINGAN PERTUMBUHAN EKONOMI				
3	Kawasan Ekonomi Setangga	Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Kotabaru		Pengembangan di sekitar kawasan industri
4	Kawasan Rawa Batang Banyu	Kab. Barito Kuala Kab. Banjar Kab Hulu Sungai Selatan Kab. Hulu Sungai Tengah Kab. Hulu Sungai Utara Kab. Tabalong Kab. Tapin	Peningkatan produksi pangan daerah dimana	Pengembangan pertanian dan agroindustri yang berdaya saing, produktif dan berkawasan lingkungan
5	Kawasan Sekitar Industri Batulicin	Kabupaten Tanah Bumbu		Kawasan yang berbasis pada pengembangan industri, perdagangan, dan jasa pada komoditas besi baja, batubara, kelapa sawit, karet, kepelabuhanan, maritim.

No	Tema Kawasan	Kab/Kota (Lokasi)	Arah Kebijakan Kewilayahan	Arah Pengembangan
6	Kawasan Sekitar Industri Kotabaru	Kabupaten Kotabaru		Pengembangan industri, Perdagangan, jasa pada komoditas besi baja, batubara, semen, kelapa sawit, industri pengolahan, kepelabuhanan, maritim yang meliputi Kawasan Industri Tarjun, Pelabuhan Mekar Putih, Pelabuhan Tanjung Pemancingan Pengembangan Kawasan Kota Terpadu Mandiri Sengayam
7	Kawasan Industri Jorong dan sekitarnya	Kabupaten Tanah Laut		Pengembangan industri, perdagangan, jasa dengan komoditas besi baja, batubara, kelapa sawit, industri pengolahan, kepelabuhanan, maritim dan energi
8	Kawasan Peruntukan Industri Seradang	Kabupaten Tabalong		Kawasan Industri Unggul dari Sektor Primer yang Berbasis Eco-Spasial dan Berintegritas
9	Kawasan Sentra Energi dan Pangan	Kabupaten Kotabaru		Pengembangan sentra energi dan pengembangan sentra pangan yang terintegrasi dengan industri pengolahannya
KAWASAN STRATEGIS PROVINSI DARI SUDUT KEPENTINGAN FUNGSI DAN DAYA DUKUNG LINGKUNGAN HIDUP				
10	Kawasan Pegunungan Meratus	Kab. Tanah Laut Kab. Banjar Kab Hulu Sungai Selatan Kab. Hulu Sungai Tengah Kab. Kotabaru Kab. Tabalong Kab. Balangan Kab. Tapin Kab. Tanah Bumbu		Pusat keanekaragaman hayati melalui perlindungan dan pengelolaan lingkungan geologi dan antropologi serta konservasi sumber daya alam yang berkelanjutan
11	Kawasan Pesisir dan Pulau-pulau kecil	Kab. Tanah Laut Kab. Banjar Kab. Kotabaru Kab. Tabalong Kab. Barito Kuala Kab. Tanah Bumbu Perairan Laut Jawa, dan Perairan Selat Makassar		Pengelolaan sumber daya WP3K Kalimantan Selatan yang maju, sejahtera dan berkelanjutan

Dengan memperhatikan distribusi penduduk pada masing-masing wilayah kabupaten/kota, sistem pusat permukiman Provinsi Kalimantan Selatan terbagi atas Pusat Kegiatan Nasional (PKN), Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) dan Pusat Kegiatan Lingkungan (PKL). Pembagian sistem pusat permukiman tersebut antara lain:

1. Pusat Kegiatan Nasional (PKN) terdapat di Kawasan Perkotaan Banjarmasin – Banjarbaru – Banjar – Barito Kuala – Tanah Laut yang memiliki fungsi sebagai pusat kegiatan ekonomi berskala internasional melalui perdagangan dan jasa, industri, industri kelautan, pertanian dan pengembangan pusat pelayanan yang terkoneksi antar Kawasan.
2. Pusat Kegiatan Wilayah (PKW), meliputi:

- a) Marabahan di Kabupaten Barito Kuala yang memiliki fungsi sebagai pusat pertanian dan industri pengolahan, pusat pemerintahan kabupaten, Pusat pengembangan perkantoran kabupaten, pusat pengembangan transportasi, pusat kesehatan, pusat pengembangan perdagangan, perbankan dan jasa regional, pusat pendidikan, pusat permukiman perkotaan, dan pusat pariwisata sungai;
 - b) Martapura di Kabupaten Banjar yang memiliki fungsi sebagai pusat pariwisata dan kegiatan keagamaan skala regional dan nasional, serta pusat perdagangan dan jasa skala internasional;
 - c) Amuntai di Kabupaten Hulu Sungai Utara yang memiliki fungsi sebagai pusat kegiatan jasa dan komersial, industri pengolahan, wisata budaya, pertanian dan perikanan; dan
 - d) Kotabaru di Kabupaten Kotabaru yang memiliki fungsi sebagai pusat ekowisata dan jasa lingkungan.
3. Pusat Kegiatan Lokal (PKL) yang ditetapkan oleh pemerintah daerah provinsi. PKL merupakan kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kabupaten atau beberapa kecamatan.
- a) Tanjung di Kabupaten Tabalong yang memiliki fungsi sebagai pusat pelayanan publik dan perdagangan jasa;
 - b) Simpang Empat - Batulicin di Kabupaten Tanah Bumbu yang memiliki fungsi sebagai pusat pelayanan transportasi regional dan internasional, pusat kawasan industri, pusat pemerintahan dan pelayanan publik skala regional, kawasan permukiman perkotaan, dan kawasan perdagangan dan jasa;
 - c) Kandungan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang memiliki fungsi sebagai kawasan jasa pemerintahan umum skala regional, jasa pariwisata skala regional, dan permukiman;
 - d) Rantau di Kabupaten Tapin yang memiliki fungsi sebagai pusat pertanian dan pariwisata;
 - e) Barabai di Kabupaten Hulu Sungai Tengah yang memiliki fungsi sebagai pusat pertanian, perikanan, perdagangan dan jasa;

- f) Paringin di Kabupaten Balangan yang memiliki fungsi sebagai pusat ekowisata, wisata budaya skala regional;
- g) Tabukan di Kabupaten Barito Kuala yang memiliki fungsi sebagai pusat perikanan, pusat pemerintahan kecamatan, pusat pengembangan industri skala besar, pusat pengumpul komoditas hasil pertanian dan perkebunan, pusat pengembangan perumahan dan fasilitas penunjangnya, pusat pelayanan lintas kecamatan, pusat kesehatan, pusat pendidikan, dan pusat pengembangan pelabuhan sungai;
- h) Simpang Empat di Kabupaten Banjar yang memiliki fungsi sebagai pusat pemerintahan, permukiman, jasa pariwisata, pertanian dan perikanan;
- i) Kelua di Kabupaten Tabalong yang memiliki fungsi sebagai pusat perdagangan jasa;
- j) Jaro di Kabupaten Tabalong yang memiliki fungsi sebagai pusat pertanian, perikanan dan pariwisata;
- k) Mantewe di Kabupaten Tanah Bumbu yang memiliki fungsi sebagai pusat pelayanan publik, pusat layanan koleksi serta distribusi barang dan jasa; dan
- l) Sengayam di Kabupaten Kotabaru yang memiliki fungsi sebagai pusat permukiman, pertanian, dan pusat transportasi.

Kawasan Metropolitan Banjarmasin (Banjarbakula) berperan sebagai pusat di barat daya Kalimantan Selatan, yang fungsinya lebih menjadi gerbang dari aktifitas nasional. Lalu, akan ada jaringan jalan yang ditingkatkan dan juga dibangun sebagai koneksi antar pusat baru antara Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah dan Kalimantan Timur. Masing-masing jalur ini dibentuk agar ada konektivitas untuk distribusi barang logistik bagi IKN dan *Food Estate*. Dengan koneksi antara Banjarbakula, Kandangan dan Batulicin, maka jaringan jalannya akan berbentuk seperti kupu-kupu yang akan menyatukan semua wilayah di Kalimantan Selatan.

Kandangan yang berdekatan dengan Tanjung, Amuntai, Rantau dan Marahaban fungsinya akan ditingkatkan lagi menjadi titik pusat bergerak jaringan jalan yang nantinya akan terkoneksi menuju *Food Estate* dan IKN. Wilayah ini nantinya akan menjadi pusat baru yang lebih berkonsep pada alam karena posisinya yang berada pada jalur sungai dan rawa sehingga tidak memungkinkan untuk direncanakan sebagai kawasan yang padat bangunan dan penduduk dan berperan sebagai pusat di utara Kalimantan Selatan bergabung dengan Tanjung.

Pelabuhan di Kotabaru akan difungsikan untuk menangkap arus barang masuk maupun keluar Kalsel berupa barang-barang dari pasar global sedangkan yang di Banjarmasin hanya akan difokuskan sebagai tempat menangkap arus barang nasional. Lalu dengan adanya KEK Mekar Putih, maka wilayah ini berpotensi untuk menjadi kawasan baru yang difungsikan menjadi *maritime center* dan gerbang masuk menuju Pulau Kalimantan maupun yang ingin ke IKN. Mekar Putih, Kotabaru dan Batulicin akan dikonsepsikan menjadi Kota Sedang karena dari sistem perkotaan dan jumlah penduduknya sudah memenuhi kriteria. Kedua wilayah ini jika di gabungkan akan lebih fokus pada fungsinya sebagai pusat aktifitas ekonomi dan logistik karena posisi geografisnya yang berada di dekat ALKI II yang berbasis kemaritiman. Selain itu kawasan ini juga bisa menangkap arus barang baik masuk-keluar dari jalur internasional. Maka perannya nanti akan berbeda dengan Banjarmasin (nasional) sedangkan Kotabaru (internasional). Tapi dikarenakan posisi geografisnya yang memiliki cagar alam yaitu Terumbu Karang dan bukan berada di laut dalam, maka harus ada cara agar kapal-kapal besar tidak harus berlabuh di Kotabaru maupun Batulicin. Agar distribusi barang dari Kotabaru ini masuk dan terkoneksi dengan jaringan jalan di Kalimantan Selatan, memungkinkan dibangun jembatan untuk membuat aktifitas di kedua wilayah ini menjadi satu kesatuan.

Pengembangan wilayah dengan saling melengkapi kebutuhan antar wilayah dari keunggulan potensi masing-masing wilayah, hasil industri pada Batulicin dan Kotabaru tidak hanya diarahkan pada Ibu Kota

Nusantara tetapi juga untuk memenuhi kebutuhan di wilayah Banjarbakula dan Banua Anam. Begitupun pada Zona Banjarbakula yang merupakan Kota Pusat Perdagangan dan Jasa diharapkan menjadi pasar bagi industri kecil dan menengah dari Wilayah Banua Anam. Wilayah Banua Anam merupakan penopang pangan untuk wilayah Banjarbakula dan Wilayah Industri Batulicin/Kotabaru.

Peningkatan jumlah kendaraan yang tentu berdampak dapat mengurangi waktu tempuh dikarenakan perbandingan volume dengan kapasitas meningkat terutama jaringan jalan di Kawasan Strategis Metropolitan Banjarbakula dan lintas penghubung Banjarmasin – Martapura – Rantau – Kandangan – Barabai - Amuntai. Berdasarkan hasil kajian pengembangan jaringan jalan provinsi Kalimantan Selatan, di estimasikan perbandingan volume dengan kapasitas jaringan jalan nasional A.Yani akan meningkat, sehingga arus lalu lintas Jaringan Jalan Lintas Barat menjadi meningkat, dengan kehadiran Ibu Kota Nusantara akan memicu peningkatan perbandingan volume dengan kapasitas di zona Kawasan Industri dan Pesisir.

Hasil analisa proyeksi pengembangan ruas jalan nasional dan provinsi di Provinsi Kalimantan Selatan (2024: *Do-Something*). Pengembangan jaringan jalan baru dan pelebaran jalan serta perubahan status jalan di tahun 2024 akan berdampak menurunkan perbandingan volume dengan kapasitas $VCR = 17,92\%$ (tidak melakukan apapun) menjadi $VCR = 5,66\%$ (melakukan sesuai), mengalami penurunan sangat signifikan (-68,42%). Pengembangan jaringan jalan baru dan pelebaran jalan serta perubahan status yang di kerjakan sampai tahun 2029 akan berdampak menurunkan $VCR = 22,64\%$ (*do-nothing*) menjadi $VCR = 3,77\%$ (*do-something*), mengalami penurunan sangat signifikan (-83,34%).

Arah Kebijakan Banua Anam

Wilayah Banua Anam merupakan wilayah ketahanan pangan dan kerajinan dengan potensi perkebunan terutama sayuran dan buah-buahan yang dapat menopang wilayah Banjarbakula dan ibukota nusantara, potensi perikanan air tawar yang besar yang perlu

dikembangkan kedalam ikan kemasan dan albumin ikan gabus agar mampu bersaing masuk ke pasar Ibu Kota Nusantara dan masuk ke pasar Internasional. Industri Perkebunan Karet yang dihasilkan wilayah ini diharapkan mampu menyediakan kebutuhan di zona industri Batulicin dan Kotabaru, untuk itu perlu adanya jalur konektivitas yang menghubungkan wilayah gerbang ibukota seperti Kabupaten Tabalong dan Kabupaten Balanga memiliki jalur distribusi ke wilayah Industri dan Pesisir.

2) Arah Kebijakan Provinsi untuk Kabupaten Tabalong

Potensi Ekonomi:

1) Pengembangan kawasan peruntukan industri seradang; 2) kawasan peyangga IKN; 3) jalur logistik antara kaltim/IKN ke Kalimantan Selatan; serta 4) madu kelulut, kopi pasak bumi, dan kulinernya seperti paliat. Lain-lain produk unggulan termasuk anyaman bambu, anyaman purun, dan beragam olahan kreasi seni tangan dari bahan organik seperti kayu limbah, eceng gondok, dan olahan kayu. Komoditas perkebunan dan pertanian yang penting di Tabalong yaitu karet, kakao, dan kelapa sawit. Tenaga Kerja:

1) Peningkatan produktivitas dan kualitas tenaga kerja, kesempatan kerja, dan *link and match* dunia usaha dan Pendidikan; 2) peningkatan spesifikasi tenaga kerja sesuai kebutuhan industri yang ada; dan 3) pelatihan tenaga kerja, UMKM, dan IKM.

Pemerataan:

Kesempatan kerja pada sektor unggulan daerah dan peningkatan pendidikan untuk masyarakat menengah kebawah/miskin.

Arah kebijakan perencanaan pembangunan provinsi pada Kabupaten Tabalong pada tahun 2024, antara lain:

1. Aspek Pembangunan Sumber Daya Manusia

- a) Bidang pendidikan dan kebudayaan melalui peningkatan kualitas pembelajaran pendidikan vokasi (SMK dan politeknik).
- b) Peningkatan kesesuaian (*link and match*) antara jurusan pada Sekolah Menengah Kejuruan dengan dunia usaha.

2. Aspek Pembangunan Ekonomi

- a) Pada Bidang perindustrian dengan mengembangkan kawasan industri Tabalong.
- b) Pengembangan kawasan budidaya perkebunan, pertanian, tanaman pangan dan hortikultura.
- c) Pengembangan kawasan budidaya perikanan dan peternakan.

3. Aspek Pengembangan Infrastruktur

- a) Bidang perhubungan dengan dukungan pembangunan jalur kereta api dan dukungan pengembangan bandara Warukin.
- b) Bidang Pekerjaan Umum dengan pembangunan jalan lingkar barat, jalan akses Kalsel - Kalteng dan jalur distribusi pusat perikanan ke IKN.
- c) Pengembangan industri pengolahan hasil tambangan dan perkebunan.

4.2.7 Prioritas dan Sasaran RKPD Perubahan Kabupaten Tabalong

1. Prioritas Pembangunan Kabupaten Tabalong Tahun 2025

Kebijakan yang mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkualitas di tahun 2025 terus didorong oleh pemerintah Kabupaten Tabalong ditengah pertumbuhan perekonomian yang terus menanjak, dimana pada tahun 2023 Kabupaten Tabalong menjadi salah satu Kabupaten dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi ke-3 diwilayah Kalimantan Selatan, walaupun pertumbuhan ini lebih rendah dari tahun 2022. Kendati demikian, situasi isu keamanan global bisa berpengaruh terhadap rantai pasok (*supply chain*) beberapa komoditas yang berdampak pada naiknya harga komoditas tersebut sehingga mempengaruhi keseimbangan pasokan ditingkat internasional yang secara sistemik akan mengganggu pasokan di dalam negeri yang tentu juga akan berpengaruh sampai ke daerah.

Isu pelemahan perekonomian global terus menghantui aktivitas pelaku ekonomi di tahun 2025. Di tengah prospek penurunan ekonomi global, perbaikan ekonomi terus berlanjut. Perbaikan ekonomi sepanjang

2025 ini ditopang oleh peningkatan pertumbuhan ekonomi di seluruh wilayah Indonesia, termasuk Kabupaten Tabalong.

Bagi Tabalong, sebagai salah satu daerah penghasil tambang batu bara, lonjakan permintaan dan harga sumber energi, ekspor komoditas batu bara Kabupaten Tabalong terus meningkat. Kinerja ekspor menjadi salah satu aktivitas yang mendongkrak perekonomian Tabalong. Terlebih lagi dengan harga batu bara yang juga mengalami kenaikan.

Pertumbuhan ekonomi diharapkan semakin berkualitas melalui pertumbuhan sektor-sektor perekonomian yang produktif dengan memperhatikan keberlanjutan pertumbuhan ekonomi yang makin kuat dan stabil dalam jangka panjang sehingga diharapkan mampu meningkatkan kinerja perekonomian yang dapat menyerap tenaga kerja yang terampil dan berdaya saing.

Akselerasi kinerja ekonomi daerah dilakukan secara simultan antar sektor terutama dalam meningkatkan kualitas SDM yang dimulai dari pemenuhan pelayanan dasar (pendidikan, kesehatan, dan lingkungan yang sehat), harus sejalan dengan pemulihan daya beli masyarakat dan dunia usaha, sampai dengan layanan publik yang baik.

Keterpaduan pembangunan antar pusat dan daerah merupakan kunci utama bagi keberlanjutan pemulihan ekonomi melalui transformasi ekonomi. Dengan mengacu dan mempertimbangkan sasaran dalam rancangan akhir RPJMD Kabupaten Tabalong Tahun 2025-2029, hasil evaluasi kinerja pembangunan tahun 2024, berbagai isu strategis, tema RKP Tahun 2025 dan RKPD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2025, tema pembangunan Kabupaten Tahun 2025 disusun sebagai respon kebijakan untuk memperkuat daya saing daerah dalam rangka peningkatan pertumbuhan ekonomi berkualitas yang mampu mewujudkan pemerataan pendapatan, pengentasan kemiskinan dan membuka kesempatan kerja yang luas sehingga pada gilirannya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang bergerak secara aktif menuju kemajuan yang berkelanjutan di Kabupaten Tabalong sehingga tema pembangunan RKPD Kabupaten Tabalong Tahun 2025 yang

dirumuskan adalah “**Penguatan Daya Saing Daerah Menuju Tabalong yang Sejahtera, Dinamis, Maju dan Berkelanjutan**”.

Daya saing daerah merupakan keadaan yang menggambarkan kondisi dan kemampuan suatu daerah dalam mengoptimalkan seluruh potensi yang dimilikinya melalui peningkatan produktivitas, nilai tambah dan persaingan untuk mewujudkan kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan. Ini mencakup berbagai aspek, mulai dari aspek Penguat (*Enabling Environment*), aspek Sumber Daya Manusia (*Human Capital*), aspek Pasar (*Market*), hingga aspek Ekosistem Inovasi.

Komponen Lingkungan Pendukung meliputi empat pilar, yaitu **institusi** yang mengukur seberapa jauh iklim sosial, politik, hukum dan aspek keamanan mempengaruhi secara positif aktivitas perekonomian daerah; **infrastruktur** yang dapat mendukung aktivitas perekonomian daerah yang bernilai tambah; **adopsi TIK** yang merupakan faktor determinan kemajuan Industri 4.0; dan **stabilitas ekonomi makro** yang meliputi penciptaan nilai tambah, akumulasi kapital, tingkat konsumsi, kinerja perekonomian, serta tingkat biaya hidup.

Komponen Sumber Daya Manusia meliputi dua pilar, yaitu **Kesehatan** yang merepresentasikan kualitas hidup manusia yang diukur dari angka harapan hidup dan **keterampilan** yang erat keterkaitannya dengan penciptaan tenaga kerja produktif yang sesuai dengan kebutuhan dunia usaha.

Komponen Pasar meliputi empat pilar, yaitu **pasar produk** yang mendorong efisiensi di dalam sistem produksi; **pasar tenaga kerja** yang mampu menekan angka pengangguran dengan merangsang terciptanya kesempatan kerja; **sistem keuangan** yang merefleksikan kemampuan sistem finansial perbankan dan nonperbankan di daerah untuk memediasi aktivitas perekonomian; dan **ukuran pasar** yang menguatkan struktur industri dalam menghasilkan nilai tambah hasil dari perkembangan iptek.

Komponen Ekosistem Inovasi meliputi dua pilar, yaitu **dinamisme bisnis** yang menggambarkan kemudahan entitas bisnis memulai usaha

untuk penciptaan dan perluasan lapangan kerja, serta **kapabilitas inovasi** yang mengukur kemampuan daerah dalam penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi serta penerapannya dalam aktivitas ekonomi bernilai tambah.

Adapun fokus pembangunan tahun 2025 adalah:

1. Peningkatan kesempatan kerja sebagai salah satu untuk penurunan kemiskinan dan pengangguran.
2. Optimalisasi pendidikan untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia.
3. Peningkatan pelayanan kesehatan dalam rangka penurunan stunting.
4. Penguatan struktur ekonomi produktif sektor-sektor unggulan untuk mengurangi tingkat kesenjangan (*gini ratio*).
5. Meningkatkan infrastruktur dasar dan konektivitas wilayah sebagai upaya pemerataan pembangunan disemua desa untuk mempersiapkan Tabalong sebagai penyangga IKN.
6. Optimalisasi pelayanan publik dan penyelenggaraan pemerintahan untuk pencapaian indeks reformasi birokrasi yang maksimal.
7. Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan mitigasi bencana.

Sasaran pembangunan Kabupaten Tabalong Tahun 2025 yang akan dicapai melalui indikator sasaran sebagai berikut:

1. Pertumbuhan Ekonomi sebesar 5,00% – 5,49%.
2. Tingkat Kemiskinan sebesar 5,63% - 5,26%.
3. Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 3,43% - 3,31%.
4. Rasio Gini sebesar 0,280-0,270
5. Indeks Pembangunan Manusia sebesar 76,08-78,08.
6. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup sebesar 74.
7. Inflasi sebesar 2,00% – 4,00%.

Prioritas Pembangunan Kabupaten Tabalong Tahun 2025 ditetapkan dengan mengacu pada rancangan akhir RPJMD Kabupaten Tabalong Tahun 2025-2029 dan hasil capaian pembangunan pada tahun sebelumnya, serta memperhatikan prioritas pembangunan nasional dan

Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2025. Berdasarkan hal tersebut, RKPD Kabupaten Tabalong menetapkan 5 (lima) Prioritas Daerah (PD) sebagai berikut:

- PD 1: Meningkatkan kesempatan kerja dan berusaha, menurunkan kemiskinan dan angka pengangguran untuk pertumbuhan ekonomi yang berkualitas.
- PD 2: Meningkatkan kualitas Pendidikan, pelayanan Kesehatan untuk penurunan stunting dalam rangka pencapaian kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing.
- PD 3: Meningkatkan pemenuhan sarana dan prasarana infrastruktur dasar untuk mendukung IKN.
- PD 4: Meningkatkan kualitas Pelayanan publik untuk mendukung pencapaian indeks reformasi birokrasi yang maksimal.
- PD 5: Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan mitigasi bencana.

2. Arah Kebijakan Prioritas Daerah

RKPD Pemerintah Kabupaten Tabalong Tahun 2025 yang bertujuan untuk pencapaian sasaran prioritas daerah, di-breakdown dalam arah kebijakan prioritas daerah dan akan diterjemahkan lebih lanjut dalam program dan kegiatan pembangunan daerah tahun 2025. Berikut adalah arah kebijakan prioritas daerah tahun 2025:

- PD 1: Meningkatkan kesempatan kerja dan berusaha, menurunkan kemiskinan dan angka pengangguran untuk pertumbuhan ekonomi yang berkualitas.*
- Peningkatan kesempatan kerja, penurunan kemiskinan dan pengangguran.
 - Pengembangan pariwisata lokal beserta ekonomi kreatifnya.
 - Mendorong peningkatan nilai tambah dan daya saing sektor pertanian, industri dan UMKM.
 - Peningkatan produktivitas pertanian sebagai daerah penyangga IKN.

- Mendorong perkembangan UMKM dan tumbuhnya wira usaha baru.
- Peningkatan pemberdayaan masyarakat desa.
- Peningkatan kualitas tenaga kerja yang terampil.
- Peningkatan kemandirian ekonomi rakyat didesa/kelurahan melalui Pengembangan koperasi merah putih guna menciptakan lapangan kerja.

Tabel 4.15
Indikator Sasaran Pembangunan Prioritas Daerah 1

No	Indikator Sasaran Prioritas Daerah	Capaian Tahun 2024	Target Tahun 2025
1	2	3	4
1	Rasio penduduk yang bekerja	96,4	96,95
2	Tingkat Pengangguran Terbuka	3,44	3,16-2,57
3	Persentase penduduk miskin	5,64	5,24-4,74
4	Indeks Gini	0,300	0,269-0,259
5	Pertumbuhan ekonomi	4,87	5,7-6,6
6	Kontribusi sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan terhadap PDRB	7,76	7,79
7	Kontribusi sektor Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi terhadap PDRB	7,61	9,21
8	Indeks Desa	N/A	84
9	Rasio Kewirausahaan Daerah	1,76	2,03
10	Kontribusi Sektor Industri terhadap PDRB	5,96	6,02

Sumber: RPJM Kab. Tabalong 2025-2029

PD 2: Meningkatkan kualitas pendidikan, pelayanan kesehatan untuk penurunan stunting dalam rangka pencapaian kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing.

- Peningkatan kualitas pendidikan untuk mewujudkan sumber daya manusia yang berdaya saing.
- Mendorong pelaksanaan program pendidikan sekolah rakyat yang bertujuan memberikan akses pendidikan berkualitas bagi anak-anak dari keluarga miskin yang kesulitan mendapatkan pendidikan layak dan memutus rantai kemiskinan melalui Pendidikan.
- Peningkatan derajat kesehatan masyarakat melalui akses pelayanan dasar yang baik dan melalui gerakan masyarakat hidup sehat

- Peningkatan perlindungan anak dan pemberdayaan perempuan.
- Pengendalian prevalensi stunting dan peningkatan aksesibilitas layanan kesehatan kepada masyarakat.

Tabel 4.16
Sasaran Pembangunan Prioritas Daerah 2

No	Indikator Sasaran Prioritas Daerah	Capaian Tahun 2024	Target Tahun 2025
1	2	3	4
1	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	75,97	76,08-76,40
2	Rata-Rata Lama Sekolah	9,15	9,62
3	Harapan Lama Sekolah	12,92	13,29
4	Umur Harapan Hidup	74,76	76,37
5	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM)	87,66	90
7	Nilai Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat (TGM)	67,04	68,98
8	AKI	-	109
9	AKB	-	13
10	Cakupan kepesertaan jaminan Kesehatan Nasional	98,81	99,5
11	Prevalensi Stunting	23,1	22
12	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	0,421	0,417
13	Indeks Pembangunan gender (IPG)	86,47	86,47
14	Status Kota Layak Anak	Nindya	Nindya

Sumber: RPJM Kab. Tabalong 2025-2029

PD 3: Meningkatkan pemenuhan sarana dan prasarana infrastruktur dasar untuk mendukung IKN

- Peningkatan kualitas dan pemerataan infrastruktur untuk mendukung konektivitas dan logistik sebagai penyangga IKN.

Tabel 4.17
Sasaran Pembangunan Prioritas Daerah 3

No	Indikator Sasaran Prioritas Daerah	Capaian Tahun 2024	Target Tahun 2025
1	2	3	4
1	Indeks Infrastruktur	0,729	0,736
2	Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan	-	71
3	Tingkat Kemantapan jalan Kabupaten/Kota	80,91	81,67

Sumber: RPJM Kab. Tabalong 2025-2029

PD 4: Meningkatkan kualitas Pelayanan publik untuk mendukung pencapaian indeks reformasi birokrasi yang maksimal

- Penguatan reformasi birokrasi.
- Perencanaan pembangunan berbasis data dan kajian

- Pengembangan dan penguatan pengelolaan satu data Tabalong.

Tabel 4.18
Sasaran Pembangunan Prioritas Daerah 4

No	Indikator Sasaran Prioritas Daerah	Capaian Tahun 2024	Target Tahun 2025
1	2	3	4
1	Indeks Reformasi Birokrasi	80,76	80,91
2	Indeks Pemerintahan Digital	N/A	2,5
3	Nilai SAKIP	(67,10) B	BB
4	Opini BPK	90	WTP
5	Predikat Inovasi Daerah	Sangat Inovatif	Sangat Inovatif
6	Indeks Pelayanan Publik	4,49	4,51
7	Indeks SPBE	3,7	3,7

Sumber: RPJM Kab. Tabalong 2025-2029

PD 5: Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan mitigasi bencana.

- Pembangunan berwawasan lingkungan melalui tata kelola dan perlindungan lingkungan hidup.
- Optimalisasi tata kota dan wilayah serta lingkungan permukiman.

Tabel 4.19
Sasaran Pembangunan Prioritas Daerah 5

No	Indikator Sasaran Prioritas Daerah	Capaian Tahun 2024	Target Tahun 2025
1	2	3	4
1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	73,98	74,72
2	Penurunan Intensitas Emisi GRK	N/A	2,36
3	Indeks Resiko Bencana	157,77	151,37

Sumber: RPJM Kab. Tabalong 2025-2029

3. Major Projects Prioritas Daerah

Untuk tahun 2025, Kabupaten Tabalong memiliki berbagai kegiatan multisektor yang menjadi *major projects* prioritas daerah yang bertujuan untuk meningkatkan infrastruktur, kesejahteraan masyarakat, dan pertumbuhan ekonomi daerah. Berikut *major projects* prioritas daerah tahun 2025:

A. Pembangunan dan pengembangan infrastruktur

1. Pembangunan dan pengembangan jalan dan jembatan untuk meningkatkan konektivitas antar wilayah.

2. Peningkatan sarana dan prasarana transportasi serta fasilitas transportasi umum lainnya.
- B. Pengembangan Sumber Daya Air
1. Pembangunan dan peningkatan/pengembangan jaringan irigasi untuk mendukung sektor pertanian.
 2. Peningkatan sistem pengelolaan air bersih dan sanitasi untuk masyarakat.
- C. Pendidikan dan Kesehatan
1. Rehabilitasi atau renovasi sekolah dan peningkatan fasilitas pendidikan serta beasiswa pendidikan.
 2. Pendidikan dan pelatihan bagi tenaga pendidik dalam mendorong kreativitas dan sekolah penggerak.
 3. Pengembangan dan penguatan pendidikan yang berbasis vokasi sesuai potensi sektor unggulan daerah.
 4. Peningkatan rumah sakit, puskesmas, dan klinik kesehatan.
 5. Peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat melalui perbaikan kualitas sarana dan prasarana serta pemenuhan distribusi dan kualitas SDM kesehatan.
 6. Percepatan Penurunan Kematian Ibu dan Bayi (AKI/AKB) serta *Stunting*.
- D. Pemberdayaan Ekonomi
1. Program pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) untuk meningkatkan ekonomi lokal.
 2. Pengembangan UMKM melalui kemitraan dan peningkatan skala usaha. Pembangunan dan peningkatan fasilitas destinasi wisata alam, budaya, dan sejarah.
 3. Perencanaan pembangunan kawasan industri dan pusat perdagangan untuk menarik investasi.
- E. Pariwisata dan Kebudayaan
1. Optimalisasi sarana dan prasarana pariwisata dan peningkatan promosi destinasi wisata unggulan.

2. Pembangunan dan peningkatan fasilitas destinasi wisata alam, budaya, dan sejarah.
3. Penyelenggaraan festival dan acara budaya untuk menarik wisatawan.

F. Pertanian dan Perikanan

1. Pembangunan dan rehabilitasi saluran irigasi untuk memastikan pasokan air yang memadai bagi lahan pertanian sepanjang tahun.
2. Peningkatan program intensifikasi dan diversifikasi tanaman pangan dan hortikultura.
3. Program pelatihan petani tentang teknik pertanian dan perikanan modern, penggunaan alat pertanian canggih, dan praktik pertanian dan perikanan berkelanjutan.
4. Pembangunan dan perbaikan jalan usaha tani untuk memudahkan akses ke lahan pertanian.
5. Pengembangan budidaya dan penerapan teknologi perikanan.
6. Pengembangan dan diversifikasi produk olahan ikan.
7. Peningkatan akses pasar dan jaringan distribusi untuk hasil pertanian dan perikanan melalui kerjasama dengan pelaku usaha dan pasar digital.

G. Perumahan dan Permukiman

1. Pembangunan perumahan layak huni yang terjangkau bagi masyarakat.
2. Peningkatan kualitas permukiman dan infrastruktur dasar di kawasan kumuh.
3. Peningkatan sarana dan prasarana/utilitas umum.

H. Teknologi dan Informasi

1. Implementasi teknologi informasi untuk mendukung konsep *smart city* dalam perencanaan, pemerintahan dan pelayanan publik.
2. Dukungan untuk pembangunan infrastruktur telekomunikasi untuk meningkatkan akses internet dan komunikasi.

I. Lingkungan Hidup

1. Dukungan terhadap program penghijauan, konservasi hutan, dan pengelolaan lingkungan hidup serta penanganan bencana.
2. Pengelolaan sampah terpadu.

4. Pandangan dan Pertimbangan DPRD mengenai arah prioritas pembangunan melalui Pokok-Pokok Pikiran

Dalam penyusunan perencanaan pembangunan tahun 2025, DPRD Kabupaten Tabalong merekomendasikan kepada Pemerintah Kabupaten Tabalong pokok-pokok pikiran yang diakomodir dalam RKPD tahun 2025, sebagai berikut:

1. Urusan Pendidikan dan kebudayaan
 - a. Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pendidikan khususnya di daerah Pedesaan.
 - b. Meningkatkan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan.
2. Urusan Kesehatan
 - a. Meningkatkan Penyediaan Fasilitas Prasarana dan Sarana Pelayanan Kesehatan Masyarakat.
3. Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
 - a. Meningkatkan Pembangunan Baru dan pemeliharaan Infrastruktur Irigasi, Sarana dan Prasarana Air dan Pintu Air.
 - b. Meningkatkan Perbaikan/Pemeliharaan/Peningkatan Infrastruktur Jalan dan jembatan di Daerah Pedesaan.
 - c. Pemeliharaan/Pengembangan Drainase di daerah Perkotaan dan Pedesaan.
4. Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
 - a. Meningkatkan Penyediaan Prasarana dan Sarana Utilitas Umum Perumahan khususnya daerah kecamatan dan pedesaan terutama penerangan jalan umum.
 - b. Meningkatkan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni
 - c. Meningkatkan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh.
5. Urusan Tenaga Kerja
 - a. Meningkatkan Penyediaan Pelatihan & Produktivitas Tenaga Kerja
6. Urusan Sosial

- a. Meningkatkan Penyediaan Bantuan Sosial Fakir Miskin dan Masyarakat tidak mampu
7. Urusan Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
 - a. Meningkatkan sarana dan prasarana olahraga dan kegiatan kepemudaan khususnya untuk daerah kecamatan dan pedesaan.
 - b. Mengoptimalkan pembinaan kepemudaan dan keolahragaan.
 - c. Meningkatkan Pembinaan & Pengembangan Kepariwisata.
8. Urusan Lingkungan Hidup
 - a. Mengoptimalkan Penanganan dan pengelolaan persampahan.
9. Urusan Perhubungan
 - a. Meningkatkan Penyediaan Infrastruktur Perhubungan dan Keselamatan Berlalu lintas (Terminal, Marka, Jalan, dll).
 - b. Mengoptimalkan Penyediaan Jasa Angkutan Umum untuk Angkutan Orang dan/atau Barang.
10. Urusan Pertanian
 - a. Meningkatkan Pembangunan dan Penyediaan Sarana Tanaman Pangan dan Holtikultura.
11. Urusan Pangan, Kelautan dan Perikanan
 - a. Meningkatkan Pembangunan & Penyediaan Sarana dan Prasarana Perkebunan dan Peternakan.
 - b. Mengoptimalkan Penyediaan Bibit & Benih Tanaman Perkebunan.
12. Urusan Koprasi, usaha kecil dan menengah serta Perdagangan
 - a. Meningkatkan Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Mikro/Usaha Kecil.
13. Urusan Sekretariat Daerah
 - a. Mengoptimalkan Pembinaan dan Pengembangan Rumah Ibadah
14. Urusan Komunikasi dan informatika
 - a. Mengoptimalkan Sarana dan Prasarana Telekomunikasi dan Informatika terutama di wilayah pedesaan.
15. Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat
 - a. Meningkatkan Fasilitas Pencegahan Kebakaran Daerah.
 - b. Meningkatkan Fasilitas Pencegahan Bencana Alam dalam Daerah

5. Keterkaitan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Tabalong dengan Pemerintah Pusat dan Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2025

Perencanaan pembangunan tahun 2025 pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota telah melalui proses atau tahapan yang mengacu peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam RKP Tahun 2025 yang menjadi panduan bagi daerah dalam menyeleraskan tema, sasaran, arah kebijakan, dan prioritas pembangunan, diharapkan terjadi gerak langkah yang seirama, sehingga pencapaian tujuan pembangunan benar-benar berdampak untuk mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran yang adil dan merata.

Selanjutnya dalam rangka sinkronisasi perencanaan pusat dengan daerah dilakukan rapat koordinasi dengan Gubernur dalam mendukung Prioritas Nasional terutama yang berkaitan dengan Proyek Prioritas Strategis (*Major Project*). Proses atau tahapan untuk menjaring usulan dari Kabupaten/Kota yang mendukung proyek prioritas hasil rapat koordinasi Gubernur dilakukan pada tahap rapat koordinasi teknis perencanaan pembangunan, di mana pada tahapan sebelumnya di tingkat provinsi telah dilakukan sinkronisasi dan harmonisasi perencanaan melalui rapat koordinasi teknis antar instansi/lembaga yang melibatkan Pemerintah Kabupaten/Kota dan menjaring isu strategis, tema, strategi dan arah kebijakan RKPD Provinsi Tahun 2025 melalui Musrenbang Provinsi.

Sinergitas perencanaan pembangunan antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah serta antar Pemerintah Daerah dalam rangka menjamin sinergitas program pembangunan nasional dan daerah sehingga dapat mempercepat target pencapaian pembangunan.

Berdasarkan hal tersebut, penyusunan RKPD Kabupaten Tabalong Tahun 2025 telah memperhatikan prioritas dan sasaran pembangunan nasional yang tercantum dalam RKP Tahun 2025, serta memperhatikan prioritas dan sasaran pembangunan yang tercantum dalam RKPD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2025 melalui harmonisasi pada tahapan penyusunan perencanaan sehingga sinergitas perencanaan

pembangunan tahun 2025 dapat berjalan dengan baik dalam mencapai sasaran dan prioritas pembangunan pusat dan daerah.

Pemindahan Ibu Kota Negara sebagaimana sudah ditetapkan dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2022 akan menciptakan dorongan investasi yang lebih luas pada wilayah sekitar serta meningkatkan output beberapa sektor non-tradisional terutama sektor Jasa.

Kabupaten Tabalong yang secara geografis berbatasan langsung dengan provinsi Kalimantan Timur sebagai lokasi ibukota negara baru tentunya akan menerima berbagai dampak, baik yang bersifat positif maupun negatif. Terkait hal tersebut maka pemerintah Kabupaten Tabalong harus menyiapkan diri dengan sebaik-baiknya agar dapat memanfaatkan peluang-peluang ekonomi, diantaranya dengan memperkuat prasarana infrastruktur untuk mendukung konektivitas, meningkatkan kualitas SDM yang inovatif dan berdaya saing serta mengantisipasi berbagai dampak negatifnya secara lebih dini.

Keterkaitan Tema RKP 2025 dan Tema RKPD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2025 dengan Tema RKPD Kabupaten Tabalong Tahun 2025 sebagai berikut:



Gambar 4.5
Keterkaitan Tema RKP 2025, Tema RKPD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2025 dan Tema RKPD Kabupaten Tabalong Tahun 2025

Sedangkan keterkaitan target dan sasaran pembangunan Nasional, Provinsi Kalimantan Selatan, dan Kabupaten Tabalong pada tahun 2025 sebagaimana tabel berikut:

Tabel 4.20
Target dan Sasaran Pembangunan Tahun 2025

No	Uraian	Target		
		Nasional	Prov. Kalsel	Kab.Tabalong
1.	Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,3 - 5,6	4,97 - 5,28	5,00% – 5,49%
2.	Tingkat Kemiskinan (%)	7,0 - 8,0	3,64 - 3,94	5,63% - 5,26%.
3.	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	4,5 – 5,0	3,86 - 4,25	3,43% - 3,31%
4.	Rasio Gini (Nilai)	0,379-0,382	0,307- 0,312	0,280-0,270
5.	Indeks Pembangunan Manusia (Indeks)	0,56	75,2	76,08-78,08
6.	Inflasi (%)	1,5-3,5	3,3 - 4,1	2,0% – 4,0%
7.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (Indeks)	76,49	72,32	74,00

Sumber: RKP 2025, RKPD Prov. Kalsel 2025 dan hasil analisis

Tabel 4.21
Perubahan Target Ekonomi Makro Tahun 2025

No	Uraian	Realisasi 2024	Target 2025	Perubahan Target 2025
1.	Pertumbuhan Ekonomi (%)	4,87	6,74	5,00 – 5,49
2.	Tingkat Kemiskinan (%)	5,64	4,35 - 5,1	5,63 – 5,26
3.	Indeks Pembangunan Manusia	75,97	76,08 – 77,20	76,08 – 78,08
4.	Rasio Gini (Nilai)	-	0,244 – 0,344	0,280 – 0,270
5.	Tingkat Pengangguran (%)	3,44	2,60 -3,60	3,43 – 3,31
6.	Inflasi (%)	2.24	2,0 – 4,0	2,00 – 4,00
7.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (Indeks)	73,98	71,96	74,00

BAB V

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

***PERUBAHAN RKPD
KABUPATEN TABALONG
TAHUN 2025***

BAB V

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Perubahan RKPD Kabupaten Tabalong Tahun 2025 mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, yang memuat:

1. penyesuaian nomenklatur program dan kegiatan sesuai kebijakan baru;
2. penambahan atau pengurangan target kinerja, pagu indikatif, lokasi, kelompok sasaran yang mengalami perubahan dan yang tidak mengalami perubahan; dan
3. rencana program dan kegiatan prioritas daerah tersebut mencakup semua rencana program dan kegiatan prioritas yang akan dianggarkan melalui belanja operasi belanja modal, belanja tidak terduga dan belanja transfer.

Adapun rekapitulasi jumlah program/kegiatan dan pagu berdasarkan urusan pemerintahan pada Perubahan RKPD Kabupaten Tabalong Tahun 2025 sebagaimana pada tabel berikut:

Tabel 5.1
Rekapitulasi Jumlah Program/Kegiatan dan Pagu Berdasarkan Urusan
Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Tabalong Tahun 2025

No	Urusan	RKPD 2025			APBD dan PERGESERAN 2025			PERUBAHAN RKPD 2025			PAGU ANGGARAN			SKPD Penanggung Jawab
		Prog-ram	Kegiat-an	Sub Kegiat-an	Prog-ram	Kegiat-an	Sub Kegiat-an	Prog-ram	Kegiat-an	Sub Kegiat-an	RKPD 2025	APBD INDUK 2025 dan PERGESERAN	PERUBAHAN RKPD 2025	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	3	12	69	3	12	69	3	13	71	470.968.734.599,00	541.490.073.340,00	583.610.505.991,00	1.01.2.22.0.00.01.0000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
2	1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	5	20	76	5	21	80	5	21	81	231.263.541.077,00	267.728.648.245,00	270.085.487.672,00	1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN
											142.137.132.079,00	156.357.448.504,00	165.981.553.781,00	1.02.0.00.0.00.02.0000 RUMAH SAKIT H. BADARUDDIN KASIM
3	1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	9	22	77	9	22	76	9	19	77	449.559.617.240,00	570.196.831.512,00	657.167.643.721,54	1.03.0.00.0.00.01.0000 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
4	1.04 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	5	9	20	5	9	19	5	10	21	152.177.155.779,00	158.478.346.534,00	160.269.716.629,00	1.04.2.10.0.00.01.0000 DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
5	1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	4	15	63	4	15	62	4	15	62	36.127.628.389,00	35.841.315.019,00	35.774.108.734,00	1.05.0.00.0.00.01.0000 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
											18.749.837.728,00	18.934.360.535,00	19.075.530.535,00	1.05.0.00.0.00.02.0000 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
6	1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	6	16	36	6	16	35	6	16	35	47.614.529.830,00	49.470.035.634,00	51.167.040.339,50	1.06.0.00.0.00.01.0000 DINAS SOSIAL

No	Urusan	RKPD 2025			APBD dan PERGESERAN 2025			PERUBAHAN RKPD 2025			PAGU ANGGARAN			SKPD Penanggung Jawab
		Prog-ram	Kegiat-an	Sub Kegiat-an	Prog-ram	Kegiat-an	Sub Kegiat-an	Prog-ram	Kegiat-an	Sub Kegiat-an	RKPD 2025	APBD INDUK 2025 dan PERGESERAN	PERUBAHAN RKPD 2025	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
7	2.07 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	5	15	29	5	15	29	5	16	30	20.039.620.428,00	23.947.258.870,00	28.236.562.954,00	2.07.0.00.0.00.01.0000 DINAS TENAGA KERJA
8	2.08 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	7	19	31	7	20	34	7	21	34	10.248.766.867,00	10.853.271.537,00	11.268.061.537,00	2.08.2.14.0.00.01.0000 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
9	2.09 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	5	13	25	6	13	24	6	13	24	43.026.366.719,00	43.138.149.444,50	43.716.938.847,00	2.09.3.25.3.27.01.0000 DINAS KETAHANAN PANGAN, PERIKANAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
10	2.10 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN	3	3	3	3	3	3	3	3	3	29.418.893.000,00	15.598.221.500,00	21.964.327.500,00	1.04.2.10.0.00.01.0000 DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
11	2.11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	10	16	33	10	16	32	10	16	32	70.250.000.000,00	66.529.279.664,00	69.969.279.664,00	2.11.0.00.0.00.01.0000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP
12	2.12 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	5	17	45	5	17	44	5	17	44	38.026.326.564,00	21.589.526.789,00	19.077.985.271,00	2.12.0.00.0.00.01.0000 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
13	2.13 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	5	9	30	5	9	29	5	8	29	18.974.204.219,00	17.787.599.141,00	27.926.982.507,00	2.13.0.00.0.00.01.0000 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

No	Urusan	RKPD 2025			APBD dan PERGESERAN 2025			PERUBAHAN RKPD 2025			PAGU ANGGARAN			SKPD Penanggung Jawab
		Prog-ram	Kegiat-an	Sub Kegiat-an	Prog-ram	Kegiat-an	Sub Kegiat-an	Prog-ram	Kegiat-an	Sub Kegiat-an	RKPD 2025	APBD INDUK 2025 dan PERGESERAN	PERUBAHAN RKPD 2025	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
14	2.14 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	3	8	12	3	8	24	3	8	26	2.107.559.772,00	5.668.236.669,00	5.637.340.669,00	2.08.2.14.0.00.01.0000 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
15	2.15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	2	17	42	2	17	41	2	16	41	48.971.792.500,00	49.159.376.633,00	55.558.196.176,06	2.15.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERHUBUNGAN
16	2.16 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	3	10	38	3	10	36	3	10	36	23.789.510.110,00	24.132.955.308,00	32.071.270.706,00	2.16.2.20.2.21.01.0000 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
17	2.17 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	6	11	21	6	11	20	6	10	20	18.957.224.435,00	23.176.958.823,00	24.351.631.633,00	2.17.3.31.3.30.01.0000 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
18	2.18 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	6	13	33	6	12	32	6	12	32	12.666.397.566,00	13.247.534.855,00	14.422.134.855,00	2.18.0.00.0.00.01.0000 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
19	2.19 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	4	15	38	4	15	38	4	15	35	33.091.328.908,00	32.731.762.835,00	49.948.540.064,00	2.19.3.26.0.00.01.0000 DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
20	2.20 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK	1	1	5	1	1	5	1	1	4	712.498.420,00	525.247.920,00	564.247.920,00	2.16.2.20.2.21.01.0000 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
21	2.21 URUSAN PEMERINTAHAN	1	2	5	1	2	5	1	1	3	729.567.400,00	366.643.400,00	366.643.400,00	2.16.2.20.2.21.01.0000 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

No	Urusan	RKPD 2025			APBD dan PERGESERAN 2025			PERUBAHAN RKPD 2025			PAGU ANGGARAN			SKPD Penanggung Jawab
		Prog-ram	Kegiat-an	Sub Kegiat-an	Prog-ram	Kegiat-an	Sub Kegiat-an	Prog-ram	Kegiat-an	Sub Kegiat-an	RKPD 2025	APBD INDUK 2025 dan PERGESERAN	PERUBAHAN RKPD 2025	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	BIDANG PERSANDIAN													
22	2.22 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	2	4	4	2	4	4	2	3	4	8.300.393.410,00	7.092.019.802,00	8.254.220.472,00	1.01.2.22.0.00.01.0000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
23	2.23 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	2	9	43	2	9	43	2	9	43	10.782.184.243,00	12.734.074.924,00	15.114.694.743,00	2.23.2.24.0.00.01.0000 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
24	2.24 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN	2	7	9	2	7	9	2	7	9	2.664.231.952,00	1.162.109.618,00	1.162.103.656,00	2.23.2.24.0.00.01.0000 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
25	3.25 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	4	5	9	4	5	9	4	5	9	5.369.490.987,00	4.159.231.893,00	4.933.707.465,06	2.09.3.25.3.27.01.0000 DINAS KETAHANAN PANGAN, PERIKANAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
26	3.26 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	3	4	8	3	4	8	3	4	8	6.501.008.242,00	5.354.499.385,00	4.782.591.510,00	2.19.3.26.0.00.01.0000 DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
27	3.27 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	6	18	49	6	18	49	6	18	49	22.698.525.552,00	21.427.891.749,50	30.691.564.326,80	2.09.3.25.3.27.01.0000 DINAS KETAHANAN PANGAN, PERIKANAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
											47.333.500.905,00	46.642.313.839,00	53.806.778.283,50	3.27.0.00.0.00.02.0000 DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN
28	3.30 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	5	10	15	5	10	15	5	10	15	21.843.246.741,00	20.536.498.782,00	21.776.446.858,07	2.17.3.31.3.30.01.0000 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

No	Urusan	RKPD 2025			APBD dan PERGESERAN 2025			PERUBAHAN RKPD 2025			PAGU ANGGARAN			SKPD Penanggung Jawab
		Prog-ram	Kegiat-an	Sub Kegiat-an	Prog-ram	Kegiat-an	Sub Kegiat-an	Prog-ram	Kegiat-an	Sub Kegiat-an	RKPD 2025	APBD INDUK 2025 dan PERGESERAN	PERUBAHAN RKPD 2025	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
29	3.31 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	3	3	5	3	3	5	3	3	5	1.587.422.194,00	1.288.762.426,00	2.901.137.296,00	2.17.3.31.3.30.01.0000 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
30	4.01 SEKRETARIAT DAERAH	3	19	54	3	18	53	3	18	53	87.134.536.687,00	88.652.570.845,00	116.464.594.444,00	4.01.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DAERAH
31	4.02 SEKRETARIAT DPRD	2	17	62	2	17	60	2	17	60	88.669.624.339,00	91.531.843.303,00	101.116.980.253,00	4.02.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DPRD
32	5.01 PERENCANAAN	3	15	56	3	15	55	3	15	55	18.965.163.262,00	17.139.436.727,00	18.630.650.555,00	5.01.5.05.0.00.01.0000 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
33	5.02 KEUANGAN	4	14	79	4	13	80	4	13	80	443.519.352.180,00	435.146.370.980,00	462.209.475.449,00	5.02.0.00.0.00.01.0000 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
											24.180.496.942,00	27.824.180.914,00	26.876.405.145,00	5.02.0.00.0.00.02.0000 BADAN PENDAPATAN DAERAH
34	5.03 KEPEGAWAIAN	2	11	38	2	10	37	2	10	37	13.667.173.897,00	13.823.724.180,00	16.822.766.251,10	5.03.5.04.0.00.01.0000 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
35	5.04 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	1	3	3	1	3	3	1	3	3	4.591.353.707,00	3.323.567.307,00	4.254.630.989,00	5.03.5.04.0.00.01.0000 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
36	5.05 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	1	3	8	1	3	8	1	3	8	3.597.466.050,00	2.764.688.557,00	4.138.641.797,00	5.01.5.05.0.00.01.0000 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
37	6.01 INSPEKTORAT DAERAH	3	10	27	3	10	27	3	10	27	20.727.936.634,00	24.566.216.702,00	26.634.486.080,00	6.01.0.00.0.00.01.0000 INSPEKTORAT
38	7.01 KECAMATAN	6	17	57	6	17	51	6	17	51	22.703.165.117,00	23.799.307.779,00	23.905.402.503,00	7.01.0.00.0.00.01.0000 KECAMATAN TANJUNG

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
Kabupaten Tabalong Tahun 2025

No	Urusan	RKPD 2025			APBD dan PERGESERAN 2025			PERUBAHAN RKPD 2025			PAGU ANGGARAN			SKPD Penanggung Jawab
		Prog-ram	Kegiat-an	Sub Kegiat-an	Prog-ram	Kegiat-an	Sub Kegiat-an	Prog-ram	Kegiat-an	Sub Kegiat-an	RKPD 2025	APBD INDUK 2025 dan PERGESERAN	PERUBAHAN RKPD 2025	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
											18.745.637.961,00	21.545.995.896,00	22.755.803.203,00	7.01.0.00.0.00.02.0000 KECAMATAN MURUNG PUDAK
											5.360.763.926,00	5.477.714.767,00	5.672.336.878,00	7.01.0.00.0.00.03.0000 KECAMATAN TANTA
											4.975.573.520,00	5.148.961.598,00	5.355.567.208,00	7.01.0.00.0.00.04.0000 KECAMATAN MUARA HARUS
											4.455.744.930,00	4.645.722.239,00	4.823.522.239,00	7.01.0.00.0.00.05.0000 KECAMATAN BANUA LAWAS
											6.982.860.753,00	7.136.266.291,00	7.766.266.291,00	7.01.0.00.0.00.06.0000 KECAMATAN KELUA
											4.226.392.378,00	4.390.995.643,00	4.606.900.203,00	7.01.0.00.0.00.07.0000 KECAMATAN PUGAAN
											3.848.423.934,00	3.956.522.377,00	4.199.509.724,00	7.01.0.00.0.00.08.0000 KECAMATAN JARO
											6.302.140.160,00	6.264.841.559,00	6.485.841.559,00	7.01.0.00.0.00.09.0000 KECAMATAN MUARA UYA
											3.821.368.260,00	3.973.690.049,00	4.622.873.623,00	7.01.0.00.0.00.10.0000 KECAMATAN HARUAI
											4.675.194.085,00	5.408.840.663,00	6.970.528.696,00	7.01.0.00.0.00.11.0000 KECAMATAN UPAU
											3.388.542.499,00	3.679.587.363,00	3.935.445.840,00	7.01.0.00.0.00.12.0000 KECAMATAN BINTANG ARA
39	8.01 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	6	12	30	6	12	29	6	12	29	13.274.176.745,00	12.921.929.043,00	15.209.927.345,00	8.01.0.00.0.00.01.0000 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
JUMLAH		156	444	1.287	157	442	1.282	157	438	1.285	2.854.501.325.821,00	3.080.469.459.912,00	3.385.093.531.991,63	

Sumber: Renja PD/SIPD.RI Tahun 2025

Adapun rekapitulasi program/kegiatan dan pagu berdasarkan perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 sebagaimana pada tabel berikut:

Tabel 5.2
Rekapitulasi Daftar Perubahan Program dan Perubahan Kegiatan Pada
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Perubahan Kabupaten Tabalong Tahun 2025

NO	BIDANG URUSAN	SEBELUM (RKPD Induk 2025)			SESUDAH (RKPD Perubahan 2025)			PAGU		RKPD 2025 PERUBAHAN	ALASAN PERUBAHAN
		PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET	RKPD 2025 (Induk)	APBD INDUK 2025 dan PERGESERAN		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.01.2.22.0.00.01.0000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN											
1	X.XX. NON URUSAN	1.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai AKIP	BB	1.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Predikat Nilai AKIP Perangkat Daerah	BB	384.514.046.486,00	415.712.092.330,00	418.831.467.283,00	
		1.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Realisasi Kinerja	21 Dokumen	1.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase hasil perencanaan dan pelaporan yang dijadikan bahan evaluasi kinerja	100%	282.401.660,00	103.706.660,00	295.821.660,00	
		1.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	2500 Orang	1.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase administrasi keuangan yang tertib, akuntabel dan tepat waktu	100%	378.934.587.000,00	411.060.633.179,00	411.060.633.179,00	
		1.01.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan	1.01.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase pengadministrasian Barang Milik Daerah (BMD) yang akurat lengkap dan mutakhir.	100%	84.787.518,00	54.165.000,00	71.846.940,00	
		1.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya pengelolaan administrasi kepegawaian perangkat daerah	95%	1.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pengelolaan dan pelayanan administrasi kepegawaian yang tepat waktu,	100%	354.113.600,00	263.241.200,00	386.415.000,00	

NO	BIDANG URUSAN	SEBELUM (RKPD Induk 2025)			SESUDAH (RKPD Perubahan 2025)			PAGU		RKPD 2025 PERUBAHAN	ALASAN PERUBAHAN
		PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET	RKPD 2025 (Induk)	APBD INDUK 2025 dan PERGESERAN		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						mutakhir dan terdokumentasi					
		1.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Peralatan, Perlengkapan, Barang cetakan dan penggandaan Kantor yang disediakan.	13 Paket	1.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi umum yang terlaksana sesuai SOP	100%	1.418.744.793,00	824.632.016,00	1.262.106.654,00	
					1.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Realisasi Pengadaan Barang Milik Daerah yang sesuai dengan yang direncanakan	100%	0,00	0,00	1.350.215.554,00	
		1.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpenuhinya penyediaan jasa urusan Sekretariat Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	100%	1.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang difasilitasi/ disediakan	100%	1.492.165.000,00	1.861.805.000,00	2.193.470.910,00	
		1.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya alat/perlengkapan kantor	100%	1.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang yang dipelihara dan berfungsi sesuai kondisi standar	100%	1.947.246.915,00	1.543.909.275,00	2.210.957.386,00	
2	1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	a. APK dan APM SD	a. 100,00% 100,00%	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	a. Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	a. 100	77.674.359.380,00	118.207.468.232,00	159.800.060.505,00	

NO	BIDANG URUSAN	SEBELUM (RKPD Induk 2025)			SESUDAH (RKPD Perubahan 2025)			PAGU		RKPD 2025 PERUBAHAN	ALASAN PERUBAHAN
		PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET	RKPD 2025 (Induk)	APBD INDUK 2025 dan PERGESERAN		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			b. APK dan APM SMP	b. 100,00% 100,00%		b. Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan c. Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan d. Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD e. Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama	b. 92.26 c. 92.26 d. 96.42 e. 92.21				
		1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	APK dan APM SD	100%	1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	a. Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia b. Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik	a. 40 b. 400	30.605.723.088,00	53.151.123.708,00	72.826.143.687,00	

NO	BIDANG URUSAN	SEBELUM (RKPD Induk 2025)			SESUDAH (RKPD Perubahan 2025)			PAGU			ALASAN PERUBAHAN
		PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET	RKPD 2025 (Induk)	APBD INDUK 2025 dan PERGESERAN	RKPD 2025 PERUBAHAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						c. Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan d. Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi e. Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan f. Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi g. Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan h. Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia i. Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	c. 5 d. 1 e. 1 f. 71 g. 2 h. 3050 i. 220				

NO	BIDANG URUSAN	SEBELUM (RKPD Induk 2025)			SESUDAH (RKPD Perubahan 2025)			PAGU		RKPD 2025 PERUBAHAN	ALASAN PERUBAHAN
		PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET	RKPD 2025 (Induk)	APBD INDUK 2025 dan PERGESERAN		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						j. Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	j. 2175				
						k. Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	k. 4				
						l. Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	l. 2550				
						m. Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun	m. 3				
						n. Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	n. 4092				
						o. Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan	o. 220				
						p. Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	p. 2				
						q. Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	q. 1				

NO	BIDANG URUSAN	SEBELUM (RKPD Induk 2025)			SESUDAH (RKPD Perubahan 2025)			PAGU		RKPD 2025 PERUBAHAN	ALASAN PERUBAHAN
		PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET	RKPD 2025 (Induk)	APBD INDUK 2025 dan PERGESERAN		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						r. Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah s. Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat t. Jumlah Ruang Laboratorium Sekolah Dasar yang Telah Dibangun u. Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun v. Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat w. Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar x. Jumlah Sekolah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah y. Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS z. Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	r. 26 s. 63 t. 2 u. 45 v. 7 w. 221 x. 221 y. 221 z. 3000				

NO	BIDANG URUSAN	SEBELUM (RKPD Induk 2025)			SESUDAH (RKPD Perubahan 2025)			PAGU		RKPD 2025 PERUBAHAN	ALASAN PERUBAHAN
		PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET	RKPD 2025 (Induk)	APBD INDUK 2025 dan PERGESERAN		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		1.01.02.2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	APK dan APM SMP	100% 100%	1.01.02.2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	a. Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi	a. 60	25.548.931.277,00	32.380.649.109,00	53.057.812.156,00	
						b. Jumlah Laboratorium yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	b. 3				
						c. Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	c. 55				
						d. Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	d. 61				
						e. Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	e. 687				
						f. Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	f. 210				
						g. Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	g. 1830				

NO	BIDANG URUSAN	SEBELUM (RKPD Induk 2025)			SESUDAH (RKPD Perubahan 2025)			PAGU		RKPD 2025 PERUBAHAN	ALASAN PERUBAHAN
		PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET	RKPD 2025 (Induk)	APBD INDUK 2025 dan PERGESERAN		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						h. Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun	h. 2				
						i. Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	i. 2				
						j. Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar	j. 61				
						k. Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	k. 2				
						l. Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	l. 9				
						m. Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	m. 11				
						n. Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun	n. 2				
						o. Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun	o. 1				
						p. Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	p. 15				
						q. Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	q. 12				
						r. Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan	r. 61				

NO	BIDANG URUSAN	SEBELUM (RKPD Induk 2025)			SESUDAH (RKPD Perubahan 2025)			PAGU		RKPD 2025 PERUBAHAN	ALASAN PERUBAHAN
		PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET	RKPD 2025 (Induk)	APBD INDUK 2025 dan PERGESERAN		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						s. Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS t. Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik u. Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	s. 63 t. 3000 u. 2378				
		1.01.02.2.03 Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	APK PAUD	100%	1.01.02.2.03 Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	a. Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD yang Tersedia b. Jumlah Mebel PAUD yang Tersedia c. Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen d. Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP e. Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	a. 43 b. 400 c. 290 d. 290 e. 798	20.127.846.478,00	29.233.016.878,00	30.380.206.125,00	

NO	BIDANG URUSAN	SEBELUM (RKPD Induk 2025)			SESUDAH (RKPD Perubahan 2025)			PAGU		RKPD 2025 PERUBAHAN	ALASAN PERUBAHAN
		PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET	RKPD 2025 (Induk)	APBD INDUK 2025 dan PERGESERAN		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						f. Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada PAUD g. Jumlah Peserta Didik PAUD yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik h. Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah i. Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat j. Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun k. Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	f. 815 g. 1300 h. 24 i. 18 j. 55 k. 12				
		1.01.02.2.04 Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Angka Melek Huruf (AMH)	99,65%	1.01.02.2.04 Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	a. Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan b. Jumlah Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik c. Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	a. 466 b. 830 c. 2	1.391.858.537,00	3.442.678.537,00	3.535.898.537,00	

NO	BIDANG URUSAN	SEBELUM (RKPD Induk 2025)			SESUDAH (RKPD Perubahan 2025)			PAGU		RKPD 2025 PERUBAHAN	ALASAN PERUBAHAN
		PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET	RKPD 2025 (Induk)	APBD INDUK 2025 dan PERGESERAN		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						d. Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat e. Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Pendidikan Non Formal yang Telah Dibangun f. Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar g. Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen h. Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP	d. 1 e. 2 f. 670 g. 13 h. 13				
		1.01.04 PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Persentase tenaga pendidik yang memiliki kualifikasi S1/D.IV 2.Persentase tenaga pendidik yang memiliki sertifikat pendidik	100%	1.01.04 PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	a. Persentase Guru yang Memiliki Sertifikat Pendidik b. Indeks Pemerataan Guru	a. 95.95 b. 0.62	8.780.328.733,00	7.570.512.778,00	7.813.728.203,00	
		1.01.04.2.01 Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Rasio ketersediaan Guru	30	1.01.04.2.01 Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	16	8.780.328.733,00	7.570.512.778,00	7.813.728.203,00	

NO	BIDANG URUSAN	SEBELUM (RKPD Induk 2025)			SESUDAH (RKPD Perubahan 2025)			PAGU		RKPD 2025 PERUBAHAN	ALASAN PERUBAHAN
		PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET	RKPD 2025 (Induk)	APBD INDUK 2025 dan PERGESERAN		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	2.22 URUSAN PEMERINTAH AN BIDANG KEBUDAYAAN	2.22.02 PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Penyelenggaraan festival kebudayaan daerah dan pelestarian sejarah dan tradisi budaya daerah	10 Objek	2.22.02 PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Tingkat Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengembangan Kebudayaan	85	7.245.138.998,00	6.312.885.400,00	7.644.311.070,00	
		2.22.02.2.01 Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah penyelenggaraan festival kesenian dan kebudayaan daerah	5 Objek	2.22.02.2.01 Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	a. Jumlah PPKD Kabupaten/Kota yang Disusun, Dimutakhirkan dan Ditetapkan b. Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Perlindungan, Pengembangan, Pemanfaatan	a. 1 b. 16	2.539.032.014,00	2.127.134.014,00	2.930.378.684,00	
		2.22.02.2.02 Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah penyelenggaraan event tradisi dan adat budaya daerah.	10 Objek	2.22.02.2.02 Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Perlindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan	13	1.082.422.984,00	1.034.751.386,00	1.562.932.386,00	
		2.22.02.2.03 Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga adat yang dibina	2 lembaga	2.22.02.2.03 Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Adat yang Disediakan/Difasilitasi	1	3.623.684.000,00	3.151.000.000,00	3.151.000.000,00	
		2.22.05 PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	10 Objek	2.22.05 PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	a. Persentase Warisan Budaya yang Dilestarikan b. Persentase Cagar Budaya dan Warisan Budaya Tak Benda yang Ditetapkan	a. 85 b. 85	1.055.254.412,00	779.134.402,00	609.909.402,00	

NO	BIDANG URUSAN	SEBELUM (RKPD Induk 2025)			SESUDAH (RKPD Perubahan 2025)			PAGU			ALASAN PERUBAHAN
		PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET	RKPD 2025 (Induk)	APBD INDUK 2025 dan PERGESERAN	RKPD 2025 PERUBAHAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2.22.05.2.02 Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Terkelolanya Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota dan Terlindunginya kebudayaan daerah.	10 Objek Cagar Budaya	2.22.05.2.02 Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dilindungi	12	1.055.254.412,00	779.134.402,00	609.909.402,00	
JUMLAH								479.269.128.009,00	548.582.093.142,00	594.699.476.463,00	
1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN											
1	X.XX. NON URUSAN	1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai AKIP	BB	1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Predikat Nilai AKIP Perangkat Daerah	BB	96.407.446.423,00	139.181.435.653,00	144.245.723.414,00	
		1.02.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Terlaksananya perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD pada Dinas Kesehatan	100%	1.02.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase hasil perencanaan dan pelaporan yang dijadikan bahan evaluasi kinerja	100%	670.933.000,00	132.775.000,00	312.855.000,00	Penambahan Kontribusi Renstra dan Kegiatan Desk BOK
		1.02.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	persentase terlaksananya penatausahaan keuangan yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD pada Dinas Kesehatan	100%	1.02.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase administrasi keuangan yang tertib, akuntabel dan tepat waktu	100%	65.270.236.500,00	113.002.794.000,00	113.109.504.342,00	Penambahan Gaji dan Tunjangan, Sosialisasi Pajak, Baznas di Lingkup Dinkes dan PKM
		1.02.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	persentase terlaksananya administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100%	1.02.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase pengadministrasian Barang Milik Daerah (BMD) yang akurat lengkap dan mutakhir.	100%	57.500.000,00	28.696.000,00	28.696.000,00	

NO	BIDANG URUSAN	SEBELUM (RKPD Induk 2025)			SESUDAH (RKPD Perubahan 2025)			PAGU		RKPD 2025 PERUBAHAN	ALASAN PERUBAHAN
		PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET	RKPD 2025 (Induk)	APBD INDUK 2025 dan PERGESERAN		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		1.02.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase terwujudnya peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD pada Dinas Kesehatan	100%	1.02.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pengelolaan dan pelayanan administrasi kepegawaian yang tepat waktu, mutakhir dan terdokumentasi	100%	212.295.000,00	16.205.000,00	264.925.000,00	Penambahan Kegiatan Diklat
		1.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	persentase sarana dan prasarana perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi administrasi perangkat daerah pada Dinas Kesehatan	100%	1.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi umum yang terlaksana sesuai SOP	100%	6.021.572.781,00	1.807.968.202,00	1.807.968.202,00	
		1.02.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	terlaksananya pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	1.02.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Realisasi Pengadaan Barang Milik Daerah yang sesuai dengan yang direncanakan	100%	1.790.943.120,00	446.455.051,00	1.300.041.945,00	Pengadaan Perangkat Komputer dan lainnya
		1.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	persentase sarana dan prasarana perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi administrasi perangkat daerah pada Dinas Kesehatan	100%	1.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang difasilitasi/ disediakan	100%	2.393.271.040,00	2.998.411.540,00	2.969.811.540,00	Penambahan Belanja Tagihan PDAM dan Listrik, Pengurangan anggaran pelayanan umum
		1.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	indeks kepuasan pemeliharaan barang milik daerah penunjang perangkat daerah urusan kesehatan	3 poin	1.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang yang dipelihara dan berfungsi sesuai kondisi standar	100%	1.204.023.000,00	1.961.458.878,00	2.011.458.878,00	Pindah sub kegiatan rehab gedung Dinkes Pemindahan barang dari Usman Dundrung

NO	BIDANG URUSAN	SEBELUM (RKPD Induk 2025)			SESUDAH (RKPD Perubahan 2025)			PAGU		RKPD 2025 PERUBAHAN	ALASAN PERUBAHAN
		PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET	RKPD 2025 (Induk)	APBD INDUK 2025 dan PERGESERAN		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD	Terlaksananya Pelayanan kesehatan pada BLUD PKM	100%	1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase Terlaksananya Pelayanan kesehatan pada BLUD PKM	100%	18.786.671.982,00	18.786.671.982,00	22.440.462.507,00	Penambahan Pendapatan dan SILPA 2024
2	1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	a. AKI b. AKB c. UHC d. Prevalensi Stunting (Pendek dan Sangat Pendek) Pada Balita	a. 105 b. 8 c. 99,5% d. 7	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	a. AKI b. AKB c. UHC d. Prevalensi Stunting (Pendek dan Sangat Pendek) Pada Balita	a. 150 b. 11 c. 99,5% d. 7,3	130.594.420.672,00	125.028.652.330,00	136.559.445.720,00	
		1.02.02.2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kategori Sarana dan Prasarana Kerja Kesehatan yang Memenuhi Standar (Obat dan Vaksin, Alat Kesehatan, Bahan Medis Habis Pakai, dan Bangunan/Fasilitas Fisik)	4 kategori	1.02.02.2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kategori Sarana dan Prasarana Kerja Kesehatan yang Memenuhi Standar (Obat dan Vaksin, Alat Kesehatan, Bahan Medis Habis Pakai, dan Bangunan/Fasilitas Fisik)	4 kategori	81.697.431.589,00	60.418.193.044,00	70.032.843.206,00	Kekurangan pembangunan PKM Jaro berdasarkan hasil reuiu ITDA, Perencanaan Gudang Alkes, Perbaikan Pagar IF, Pengadaan alat TCM, X Ray portable, X Ray (Ruangan), Pemantau suhu vaksin, Pembelian Lahan RSHBK, Penambahan BMHP, Penambahan Kegiatan Sunatan Massal, Monev dan Pemantauan Ke Lapangan kegiatan Homecare, penambahan Relokasi Alkes dan peralatan kantor RSUD Usman Dundrung.

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
Kabupaten Tabalong Tahun 2025

NO	BIDANG URUSAN	SEBELUM (RKPD Induk 2025)			SESUDAH (RKPD Perubahan 2025)			PAGU		RKPD 2025 PERUBAHAN	ALASAN PERUBAHAN
		PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET	RKPD 2025 (Induk)	APBD INDUK 2025 dan PERGESERAN		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Unit Pelayanan yang Menerapkan Standar Pelayanan	100%	1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Unit Pelayanan yang Menerapkan Standar Pelayanan	100%	46.858.256.083,00	64.142.396.286,00	65.652.961.693,00	Penambahan Pengadaan Buku KIA, Penambahan biaya pengiriman sampel SHK ke RSUP DR.Sardjito, Penambahan Kegiatan Lansia Tabalong SMART, Menggeser kegiatan dan menambah pagu anggaran untuk pertemuan pelaporan SIGIZI KESGA TERPADU dan uang harian pertemuan kader, Batik, Pembinaan Tenaga Kesehatan Tradisional Di Desa memerlukan pelatihan dan pembinaan, Tambahan luran BPJS, Penghargaan Swastisaba Penyelenggaraan Kabupaten Kota Sehat, Penyelenggaraan Workshop serta penambahan jumlah FKTP baru, Kegiatan meningkatkan capaian iDL di asik, menambah di anggaran perjalanan dalam kota, Makan Minum Hari Jadi,
		1.02.02.2.03 Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi	Persentase Penerapan Sistem Informasi Kesehatan Terintegrasi	100%	1.02.02.2.03 Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi	Persentase Penerapan Sistem Informasi Kesehatan Terintegrasi	100%	1.219.906.000,00	122.712.000,00	122.712.000,00	

NO	BIDANG URUSAN	SEBELUM (RKPD Induk 2025)			SESUDAH (RKPD Perubahan 2025)			PAGU		RKPD 2025 PERUBAHAN	ALASAN PERUBAHAN
		PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET	RKPD 2025 (Induk)	APBD INDUK 2025 dan PERGESERAN		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		1.02.02.2.04 Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang mendapatkan Pengawasan dan Pembinaan	100%	1.02.02.2.04 Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang mendapatkan Pengawasan dan Pembinaan	100%	818.827.000,00	345.351.000,00	750.928.821,00	Pemeriksaan KAP, Pendampingan BPKP, Aplikasi ePuskesmas untuk kegiatan Puskesmas ILP, pembuatan peraturan bupati, pelaksanaan PKG,
		1.02.03 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Rasio Dokter terhadap jumlah penduduk	1 : 2.000	1.02.03 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Rasio Dokter terhadap jumlah penduduk Persentase peningkatan kompetensi SDM Bidang Kesehatan	1 : 2.000 100%	3.539.543.740,00	2.584.288.400,00	3.343.818.400,00	
		1.02.03.2.01 Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota	Persentase tenaga kesehatan yang berijin	100%	1.02.03.2.01 Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota	Persentase tenaga kesehatan yang berijin	100%	17.145.000,00	5.425.000,00	5.425.000,00	
		1.02.03.2.02 Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Persentase Tenaga Kesehatan Sesuai Kompetensi	100%	1.02.03.2.02 Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Persentase Tenaga Kesehatan Sesuai Kompetensi	100%	3.279.949.740,00	2.184.489.400,00	2.167.844.400,00	Pergeseran belanja
		1.02.03.2.03 Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan (SDMK)	100%	1.02.03.2.03 Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan (SDMK)	100%	242.449.000,00	394.374.000,00	1.170.549.000,00	Penambahan kegiatan Diklat
		1.02.04 PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Persentase Faskes dengan ketersediaan obat esensial	100%	1.02.04 PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Persentase Cakupan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	100%	210.368.780,00	385.296.780,00	290.777.880,00	

NO	BIDANG URUSAN	SEBELUM (RKPD Induk 2025)			SESUDAH (RKPD Perubahan 2025)			PAGU		RKPD 2025 PERUBAHAN	ALASAN PERUBAHAN
		PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET	RKPD 2025 (Induk)	APBD INDUK 2025 dan PERGESERAN		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		1.02.04.2.01 Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Persentase Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, UMOT yang Dilakukan Tindak Lanjut Pengawasan	100%	1.02.04.2.01 Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Persentase Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, UMOT yang Dilakukan Tindak Lanjut Pengawasan	100%	37.556.400,00	117.894.200,00	94.967.800,00	Pengurangan Anggaran dipindah ke pengadaan obat BMHP
		1.02.04.2.03 Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Persentase sediaan farmasi alkes dan makanan minuman sesuai standar	100%	1.02.04.2.03 Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Persentase Penerbitan Sertifikat PIRT	100%	86.562.380,00	74.862.380,00	57.595.880,00	Pengurangan Anggaran dipindah ke pengadaan obat BMHP
		1.02.04.2.06 Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	Persentase Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market	90%	1.02.04.2.06 Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	Persentase Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market	90%	86.250.000,00	192.540.200,00	138.214.200,00	Pengurangan Anggaran dipindah ke pengadaan obat BMHP
		1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase UKBM Aktif	90%	1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan yang diberdayakan	90%	511.761.462,00	548.975.082,00	548.975.082,00	
		1.02.05.2.01 Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Peningkatan Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor	100%	1.02.05.2.01 Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Peningkatan Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor	100%	511.761.462,00	375.277.462,00	375.277.462,00	

NO	BIDANG URUSAN	SEBELUM (RKPD Induk 2025)			SESUDAH (RKPD Perubahan 2025)			PAGU		RKPD 2025 PERUBAHAN	ALASAN PERUBAHAN
		PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET	RKPD 2025 (Induk)	APBD INDUK 2025 dan PERGESERAN		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					1.02.05.2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat daerah Kabupaten/Kota	100%	0,00	173.697.620,00	173.697.620,00	
JUMLAH								231.263.541.077,00	267.728.648.245,00	284.988.740.496,00	
1.02.0.00.0.00.02.0000 RUMAH SAKIT H. BADARUDDIN KASIM											
1	X.XX. NON URUSAN	1.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Mewujudkan pemerintahan daerah yang profesional, transparan dan akuntabel (Nilai AKIP)	B	1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Predikat Nilai AKIP Perangkat Daerah	B	121.780.734.669,00	129.361.266.679,00	146.349.588.587,00	
		1.02.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya administrasi pelaksanaan tugas ASN	14 bulan	1.02.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase administrasi keuangan yang tertib, akuntabel dan tepat waktu	100%	45.385.395.000,00	48.843.139.000,00	48.843.139.000,00	
		1.02.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya administrasi kepegawaian perangkat daerah	100%	1.02.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pengelolaan dan pelayanan administrasi kepegawaian yang tepat waktu, mutakhir dan terdokumentasi	100%	1.777.142.000,00	1.446.553.000,00	1.446.553.000,00	Mengubah rincian belanja Belanja Kursus Singkat/Pelatihan dengan Spesifikasi Belanja Kursus Singkat/Pelatihan (Kontribusi Kursus/Pelatihan/Sosi alisasi dll)

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
Kabupaten Tabalong Tahun 2025

NO	BIDANG URUSAN	SEBELUM (RKPD Induk 2025)			SESUDAH (RKPD Perubahan 2025)			PAGU		RKPD 2025 PERUBAHAN	ALASAN PERUBAHAN
		PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET	RKPD 2025 (Induk)	APBD INDUK 2025 dan PERGESERAN		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		1.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya administrasi umum perangkat daerah	100%	1.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi umum yang terlaksana sesuai SOP	100%	2.019.499.710,00	2.057.389.560,00	800.000.000,00	Ada pergeseran dan Penambahan belanja modal peralatan studi audio dan Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film, Penambahan Mesin Penyikat Lantai (Floor Scrubber 2 Unit x Rp. 200.000.000 = Rp. 400.000.000) dan Robot Vacuum Cleaner (10 Unit x Rp.20.000.000 = Rp. 200.000.000)
		1.02.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya pengadaan BMD perangkat daerah	100%	1.02.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Realisasi Pengadaan Barang Milik Daerah yang sesuai dengan yang direncanakan	100%	389.040.585,00	800.000.000,00	2.701.446.180,00	
		1.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Penyediaan jasa Penunjang urusan pemerintah daerah	36 orang	1.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang difasilitasi/ disediakan	100%	912.248.625,00	4.916.776.370,00	4.916.776.370,00	
		1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase tersedianya Kegiatan Pelayanan BLUD	100%	1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD			71.297.408.749,00	71.297.408.749,00	87.641.674.037,00	Perubahan angka pendapatan menjadi Rp. 72.495.456.757 dan penambahan silpa Rp. 15.146.217.279
2	1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	a. IKM b. Persentase Capaian SPM c. Akreditasi	(3,59) B 100% Paripurna	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	a. IKM b. Persentase Capaian SPM c. Akreditasi	3,44 82% Paripurna	20.356.397.410,00	26.996.181.825,00	35.976.230.482,00	

NO	BIDANG URUSAN	SEBELUM (RKPD Induk 2025)			SESUDAH (RKPD Perubahan 2025)			PAGU		RKPD 2025 PERUBAHAN	ALASAN PERUBAHAN
		PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET	RKPD 2025 (Induk)	APBD INDUK 2025 dan PERGESERAN		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	BIDANG KESEHATAN	1.02.02.2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Terwujudnya Pengadaan alat kesehatan/alat penunjang medik pelayanan kesehatan	7 Paket	1.02.02.2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pengadaan alat Kesehatan/alat penunjang medik pelayanan kesehatan	100%	19.156.397.410,00	20.664.770.825,00	30.614.794.482,00	Penambahan alat kesehatan Electrical Safety Analyzer,Vital Signs Simulator,One-channel Infusion Device Analyzer, Venomatic, RONTGEN PORTABLE, SHIELDING PB MOBILE, EKG, STRECHER, BED PASIEN MANUAL (+BEDSIDE CABINET+TIANG INFUS+ OVERBED TABLE), BED PASIEN ELEKTRIK (+BEDSIDE CABINET+TIANG INFUS+ OVERBED TABLE), INFUSED PUMP, SYRINGE PUMP, SUCTION PUMP,WASHER LINEN 30 KG, TRB LASER HEMOROIDOPLASTY, MINOR SET,DIGITAL BABY SCALE AND MEASURING PLUS ADAPTOR,INSTRUMEN TROLLY,EASY MOVE,BLOOD WARMER, Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Kedokteran dan Belanja Barang Pakai Habis

NO	BIDANG URUSAN	SEBELUM (RKPD Induk 2025)			SESUDAH (RKPD Perubahan 2025)			PAGU		RKPD 2025 PERUBAHAN	ALASAN PERUBAHAN
		PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET	RKPD 2025 (Induk)	APBD INDUK 2025 dan PERGESERAN		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase layanan kesehatan UKM dan UKP rujukan	100%	1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase layanan kesehatan UKM dan UKP rujukan	100%	1.200.000.000,00	6.331.411.000,00	5.361.436.000,00	untuk belanja coldstorage Rp.969.975.000 di geser keBelanja Modal Alat Kesehatan Umum Lainnya
JUMLAH								142.137.132.079,00	156.357.448.504,00	182.325.819.069,00	
1.03.0.00.0.00.01.0000 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG											
1	X.XX. NON URUSAN	1.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Layanan Kesekretariatan	B	1.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Predikat Nilai AKIP Perangkat Daerah	B	20.268.295.443,00	21.171.879.570,00	26.480.058.934,00	1.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
		1.03.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya dokumen perencanaan dan laporan kinerja SKPD	100%	1.03.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase hasil perencanaan dan pelaporan yang dijadikan bahan evaluasi kinerja	100%	155.132.560,00	119.727.560,00	119.727.560,00	
		1.03.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya administrasi keuangan pada Dinas PUPR Kab. Tabalong	100%	1.03.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase administrasi keuangan yang tertib, akuntabel dan tepat waktu	100%	12.944.405.309,00	13.847.696.000,00	13.847.696.000,00	
		1.03.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya administrasi kepegawaian pada Dinas PUPR Kab. Tabalong	100%	1.03.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pengelolaan dan pelayanan administrasi kepegawaian yang tepat waktu, mutakhir dan terdokumentasi	100%	159.986.000,00	109.275.000,00	349.259.000,00	
		1.03.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya administrasi umum perkantoran	100%	1.03.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi umum yang terlaksana sesuai SOP	100%	1.127.718.046,00	1.136.210.434,00	2.548.386.798,00	
		1.03.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya pengadaan BMD perangkat daerah	100%	1.03.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Realisasi Pengadaan Barang Milik Daerah yang sesuai dengan yang direncanakan	100%	2.884.915.000,00	2.586.979.000,00	6.000.000.000,00	

NO	BIDANG URUSAN	SEBELUM (RKPD Induk 2025)			SESUDAH (RKPD Perubahan 2025)			PAGU		RKPD 2025 PERUBAHAN	ALASAN PERUBAHAN
		PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET	RKPD 2025 (Induk)	APBD INDUK 2025 dan PERGESERAN		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		1.03.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya jasa penunjang urusan kantor Dinas PUPR Kab. Tabalong	100%	1.03.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang difasilitasi/ disediakan	100%	1.663.829.200,00	2.060.397.976,00	2.060.397.976,00	
		1.03.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya pemeliharaan barang milik daerah pada Dinas PUPR Kab. Tabalong	100%	1.03.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang yang dipelihara dan berfungsi sesuai kondisi standar	100%	1.332.309.328,00	1.311.593.600,00	1.554.591.600,00	
2	1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Rasio jaringan irigasi Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik	6,36% 75%	1.03.02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Rasio jaringan irigasi	113.152 : 16.640	17.043.348.220,00	15.450.891.220,00	15.148.455.447,00	1.03.02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)
		1.03.02.2.01 Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya pengelolaan SDA dan bangunan pengaman pantai pada wilayah sungai di Kabupaten Tabalong	100%	1.03.02.2.01 Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	a. Panjang Tanggul Sungai yang Direhabilitasi b. Jumlah Sumur Air Tanah untuk Air Baku yang Dibangun c. Jumlah Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir yang Direhabilitasi d. Jumlah Lembaga Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota yang Dibina dan Diberdayakan	a. 0.30 b. 2 c. 2 d. 20	6.282.610.400,00	5.975.883.400,00	3.902.262.947,00	
		1.03.02.2.02 Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1	Terlaksananya pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi primer dan sekunder di Kabupaten Tabalong	100%	1.03.02.2.02 Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1	a. Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Ditingkatkan b. Jumlah Bendung Irigasi yang Dibangun c. Jumlah Bendung Irigasi yang Direhabilitasi	a. 1 b. 1 c. 1	10.760.737.820,00	9.475.007.820,00	11.246.192.500,00	

NO	BIDANG URUSAN	SEBELUM (RKPD Induk 2025)			SESUDAH (RKPD Perubahan 2025)			PAGU		RKPD 2025 PERUBAHAN	ALASAN PERUBAHAN
		PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET	RKPD 2025 (Induk)	APBD INDUK 2025 dan PERGESERAN		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		(Satu) Daerah Kabupaten/Kota			(Satu) Daerah Kabupaten/Kota	d. Panjang Jaringan Irigasi Rawa yang Ditingkatkan f. Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi g. Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara	e. 0,55 f. 2,00 g. 5,50				
		1.03.03 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase penduduk berakses air minum	74,99%	1.03.03 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	a. Persentase Rumah Tangga Berakses Air Minum b. Persentase Rumah Tangga yang mendapatkan akses air minum perpipaan	a. 100,00 b. 51,50	25.000.000.000,00	24.810.584.000,00	50.047.829.464,00	
		1.03.03.2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksana pengembangan dan pengelolaan sistem Pengelolaan Air minum di Kabupaten Tabalong	100%	1.03.03.2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Masyarakat yang dibina dan diberdayakan dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	300	25.000.000.000,00	24.810.584.000,00	50.047.829.464,00	
		1.03.05 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase rumah tinggal bersanitasi	96,43%	1.03.05 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH			6.624.524.259,00	6.311.377.400,00	0,00	
		1.03.05.2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik di Kab. Tabalong	100%	1.03.05.2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota			6.624.524.259,00	6.311.377.400,00	0,00	

NO	BIDANG URUSAN	SEBELUM (RKPD Induk 2025)			SESUDAH (RKPD Perubahan 2025)			PAGU		RKPD 2025 PERUBAHAN	ALASAN PERUBAHAN
		PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET	RKPD 2025 (Induk)	APBD INDUK 2025 dan PERGESERAN		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		1.03.06 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Persentase terlaksananya pengelolaan dan pengembangan sistem drainase yang direncanakan	100%	1.03.06 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE			3.000.000.000,00	3.000.000.000,00	0,00	
		1.03.06.2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase terlaksananya pengelolaan dan pengembangan sistem drainase yang direncanakan	100%	1.03.06.2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota			3.000.000.000,00	3.000.000.000,00	0,00	
					1.03.07 PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	9650%	0,00	0,00	6.321.377.400,00	
					1.03.07.2.01 Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	a. Jumlah Rumah Tangga yang memiliki toilet dan tangki septik sesuai dengan standar b. Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat (IPLT) di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota yang dioptimalisasi c. Jumlah Rumah Tangga di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota yang Terlayani Jasa Penyedotan Lumpur Tinja	a. 104 b. 1 c. 150	0,00	0,00	6.321.377.400,00	

[illegible]

NO	BIDANG URUSAN	SEBELUM (RKPD Induk 2025)			SESUDAH (RKPD Perubahan 2025)			PAGU		RKPD 2025 PERUBAHAN	ALASAN PERUBAHAN
		PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET	RKPD 2025 (Induk)	APBD INDUK 2025 dan PERGESERAN		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						Dirawat, dan Diperiksa Berkala					
		1.03.10 PROGRAM PENYELENGGARAA N JALAN	a. Persentase desa yang dapat diakses dengan mudah b. Persentase jalan kabupaten dalam kondisi mantap	a. 100% b. 79,80%	1.03.10 PROGRAM PENYELENGGARAA N JALAN	a. Persentase jalan Kabupaten dalam kondisi mantap b. Persentase Jembatan Kabupaten Dalam Kondisi Mantap	a. 73,00 b. 92,28	303.232.336.030,00	434.798.731.082,00	574.697.482.709,00	
		1.03.10.2.01 Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Penyelenggaraan Jalan di Kabupaten Tabalong	100%	1.03.10.2.01 Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	a. Panjang Jembatan yang Direhabilitasi b. Panjang jembatan yang dibangun c. Panjang Jalan yang Direkonstruksi d. Panjang Jalan yang Direhabilitasi e. Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin f. Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Berkala g. Panjang Jalan yang Dilebarkan Menuju Standar h. Panjang Jalan yang Dibangun Sampai Perkerasan i. Jumlah Jembatan yang Dipelihara Secara Rutin	a. 80,00 b. 100,00 c. 10,00 d. 10,00 e. 22,55 f. 36,00 g. 10,00 h. 35,50 i. 27,00	303.232.336.030,00	434.798.731.082,00	574.697.482.709,00	

NO	BIDANG URUSAN	SEBELUM (RKPD Induk 2025)			SESUDAH (RKPD Perubahan 2025)			PAGU		RKPD 2025 PERUBAHAN	ALASAN PERUBAHAN
		PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET	RKPD 2025 (Induk)	APBD INDUK 2025 dan PERGESERAN		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		1.03.11 PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Persentase penerapan manajemen mutu konstruksi	100%	1.03.11 PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Persentase penerapan manajemen mutu konstruksi	100%	1.398.868.499,00	946.135.367,00	777.029.107,00	
		1.03.11.2.01 Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Terlaksananya Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	100%	1.03.11.2.01 Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	a. Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Dibina dan Ditingkatkan Kapasitasnya b. Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis yang Dilatih c. Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Difasilitasi Sertifikasi	a. 8 b. 70 c. 50	908.862.200,00	724.118.797,00	496.106.807,00	
		1.03.11.2.02 Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi di Kabupaten Tabalong	100%	1.03.11.2.02 Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota yang Disediakan	2	264.723.869,00	133.624.140,00	215.603.640,00	
		1.03.11.2.03 Penerbitan Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional (Non Kecil dan Kecil)	Persentase penerbitan izin usaha jaskon	100%	1.03.11.2.03 Penerbitan Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional (Non Kecil dan Kecil)			75.763.460,00	5.053.460,00	0,00	
		1.03.11.2.04 Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Terlaksananya Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	100%	1.03.11.2.04 Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Jumlah Paket Pekerjaan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Penyelenggaraan	25	149.518.970,00	83.338.970,00	65.318.660,00	
		1.03.12 PROGRAM PENYELENGGARAA	Persentase kawasan terbangun	2%	1.03.12 PROGRAM PENYELENGGARAA	Persentase Ketaatan Tata Ruang	15.63	7.748.864.000,00	4.085.345.900,00	4.084.882.800,00	

NO	BIDANG URUSAN	SEBELUM (RKPD Induk 2025)			SESUDAH (RKPD Perubahan 2025)			PAGU		RKPD 2025 PERUBAHAN	ALASAN PERUBAHAN
		PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET	RKPD 2025 (Induk)	APBD INDUK 2025 dan PERGESERAN		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		N PENATAAN RUANG	Ketaatan terhadap RTRW	100%	N PENATAAN RUANG						
		1.03.12.2.01 Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	Terlaksananya Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten Tabalong	100%	1.03.12.2.01 Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	Jumlah laporan sosialisasi kebijakan dan peraturan perundang-undangan bidang penataan ruang.	1	2.193.916.100,00	1.489.924.900,00	1.489.461.800,00	
		1.03.12.2.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang	100%	1.03.12.2.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah materi teknis dan ranperkada RDTR Kabupaten/Kota	1	3.341.137.300,00	1.552.946.400,00	1.552.946.400,00	
		1.03.12.2.03 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten Tabalong	100%	1.03.12.2.03 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sistem informasi dan komunikasi penataan ruang	1	639.500.000,00	325.529.600,00	325.529.600,00	
		1.03.12.2.04 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten Tabalong	100%	1.03.12.2.04 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	1	1.574.310.600,00	716.945.000,00	716.945.000,00	
JUMLAH								449.559.617.240,00	570.196.831.512,00	791.777.159.486,00	
1.04.2.10.0.00.01.0000 DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN											
1	X.XX. NON URUSAN	1.04.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai AKIP	BB (80)	1.04.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Predikat Nilai AKIP Perangkat Daerah	BB	10.210.558.631,00	12.389.306.453,00	12.391.883.608,00	
		1.04.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPD	100%	1.04.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase hasil perencanaan dan pelaporan yang dijadikan bahan evaluasi kinerja	100%	129.613.200,00	218.376.825,00	280.761.200,00	penambahan biaya fotokopi, penjilidan dokumen perencanaan dan keuangan dan

NO	BIDANG URUSAN	SEBELUM (RKPD Induk 2025)			SESUDAH (RKPD Perubahan 2025)			PAGU		RKPD 2025 PERUBAHAN	ALASAN PERUBAHAN
		PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET	RKPD 2025 (Induk)	APBD INDUK 2025 dan PERGESERAN		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		1.04.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN	100%	1.04.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase administrasi keuangan yang tertib, akuntabel dan tepat waktu	100%	5.535.321.000,00	7.734.538.000,00	7.734.538.000,00	
		1.04.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tertaksananya kegiatan administrasi umum	100%	1.04.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi umum yang terlaksana sesuai SOP	100%	1.432.903.289,00	1.153.684.207,00	1.272.652.397,00	pembelian gordena kantor, penambahan honor PPTK dan pemasangan stiker kaca ruangan kantor
		1.04.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan	12 Bulan	1.04.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang difasilitasi/ disediakan	100%	2.415.231.142,00	2.790.217.421,00	2.508.302.011,00	pengurangan honor tenaga kontrak, penambahan makmin rapat, penambahan pengadaan baju ASN
		1.04.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	1.04.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang yang dipelihara dan berfungsi sesuai kondisi standar	100%	697.490.000,00	492.490.000,00	595.630.000,00	penambahan biaya service 3 unit pickup lapangan
2	1.04 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	1.04.02 PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Persentase Rumah Korban Bencana/Relokasi Program Pemerintah	100%	1.04.02 PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Persentase peningkatan pengembangan perumahan	33%	2.363.665.000,00	1.110.365.000,00	1.110.365.000,00	
		1.04.02.2.03 Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Layak Huni Bagi Korban Bencana Kab/Kota	56 Unit	1.04.02.2.03 Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Persentase pembangunan dan rehabilitasi rumah korban bencana atau relokasi program kabupaten/kota	20%	2.363.665.000,00	1.110.365.000,00	1.110.365.000,00	
		1.04.03 PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase kawasan kumuh dibawah 10 Ha yang ditangani	85,00%	1.04.03 PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase rumah dan PSU yang ditangani di kawasan kumuh	13,00%	14.154.338.432,00	15.255.151.285,00	15.166.211.225,00	
		1.04.03.2.03 Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Cakupan Kawasan Permukiman Kumuh kurang dari 10 Ha yang ditangani	10 Ha	1.04.03.2.03 Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Persentase rumah tidak layak huni dan PSU yang ditangani di kawasan kumuh	20%	14.154.338.432,00	15.255.151.285,00	15.166.211.225,00	dilakukan pengurangan dan pergeseran penanganan fisik kumuh

NO	BIDANG URUSAN	SEBELUM (RKPD Induk 2025)			SESUDAH (RKPD Perubahan 2025)			PAGU		RKPD 2025 PERUBAHAN	ALASAN PERUBAHAN
		PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET	RKPD 2025 (Induk)	APBD INDUK 2025 dan PERGESERAN		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		1.04.04 PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Persentase permukiman yang tertata	100%	1.04.04 PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Persentase kawasan permukiman tertata	56%	6.486.684.000,00	6.412.900.000,00	6.412.900.000,00	
		1.04.04.2.01 Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan RTLH dan PSU diluar kawasan permukiman kumuh dibawah 10 Ha yang ditangani	100%	1.04.04.2.01 Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	Persentase rumah tidak layak huni yang ditangani di luar kawasan kumuh	20%	6.486.684.000,00	6.412.900.000,00	6.412.900.000,00	
		1.04.05 PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Persentase Kawasan Permukiman Yang Didukung PSU	100%	1.04.05 PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Persentase PSU yang ditangani	70%	118.961.909.716,00	123.310.623.796,00	149.854.368.018,00	
		1.04.05.2.01 Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Meningkatnya Kualitas PSU di Perumahan dan Permukiman	100%	1.04.05.2.01 Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Persentase terbangunnya fasilitas PSU	20%	118.961.909.716,00	123.310.623.796,00	149.854.368.018,00	penambahan dokumen perencanaan lokasi dan penanganan fisik PSU dan PJU
3	2.10 URUSAN PEMERINTAH AN BIDANG PERTANAHAN	2.10.04 PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	Persentase kasus tanah tertangani	100%	2.10.04 PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	Persentase tanah garapan yang ditangani	20%	71.621.000,00	40.860.500,00	40.860.500,00	
		2.10.04.2.01 Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kasus sengketa tanah tertangani	3 Kasus	2.10.04.2.01 Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase fasilitasi sengketa tanah garapan	20%	71.621.000,00	40.860.500,00	40.860.500,00	
		2.10.05 PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	Persentase Luas Lahan Yang Bersertifikat	100%	2.10.05 PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	Persentase penyelesaian ganti kerugian tanah dan santunan	20%	29.147.238.000,00	15.411.119.000,00	22.387.219.000,00	

NO	BIDANG URUSAN	SEBELUM (RKPD Induk 2025)			SESUDAH (RKPD Perubahan 2025)			PAGU		RKPD 2025 PERUBAHAN	ALASAN PERUBAHAN
		PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET	RKPD 2025 (Induk)	APBD INDUK 2025 dan PERGESERAN		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2.10.05.2.01 Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase tanah terbayar.	100%	2.10.05.2.01 Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase luas tanah ganti kerugian tanah dan santunan	20%	29.147.238.000,00	15.411.119.000,00	22.387.219.000,00	penambahan lokasi pengadaan tanah
		2.10.06 PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, DAN GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE	Persentase bidang tanah yang terdistribusi	100%	2.10.06 PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, DAN GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE	Persentase koordinasi penyelenggaraan redistribusi tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee	20%	200.034.000,00	146.242.000,00	146.248.000,00	
		2.10.06.2.01 Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	jumlah bidang tanah yang terdistribusi	350 bidang	2.10.06.2.01 Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase koordinasi penyelenggaraan redistribusi tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee	20%	200.034.000,00	146.242.000,00	146.248.000,00	dilakukan pergeseran internal
JUMLAH								181.596.048.779,00	174.076.568.034,00	207.510.055.351,00	
1.05.0.00.0.00.01.0000 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN											
1	X.XX. NON URUSAN	1.05.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai AKIP	BB	1.05.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Predikat Nilai AKIP Perangkat Daerah	BB	18.808.735.886,00	23.743.582.434,00	24.037.721.769,00	
		1.05.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100%	1.05.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase hasil perencanaan dan pelaporan yang dijadikan bahan evaluasi kinerja	100%	372.136.568,00	91.138.568,00	103.171.568,00	kegiatan statistik dalam rangka pengumpulan data, sesuai arahan bidang statistik dan persandian diskominfo

NO	BIDANG URUSAN	SEBELUM (RKPD Induk 2025)			SESUDAH (RKPD Perubahan 2025)			PAGU		RKPD 2025 PERUBAHAN	ALASAN PERUBAHAN
		PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET	RKPD 2025 (Induk)	APBD INDUK 2025 dan PERGESERAN		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		1.05.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	1.05.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase administrasi keuangan yang tertib, akuntabel dan tepat waktu	100%	7.466.085.303,00	12.480.673.303,00	12.480.673.303,00	
		1.05.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Terlaksananya pengadaan BMD perangkat daerah	100%	1.05.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase pengadministrasian Barang Milik Daerah (BMD) yang akurat lengkap dan mutakhir.	100%	43.328.552,00	8.570.552,00	8.570.552,00	

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
Kabupaten Tabalong Tahun 2025

NO	BIDANG URUSAN	SEBELUM (RKPD Induk 2025)			SESUDAH (RKPD Perubahan 2025)			PAGU		RKPD 2025 PERUBAHAN	ALASAN PERUBAHAN
		PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET	RKPD 2025 (Induk)	APBD INDUK 2025 dan PERGESERAN		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		1.05.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	1.05.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pengelolaan dan pelayanan administrasi kepegawaian yang tepat waktu, mutakhir dan terdokumentasi	100%	1.243.110.044,00	609.690.240,00	1.447.829.800,00	Pergeseran Anggaran Penyesuaian Pengadaan Pakaian Dinas sesuai arahan dari Ditjen Bina Adwil Kemendagri RI untuk Menyesuaikan Pengadaan Pakaian Satpol PP sesuai dengan Permendagri No. 17 Tahun 2019 dan Permendagri No. 04 Tahun 2023 untuk Pegawai pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Tabalong dan untuk menindaklanjuti catatan strategis LKPJ DPRD yang meminta agar SatpolPP meningkatkan kapasitas SDM dan Biaya Kontribusi Pelatihan Inspektur Pemadam Kebakaran dan Peningkatan Kapasitas Pegawai sesuai dengan tugas dan fungsinya

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
Kabupaten Tabalong Tahun 2025

NO	BIDANG URUSAN	SEBELUM (RKPD Induk 2025)			SESUDAH (RKPD Perubahan 2025)			PAGU		RKPD 2025 PERUBAHAN	ALASAN PERUBAHAN
		PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET	RKPD 2025 (Induk)	APBD INDUK 2025 dan PERGESERAN		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		1.05.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	1.05.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi umum yang terlaksana sesuai SOP	100%	5.300.064.171,00	4.043.032.418,00	2.506.025.129,00	Pergeseran Anggaran untuk Penambahan fasilitas penting pendukung ruangan rapat untuk mendukung koordinasi dan pembahasan antar unit kerja/Instansi atau stakeholder dan untuk koordinasi Luar Daerah dan Dalam Daerah untuk mendukung sinergitas dan kerjasama antar Instansi terkait dan mendukung koordinasi terkait inovasi peningkatan kinerja khususnya pada urusan pemerintahan bidang ketentaraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat
		1.05.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	1.05.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang difasilitasi/ disediakan	100%	1.693.760.680,00	4.011.528.931,00	3.280.829.338,00	Persegeran antar sub kegiatan

NO	BIDANG URUSAN	SEBELUM (RKPD Induk 2025)			SESUDAH (RKPD Perubahan 2025)			PAGU		RKPD 2025 PERUBAHAN	ALASAN PERUBAHAN
		PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET	RKPD 2025 (Induk)	APBD INDUK 2025 dan PERGESERAN		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		1.05.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan daerah	100%	1.05.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang yang dipelihara dan berfungsi sesuai kondisi standar	100%	2.690.250.568,00	2.498.948.422,00	4.210.622.079,00	Pergeseran Anggaran untuk Pemeliharaan Gedung dikarenakan usia bangunan gedung sudah cukup lama sehingga memerlukan pemeliharaan secara intensif dan untuk menghindari kerusakan yang signifikan serta mendukung efektifitas penggunaan sarana dan prasarana operasional serta meningkatkan keamanan dan keselamatan kerja
2	1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	1.05.02 PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	a. Persentase Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota b. Persentase Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Walikota	a. 100% b. 100%	1.05.02 PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Penyelesaian K3 (Ketenteraman, Ketertiban dan Kenyamanan)	100%	6.670.789.168,00	2.594.076.250,00	2.629.816.630,00	

NO	BIDANG URUSAN	SEBELUM (RKPD Induk 2025)			SESUDAH (RKPD Perubahan 2025)			PAGU		RKPD 2025 PERUBAHAN	ALASAN PERUBAHAN
		PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET	RKPD 2025 (Induk)	APBD INDUK 2025 dan PERGESERAN		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		1.05.02.2.01 Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	100%	1.05.02.2.01 Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Terlaksananya Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	100%	5.576.946.381,00	2.025.835.165,00	2.042.306.945,00	Penambahan Belanja Perjalanan Dinas Biasa Untuk Pelaksanaan Kegiatan Haji Tahun 2025
		1.05.02.2.02 Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Terlaksananya Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Walikota	100%	1.05.02.2.02 Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Persentase Terlaksananya Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Walikota	100%	826.986.395,00	472.311.693,00	448.383.293,00	Peningkatan Sarana dan Prasarana untuk mendukung Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah
		1.05.02.2.03 Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	Prosentasi penyidik PNS yang dibina	100%	1.05.02.2.03 Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	Persentase Terlaksananya Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	100%	266.856.392,00	95.929.392,00	139.126.392,00	Peningkatan kerja sama antar lembaga dan kemitraan dalam pelaksanaan penegakan peraturan daerah
		1.05.04 PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	a. Cakupan pencegahan penanggulangan kebakaran b. Terpenuhinya sarana dan prasarana pencegahan penanggulangan kebakaran	a. 100% b. 5 unit	1.05.04 PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Persentase Pencegahan Penanggulangan Kebakaran (Respon Cepat Darurat Kebakaran)	100%	10.648.103.335,00	9.503.656.335,00	9.106.570.335,00	

NO	BIDANG URUSAN	SEBELUM (RKPD Induk 2025)			SESUDAH (RKPD Perubahan 2025)			PAGU		RKPD 2025 PERUBAHAN	ALASAN PERUBAHAN
		PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET	RKPD 2025 (Induk)	APBD INDUK 2025 dan PERGESERAN		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		1.05.04.2.01 Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	100%	1.05.04.2.01 Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Terlaksananya Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penangan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	100%	10.648.103.335,00	9.503.656.335,00	9.106.570.335,00	Pergeseran Anggaran karena ada usulan SSH yang belum muncul di SIPD
JUMLAH								36.127.628.389,00	35.841.315.019,00	35.774.108.734,00	
1.05.0.00.0.00.02.0000 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH											
1	X.XX. NON URUSAN	1.05.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai AKIP	BB	1.05.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Predikat Nilai AKIP Perangkat Daerah	BB	9.278.240.123,00	10.762.245.336,00	11.044.362.154,00	
		1.05.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Terlaksananya Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaliasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	1.05.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase hasil perencanaan dan pelaporan yang dijadikan bahan evaluasi kinerja	100%	51.198.000,00	51.198.000,00	51.198.000,00	
		1.05.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat daerah	100%	1.05.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase administrasi keuangan yang tertib, akuntabel dan tepat waktu	100%	5.208.245.055,00	7.884.662.000,00	7.884.662.000,00	Penambahan ASN P3K
		1.05.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat daerah	100%	1.05.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pengelolaan dan pelayanan administrasi kepegawaian yang tepat waktu, mutakhir dan terdokumentasi	100%	220.000.000,00	217.900.000,00	217.900.000,00	

NO	BIDANG URUSAN	SEBELUM (RKPD Induk 2025)			SESUDAH (RKPD Perubahan 2025)			PAGU		RKPD 2025 PERUBAHAN	ALASAN PERUBAHAN
		PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET	RKPD 2025 (Induk)	APBD INDUK 2025 dan PERGESERAN		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		1.05.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	1.05.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi umum yang terlaksana sesuai SOP	100%	1.043.047.073,00	733.713.503,00	826.536.321,00	Penambahan Pengadaan Loker Sebagai Tempat Penyimpanan Barang Kesiapsiagaan Sehingga meningkatkan efisiensi dan produktivitas dan mengurangi waktu mencari APD dalam keadaan Darurat
		1.05.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	1.05.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang difasilitasi/ disediakan	100%	740.531.195,00	983.471.833,00	983.471.833,00	
		1.05.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Terpelihara Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	1.05.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang yang dipelihara dan berfungsi sesuai kondisi standar	100%	2.015.218.800,00	891.300.000,00	1.080.594.000,00	Penambahan Anggaran Untuk Pembelian Lahan UPBS
2	1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	1.05.03 PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Persentase Cakupan Penanggulangan Korban Bencana	100%	1.05.03 PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Persentase Kapasitas Daerah Dalam Penanggulangan Bencana	100%	9.471.597.605,00	8.172.115.199,00	8.056.168.381,00	
		1.05.03.2.01 Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Persentase Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kab/Kota	100%	1.05.03.2.01 Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Persentase Meningkatnya Pelayanan Informasi Penanggulangan Bencana	100%	356.143.200,00	296.664.920,00	302.664.920,00	Penambahan Anggaran Souvenir Untuk Edukasi Bencana
		1.05.03.2.02 Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Persentase Pelayanan Pencegahan Dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	100%	1.05.03.2.02 Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Persentase Penanganan Pra Bencana	100%	6.616.337.805,00	6.265.944.527,00	6.008.922.709,00	Penambahan Anggaran Pengadaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan
		1.05.03.2.03 Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Persentase Pelayanan Penyelamatan Dan Evakuasi Korban bencana	100%	1.05.03.2.03 Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Persentase Penanganan Tanggap Darurat Bencana	100%	1.719.116.600,00	1.240.980.364,00	1.376.055.364,00	Penambahan Anggaran makan Minum Untuk Posko Karhutla

NO	BIDANG URUSAN	SEBELUM (RKPD Induk 2025)			SESUDAH (RKPD Perubahan 2025)			PAGU		RKPD 2025 PERUBAHAN	ALASAN PERUBAHAN
		PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET	RKPD 2025 (Induk)	APBD INDUK 2025 dan PERGESERAN		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		1.05.03.2.04 Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Persentase Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	100%	1.05.03.2.04 Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Persentase Peningkatan Upaya Penanganan Pasca Bencana	100%	780.000.000,00	368.525.388,00	368.525.388,00	
JUMLAH								18.749.837.728,00	18.934.360.535,00	19.100.530.535,00	
1.06.0.00.0.00.01.0000 DINAS SOSIAL											
1	X.XX. NON URUSAN	1.06.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Akip	BB	1.06.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Predikat Nilai AKIP Perangkat Daerah	BB	8.866.659.825,00	10.234.661.797,75	11.039.114.117,25	
		1.06.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyusunan perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja SKPD	100%	1.06.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase hasil perencanaan dan pelaporan yang dijadikan bahan evaluasi kinerja	100%	34.440.000,00	23.545.000,00	23.545.000,00	Meningkatkan kualitas Pelayanan publik untuk mendukung pencapaian indeks reformasi birokrasi yang maksimal
		1.06.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Penatausahaan Keuangan	100%	1.06.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase administrasi keuangan yang tertib, akuntabel dan tepat waktu	100%	4.856.588.000,00	7.065.234.000,00	7.065.234.000,00	Meningkatkan kualitas Pendidikan, pelayanan Kesehatan untuk penurunan stunting untuk pencapaian kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing
		1.06.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya administrasi kepegawaian perangkat daerah	100%	1.06.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pengelolaan dan pelayanan administrasi kepegawaian yang tepat waktu, mutakhir dan terdokumentasi	100%	29.970.000,00	38.850.000,00	38.850.000,00	Meningkatkan pemenuhan sarana dan prasarana infrastruktur dasar untuk mendukung IKN

NO	BIDANG URUSAN	SEBELUM (RKPD Induk 2025)			SESUDAH (RKPD Perubahan 2025)			PAGU		RKPD 2025 PERUBAHAN	ALASAN PERUBAHAN
		PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET	RKPD 2025 (Induk)	APBD INDUK 2025 dan PERGESERAN		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		1.06.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penatausahaan Administrasi Umum dan Kepegawaian	100%	1.06.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi umum yang terlaksana sesuai SOP	100%	720.742.224,00	389.150.471,25	623.911.123,25	Meningkatkan pemenuhan sarana dan prasarana infrastruktur dasar untuk mendukung IKN, Penambahan kursi dan meja kerja serta laptop untuk tenaga PPPK yang baru, karena ketersediaan laptop, kursi dan meja kerja yang tersedia saat ini tidak mencukupi dan Biaya Koran yang tidak mencukupi
		1.06.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pengadaan Kendaraan Dinas Roda 2 dan Roda 4	100%	1.06.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Realisasi Pengadaan Barang Milik Daerah yang sesuai dengan yang direncanakan	100%	1.531.571.437,00	986.700.422,50	1.542.327.597,00	Meningkatkan pemenuhan sarana dan prasarana infrastruktur dasar untuk mendukung IKN dan Pengurukan Tanah untuk perluasan Bangunan Kantor
		1.06.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penatausahaan Administrasi Umum dan Kepegawaian	100%	1.06.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang difasilitasi/ disediakan	100%	1.144.223.980,00	1.182.057.720,00	1.106.361.140,00	Meningkatkan kualitas Pelayanan publik untuk mendukung pencapaian indeks reformasi birokrasi yang maksimal
		1.06.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Sarana dan Prasarana yang terpelihara	100%	1.06.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang yang dipelihara dan berfungsi sesuai kondisi standar	100%	549.124.184,00	549.124.184,00	638.885.257,00	Meningkatkan kualitas Pelayanan publik untuk mendukung pencapaian indeks reformasi birokrasi yang maksimal
2	1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	1.06.02 PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase PSKS yang berpartisipasi dalam penyelenggaraan	100%	1.06.02 PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase PSKS yang berpartisipasi dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial	100%	4.027.272.078,00	4.170.092.920,00	4.375.384.120,00	

NO	BIDANG URUSAN	SEBELUM (RKPD Induk 2025)			SESUDAH (RKPD Perubahan 2025)			PAGU		RKPD 2025 PERUBAHAN	ALASAN PERUBAHAN
		PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET	RKPD 2025 (Induk)	APBD INDUK 2025 dan PERGESERAN		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			kesejahteraan sosial								
		1.06.02.2.02 Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Sosialisasi Prosedur Pemberian Izin Pengumpulan Sumbangan (Barang dan Uang) yang terjadi di Masyarakat	2 Kegiatan	1.06.02.2.02 Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Sosialisasi Prosedur Pemberian Izin Pengumpulan Sumbangan (Barang dan Uang) yang terjadi di Masyarakat	2 Kegiatan	82.059.000,00	23.215.000,00	23.215.000,00	Meningkatkan pemenuhan sarana dan prasarana infrastruktur dasar untuk mendukung IKN
		1.06.02.2.03 Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah PSKS yang berpartisipasi dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial	341 orang	1.06.02.2.03 Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah PSKS yang berpartisipasi dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial	341 orang	3.945.213.078,00	4.146.877.920,00	4.352.169.120,00	Meningkatkan kualitas Pendidikan, pelayanan Kesehatan untuk penurunan stunting untuk pencapaian kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing
		1.06.04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase PPKS yang mendapatkan Layanan Rehabilitasi Sosial	100%	1.06.04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase PPKS yang mendapatkan Layanan Rehabilitasi Sosial	100%	4.656.000.000,00	5.235.957.867,00	4.096.869.147,00	
		1.06.04.2.01 Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Jumlah PPKS yang mendapatkan Layanan Rehabilitasi Sosial Dasar	2871 orang	1.06.04.2.01 Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Jumlah PPKS yang mendapatkan Layanan Rehabilitasi Sosial Dasar	2871 orang	3.420.000.000,00	4.248.045.000,00	3.482.485.436,00	Meningkatkan kualitas Pendidikan, pelayanan Kesehatan untuk penurunan stunting untuk pencapaian kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing
		1.06.04.2.02 Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Jumlah PPKS yang mendapatkan Layanan Rehabilitasi Sosial Lanjutan	78 orang	1.06.04.2.02 Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Jumlah PPKS yang mendapatkan Layanan Rehabilitasi Sosial Lanjutan	78 orang	1.236.000.000,00	987.912.867,00	614.383.711,00	Meningkatkan kualitas Pendidikan, pelayanan Kesehatan untuk penurunan stunting untuk pencapaian kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing

NO	BIDANG URUSAN	SEBELUM (RKPD Induk 2025)			SESUDAH (RKPD Perubahan 2025)			PAGU		RKPD 2025 PERUBAHAN	ALASAN PERUBAHAN
		PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET	RKPD 2025 (Induk)	APBD INDUK 2025 dan PERGESERAN		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		1.06.05 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase PPKS yang mendapatkan Layanan Perlindungan dan Jaminan Sosial	100%	1.06.05 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase PPKS yang mendapatkan Layanan Perlindungan dan Jaminan Sosial	100%	28.120.575.435,00	28.562.198.439,00	30.207.052.039,00	
		1.06.05.2.01 Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar	Jumlah Anak Panti yang mendapatkan bantuan	650 anak	1.06.05.2.01 Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar	Jumlah Anak Panti yang mendapatkan bantuan	650 anak	5.640.100.000,00	5.584.500.000,00	5.584.500.000,00	Meningkatkan kesempatan kerja dan berusaha, menurunkan kemiskinan dan angka pengangguran untuk pertumbuhan ekonomi yang berkualitas
		1.06.05.2.02 Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah PPKS yang mendapatkan Layanan Perlindungan dan Jaminan Sosial	4700 KPM	1.06.05.2.02 Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah PPKS yang mendapatkan Layanan Perlindungan dan Jaminan Sosial	4700 KPM	22.480.475.435,00	22.977.698.439,00	24.622.552.039,00	Meningkatkan kesempatan kerja dan berusaha, menurunkan kemiskinan dan angka pengangguran untuk pertumbuhan ekonomi yang berkualitas
		1.06.06 PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase Korban bencana yang mendapatkan bantuan sosial	100%	1.06.06 PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase Korban bencana yang mendapatkan bantuan sosial	100%	883.456.560,00	461.578.854,25	496.952.799,25	
		1.06.06.2.01 Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Penyediaan Baperstok untuk Keluarga Korban Bencana	5000 jiwa	1.06.06.2.01 Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Penyediaan Baperstok untuk Keluarga Korban Bencana	5000 jiwa	194.004.400,00	194.004.400,00	194.004.400,00	Meningkatkan kualitas Pendidikan, pelayanan Kesehatan untuk penurunan stunting untuk pencapaian kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing

NO	BIDANG URUSAN	SEBELUM (RKPD Induk 2025)			SESUDAH (RKPD Perubahan 2025)			PAGU		RKPD 2025 PERUBAHAN	ALASAN PERUBAHAN
		PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET	RKPD 2025 (Induk)	APBD INDUK 2025 dan PERGESERAN		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		1.06.06.2.02 Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Jiwa terdampak Bencana yang mendapatkan Bantuan (Bencana Banjir)	5000 jiwa	1.06.06.2.02 Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Jiwa terdampak Bencana yang mendapatkan Bantuan (Bencana Banjir)	5000 jiwa	689.452.160,00	267.574.454,25	302.948.399,25	Meningkatkan kualitas Pendidikan, pelayanan Kesehatan untuk penurunan stunting untuk pencapaian kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing
		1.06.07 PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Persentase PPKS yang ditangani/dilayani dengan baik	100%	1.06.07 PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Persentase PPKS yang ditangani/dilayani dengan baik	100%	1.060.565.932,00	805.545.756,00	1.334.770.898,50	
		1.06.07.2.01 Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Taman Makam Pahlawan yang dipelihara, Peringatan Hari Hari Besar Nasional dan Bantuan/ Santunan bagi Anggota Veteran dan Janda Veteran pada Peringatan Hari Pahlawan	2 Buah TMP dan 47 orang	1.06.07.2.01 Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Taman Makam Pahlawan yang dipelihara, Peringatan Hari Hari Besar Nasional dan Bantuan/ Santunan bagi Anggota Veteran dan Janda Veteran pada Peringatan Hari Pahlawan	2 Buah TMP dan 47 orang	1.060.565.932,00	805.545.756,00	1.334.770.898,50	Meningkatkan kualitas Pelayanan publik untuk mendukung pencapaian indeks reformasi birokrasi yang maksimal
JUMLAH								47.614.529.830,00	49.470.035.634,00	51.550.143.121,00	
2.07.0.00.0.00.01.0000 DINAS TENAGA KERJA											
1	X.XX. NON URUSAN	2.07.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai AKIP	75	2.07.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Predikat Nilai AKIP Perangkat Daerah	BB	8.699.720.905,00	9.571.963.575,00	9.596.282.575,00	
		2.07.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi Perangkat daerah	10 Dokumen	2.07.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase hasil perencanaan dan pelaporan yang dijadikan bahan evaluasi kinerja	100%	43.500.000,00	43.500.000,00	43.500.000,00	
		2.07.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya penatausahaan keuangan Perangkat Daerah	26 Dokumen	2.07.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase administrasi keuangan yang tertib, akuntabel dan tepat waktu	100%	6.525.960.000,00	7.340.406.000,00	7.340.406.000,00	

NO	BIDANG URUSAN	SEBELUM (RKPD Induk 2025)			SESUDAH (RKPD Perubahan 2025)			PAGU		RKPD 2025 PERUBAHAN	ALASAN PERUBAHAN
		PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET	RKPD 2025 (Induk)	APBD INDUK 2025 dan PERGESERAN		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2.07.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	100%	2.07.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pengelolaan dan pelayanan administrasi kepegawaian yang tepat waktu, mutakhir dan terdokumentasi	100%	50.000.000,00	50.000.000,00	20.000.000,00	
		2.07.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya kegiatan administrasi umum Perangkat Daerah	100%	2.07.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi umum yang terlaksana sesuai SOP	100%	451.002.400,00	275.417.136,00	313.998.037,00	
		2.07.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya barang milik daerah	100%	2.07.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Realisasi Pengadaan Barang Milik Daerah yang sesuai dengan yang direncanakan	100%	253.131.479,00	328.421.885,00	328.421.885,00	
		2.07.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan	100%	2.07.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang difasilitasi/ disediakan	100%	855.047.026,00	1.045.638.554,00	1.067.586.653,00	
		2.07.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	2.07.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang yang dipelihara dan berfungsi sesuai kondisi standar	100%	521.080.000,00	488.580.000,00	482.370.000,00	
2	2.07 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	2.07.02 PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	Tersusunnya Rencana Tenaga Kerja dan Database Ketenagakerjaan	1 Dokumen	2.07.02 PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu pada rencana tenaga kerja	100	317.681.939,00	135.480.617,00	224.160.893,00	
		2.07.02.2.01 Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	Tersusunnya Rencana Tenaga Kerja dan Database Ketenagakerjaan	1 Dokumen	2.07.02.2.01 Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro	100	317.681.939,00	135.480.617,00	224.160.893,00	
		2.07.03 PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	a. Jumlah Tenaga Kerja yang mendapat Pelatihan berbasis Kompetensi dan Pelatihan	384 orang	2.07.03 PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	a. Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	a. 92	2.435.467.036,00	4.959.604.130,00	6.267.834.610,00	

NO	BIDANG URUSAN	SEBELUM (RKPD Induk 2025)			SESUDAH (RKPD Perubahan 2025)			PAGU		RKPD 2025 PERUBAHAN	ALASAN PERUBAHAN
		PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET	RKPD 2025 (Induk)	APBD INDUK 2025 dan PERGESERAN		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Pemagangan dalam negeri b. Jumlah Pekerja yang meningkat produktivitasnya	70 orang		b. Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	b. 0.27				
		2.07.03.2.01 Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Terlaksananya Proses Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	100%	2.07.03.2.01 Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n	336	2.118.826.036,00	4.744.386.630,00	5.835.286.630,00	
		2.07.03.2.02 Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Terlaksananya Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	60 Lembaga	2.07.03.2.02 Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina	30	99.485.000,00	48.634.500,00	98.484.500,00	
		2.07.03.2.04 Konsultasi Produktivitas pada Perusahaan Kecil	Terlaksananya Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil	20 Perusahaan	2.07.03.2.04 Konsultasi Produktivitas pada Perusahaan Kecil	Jumlah Perusahaan Kecil yang Mendapat Konsultasi Peningkatan Produktivitas	20	217.156.000,00	166.583.000,00	334.063.480,00	
		2.07.04 PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Jumlah Tenaga Kerja yang ditempatkan di Dalam Negeri	500 Orang	2.07.04 PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah Kabupaten	44	3.136.504.648,00	3.765.565.648,00	8.493.665.372,00	
		2.07.04.2.01 Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota	100%	2.07.04.2.01 Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota	a. Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan b. Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja	a. 510 b. 336	2.752.776.728,00	3.429.086.228,00	7.917.562.035,00	

NO	BIDANG URUSAN	SEBELUM (RKPD Induk 2025)			SESUDAH (RKPD Perubahan 2025)			PAGU		RKPD 2025 PERUBAHAN	ALASAN PERUBAHAN
		PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET	RKPD 2025 (Induk)	APBD INDUK 2025 dan PERGESERAN		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						c. Jumlah Tenaga Kerja Disabilitas yang Mendapatkan Fasilitas Layanan ULD	c. 20				
		2.07.04.2.03 Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Persentase Tenaga Kerja yang ditempatkan di Dalam Negeri	44%	2.07.04.2.03 Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja	156	383.727.920,00	336.479.420,00	576.103.337,00	
		2.07.05 PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layakPP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)	87,90%	2.07.05 PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)	78.89	5.450.245.900,00	5.514.644.900,00	5.623.683.900,00	
		2.07.05.2.01 Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Terselenggaranya Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan	100%	2.07.05.2.01 Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan	12	251.019.000,00	205.689.000,00	251.019.000,00	

NO	BIDANG URUSAN	SEBELUM (RKPD Induk 2025)			SESUDAH (RKPD Perubahan 2025)			PAGU		RKPD 2025 PERUBAHAN	ALASAN PERUBAHAN
		PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET	RKPD 2025 (Induk)	APBD INDUK 2025 dan PERGESERAN		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2.07.05.2.02 Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	Terselesainya Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	100%	2.07.05.2.02 Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perkara Perselisihan yang Terselesaikan	11	5.199.226.900,00	5.308.955.900,00	5.372.664.900,00	
JUMLAH								20.039.620.428,00	23.947.258.870,00	30.205.627.350,00	
2.08.2.14.0.00.01.0000 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA											
1	X.XX. NON URUSAN	2.08.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	a. Kategori SAKIP b. Nilai SAKIP	a. A b. 80	2.08.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Predikat Nilai AKIP Perangkat Daerah	BB	7.723.118.268,00	8.411.740.294,00	8.860.210.294,00	
		2.08.01.2.01 Perencanaan, dan Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Realisasi Kinerja	14 Dokumen	2.08.01.2.01 Perencanaan, dan Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase hasil perencanaan dan pelaporan yang dijadikan bahan evaluasi kinerja	100%	140.000.000,00	103.623.360,00	83.623.360,00	Pergeseran Belanja Bimtek/ Pelatihan untuk Belanja Pakaian Dinas PNS/ ASN
		2.08.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Laporan Keuangan diselesaikan Tepat Waktu	1 Dokumen	2.08.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase administrasi keuangan yang tertib, akuntabel dan tepat waktu	100%	5.556.910.000,00	6.504.303.000,00	6.504.303.000,00	

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
Kabupaten Tabalong Tahun 2025

NO	BIDANG URUSAN	SEBELUM (RKPD Induk 2025)			SESUDAH (RKPD Perubahan 2025)			PAGU		RKPD 2025 PERUBAHAN	ALASAN PERUBAHAN
		PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET	RKPD 2025 (Induk)	APBD INDUK 2025 dan PERGESERAN		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					2.08.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pengelolaan dan pelayanan administrasi kepegawaian yang tepat waktu, mutakhir dan terdokumentasi	100%	0,00	0,00	43.400.000,00	Penambahan Belanja Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya Berpedoman pada Surat Edaran Bupati Tabalong Nomor B.29/900/VIII/2024 tentang Pedoman Penyusunan RKA-SKPD Tahun Anggaran 2025 tgl 15 Agustus 2024
		2.08.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	90%	2.08.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi umum yang terlaksana sesuai SOP	100%	570.673.933,00	292.688.399,00	287.158.399,00	Pergeseran Belanja Materai dan Alat Kantor Lainnua untuk Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya; Pergeseran Kode Rekening Belanja Kursus/ Pelatihan/Sosialisasi/B IMTEK/serta Pendidikan dan pelatihan ke Rekening Belanja Perjalanan Dinas Biasa
		2.08.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	2.08.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Realisasi Pengadaan Barang Milik Daerah yang sesuai dengan yang direncanakan	100%	122.725.787,00	182.725.787,00	233.725.787,00	Pergeseran dari Sub kegiatan Lain

NO	BIDANG URUSAN	SEBELUM (RKPD Induk 2025)			SESUDAH (RKPD Perubahan 2025)			PAGU		RKPD 2025 PERUBAHAN	ALASAN PERUBAHAN
		PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET	RKPD 2025 (Induk)	APBD INDUK 2025 dan PERGESERAN		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2.08.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Kepuasan dan Aparatur terhadap Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Pelayanan Kantor	90%	2.08.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang difasilitasi/ disediakan	100%	753.794.566,00	749.385.766,00	1.085.385.766,00	Pergeseran/ Penambahan Belanja Tagihan Internet ; Pergeseran Anggaran untuk Kegiatan Pameran, Penambahan Paket Baru untuk Stand Pameran; Penambahan Front Desk/ Pramu Saji Balai Penyuluhan KB 12 Kecamatan (OUTSORCING), Penambahan Front Office DP3AP2KB (OUTSORCING), Penambahan Belanja Makanan dan Minuman Rapat Intern, Tausiyah dan Honorarium Rohaniawan
		2.08.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Alat dan Perlengkapan Kantor yang dilakukan Pemeliharaan	100%	2.08.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang yang dipelihara dan berfungsi sesuai kondisi standar	100%	579.013.982,00	579.013.982,00	622.613.982,00	Penambahan Belanja Pemeliharaan Kendaraan Dinas untuk Petugas lapangan KB/ Penyuluh KB seluruh Kecamatan
2	2.08 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	2.08.02 PROGRAM PENGARUSUTAMAA N GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	a. Prosentasi ARG pada Belanja APBD b. Prosentasi SKPD yang responsif gender	a. 30% b. 100%	2.08.02 PROGRAM PENGARUSUTAMAA N GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Persentase Kualitas dan Responsif Gender (ARG) PUG dan Peran Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan	20% 100%	898.179.293,00	758.538.075,00	826.559.115,00	

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
Kabupaten Tabalong Tahun 2025

NO	BIDANG URUSAN	SEBELUM (RKPD Induk 2025)			SESUDAH (RKPD Perubahan 2025)			PAGU		RKPD 2025 PERUBAHAN	ALASAN PERUBAHAN
		PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET	RKPD 2025 (Induk)	APBD INDUK 2025 dan PERGESERAN		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			c. IDG	c. 75,12		Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	0,505				
		2.08.02.2.01 Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah SKPD yang Responsive Gender	41 SKPD	2.08.02.2.01 Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Terlaksananya Kegiatan Peningkatan Anggaran Responsif Gender (ARG) PUG dan Peran Lembaga Pemerintah	100%	321.926.053,00	266.997.053,00	266.997.053,00	Pengurangan Belanja Material dan Honorarium Moderator dan Pembawa Acara dipindah ke Perjalanan Dinas Biasa
		2.08.02.2.02 Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Keterwakilan Perempuan di Legislatif	30%	2.08.02.2.02 Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Keterwakilan Perempuan di Legislatif	26,27%	160.778.610,00	138.578.860,00	138.578.860,00	Pergeseran Honorarium MC dan Moderator ke Perjalanan Dinas Biasa/ Akomodasi dan Transport Narasumber Provinsi
			Jumlah Desa Sadar Hukum	60 Desa		Jumlah Desa Sadar Hukum	12 Desa				Pergeseran Honorarium MC dan Moderator ke Honorarium Narasumber Kabupaten dan Perjalanan Dinas Dalam Kota
			Persentase Angkatan Kerja Perempuan yang Mendapatkan Advokasi	100%		Persentase Angkatan Kerja Perempuan yang Mendapatkan Advokasi	100%				

NO	BIDANG URUSAN	SEBELUM (RKPD Induk 2025)			SESUDAH (RKPD Perubahan 2025)			PAGU		RKPD 2025 PERUBAHAN	ALASAN PERUBAHAN
		PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET	RKPD 2025 (Induk)	APBD INDUK 2025 dan PERGESERAN		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2.08.02.2.03 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Pelaku Usaha Ekonomi Perempuan	100%	2.08.02.2.03 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Koordinasi dan Kolaborasi Antar Lembaga Sistem Penyelenggaraan Program Pemberdayaan Perempuan yang Lebih Efektif dan Responsif	100%	415.474.630,00	352.962.162,00	420.983.202,00	Pergeseran Honorarium MC dan Moderator ke Perjalanan dinas Dalam Kota, Pemindahan Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara (Kegiatan Pameran) sesuai Arahan Asistensi Bidang Anggaran dalam Rangka Hari jadi untuk dianggarkan di sekretariat. Pengurangan Belanja Materai dan Honorarium Moderator dan Pembawa Acara ke Belanja Jasa Iklan/ Reklame dan Perjalanan Dinas Dalam Kota.
		2.08.03 PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Persentase Perempuan Korban Kekerasan yang terselesaikan Penanganannya Pada Unit Pelayanan Terpadu	100%	2.08.03 PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Kom-Prehensif	100%	282.383.093,00	423.641.793,00	422.551.373,00	
		2.08.03.2.01 Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Kasus Kekerasan Perempuan yang ditindaklanjuti dan atau diselesaikan dengan perjanjian Bersama	100%	2.08.03.2.01 Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Kasus Kekerasan Perempuan yang ditindaklanjuti dan atau diselesaikan dengan Perjanjian Bersama	100%	175.000.000,00	196.507.850,00	195.417.430,00	Dana dialihkan untuk Kegiatan Forum Anak

NO	BIDANG URUSAN	SEBELUM (RKPD Induk 2025)			SESUDAH (RKPD Perubahan 2025)			PAGU		RKPD 2025 PERUBAHAN	ALASAN PERUBAHAN
		PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET	RKPD 2025 (Induk)	APBD INDUK 2025 dan PERGESERAN		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2.08.03.2.02 Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Penanganan Perempuan Terhadap Tindak Kekerasan	100%	2.08.03.2.02 Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Penanganan Perempuan Terhadap tindak Kekerasan	100%	12.383.093,00	144.665.943,00	144.665.943,00	Pagu Tetap Hamya ada Pergeseran Kode Rekening
		2.08.03.2.03 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penanganan Perempuan Terhadap Tindak Kekerasan yang diselesaikan Melalui Perjanjian Bersama	100%	2.08.03.2.03 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penanganan Perempuan terhadap Tindak Kekerasan yang diselesaikan Melalui Perjanjian Bersama	100%	95.000.000,00	82.468.000,00	82.468.000,00	
		2.08.04 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	IPG	86,1	2.08.04 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	IPG	100% 100%	367.952.361,00	294.266.461,00	294.266.461,00	
						Keluarga Dalam Mendukung (PUSPAGA) yang Berprespektif Gender dan Hak Anak sesuai Standar					

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
Kabupaten Tabalong Tahun 2025

NO	BIDANG URUSAN	SEBELUM (RKPD Induk 2025)			SESUDAH (RKPD Perubahan 2025)			PAGU		RKPD 2025 PERUBAHAN	ALASAN PERUBAHAN
		PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET	RKPD 2025 (Induk)	APBD INDUK 2025 dan PERGESERAN		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2.08.04.2.01 Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesenjangan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Peningkatan Kualitas Hidup Keluarga	100%	2.08.04.2.01 Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesenjangan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kolaborasi Sinergi antara Berbagai Lembaga Pemerintah dan Pemangku Kepentingan dalam Merumuskan, Melaksanakan dan Memantau Program-Program yang Mendukung Peningkatan Dimensi Kualitas Keluarga, termasuk Legalitas, Ketahanan Fisik, Ekonomi, Sosial Psikologis, dan Sosial Budaya, Guna Mencapai Kesenjangan Gender dan Perlindungan Hak Anak secara Efektif di Tingkat Kabupaten/ Kota	1 Dokumen	232.005.312,00	194.987.912,00	194.987.912,00	Pergeseran Belanja Dekorasi Acara Peringatan Hari Ibu tetapi Tidak Merubah Jumlah Anggaran; Pemindahan Belanja ke Perjalann Dinas Provinsi Karena diPerlukan untuk Menghadiri Acara Peringatan Hari Ibu Tingkat Provinsi dan Sebelumnya Tidak Ada

NO	BIDANG URUSAN	SEBELUM (RKPD Induk 2025)			SESUDAH (RKPD Perubahan 2025)			PAGU		RKPD 2025 PERUBAHAN	ALASAN PERUBAHAN
		PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET	RKPD 2025 (Induk)	APBD INDUK 2025 dan PERGESERAN		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2.08.04.2.02 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kecamatan yang Mendapatkan Pelayanan PUSPAGA	12 Kecamatan	2.08.04.2.02 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kolaborasi Sinergi antara Berbagai Lembaga Pemerintah dan Pemangku Kepentingan dalam Merumuskan, Melaksanakan dan Memantau Program-Program yang Mendukung Peningkatan Dimensi Kualitas Keluarga, termasuk Legalitas, Ketahanan Fisik, Ekonomi, Sosial Psikologis, dan Sosial Budaya, Guna Mencapai Kesenjangan Gender dan Perlindungan Hak Anak secara Efektif di Tingkat Kabupaten/ Kota	2 Dokumen	135.947.049,00	99.278.549,00	99.278.549,00	Pergeseran Belanja Makanan dan Minuman tetapi tidak Merubah jumlah Anggaran; Pemindahan Belanja ke Uang Transport Peserta Pertemuan Sosialisasi PUSPAGA Karena Kegiatan akan dilaksanakan Dalam Rangka Sosialisasi Pembentukan PUSPAGA tapi Perjalanan Dinas telah dihapus pada saat Efisiensi
		2.08.05 PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Prosentasi SKPD yang mempunyai Data Terpilah Gender dan Anak	100%	2.08.05 PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Perencanaan, Evaluasi dan atau Penyusunan kebijakan	100%	195.131.871,00	141.435.371,00	141.435.371,00	
		2.08.05.2.01 Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah SKPD yang Membuat Dokumen Data Terpilah Gender dan Anak	30 SKPD	2.08.05.2.01 Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data Terpilah Gender dan Anak dari Produsen Data	1 Dokumen	195.131.871,00	141.435.371,00	141.435.371,00	Pengurangan Belanja Alat/ Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos, Honorarium Narasumber/ Pembahas, Moderator, pembawa Acara dan Panitia dialihkan ke Belanja Perjalanan Dinas dalam Kota dan Perjalanan Dinas Biasa

NO	BIDANG URUSAN	SEBELUM (RKPD Induk 2025)			SESUDAH (RKPD Perubahan 2025)			PAGU		RKPD 2025 PERUBAHAN	ALASAN PERUBAHAN
		PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET	RKPD 2025 (Induk)	APBD INDUK 2025 dan PERGESERAN		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2.08.06 PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Kabupaten Layak Anak (KLA)	Utama	2.08.06 PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA)	61	674.882.445,00	401.192.284,00	418.602.704,00	
		2.08.06.2.01 Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Kecamatan Layak Anak	100%	2.08.06.2.01 Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Kecamatan Layak Anak	100%	175.000.000,00	97.462.120,00	113.102.800,00	Dana untuk Kegiatan Rapat Persiapan VLH KLA berdasarkan Surat dari Kementerian PPA RI No. B.24/D.PHA.2/TK.05/03/2025 Tanggal 27 Maret 2025 tentang Jadwal Pelaksanaan Verifikasi Lapnagan Hybrid (VLH) Evaluasi KLA
		2.08.06.2.02 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Kelurahan/ Desa Layak Anak	100%	2.08.06.2.02 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak	100%	499.882.445,00	303.730.164,00	305.499.904,00	Pergeseran anggaran dari Sub Kegiatan lain untuk Kegiatan Forum Anak
		2.08.07 PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	a. Indeks Perlindungan Anak	a. 68,03	2.08.07 PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	a. Persentase Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Mendapatkan Layanan komprehensif	a. 100%	107.119.536,00	422.457.259,00	422.457.259,00	
			b. Persentase Anak Korban Kekerasan yang Terselesaikan Penanganannya Pada Unit Pelayanan Terpadu	b. 100%		b. Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA)	b. 83,6%				
						c. Indeks Perlindungan Anak	c. 65				

NO	BIDANG URUSAN	SEBELUM (RKPD Induk 2025)			SESUDAH (RKPD Perubahan 2025)			PAGU		RKPD 2025 PERUBAHAN	ALASAN PERUBAHAN
		PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET	RKPD 2025 (Induk)	APBD INDUK 2025 dan PERGESERAN		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2.08.07.2.01 Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah PATBM	57 Desa/ Kelurahan	2.08.07.2.01 Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Kasus Kekerasan Anak yang ditindaklanjuti	100%	75.000.000,00	159.880.448,00	159.880.448,00	Pagu Tetap Hanya Ada Pergeseran Kode Rekening
		2.08.07.2.02 Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Kasus Kekerasan Anak yang ditindaklanjuti	100%	2.08.07.2.02 Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Kasus Kekerasan Anak yang ditindaklanjuti	100%	32.119.536,00	174.176.811,00	174.176.811,00	
					2.08.07.2.03 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	100%	0,00	88.400.000,00	88.400.000,00	
3	2.14 URUSAN PEMERINTAH AN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	2.14.02 PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	a. Laju Pertumbuhan Penduduk b. Indeks Pembangunan Keluarga c. Angka Kelahiran Remaja umur 15-19 Tahun (<i>Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19</i>)	a. 1,44% b. 64,55 c. 29	2.14.02 PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	a. Angka Kelahiran Total (<i>Total Fertility Rate/TFR</i>) b. Angka Kelahiran Remaja Umur 15-19 Tahun (<i>Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19</i>) c. Laju Pertumbuhan Penduduk	a. 1,54 b. 12,6 c. 1,32	229.050.792,00	459.071.817,00	489.725.817,00	

NO	BIDANG URUSAN	SEBELUM (RKPD Induk 2025)			SESUDAH (RKPD Perubahan 2025)			PAGU		RKPD 2025 PERUBAHAN	ALASAN PERUBAHAN
		PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET	RKPD 2025 (Induk)	APBD INDUK 2025 dan PERGESERAN		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			d. Angka Kelahiran Total (<i>Total Fertility Rate/TFR</i>) Per WUS usia 15-49 Tahun	d. 2,12							
		2.14.02.2.01 Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	a. Jumlah Sekolah Siaga Kependudukan (SSK) terbentuk b. Rapat/Pertemuan Program Bangga Kencana	a. 3 SSK b. 6 Keg	2.14.02.2.01 Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Persentase Dokumen Pengendalian Kuantitas Penduduk yang disusun	100%	99.795.792,00	70.803.192,00	101.457.192,00	Penambahan Sub Kegiatan baru untuk Rapat Koordinasi Peta Jalan dan Rencana Aksi GDPK Merubah Belanja Honorarium Moderator dan Pembawa Acara ke Belanja Bahan Cetak
		2.14.02.2.02 Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	a. Jumlah Anak Sekolah yang Memahami Manfaat Pendewasaan Usia Perkawinan b. Persentase Pelaporan Tepat Waktu	a. 90 Orang b. 100%	2.14.02.2.02 Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Dokumen Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk dan Cakupan daerah	100%	129.255.000,00	388.268.625,00	388.268.625,00	Merubah Belanja Honorarium Moderator fan Pembawa Acara ke Belanja Cetak dan Perjalanan Dinas
		2.14.03 PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	a. Persentase Pencapaian Peserta KB MKJP b. Cakupan Peserta KB yang Aktif c. Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern/ <i>Modern Contraceptive</i> (mCPR)	a. 20 b. 82,28% c. 82,28	2.14.03 PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	a. Angka Prevalensi kontrasepsi Modern/ <i>Modern Contraceptive</i> (mCPR) b. Persentase Kebutuhan ber-KB yang Tidak Terpenuhi (<i>Unmeet Need</i>)	a. 79,5% b. 0,046	1.744.443.980,00	3.581.899.852,00	3.520.349.852,00	

NO	BIDANG URUSAN	SEBELUM (RKPD Induk 2025)			SESUDAH (RKPD Perubahan 2025)			PAGU		RKPD 2025 PERUBAHAN	ALASAN PERUBAHAN
		PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET	RKPD 2025 (Induk)	APBD INDUK 2025 dan PERGESERAN		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			d. Persentase Kebutuhan Ber-KB yang tidak terpenuhi (<i>Unmet need</i>)	d. 7,57 %							
		2.14.03.2.01 Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal	Persentase Kelompok UPPKS yang Aktif	90%	2.14.03.2.01 Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal	Jumlah Dokumen Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	1 Dokumen	160.413.980,00	710.125.540,00	709.125.540,00	Belanja Materai dipindahkan ke Jasa Pencari Akseptor MKJP dan Penambahan Belanja Listrik di Balai Penyuluhan KB; Penambahan Belanja Laptop dan Printer untuk Keperluan Bidang KB-KKK
		2.14.03.2.02 Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	a. Persentase PPKBD Aktif b. Persentase Sub PPKBD Aktif	a. 95,4% b. 66,9%	2.14.03.2.02 Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Persentase Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/ Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	100%	1.150.640.000,00	2.063.151.000,00	1.993.601.000,00	Pemindahan Honor TPK ke Honor PPTK; Penambahan Makan dan Minum Aktivitas Lapangan, Penambahan Perjalanan Dinas Dalam Kota
		2.14.03.2.03 Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Peserta KB Aktif	82%	2.14.03.2.03 Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/ Kota	1 Dokumen	384.890.000,00	566.443.312,00	575.443.312,00	Penambahan Jasa Pencari Akseptor MKJP

NO	BIDANG URUSAN	SEBELUM (RKPD Induk 2025)			SESUDAH (RKPD Perubahan 2025)			PAGU		RKPD 2025 PERUBAHAN	ALASAN PERUBAHAN
		PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET	RKPD 2025 (Induk)	APBD INDUK 2025 dan PERGESERAN		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2.14.03.2.04 Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Persentase Akseptor pada Kampung KB	82%	2.14.03.2.04 Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan ber-KB	6 Organisasi	48.500.000,00	242.180.000,00	242.180.000,00	
		2.14.04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	a. Cakupan Anggota Bina Keluarga yang ber KB (BKB, BKR, BKL) b. Cakupan Anggota UPPKS yang ber - KB	a. 80 b. 92%	2.14.04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	a. Indeks Lansia Berdaya b. Indeks Pengasuhan Keluarga yang memiliki Remaja c. Persentase Keluarga yang Mengikuti Kelompok Kegiatan Ketahanan Keluarga	a. 67,3 b. 88,8 c. 100%	134.065.000,00	1.627.265.000,00	1.627.265.000,00	
		2.14.04.2.01 Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	a. 'Persentase BKB yang Aktif b. Persentase BKR yang Aktif c. Persentase BKL yang Aktif	a. 100% b. 80% c. 80%	2.14.04.2.01 Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Kegiatan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	12 Kegiatan	92.500.000,00	318.500.000,00	318.500.000,00	

NO	BIDANG URUSAN	SEBELUM (RKPD Induk 2025)			SESUDAH (RKPD Perubahan 2025)			PAGU		RKPD 2025 PERUBAHAN	ALASAN PERUBAHAN
		PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET	RKPD 2025 (Induk)	APBD INDUK 2025 dan PERGESERAN		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2.14.04.2.02 Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Persentase Kelompok UPPKS yang Aktif	90%	2.14.04.2.02 Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Kegiatan Pembinaan Pelaksanaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota Dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	12 Kegiatan	41.565.000,00	1.308.765.000,00	1.308.765.000,00	
JUMLAH								12.356.326.639,00	16.521.508.206,00	17.023.423.246,00	
2.09.3.25.3.27.01.0000 DINAS KETAHANAN PANGAN, PERIKANAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA											
1	X.XX. NON URUSAN	2.09.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Layanan Kesekretariatan	B	2.09.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Predikat Nilai AKIP Perangkat Daerah	B	39.086.366.719,00	39.912.906.369,50	39.858.942.748,53	
		2.09.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya dokumen perencanaan SKPD	15 dokumen	2.09.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase hasil perencanaan dan pelaporan yang dijadikan bahan evaluasi kinerja	100%	900.000.000,00	376.357.000,00	415.104.023,53	Pergeseran perjadi ke pusat menjadi perjadi ke provinsi, penambahan belanja konsumsi rapat perencanaan, ATK dan peralatan kantor
		2.09.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya gaji dan tunjangan ASN	14 bulan	2.09.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase administrasi keuangan yang tertib, akuntabel dan tepat waktu	100%	22.000.000.000,00	25.531.475.000,00	25.531.475.000,00	Tidak ada perubahan
		2.09.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya Diklat Pegawai	10 orang	2.09.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pengelolaan dan pelayanan administrasi kepegawaian yang tepat waktu, mutakhir dan terdokumentasi	100%	400.000.000,00	152.736.300,50	91.614.000,00	Perubahan perjadi ke pusat menjadi perjadi ke provinsi, pengurangan biaya kontribusi bimtek

NO	BIDANG URUSAN	SEBELUM (RKPD Induk 2025)			SESUDAH (RKPD Perubahan 2025)			PAGU		RKPD 2025 PERUBAHAN	ALASAN PERUBAHAN
		PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET	RKPD 2025 (Induk)	APBD INDUK 2025 dan PERGESERAN		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2.09.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	2 paket	2.09.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi umum yang terlaksana sesuai SOP	100%	3.911.840.923,00	3.816.871.332,00	2.976.848.100,00	Pengurangan perjadiin biasa, pengurangan belanja modal
		2.09.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya BMD penunjang urusan pemerintahan daerah	124 unit	2.09.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Realisasi Pengadaan Barang Milik Daerah yang sesuai dengan yang direncanakan	100%	4.937.473.400,00	2.912.235.515,00	2.638.089.893,00	Pengurangan belanja modal
		2.09.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya jasa telepon/internet, jasa air dan jasa listrik	12 bulan	2.09.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang difasilitasi/disediakan	100%	2.336.222.400,00	2.921.056.370,00	3.054.656.370,00	Penambahan biaya listrik, air dan internet
		2.09.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	50 unit	2.09.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang yang dipelihara dan berfungsi sesuai kondisi standar	100%	4.600.829.996,00	4.202.174.852,00	5.151.155.362,00	Pengurangan belanja suku cadang/ <i>spare part</i> pemeliharaan kendaraan
2	2.09 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	2.09.02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN	Indeks Ketahanan Pangan	B	2.09.02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN	Indeks ketahanan pangan	84,72	2.000.000.000,00	1.897.963.595,00	2.359.703.709,00	
		2.09.02.2.01 Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kelembagaan lumbung pangan yang terbina	4 kelompok	2.09.02.2.01 Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya infrastruktur pendukung kemandirian pangan	3 unit	2.000.000.000,00	1.897.963.595,00	2.359.703.709,00	Penambahan anggaran rehab gudang penyimpanan beserta peralatan prosesing beras kemasan
		2.09.03 PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Skor Pola Pangan Harapan	89,9	2.09.03 PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	92,65	1.090.000.000,00	802.988.065,00	1.002.988.065,00	

NO	BIDANG URUSAN	SEBELUM (RKPD Induk 2025)			SESUDAH (RKPD Perubahan 2025)			PAGU		RKPD 2025 PERUBAHAN	ALASAN PERUBAHAN
		PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET	RKPD 2025 (Induk)	APBD INDUK 2025 dan PERGESERAN		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2.09.03.2.01 Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Terbinanya kelembagaan PUPM	5 kelompok	2.09.03.2.01 Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Tersedianya informasi harga dan pasokan pangan dan tersedianya pangan berbasis sumber daya lokal	10 dokumen	300.000.000,00	173.455.112,00	173.455.112,00	Penambahan biaya subsidi pangan murah
		2.09.03.2.04 Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	Capaian konsumsi pangan perkapita	100%	2.09.03.2.04 Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	Target konsumsi pangan perkapita/tahun sesuai Angka Kecukupan Gizi (AKG)	4 AKG	790.000.000,00	629.532.953,00	829.532.953,00	Penambahan belanja pembenahan pekarangan untuk ketahanan pangan
		2.09.04 PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Persentase Desa tahan pangan	100 %	2.09.04 PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Persentase Desa tahan pangan	100%	550.000.000,00	356.642.107,00	356.642.107,00	
		2.09.04.2.01 Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	Tersusunnya peta kerentanan dan kerawanan pangan	1 dokumen	2.09.04.2.01 Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	Jumlah peta kerentanan dan ketahanan pangan Kecamatan yang disusun	1 dokumen	200.000.000,00	115.797.000,00	115.797.000,00	Penambahan belanja peralatan meeting berupa tv dan kamera
		2.09.04.2.02 Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya penanganan kerawanan pangan	12 Kecamatan	2.09.04.2.02 Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi penanganan kerawanan pangan dan gizi Kabupaten/ Kota	12 laporan	350.000.000,00	240.845.107,00	240.845.107,00	Pergeseran belanja rapat kewaspadaan kerawanan pangan dan gizi
		2.09.05 PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Tingkat keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT)	90%	2.09.05 PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Tingkat keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT)	100%	300.000.000,00	167.649.308,00	167.649.308,00	
		2.09.05.2.01 Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah komoditas PSAT yang terawasi	8 komoditas	2.09.05.2.01 Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi keamanan dan mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT)	9 laporan	300.000.000,00	167.649.308,00	167.649.308,00	Perubahan perjadi ke pusat menjadi perjadi ke provinsi

NO	BIDANG URUSAN	SEBELUM (RKPD Induk 2025)			SESUDAH (RKPD Perubahan 2025)			PAGU		RKPD 2025 PERUBAHAN	ALASAN PERUBAHAN
		PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET	RKPD 2025 (Induk)	APBD INDUK 2025 dan PERGESERAN		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	3.25 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	3.25.03 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Jumlah produksi perikanan tangkap yang ramah lingkungan	2.163,41 ton	3.25.03 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Jumlah produksi perikanan tangkap yang ramah lingkungan	2.185 ton	468.832.747,00	374.691.747,00	458.458.847,00	
		3.25.03.2.01 Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Tersedianya sarana penangkapan ikan yang ramah lingkungan	375 buah/set	3.25.03.2.01 Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah prasarana dan sarana perikanan tangkap yang tersedia	757 unit	468.832.747,00	374.691.747,00	458.458.847,00	Penambahan belanja lomba manci Kabupaten dan belanja perahu tanpa motor
		3.25.04 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Jumlah produksi perikanan budidaya	18.053,2 ton	3.25.04 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Jumlah produksi budidaya pembesaran ikan	18.324 ton	3.970.234.358,00	3.401.115.708,00	4.181.369.813,06	
		3.25.04.2.02 Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Tersedianya sarana produksi budidaya pembesaran ikan	8 paket	3.25.04.2.02 Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah kelompok perikanan yang mengikuti pengembangan kompetensi	5 kelompok	224.408.265,00	57.716.265,00	57.716.265,00	Tidak ada perubahan
		3.25.04.2.04 Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Jumlah produksi bibit ikan UPTD PBAT	700.000 ekor	3.25.04.2.04 Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Jumlah sarana pembudidayaan ikan dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/ Kota	43 paket	3.745.826.093,00	3.343.399.443,00	4.123.653.548,06	Penambahan belanja sarana produksi budidaya ikan untuk 3 Matra dan pesantren
		3.25.05 PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Jumlah kegiatan penangkapan ikan yang tidak ramah lingkungan	0 kali	3.25.05 PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Jumlah pelanggaran pengawasan sumber daya perikanan tangkap dan pembudidayaan	2 kali	531.826.961,00	203.428.517,00	203.417.185,00	
		3.25.05.2.01 Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota	Terlaksananya pemantauan kegiatan penangkapan ikan yang tidak ramah lingkungan di wilayah Kecamatan	12 Kecamatan	3.25.05.2.01 Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota	Jumlah pengawasan sumber daya perikanan tangkap dan pembudidayaan	96 kali	531.826.961,00	203.428.517,00	203.417.185,00	Pengurangan belanja perajadin dan peralatan pengawasan perikanan

NO	BIDANG URUSAN	SEBELUM (RKPD Induk 2025)			SESUDAH (RKPD Perubahan 2025)			PAGU		RKPD 2025 PERUBAHAN	ALASAN PERUBAHAN
		PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET	RKPD 2025 (Induk)	APBD INDUK 2025 dan PERGESERAN		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		3.25.06 PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Jumlah produksi pengolahan hasil perikanan	32 ton	3.25.06 PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Jumlah produksi pengolahan hasil perikanan	32,5 ton	398.596.921,00	179.995.921,00	1.801.831.013,00	
		3.25.06.2.01 Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil	Terlaksananya bimbingan teknis pengolahan dan diversifikasi produk perikanan	3 kali	3.25.06.2.01 Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil	Terlaksananya bimbingan teknis pengolahan dan diversifikasi produk perikanan	3 kali	398.596.921,00	179.995.921,00	1.801.831.013,00	Penambahan anggaran rehab pasar ikan Telaga Itar
4	3.27 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	3.27.02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Produktivitas pertanian per hektar per tahun: -Padi -Jagung -Kedelai -Bawang merah -Cabai rawit -Cabai besar -Karet (sheet) -Lada (biji kering)	4,7 ton/ha 3,72 ton/ha 1 ton/ha 7 ton/ha 4,72 ton/ha 8,55 ton/ha 1 ton/ha 210 kg/ha	3.27.02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Produksi komoditas pangan utama: - Padi - Jagung - Sayur - sayuran - Buah - buahan	66.430 ton 2.250 ton 550 ton 41.908 ton	12.768.525.552,00	12.491.726.887,00	17.329.566.658,61	
		3.27.02.2.01 Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Jumlah alsintan yang diberikan kepada masyarakat	5 unit	3.27.02.2.01 Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Jumlah alsintan yang diberikan kepada masyarakat	183 unit	12.268.525.552,00	11.859.184.782,00	16.697.024.553,61	Penambahan belanja hibah alsintan
		3.27.02.2.02 Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah SDG tanaman yang dilakukan pelestarian dan pemurnian	12 VUB	3.27.02.2.02 Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah varitas tanaman pangan dan hortikultura unggul lokal yang didaftarkan dan dilepaskan	4 varietas	500.000.000,00	632.542.105,00	632.542.105,00	Tidak ada perubahan
		3.27.03 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Persentase cakupan yang dapat dilayani oleh prasarana pertanian	68%	3.27.03 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Meningkatnya ketersediaan prasarana pertanian	58 unit	5.630.000.000,00	5.649.965.984,00	14.723.582.189,00	

NO	BIDANG URUSAN	SEBELUM (RKPD Induk 2025)			SESUDAH (RKPD Perubahan 2025)			PAGU			ALASAN PERUBAHAN
		PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET	RKPD 2025 (Induk)	APBD INDUK 2025 dan PERGESERAN	RKPD 2025 PERUBAHAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		3.27.03.2.01 Pengembangan Prasarana Pertanian			3.27.03.2.01 Pengembangan Prasarana Pertanian	Terlindunginya Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan	6.714 hektar	99.281.000,00	166.966.566,00	166.966.566,00	Tidak ada perubahan
		3.27.03.2.02 Pembangunan Prasarana Pertanian	Terlaksananya pembuatan jalan, jaringan dan irigasi	200 m	3.27.03.2.02 Pembangunan Prasarana Pertanian	Terbangun, terehabilitasi dan terpeliharanya prasarana pertanian	58 unit	5.530.719.000,00	5.482.999.418,00	14.556.615.623,00	Penambahan belanja pembuatan embung dan JUT
		3.27.05 PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Persentase cakupan pencegahan bencana pertanian	100%	3.27.05 PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Jumlah cakupan lahan pencegahan bencana pertanian	1.500 hektar	1.050.000.000,00	836.111.000,00	836.111.000,00	
		3.27.05.2.01 Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	Luas areal pengendalian bencana pertanian	1.482 ha	3.27.05.2.01 Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	Jumlah luas lahan yang dilakukan pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian	1.500 hektar	1.050.000.000,00	836.111.000,00	836.111.000,00	Pergeseran belanja drone semprot menjadi belanja pelatihan pengendalian OPT
		3.27.07 PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Persentase peningkatan jumlah kelompok tani yang naik nilai kemampuannya	35%	3.27.07 PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Jumlah kelompok tani yang meningkat kapasitasnya	20 kelompok	3.250.000.000,00	2.450.087.878,50	2.383.898.023,80	
		3.27.07.2.01 Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Jumlah BPP yang meningkat nilainya	1 unit (1 BPP)	3.27.07.2.01 Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Jumlah BPP yang meningkat kelasnya	1 unit	3.250.000.000,00	2.450.087.878,50	2.383.898.023,80	Pengurangan belanja perjadin
JUMLAH								71.094.383.258,00	68.725.273.087,00	85.664.160.667,00	
2.11.0.00.0.00.01.0000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP											
1	X.XX. NON URUSAN	2.11.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai AKIP	A (82)	2.11.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Predikat Nilai AKIP Perangkat Daerah	A	18.706.129.394,00	30.641.396.983,00	32.399.453.617,00	
		2.11.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan dokumen perencanaan, anggaran dan evaluasi tepat waktu	8 dokumen	2.11.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase hasil perencanaan dan pelaporan yang dijadikan bahan evaluasi kinerja	100%	64.967.000,00	25.200.000,00	25.200.000,00	

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
Kabupaten Tabalong Tahun 2025

NO	BIDANG URUSAN	SEBELUM (RKPD Induk 2025)			SESUDAH (RKPD Perubahan 2025)			PAGU		RKPD 2025 PERUBAHAN	ALASAN PERUBAHAN
		PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET	RKPD 2025 (Induk)	APBD INDUK 2025 dan PERGESERAN		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2.11.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Administrasi keuangan tepat waktu	4 laporan	2.11.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase administrasi keuangan yang tertib, akuntabel dan tepat waktu	100%	12.676.810.000,00	13.463.775.000,00	13.463.775.000,00	
		2.11.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	75	2.11.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi umum yang terlaksana sesuai SOP	100%	1.641.733.535,00	1.137.776.117,00	1.735.111.702,00	Penambahan dari sub kegiatan penyusunan SLHD untuk keperluan fasilitasi sarpras di bidang PPKL, Pengurangan ke sub kegiatan peralatan perlengkapan kantor untuk pembelian 2 buah AC bidang PSLB3 dan 1 set Kursi Tamu Kabid PSLB3, Pergeseran dari sub kegiatan PPLH untuk belanja modal sarpras fasilitasi bidang PL, Pergeseran dari sub keg pemeliharaan untuk belanja videotron, Pergeseran belanja kontribusi belanja perjalanan dinas, Penampahan petugas PPSU sebesar 100 ribu/orang sebagai ap sebesar 1,3 mresiasi adipura ke 6 sebanyak 580, Pengurangan belanja interior aula, Penamabahan pemeliharaan gedung kantor.

NO	BIDANG URUSAN	SEBELUM (RKPD Induk 2025)			SESUDAH (RKPD Perubahan 2025)			PAGU		RKPD 2025 PERUBAHAN	ALASAN PERUBAHAN
		PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET	RKPD 2025 (Induk)	APBD INDUK 2025 dan PERGESERAN		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2.11.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah penyediaan layanan umum	12 bulan	2.11.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang difasilitasi/ disediakan	100%	2.376.080.936,00	14.145.578.648,00	15.424.756.345,00	
		2.11.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah BMD dipelihara	40 unit	2.11.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang yang dipelihara dan berfungsi sesuai kondisi standar	100%	1.946.537.923,00	1.869.067.218,00	1.750.610.570,00	
2	2.11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	2.11.02 PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Adanya dokumen perencanaan LH yang updating	2 dokumen	2.11.02 PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Dokumen Lingkungan Hidup Tersedia	100%	1.598.506.000,00	1.272.688.000,00	1.272.688.000,00	
		2.11.02.2.01 Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen RPPLH tersedia	1 dokumen	2.11.02.2.01 Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen perencanaan LH tersedia	1 dokumen	828.618.000,00	611.639.000,00	611.639.000,00	
		2.11.02.2.02 Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen KHLS tersedia	1 dokumen	2.11.02.2.02 Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen strategis lingkungan hidup disusun	2 dokumen	769.888.000,00	661.049.000,00	661.049.000,00	
		2.11.03 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	a. Indeks kualitas air b. Indeks kualitas udara	61 89,5	2.11.03 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Pemenuhan baku mutu	50%	6.146.216.421,00	5.173.331.973,00	5.136.374.473,00	
		2.11.03.2.01 Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	a. Indeks kualitas air (IKA)	a. 61	2.11.03.2.01 Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Aksi Pencegahan Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan yang dilaksanakan	2 aksi	5.946.216.421,00	5.003.840.473,00	4.966.882.973,00	Pergeseran Belanja, Pergeseran belanja biopori untuk aksi gema jalin program kdh tabalong smart, Digeser ke sub kegiatan perlatan perlengkapan kantor untuk keperluan fasilitasi sarpras di

NO	BIDANG URUSAN	SEBELUM (RKPD Induk 2025)			SESUDAH (RKPD Perubahan 2025)			PAGU		RKPD 2025 PERUBAHAN	ALASAN PERUBAHAN
		PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET	RKPD 2025 (Induk)	APBD INDUK 2025 dan PERGESERAN		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			b. Indeks kualitas udara (IKU)	b. 89,5							bidang PPKL, Pergeseran rincian belanja untuk Pemeliharaan Bangunan Gedung Kantor seperti: Pembuatan kanopi, perbaikan halaman kantor Laboratorium dan pagar, dan penambahan peralatan untuk pengujian Laboratorium.
		2.11.03.2.02 Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah kampung iklim yang dibina	2 kampung iklim	2.11.03.2.02 Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Aksi penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup kab/kota	2 aksi	200.000.000,00	169.491.500,00	169.491.500,00	Pergeseran Belanja
		2.11.04 PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Indeks kualitas tutupan lahan	67,5	2.11.04 PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Persentase Pengelolaan Keanekaragaman hayati	75%	10.905.956.000,00	9.011.995.624,00	9.930.401.624,00	
		2.11.04.2.01 Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	Adanya dokumen pengelolaan kehati	1 dokumen	2.11.04.2.01 Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	Persentase Pengelolaan Keanekaragaman hayati	75%	10.905.956.000,00	9.011.995.624,00	9.930.401.624,00	Penambahan untuk pembangunan RTH, Penambahan untuk pemeliharaan RTH, Belanja Bibit Tanaman, BM 1 unit dumb truck dan 1 unit tangki air RTH, Belanja Modal Tanah, Belanja modal tanah untuk tugu/ perbatasan kalsel kaltim.

NO	BIDANG URUSAN	SEBELUM (RKPD Induk 2025)			SESUDAH (RKPD Perubahan 2025)			PAGU		RKPD 2025 PERUBAHAN	ALASAN PERUBAHAN
		PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET	RKPD 2025 (Induk)	APBD INDUK 2025 dan PERGESERAN		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2.11.05 PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Tingkat ketaatan pelaku usaha/ kegiatan dalam pengelolaan Limbah B3	70%	2.11.05 PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Persentase ketaatan pelaku usaha/ kegiatan dalam pengelolaan Limbah B3	100%	654.468.000,00	495.729.400,00	483.812.237,00	
		2.11.05.2.01 Penyimpanan Sementara Limbah B3	Jumlah pelaku usaha kegiatan yang taat melaksanakan pengelolaan LB3	24 pelaku usaha kegiatan	2.11.05.2.01 Penyimpanan Sementara Limbah B3	Jumlah pelaku usaha kegiatan yang taat melaksanakan pengelolaan LB3	15 pelaku usaha/ kegiatan	654.468.000,00	495.729.400,00	483.812.237,00	Pengurangan ke sub kegiatan peralatan perlengkapan kantor untuk pembelian 2 buah AC bidang PSLB3 dan 1 set Kursi Tamu Bidang PSLB3.
		2.11.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan	100%	2.11.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Persentase ketaatan pelaku usaha dalam pengelolaan lingkungan	90%	558.449.260,00	312.554.260,00	248.374.260,00	
		2.11.06.2.01 Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pelaku usaha kegiatan yang dibina dan diawasi ketaatan terhadap PPLH	82 pelaku usaha	2.11.06.2.01 Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang dibina dan diawasi terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan	15 laporan	558.449.260,00	312.554.260,00	248.374.260,00	Pengurangan untuk sub kegiatan PPLH dan pergeseran ke sub kegiatan peralatan perlengkapan kantor.

NO	BIDANG URUSAN	SEBELUM (RKPD Induk 2025)			SESUDAH (RKPD Perubahan 2025)			PAGU		RKPD 2025 PERUBAHAN	ALASAN PERUBAHAN
		PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET	RKPD 2025 (Induk)	APBD INDUK 2025 dan PERGESERAN		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2.11.07 PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH	Adanya penetapan pengakuan keberadaan MHA kearifan lokal dan hak MHA terkait PPLH	1 kelompok	2.11.07 PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH	Persentase Kelompok Masyarakat dan Lembaga Pendidikan yang Berpartisipasi dalam pengelolaan Lingkungan	100%	181.286.400,00	150.987.400,00	144.888.400,00	
		2.11.07.2.02 Peningkatan Kapasitas MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH	Kelompok masyarakat yang berperan dalam pengelolaan lingkungan	1 kelompok	2.11.07.2.02 Peningkatan Kapasitas MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH	Persentase Kelompok Masyarakat dalam pengelolaan Lingkungan	100%	181.286.400,00	150.987.400,00	144.888.400,00	Pengurangan untuk sub kegiatan pendidikan dan pelatihan lingkungan hidup untuk masyarakat
		2.11.08 PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase sekolah yang berwawasan lingkungan (Adiwiyata)	80%	2.11.08 PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase Kelompok Masyarakat dan Lembaga Pendidikan yang Berpartisipasi dalam pengelolaan Lingkungan	100%	345.931.959,00	298.407.059,00	339.761.979,00	
		2.11.08.2.01 Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sekolah yang berperan dalam pengelolaan lingkungan	73 sekolah adiwiyata	2.11.08.2.01 Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Tingkat partisipasi kelompok masyarakat dalam pengelolaan LH	100%	345.931.959,00	298.407.059,00	339.761.979,00	Pergeseran dari sub kegiatan PPLHD, Pergeseran dari sub kegiatan Pengaduan, Pergeseran dari sub kegiatan MHA.
		2.11.10 PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase jumlah lingkungan yang ditindaklanjuti	90%	2.11.10 PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase ketaatan pelaku usaha dalam pengelolaan lingkungan	90%	151.681.000,00	103.326.500,00	98.726.500,00	

NO	BIDANG URUSAN	SEBELUM (RKPD Induk 2025)			SESUDAH (RKPD Perubahan 2025)			PAGU		RKPD 2025 PERUBAHAN	ALASAN PERUBAHAN
		PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET	RKPD 2025 (Induk)	APBD INDUK 2025 dan PERGESERAN		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2.11.10.2.01 Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	Jumlah pengaduan yang diselesaikan	10 kasus	2.11.10.2.01 Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	Jumlah pengaduan permasalahan pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota yang ditindaklanjuti /ditangani	10 kasus	151.681.000,00	103.326.500,00	98.726.500,00	Pengurangan untuk sub kegiatan pendidikan dan pelatihan lingkungan hidup untuk masyarakat.
		2.11.11 PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	a. Persentase Pengurangan sampah b. Persentase Penanganan sampah	a. 30% b. 70%	2.11.11 PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Indeks kinerja pengelolaan sampah	70%	31.001.375.566,00	19.068.862.465,00	19.914.798.574,00	

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
Kabupaten Tabalong Tahun 2025

NO	BIDANG URUSAN	SEBELUM (RKPD Induk 2025)			SESUDAH (RKPD Perubahan 2025)			PAGU		RKPD 2025 PERUBAHAN	ALASAN PERUBAHAN
		PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET	RKPD 2025 (Induk)	APBD INDUK 2025 dan PERGESERAN		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2.11.11.2.01 Pengelolaan Sampah	Cakupan pengelolaan sampah kabupaten	30%	2.11.11.2.01 Pengelolaan Sampah	Persentase pengelolaan sampah kabupaten	94,80%	31.001.375.566,00	19.068.862.465,00	19.914.798.574,00	pergeseran dan penambahan untuk: pemasangan PDAM di TPS Banua Lwas TPS 3R, Penambahan KWH listrik TPS banua lawas dan TPS 3R, Pembayaran Tagihan TPS usih, Penambahan karung dan kantong plastik sampah, BM sweeper, Mini Whell Loader, Keranjang Sampah, Tossa, Tempat sampah 5 pilah, TPS hapalah banua lawas, TPS binjai muara uya, Pergeseran Rincian Belanja, Penambahan anggaran untuk pembebasan lahan di bagian utara lokasi TPA Bongkang, Penambahan untuk melanjutkan pembangunan mushola di TPA Bongkang.
JUMLAH								70.250.000.000,00	66.529.279.664,00	69.969.279.664,00	
2.12.0.00.0.00.01.0000 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL											
1	X.XX. NON URUSAN	2.12.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai AKIP	85/A	2.12.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Predikat Nilai AKIP Perangkat Daerah	A	33.349.324.443,00	17.888.559.003,00	17.858.539.221,00	

NO	BIDANG URUSAN	SEBELUM (RKPD Induk 2025)			SESUDAH (RKPD Perubahan 2025)			PAGU		RKPD 2025 PERUBAHAN	ALASAN PERUBAHAN
		PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET	RKPD 2025 (Induk)	APBD INDUK 2025 dan PERGESERAN		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2.12.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya kegiatan perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	8 dok/lap	2.12.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase hasil perencanaan dan pelaporan yang dijadikan bahan evaluasi kinerja	100%	20.091.191,00	20.091.191,00	20.091.191,00	
		2.12.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya kegiatan administrasi keuangan perangkat Daerah	12 bulan	2.12.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase administrasi keuangan yang tertib, akuntabel dan tepat waktu	100%	5.590.590.000,00	8.608.243.000,00	8.608.243.000,00	
		2.12.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	2.12.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pengelolaan dan pelayanan administrasi kepegawaian yang tepat waktu, mutakhir dan terdokumentasi	100%	1.210.049.000,00	815.587.392,00	235.587.392,00	Sub kegiatan bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan pagunya berkurang karena efesiensi (bimtek luar daerah) dan dilakukan pergeseran anggaran ke sub kegiatan penyusunan profil data kependudukan 106.149.650, sub kegiatan pengadaan mibeler 85.600.000, sub kegiatan penyediaan komponen instalasi listrik 122.916.600, sisanya 29.333.800 ke sub kegiatan penyediaan peralatan rumah tangga

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
Kabupaten Tabalong Tahun 2025

		2.12.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	2.12.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi umum yang terlaksana sesuai SOP	100%	1.546.768.737,00	1.061.453.342,00	3.350.648.450,00	- Sub kegiatan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor pagunya bertambah dari pagu pergeseran sub kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan yang akan digunakan untuk pembelian isolasi kabel, plester bening, kabel listrik 100m, kabel listrik tembaga 100m, stiker dan klem kabel dan instalasi listrik untuk AC standing sebesar 122.916.600 - Sub kegiatan penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor pagunya bertambah dari pergeseran pagu sub kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya dan akan digunakan untuk melengkapi fasilitas kantor, fasilitas pelayanan publik, ruang arsip dan ruang server - Sub kegiatan penyediaan peralatan rumah tangga pagunya bertambah dari pagu pergeseran sub kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan sebesar 29.333.800, Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor dan Bangunan
--	--	---	--	------	---	--	------	------------------	------------------	------------------	---

										Lainnya, sub kegiatan penyediaan jasa pelayanan umum kantor dan sub kegiatan yang ada di bidang dafduk, capil dan paik dan akan digunakan untuk melengkapi fasilitas Kantor, fasilitas pelayanan publik, ruang arsip dan ruang server serta instalasi AC, selang pipa karet dan lakban karet
										- Sub kegiatan penataan arsip dinamis pada SKPD pagunya bertambah dari pagu pergeseran sub kegiatan Penyediaan pelayanan umum kantor sebesar 300.000.000 yang akan digunakan untuk penataan arsip di 7 kecamatan dan kantor baru Disdukcabil

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
Kabupaten Tabalong Tahun 2025

NO	BIDANG URUSAN	SEBELUM (RKPD Induk 2025)			SESUDAH (RKPD Perubahan 2025)			PAGU		RKPD 2025 PERUBAHAN	ALASAN PERUBAHAN
		PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET	RKPD 2025 (Induk)	APBD INDUK 2025 dan PERGESERAN		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2.12.01.2.07 Pengadaan Barang milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	6 Unit	2.12.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Realisasi Pengadaan Barang Milik Daerah yang sesuai dengan yang direncanakan	100%	22.667.234.920,00	5.111.358.080,00	3.735.320.100,00	- Sub kegiatan pengadaan mebel penambahan pagu anggaran dari pergeseran pagu sub kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan sebesar 85.600.000 yang akan di gunakan untuk belanja mibeler di ruang pelayanan serta untuk perbaikan meja pelayanan- Sub kegiatan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor dan bangunan lainnya pagunya berkurang dari pengadaan tanah yang batal dilaksanakan dan pagu akan digeser untuk menambah pagu belanja pembuatan pagar kantor dan sisanya di geser ke sub kegiatan pengadaan peralatan rumah tangga untuk belanja sarana dan prasarana melengkapi fasilitas kantor, fasilitas pelayanan publik, ruang arsip dan ruang server

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
Kabupaten Tabalong Tahun 2025

		2.12.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan pemerintahan Daerah	12 bulan	2.12.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang difasilitasi/ disediakan	100%	1.837.930.595,00	1.795.165.998,00	1.431.989.088,00	- Sub kegiatan penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik pagunya bertambah dari pagu pergeseran sub kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan sebesar 16.000.000 yang akan digunakan untuk belanja pembayaran rekening listrik, Internet, air dan pembayaran tunggakan PDAM serta langganan starlink- Sub kegiatan penyediaan jasa pelayanan umum kantor pagunya berkurang dari belanja honorarium tenaga kontrak yang lulus p3k sebesar 534.818.310. pagu tersebut digunakan untuk menambah belanja makan dan minum untuk kegiatan hari jadi kabupaten dan kegiatan besar lainnya sebesar 24.000.000. dan pergeseran pagu ke sub kegiatan penataan arsip dinamis skpd sebesar 25.000.000 dan sisanya 485.818.310 dilakukan pergeseran ke sub kegiatan penyediaan peralatan rumah tangga
--	--	--	--	----------	--	--	------	------------------	------------------	------------------	--

NO	BIDANG URUSAN	SEBELUM (RKPD Induk 2025)			SESUDAH (RKPD Perubahan 2025)			PAGU		RKPD 2025 PERUBAHAN	ALASAN PERUBAHAN
		PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET	RKPD 2025 (Induk)	APBD INDUK 2025 dan PERGESERAN		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2.12.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan pemerintahan Daerah	62 Unit	2.12.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang yang dipelihara dan berfungsi sesuai kondisi standar	100%	476.660.000,00	476.660.000,00	476.660.000,00	Tidak Berubah
2	2.12 URUSAN PEMERINTAH AN BIDANG ADMINISTRAS I KEPENDUDUK AN DAN PENCATATAN SIPIL	2.12.02 PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	a. Persentase Cakupan kepemilikan KTP Elektronik b. Persentase Cakupan kepemilikan Kartu Keluarga c. Persentase Cakupan kepemilikan Kartu Identitas Anak	a. 100% b. 100% c. 100%	2.12.02 PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	a. Persentase kepemilikan KTP elektronik b. Persentase kepemilikan kartu identitas anak (KIA) c. Persentase aktivasi kependudukan digital (IKD)	99,8% 80% 5%	1.546.770.330,00	1.346.205.930,00	1.344.160.930,00	
		2.12.02.2.01 Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Dokumen kependudukan yang terbit	36.500 dokumen dan 2 Laporan	2.12.02.2.01 Pelayanan Pendaftaran Penduduk	a. Jumlah perekaman KTP elektronik b. Jumlah KIA yang diterbitkan c. Jumlah IKD yang diaktivasi	a. 219 b. 3.000 c. 37.845	425.666.400,00	227.802.000,00	1.113.918.930,00	- Sub kegiatan pelayanan pendaftaran penduduk pagunya berkurang dan digeser ke sub kegiatan pengadaan peralatan rumah tangga 2.045.000
		2.12.02.2.02 Penataan Pendaftaran Penduduk	Persentase penduduk yang memiliki NIK	99%	2.12.02.2.02 Penataan Pendaftaran Penduduk	Jumlah paket pengadaan bahan untuk cetak dokumen kependudukan	6 dokumen	1.113.918.930,00	1.113.918.930,00	225.757.000,00	
		2.12.02.2.04 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	12 Kecamatan	2.12.02.2.04 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	Jumlah pembinaan dan pengawasan terkait pendaftaran penduduk	12 kecamatan	7.185.000,00	4.485.000,00	4.485.000,00	
		2.12.03 PROGRAM PENCATATAN SIPIL	a. Persentase cakupan kepemilikan akta kelahiran	a. 70%	2.12.03 PROGRAM PENCATATAN SIPIL	a. Persentase kepemilikan kelahiran	a. 75%	352.221.880,00	269.771.884,00	198.744.016,00	

NO	BIDANG URUSAN	SEBELUM (RKPD Induk 2025)			SESUDAH (RKPD Perubahan 2025)			PAGU		RKPD 2025 PERUBAHAN	ALASAN PERUBAHAN
		PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET	RKPD 2025 (Induk)	APBD INDUK 2025 dan PERGESERAN		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			b. Persentase cakupan akta kelahiran anak 0-18 tahun	b. 100%		b. Persentase kepemilikan akta kelahiran 0-18 tahun	b.100%				
			c. Persentase cakupan kepemilikan buku nikah/akta perkawinan pada semua pasangan yang perkawinannya dilaporkan	c.100%		c. Persentase kepemilikan akta perkawinan	c.100%				
			d. Persentase cakupan kepemilikan akta perceraian dari perceraian yang dilaporkan	d.100%		d. Persentase kepemilikan akta perceraian	d.100%				
			e. Persentase kepemilikan akta kematian dari peristiwa kematian yang dilaporkan	e.100%		e. Persentase kepemilikan akta kematian	e.100%				
						f. Persentase buku pokok pemakaman (BPP) yang ditindaklanjuti	f.100%				

NO	BIDANG URUSAN	SEBELUM (RKPD Induk 2025)			SESUDAH (RKPD Perubahan 2025)			PAGU		RKPD 2025 PERUBAHAN	ALASAN PERUBAHAN
		PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET	RKPD 2025 (Induk)	APBD INDUK 2025 dan PERGESERAN		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2.12.03.2.01 Pelayanan Pencatatan Sipil	Persentase Permohonan akta kelahiran dan akta kematian yang diterbitkan kutipan aktanya	100%	2.12.03.2.01 Pelayanan Pencatatan Sipil	a. Jumlah dokumen akta kelahiran yang terbit b. Jumlah akta kelahiran 0-18 tahun yang terbit c. Jumlah dokumen akta kematian yang terbit d. Jumlah dokumen akta perkawinan yang terbit e. Jumlah akta perceraian yang terbit f. Jumlah buku pokok pemakaman yang diterapkan	a.7.314 dokumen b.654 dokumen c.1.376 dokumen d.90 dokumen e.14 dokumen f.131 dokumen	194.999.148,00	146.294.148,00	163.700.000,00	- Sub kegiatan peningkatan dalam pelayanan pencatatan sipil pagunya berkurang karena efesiensi dan pergeseran pagu anggaran sebesar 7.830.000 ke Sub kegiatan pengadaan dokumen kependudukan selain blangko KTP El, Formulir dan buku terkait pencatatan sipil sesuai dengan kebutuhan pagunya bertambah dari pagu pergeseran sub kegiatan sosialisasi terkait pencatatan sipil. Penambahan pagu untuk belanja cetak formulir pendaftaran pencatatan sipil dimana harga di DPA lebih rendah dari harga di pasar sehingga perlu penyesuaian standar harga 2.805.852

NO	BIDANG URUSAN	SEBELUM (RKPD Induk 2025)			SESUDAH (RKPD Perubahan 2025)			PAGU		RKPD 2025 PERUBAHAN	ALASAN PERUBAHAN
		PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET	RKPD 2025 (Induk)	APBD INDUK 2025 dan PERGESERAN		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2.12.03.2.02 Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Persentase Permohonan akta perkawinan dan akta perceraian yang diterbitkan Kutipan aktanya	100%	2.12.03.2.02 Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Jumlah kegiatan sosialisasi yang dilaksanakan	12 kegiatan	147.322.732,00	118.527.736,00	30.094.016,00	Sub kegiatan sosialisasi terkait pencatatan sipil mengalami pengurangan karena terjadi efisiensi dan pergeseran pagu anggaran ke sub kegiatan pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP EL, Formulir, dan Buku Terkait Pencatatan Sipil Sesuai Dengan Kebutuhan sebesar 2.805.852 dan sisanya ke sub kegiatan penyediaan peralatan rumah tangga sebesar 71.027.868
		2.12.03.2.03 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Jumlah Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	12 Kecamatan	2.12.03.2.03 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Jumlah petugas pengelola buku pokok pemakaman yang dibina	131 orang	9.900.000,00	4.950.000,00	4.950.000,00	
		2.12.04 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	a. Persentase validitas database kependudukan b. Nilai survey kepuasan masyarakat (SKM) c. Cakupan perangkat daerah yang melaksanakan kerjasama pemanfaatan data kependudukan	a.100% b. Sangat Puas (92) c. 100%	2.12.04 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	a. Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik b. Persentase petugas pelayanan yang kompetensinya meningkat c. Persentase perangkat daerah yang memanfaatkan data d. Persentase mitra kerja yang memanfaatkan data kependudukan	a.91% b.90% c.36,58% d.33,33%	2.695.857.561,00	2.024.272.622,00	2.021.215.622,00	

NO	BIDANG URUSAN	SEBELUM (RKPD Induk 2025)			SESUDAH (RKPD Perubahan 2025)			PAGU		RKPD 2025 PERUBAHAN	ALASAN PERUBAHAN
		PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET	RKPD 2025 (Induk)	APBD INDUK 2025 dan PERGESERAN		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2.12.04.2.01 Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	Jumlah SKPD yang melaksanakan kerjasama Pemanfaatan data kependudukan	40 SKPD	2.12.04.2.01 Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	Jumlah penyajian kerjasama pemanfaatan data dengan perangkat daerah Jumlah sosialisasi pemanfaatan data kepada perangkat daerah Jumlah monitoring dan evaluasi pemanfaatan data kepada perangkat daerah Jumlah penyajian kerjasama pemanfaatan data dengan mitra kerja Jumlah monitoring dan evaluasi pemanfaatan data dengan mitra kerja	15 PD 1 kegiatan 2 kegiatan 5 mitra 1 kegiatan	47.541.852,00	24.639.000,00	24.639.000,00	Pagunya tidak berubah, pergeseran belanja dalam sub kegiatan yang sama
		2.12.04.2.03 Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	12 survey 50 peserta 1 Inovasi	2.12.04.2.03 Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah sarana dan prasarana pelayanan yang diadakan	1 kegiatan	465.563.643,00	274.995.472,00	274.995.472,00	Pagunya tidak berubah, pergeseran belanja dalam sub kegiatan yang sama
						Jumlah sarana layanan (aplikasi) yang dikembangkan	1 aplikasi				

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
Kabupaten Tabalong Tahun 2025

NO	BIDANG URUSAN	SEBELUM (RKPD Induk 2025)			SESUDAH (RKPD Perubahan 2025)			PAGU		RKPD 2025 PERUBAHAN	ALASAN PERUBAHAN
		PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET	RKPD 2025 (Induk)	APBD INDUK 2025 dan PERGESERAN		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2.12.04.2.04 Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase Pelaksanaan SIAK (Jaringan siak kab dan kec dalam kondisi baik dan peralatan siak hard dan soft ware dalam kondisi baik,update data kependudukan 25 desa	100 % 100 % 25 desa	2.12.04.2.04 Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	a.Jumlah sarana dan prasarana pelayanan yang terpeliharab.Jumlah petugas pelayanan yang mengikuti pelatihan/bimbingan teknis/workshop/coaching clinic	a.12 setb.55 orang	2.182.752.066,00	1.724.638.150,00	1.721.581.150,00	Sub kegiatan pembinaan dan pengawasan terkait pengelolaan informasi administrasi kependudukan pagunya bertambah dari pergeseran pagu sub kegiatan Bimbingan teknis terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan- Sub kegiatan bimbingan teknis terkait pengelolaan informasi administrasi kependudukan dan pendayagunaan data kependudukan pagunya berkurang dan di geser ke sub kegiatan pembinaan dan pengawasan terkait pengelolaan informasi administrasi kependudukan dan sub kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga sebesar 3.057.000,-
		2.12.05 PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Ketersediaan database kependudukan skala Kabupaten	15 laporan	2.12.05 PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Persentase validitas data kependudukan	0,9	82.152.350,00	60.717.350,00	166.867.000,00	

NO	BIDANG URUSAN	SEBELUM (RKPD Induk 2025)			SESUDAH (RKPD Perubahan 2025)			PAGU		RKPD 2025 PERUBAHAN	ALASAN PERUBAHAN
		PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET	RKPD 2025 (Induk)	APBD INDUK 2025 dan PERGESERAN		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2.12.05.2.01 Penyusunan Profil Kependudukan	Jumlah Laporan data dan profil perkembangan kependudukan	15 Laporan	2.12.05.2.01 Penyusunan Profil Kependudukan	- Jumlah dokumen kependudukan skala kabupaten - Jumlah layanan administrasi kependudukan yang terverifikasi	3 dokumen 1.000 dokumen	82.152.350,00	60.717.350,00	166.867.000,00	Pagu bertambah dari pergeseran pagu sub kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan yang akan di gunakan untuk belanja jilid buku profil dimana harga di DPA lebih rendah dari harga pasar
JUMLAH								38.026.326.564,00	21.589.526.789,00	21.589.526.789,00	
2.13.0.00.0.00.01.0000 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA											
1	X.XX. NON URUSAN	2.13.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	a. Nilai IKM b. Nilai Laki	a. B b. BB	2.13.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Predikat Nilai AKIP Perangkat Daerah	B	6.764.355.998,00	7.863.943.842,00	8.233.003.372,00	
		2.13.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusnya dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Eavaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10 Dokumen	2.13.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase hasil perencanaan dan pelaporan yang dijadikan bahan evaluasi kinerja	100%	33.583.209,00	33.583.209,00	0,00	
		2.13.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Penatausahaan Keuangan Perangkat Daerah	26 Dokumen	2.13.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase administrasi keuangan yang tertib, akuntabel dan tepat waktu	100%	4.928.875.000,00	6.224.267.000,00	6.389.267.000,00	
		2.13.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	2.13.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi umum yang terlaksana sesuai SOP	100%	807.816.077,00	575.173.177,00	778.787.916,00	
		2.13.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan	100%	2.13.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang difasilitasi/ disediakan	100%	522.354.912,00	559.193.656,00	593.221.656,00	

NO	BIDANG URUSAN	SEBELUM (RKPD Induk 2025)			SESUDAH (RKPD Perubahan 2025)			PAGU		RKPD 2025 PERUBAHAN	ALASAN PERUBAHAN
		PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET	RKPD 2025 (Induk)	APBD INDUK 2025 dan PERGESERAN		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2.13.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	2.13.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang yang dipelihara dan berfungsi sesuai kondisi standar	100%	471.726.800,00	471.726.800,00	471.726.800,00	
2	2.13 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	2.13.02 PROGRAM PENATAAN DESA	a. Jumlah desa yang ditetapkan batas administrasi wilayah desa b. Jumlah sarana transportasi desa yang dibangun c. Jumlah kawasan perdesaan yang terbentuk	a. 121 desa b. 2 buah c. 0 kawasan	2.13.02 PROGRAM PENATAAN DESA	a. Jumlah desa yang ditetapkan batas administrasi wilayah desa b. Jumlah sarana transportasi desa yang dibangun c. Jumlah kawasan perdesaan yang terbentuk	a. 121 desa b. 2 buah c. 0 kawasan	6.125.942.753,00	5.916.206.727,00	17.913.101.797,00	
		2.13.02.2.01 Penyelenggaraan Penataan Desa	a. Persentase cakupan sarana dan prasarana perkantoran pemerintahan desa yang baik b. Jumlah sarana transportasi desa yang dibangun c. Jumlah desa yang ditetapkan batas wilayahnya	a. 100% b. 2 buah c. 121 Desa	2.13.02.2.01 Penyelenggaraan Penataan Desa	a. Persentase cakupan sarana dan prasarana perkantoran pemerintahan desa yang baik b. Jumlah sarana transportasi desa yang dibangun c. Jumlah desa yang ditetapkan batas wilayahnya	a. 100% b. 2 buah c. 121 Desa	6.125.942.753,00	5.916.206.727,00	17.913.101.797,00	
		2.13.03 PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA	Jumlah kerjasama antar desa	1 Kerjasama	2.13.03 PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA	Jumlah kerjasama antar desa	1 Kerjasama	295.897.513,00	101.002.695,00	227.122.695,00	
		2.13.03.2.01 Fasilitas Kerja Sama antar Desa	Jumlah Kerjasama Desa yang dibuat	1 Kerjasama	2.13.03.2.01 Fasilitas Kerja sama antar Desa	Jumlah Kerjasama Desa yang dibuat	1 Kerjasama	295.897.513,00	101.002.695,00	227.122.695,00	
		2.13.04 PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Persentase peningkatan kinerja pemerintahan desa	80%	2.13.04 PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Persentase peningkatan kinerja pemerintahan desa	80%	3.639.286.923,00	2.556.695.652,00	2.776.832.024,00	

NO	BIDANG URUSAN	SEBELUM (RKPD Induk 2025)			SESUDAH (RKPD Perubahan 2025)			PAGU		RKPD 2025 PERUBAHAN	ALASAN PERUBAHAN
		PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET	RKPD 2025 (Induk)	APBD INDUK 2025 dan PERGESERAN		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2.13.04.2.01 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	a. Persentase desa dengan perencanaan yang baik b. Persentase desa dengan pengelolaan keuangan yang baik c. Persentase desa dengan administrasi umum desa yang baik d. Persentase desa yang menyelenggarakan pemerintahan dengan yang baik	a. 90% b. 90% c. 90% d. 90%	2.13.04.2.01 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	a. Persentase desa dengan perencanaan yang baik b. Persentase desa dengan pengelolaan keuangan yang baik c. Persentase desa dengan administrasi umum desa yang baik d. Persentase desa yang menyelenggarakan pemerintahan dengan yang baik	a. 90% b. 90% c. 90% d. 90%	3.639.286.923,00	2.556.695.652,00	2.776.832.024,00	
		2.13.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Persentase peningkatan keberdayaan masyarakat desa	80%	2.13.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Persentase peningkatan keberdayaan masyarakat desa	80%	2.148.721.032,00	1.349.750.225,00	1.790.922.619,00	
		2.13.05.2.01 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum	a. Jumlah BUM Desa yang terbentuk b. Persentase BUM Desa yang aktif c. Persentase BUM Desa yang berkembang d. Rata-rata jumlah kelompok binaan LPM e. Persentase LPM aktif f. Persentase LPM berprestasi	a. 121 Bum Desa b. 75% c. 70% d. 5 kelompok e. 30% f. 1 Kelompok	2.13.05.2.01 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum	a. Jumlah BUM Desa yang terbentuk b. Persentase BUM Desa yang aktif c. Persentase BUM Desa yang berkembang d. Rata-rata jumlah kelompok binaan LPM e. Persentase LPM aktif f. Persentase LPM berprestasi	a. 121 Bum Desa b. 75% c. 70% d. 5 kelompok e. 30% f. 1 Kelompok	2.148.721.032,00	1.349.750.225,00	1.790.922.619,00	

NO	BIDANG URUSAN	SEBELUM (RKPD Induk 2025)			SESUDAH (RKPD Perubahan 2025)			PAGU		RKPD 2025 PERUBAHAN	ALASAN PERUBAHAN
		PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET	RKPD 2025 (Induk)	APBD INDIK 2025 dan PERGESERAN		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	g. Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK h. Persentase PKK aktif i. Persentase Posyandu aktif j. Persentase swadaya masyarakat terhadap program pemberdayaan masyarakat k. Persentase pemeliharaan pasca program pemberdayaan masyarakat	g. 4 Kelompok h. 100% i. 100% j. 45% k. 45%	Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	g. Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK h. Persentase PKK aktif i. Persentase Posyandu aktif j. Persentase swadaya masyarakat terhadap program pemberdayaan masyarakat k. Persentase pemeliharaan pasca program pemberdayaan masyarakat	g. 4 Kelompok h. 100% i. 100% j. 45% k. 45%				
JUMLAH								18.974.204.219,00	17.787.599.141,00	30.940.982.507,00	
2.15.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERHUBUNGAN											
1	X.XX. NON URUSAN	2.15.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai AKIP	78 BB	2.15.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Predikat Nilai AKIP Perangkat Daerah	BB	18.643.380.452,00	19.766.305.209,00	24.129.567.576,00	
		2.15.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.	21 Dok	2.15.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase hasil perencanaan dan pelaporan yang dijadikan bahan evaluasi kinerja	100%	592.868.000,00	147.920.000,00	205.370.000,00	
		2.15.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah.	12 Bulan	2.15.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase administrasi keuangan yang tertib, akuntabel dan tepat waktu	100%	6.587.667.000,00	8.777.238.000,00	8.777.238.000,00	

NO	BIDANG URUSAN	SEBELUM (RKPD Induk 2025)			SESUDAH (RKPD Perubahan 2025)			PAGU		RKPD 2025 PERUBAHAN	ALASAN PERUBAHAN
		PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET	RKPD 2025 (Induk)	APBD INDUK 2025 dan PERGESERAN		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2.15.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pegawai Berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	5 Orang	2.15.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pengelolaan dan pelayanan administrasi kepegawaian yang tepat waktu, mutakhir dan terdokumentasi	100%	548.280.000,00	586.037.000,00	1.634.478.000,00	
		2.15.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	a. Indeks Kepuasan terhadap layanan Kesekretariatan. b. Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor. c. Tersedianya barang cetakan dan penggandaan. d. Terlaksananya Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD didalam dan diluar Daerah.	a. 79 BB b. 82 item c. 9 item d. 180 orang	2.15.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi umum yang terlaksana sesuai SOP	100%	1.781.214.237,00	1.026.842.819,00	2.300.280.075,00	
		2.15.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	a. Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor. b. Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor.	a. 30 item/tahun b. 12 bln	2.15.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang difasilitasi/ disediakan	100%	5.548.243.000,00	5.809.741.370,00	7.678.437.609,00	
		2.15.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.	36 Unit, 27 item	2.15.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang yang dipelihara dan berfungsi sesuai kondisi standar	100%	3.585.108.215,00	3.418.526.020,00	3.533.763.892,00	

NO	BIDANG URUSAN	SEBELUM (RKPD Induk 2025)			SESUDAH (RKPD Perubahan 2025)			PAGU		RKPD 2025 PERUBAHAN	ALASAN PERUBAHAN
		PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET	RKPD 2025 (Induk)	APBD INDUK 2025 dan PERGESERAN		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	2.15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	2.15.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	a. Persentase Layanan Jasa Sarana dan Prasarana Fasilitas Keselamatan Perhubungan b. Meningkatnya kelaikan Operasional Kendaraan Umum /Pribadi Di Jalan Raya c. Persentase Layanan Angkutan dan Multimoda d. Meningkatnya Pergerakan Orang dan Barang yang melalui bandara Warukin	100% 4.400 KBWU 100% 2.500/ 42.000	2.15.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	a. Konektivitas Darat b. Persentase Kelengkapan Jalan yang telah Terpasang terhadap Kondisi Ideal	a. 86 b. 100	30.328.412.048,00	29.393.071.424,00	32.065.380.002,00	
		2.15.02.2.01 Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Tersedianya Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	1 Dokumen	2.15.02.2.01 Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	a. Jumlah Dokumen Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota b. Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	a. 2 b. 1	400.000.000,00	313.035.000,00	266.945.000,00	
		2.15.02.2.02 Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	a. Terpenuhi Rambu Standar. b. Terpenuhi Cermin Tikung.	a. 500 buah b. 5 buah	2.15.02.2.02 Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	a. Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara b. Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	a. 457 b. 350	3.315.152.231,00	3.314.493.231,00	4.059.690.668,00	

NO	BIDANG URUSAN	SEBELUM (RKPD Induk 2025)			SESUDAH (RKPD Perubahan 2025)			PAGU		RKPD 2025 PERUBAHAN	ALASAN PERUBAHAN
		PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET	RKPD 2025 (Induk)	APBD INDUK 2025 dan PERGESERAN		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			c. Terpenuhinya Water Barrier. d. Terpenuhinya Guadrill e. TerpenuhinyaTrafic on. f. Terpenuhinya Marka Tikungan g. Terpeliharanya Fasilitas Keselamatan.	c. 20 buah d. 0 buah e. 10 buah f. 40 M2 g. 510 buah							
		2.15.02.2.03 Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	a. Kontribusi PAD sektor retribusi pengguna jasa/fasilitas terminal. b. Persentase terhadap 3 terminal yang dilakukan rehabilitasi dan Pemeliharaan	a. 73810000 b. 100%	2.15.02.2.03 Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	Jumlah Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang) yang terehabilitasi dan terpelihara	1	9.602.227.872,00	9.101.238.593,78	8.388.341.738,00	
		2.15.02.2.04 Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	a. Terlaksananya peningkatan, pengelolaan dan penataan titik (lokasi) parkir	a. 15 Titik Parkir	2.15.02.2.04 Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	a. Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	a. 1	950.000.000,00	834.783.846,77	250.340.713,00	

NO	BIDANG URUSAN	SEBELUM (RKPD Induk 2025)			SESUDAH (RKPD Perubahan 2025)			PAGU		RKPD 2025 PERUBAHAN	ALASAN PERUBAHAN
		PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET	RKPD 2025 (Induk)	APBD INDUK 2025 dan PERGESERAN		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			b. Kontribusi PAD sektor Retribusi Parkir.	b. 490.654.516		b. Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	b. 36				
		2.15.02.2.05 Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	a. Jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji yang telah melakukan pengujian. b. Kontribusi PAD Sektor Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor.	a. 4.500 KBWU b. 953.900.000	2.15.02.2.05 Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	a. Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara b. Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia	a. 13 b. 13	1.400.000.000,00	1.765.948.000,00	2.786.547.833,00	
		2.15.02.2.06 Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	a. Tersedianya Rambu. b. Tersedianya Marka. c. Terpeliharanya Peralatan <i>Out Door Area Traffic Control System</i> /RHK	a. 52 buah b. 1.583 M2 c. 2 lokasi	2.15.02.2.06 Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	a. Jumlah kawasan pembangunan Rute Aman Selamat Sekolah yang terbangun b. Jumlah laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota c. Jumlah Laporan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota d. Jumlah Terbangunnya Zona Selamat Sekolah (ZOSS)	a. 4 b. 3 c. 3 d. 7	8.000.000.000,00	7.966.879.581,00	9.580.219.701,00	

NO	BIDANG URUSAN	SEBELUM (RKPD Induk 2025)			SESUDAH (RKPD Perubahan 2025)			PAGU		RKPD 2025 PERUBAHAN	ALASAN PERUBAHAN
		PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET	RKPD 2025 (Induk)	APBD INDUK 2025 dan PERGESERAN		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						e. Jumlah Perlengkapan Jalan dalam Rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas yang dilaksanakan pengadaan dan Pemasangan f. Jumlah Pengadaan dan Pemasangan Sistem Manajemen Transportasi Cerdas	e. 3 f. 1				
		2.15.02.2.07 Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota	Tersedianya Dokumen Andalalin	1 Dokumen	2.15.02.2.07 Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota	a. Jumlah penilai Andalalin yang ditingkatkan kompetensinya dan tersertifikasi b. Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin c. Jumlah laporan Rekomendasi Persetujuan Teknis Andalalin yang terawasi	a. 1 b. 1 c. 1	335.000.000,00	248.038.000,00	327.958.000,00	
		2.15.02.2.08 Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	a. Tersedianya data laporan hasil pelaksanaan inspeksi, audit dan pemantauan terminal.	a. 3 Dokumen	2.15.02.2.08 Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	a. Jumlah Auditor dan Inspektur Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang ditingkatkan kapasitasnya	a. 1	1.235.000.000,00	860.262.500,00	930.224.000,00	

NO	BIDANG URUSAN	SEBELUM (RKPD Induk 2025)			SESUDAH (RKPD Perubahan 2025)			PAGU		RKPD 2025 PERUBAHAN	ALASAN PERUBAHAN
		PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET	RKPD 2025 (Induk)	APBD INDIK 2025 dan PERGESERAN		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			b. Tersedianya data laporan hasil Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota. c. Tersedianya data laporan hasil pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum.	b. 3 Dokumen/Lembaga b. 3 Dokumen/Lembaga		b. Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota c. Jumlah laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum d. Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal	b. 3 c. 3 d. 3				
		2.15.02.2.09 Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Unit Angkutan.	43 Unit	2.15.02.2.09 Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	a. Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota b. Jumlah Armada Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia	a. 4 b. 55	4.681.031.945,00	4.705.156.171,45	5.191.875.849,00	

NO	BIDANG URUSAN	SEBELUM (RKPD Induk 2025)			SESUDAH (RKPD Perubahan 2025)			PAGU		RKPD 2025 PERUBAHAN	ALASAN PERUBAHAN
		PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET	RKPD 2025 (Induk)	APBD INDUK 2025 dan PERGESERAN		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2.15.02.2.10 Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Pelayanan Angkutan Perkotaan yang Melampaui Batas 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Draf Raperda dan/atau Raperbup..	36 Dokumen	2.15.02.2.10 Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Pelayanan Angkutan Perkotaan yang Melampaui Batas 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota	1	310.000.000,00	242.551.500,00	242.551.500,00	
		2.15.02.2.14 Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kontribusi PAD sektor Retribusi Perizinan Angkutan /Trayek.	25.000.000	2.15.02.2.14 Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota	12	100.000.000,00	40.685.000,00	40.685.000,00	
JUMLAH								48.971.792.500,00	49.159.376.633,00	56.194.947.578,00	
2.16.2.20.2.21.01.0000 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA											
1	X.XX. NON URUSAN	2.16.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai AKIP	A	2.16.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Predikat Nilai AKIP Perangkat Daerah	BB	10.194.665.644,00	11.970.533.640,00	11.970.533.640,00	
		2.16.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi Perangkat daerah	8 Dokumen	2.16.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase hasil perencanaan dan pelaporan yang dijadikan bahan evaluasi kinerja	100%	164.577.000,00	92.997.000,00	92.997.000,00	Pengurangan anggaran karena kebijakan efisiensi perjalanan dinas
		2.16.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya penatausahaan keuangan Perangkat Daerah	4 Laporan	2.16.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase administrasi keuangan yang tertib, akuntabel dan tepat waktu	100%	6.264.483.000,00	8.425.651.000,00	8.425.651.000,00	Penambahan Langsung dari Bidang Anggaran BPKAD
		2.16.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Meningkatnya Kualitas SDM	100%	2.16.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pengelolaan dan pelayanan administrasi kepegawaian yang tepat waktu,	100%	459.934.120,00	350.754.120,00	350.754.120,00	Pengurangan anggaran karena kebijakan efisiensi perjalanan dinas

NO	BIDANG URUSAN	SEBELUM (RKPD Induk 2025)			SESUDAH (RKPD Perubahan 2025)			PAGU		RKPD 2025 PERUBAHAN	ALASAN PERUBAHAN
		PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET	RKPD 2025 (Induk)	APBD INDUK 2025 dan PERGESERAN		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						mutakhir dan terdokumentasi					
		2.16.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Kegiatan Administrasi Umum	100%	2.16.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi umum yang terlaksana sesuai SOP	100%	898.738.206,00	475.193.790,00	475.193.790,00	Pengurangan anggaran karena kebijakan efisiensi perjalanan dinas
		2.16.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya barang milik daerah	7 Unit	2.16.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Realisasi Pengadaan Barang Milik Daerah yang sesuai dengan yang direncanakan	100%	550.392.216,00	310.478.420,00	310.478.420,00	Pengurangan anggaran karena kebijakan efisiensi
		2.16.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintah	1 Tahun	2.16.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang difasilitasi/ disediakan	100%	1.058.272.672,00	1.517.190.880,00	1.517.190.880,00	Pagu Induk 1.520.190.880 Pengurangan anggaran karena kebijakan efisiensi
		2.16.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	2.16.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang yang dipelihara dan berfungsi sesuai kondisi standar	100%	798.268.430,00	798.268.430,00	798.268.430,00	Tidak ada Perubahan
2	2.16 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	2.16.02 PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase, Jumlah Informasi dan Berita yang ditangani	100%	2.16.02 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase, Jumlah Informasi dan Berita yang ditangani	100%	7.426.722.496,00	7.013.467.098,00	8.722.082.496,00	
		2.16.02.2.01 Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Bid. Informasi dan Komunikasi Publik	100%	2.16.02.2.01 Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Bid. Informasi dan Komunikasi Publik	100%	7.426.722.496,00	7.013.467.098,00	8.722.082.496,00	Penambahan anggaran untuk Hibah kepada Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kabupaten Tabalong, anggaran untuk dukungan Hari Jadi Kabupaten dan Desiminasi Informasi program prioritas Bupati Tabalong.

NO	BIDANG URUSAN	SEBELUM (RKPD Induk 2025)			SESUDAH (RKPD Perubahan 2025)			PAGU		RKPD 2025 PERUBAHAN	ALASAN PERUBAHAN
		PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET	RKPD 2025 (Induk)	APBD INDUK 2025 dan PERGESERAN		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2.16.03 PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	Persentase terlaksananya Program Aplikasi Informatika	100%	2.16.03 PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Persentase terlaksananya Program Aplikasi Informatika	100%	6.168.121.970,00	5.148.954.570,00	11.378.654.570,00	
		2.16.03.2.01 Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase terlaksananya kegiatan Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	100%	2.16.03.2.01 Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase terlaksananya kegiatan Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	100%	84.034.000,00	28.607.000,00	28.607.000,00	Rasionalisasi Anggaran Perjalanan Dinas
		2.16.03.2.02 Pengelolaan <i>e-government</i> Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase terlaksananya kegiatan Pengelolaan <i>e-Government</i> di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	100%	2.16.03.2.02 Pengelolaan <i>E-government</i> di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase terlaksananya kegiatan Pengelolaan <i>e-Government</i> di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	100%	6.084.087.970,00	5.120.347.570,00	11.350.047.570,00	1. Bertambahnya penugasan dari Bupati yaitu terkait Anggaran Belanja internet gratis untuk seluruh desa (1 Desa 1 Wifi) 2. Command Center, 3. Penambahan Kuota Internet Keperluan untuk Perangkat Daerah 4. Rasionalisasi Anggaran Perjalanan Dinas
3	2.20 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK	2.20.02 PROGRAM PENYELENGGARAA N STATISTIK SEKTORAL	Persentase Terselenggaranya Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kab/Kota	100%	2.20.02 PROGRAM PENYELENGGARAA N STATISTIK SEKTORAL	Indeks Pembangunan Statistik (IPS)		712.498.420,00	525.247.920,00	564.247.920,00	

NO	BIDANG URUSAN	SEBELUM (RKPD Induk 2025)			SESUDAH (RKPD Perubahan 2025)			PAGU		RKPD 2025 PERUBAHAN	ALASAN PERUBAHAN
		PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET	RKPD 2025 (Induk)	APBD INDUK 2025 dan PERGESERAN		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2.20.02.2.01 Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Terselenggaranya Statistik	100%	2.20.02.2.01 Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Persentase perangkat daerah yang melaksanakan kegiatan statistik sesuai standar	100%	712.498.420,00	525.247.920,00	564.247.920,00	Penambahan Honorarium dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Tabalong yaitu Tim Koordinasi Dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral Kabupaten Tabalong
4	2.21 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN	2.21.02 PROGRAM PENYELENGGARAA N PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Persentase Terselenggaranya Persandian di Lingkup Daerah Kab/Kota	100%	2.21.02 PROGRAM PENYELENGGARAA N PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Tingkat Kesiapan Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah	100%	729.567.400,00	366.643.400,00	366.643.400,00	
		2.21.02.2.01 Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen yang diterima dan diamankan	50 Dokumen	2.21.02.2.01 Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase laporan keamanan siber yang ditindaklanjuti	100%	529.567.400,00	312.789.400,00	312.789.400,00	Pengurangan anggaran karena kebijakan efisiensi perjalanan dinas
		2.21.02.2.02 Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah	41 SKPD	2.21.02.2.02 Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Perangkat Daerah yang Terhubung dalam Jaring Komunikasi Sandi	100%	200.000.000,00	53.854.000,00	53.854.000,00	Pengurangan anggaran karena kebijakan efisiensi perjalanan dinas
JUMLAH								25.231.575.930,00	25.024.846.628,00	33.002.162.026,00	
2.17.3.31.3.30.01.0000 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN											
1	X.XX. NON URUSAN	2.17.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Terlaksananya kegiatan penunjang urusan pemerintah daerah	100%	2.17.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Predikat Nilai AKIP Perangkat Daerah	A	16.748.475.335,00	22.242.516.548,00	22.298.678.909,00	

NO	BIDANG URUSAN	SEBELUM (RKPD Induk 2025)			SESUDAH (RKPD Perubahan 2025)			PAGU		RKPD 2025 PERUBAHAN	ALASAN PERUBAHAN
		PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET	RKPD 2025 (Induk)	APBD INDUK 2025 dan PERGESERAN		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2.17.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD.	100%	2.17.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase hasil perencanaan dan pelaporan yang dijadikan bahan evaluasi kinerja	100%	217.979.695,00	91.699.619,00	93.049.619,00	
		2.17.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terbayarnya gaji pegawai	12 bulan	2.17.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase administrasi keuangan yang tertib, akuntabel dan tepat waktu	100%	12.104.478.000,00	15.154.643.000,00	15.154.643.000,00	
		2.17.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	2.17.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi umum yang terlaksana sesuai SOP	100%	942.269.705,00	1.235.093.748,00	1.361.183.678,00	
		2.17.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100%	2.17.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Realisasi Pengadaan Barang Milik Daerah yang sesuai dengan yang direncanakan	100%	1.077.873.665,00	270.000.000,00	40.000.000,00	
		2.17.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	2.17.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang difasilitasi/ disediakan	100%	1.527.140.605,00	4.498.062.743,00	4.509.772.743,00	
		2.17.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	2.17.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang yang dipelihara dan berfungsi sesuai kondisi standar	100%	878.733.665,00	993.017.438,00	1.140.029.869,00	
2	2.17 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI,	2.17.03 PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Persentase koperasi aktif	67,16%	2.17.03 PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Persentase Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	54,00%	84.630.700,00	43.551.000,00	43.551.000,00	

NO	BIDANG URUSAN	SEBELUM (RKPD Induk 2025)			SESUDAH (RKPD Perubahan 2025)			PAGU		RKPD 2025 PERUBAHAN	ALASAN PERUBAHAN
		PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET	RKPD 2025 (Induk)	APBD INDUK 2025 dan PERGESERAN		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	USAHA KECIL, DAN MENENGAH	2.17.03.2.01 Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Jumlah Koperasi yang Telah Dilakukan Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	90%	2.17.03.2.01 Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	umlah Koperasi yang telah dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan (Unit Usaha)	63 (Unit/Usaha)	84.630.700,00	43.551.000,00	43.551.000,00	
		2.17.04 PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	terlaksananya penilaian kesehatan koperasi	16 KSP/USP	2.17.04 PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Persentase Koperasi Aktif	0,53	201.400.000,00	77.250.263,00	73.450.263,00	
		2.17.04.2.01 Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Unit Usaha Koperasi yang Telah Dilakukan Penilaian Kesehatan	16 KSP/USP	2.17.04.2.01 Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Unit Usaha Koperasi yang Telah Dilakukan Penilaian Kesehatan (Unit Usaha)	17 (Unit/Usaha)	201.400.000,00	77.250.263,00	73.450.263,00	
		2.17.05 PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Terwujudnya SDM Koperasi yang berkualitas	40%	2.17.05 PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Persentase Koperasi yang Diberikan Dukungan Fasilitas Pelatihan	60 (Orang)	172.718.400,00	134.294.380,00	261.294.380,00	
		2.17.05.2.01 Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	60 Orang	2.17.05.2.01 Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian (Orang)	60 (Orang)	172.718.400,00	134.294.380,00	261.294.380,00	
					2.17.06 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI			0,00	0,00	338.300.000,00	

NO	BIDANG URUSAN	SEBELUM (RKPD Induk 2025)			SESUDAH (RKPD Perubahan 2025)			PAGU		RKPD 2025 PERUBAHAN	ALASAN PERUBAHAN
		PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET	RKPD 2025 (Induk)	APBD INDUK 2025 dan PERGESERAN		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					2.17.06.2.01 Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Meningkatnya Koperasi yang Berkualitas	1	0,00	0,00	338.300.000,00	
		2.17.07 PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Terfasilitasi Perizinan Usaha Mikro dan Fasilitasi Kemitraan Usaha	100%	2.17.07 PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Persentase Usaha Kecil yang Bertransformasi dari Informal ke Formal	100%	400.000.000,00	162.159.000,00	537.449.529,00	
		2.17.07.2.01 Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Terlaksananya fasilitasi Perizinan Usaha Mikro dan Fasilitasi Kemitraan Usaha	4 kegiatan	2.17.07.2.01 Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro (Unit Usaha)	30 (Unit/Usaha)	400.000.000,00	162.159.000,00	537.449.529,00	
		2.17.08 PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Terbinanya Para pelaku Usaha Mikro	100 UMKM	2.17.08 PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Meningkatnya daya saing UMKM	100 UMKM%	1.350.000.000,00	517.187.632,00	802.598.203,00	
		2.17.08.2.01 Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Jumlah Unit Usaha Mikro yang Terfasilitasi dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	100 UMKM	2.17.08.2.01 Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Proporsi UKM Menjalni Kemitraan dan Ekspor	150 UMKM	1.350.000.000,00	517.187.632,00	802.598.203,00	
3	3.30 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	3.30.02 PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Jumlah rekomendasi perizinan yang dikeluarkan	88%	3.30.02 PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Jumlah rekomendasi perizinan yang dikeluarkan	88%	74.800.000,00	15.475.080,00	15.475.080,00	

NO	BIDANG URUSAN	SEBELUM (RKPD Induk 2025)			SESUDAH (RKPD Perubahan 2025)			PAGU		RKPD 2025 PERUBAHAN	ALASAN PERUBAHAN
		PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET	RKPD 2025 (Induk)	APBD INDUK 2025 dan PERGESERAN		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		3.30.02.2.01 Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan	Jumlah Rekomendasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha	2	3.30.02.2.01 Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan	Jumlah Rekomendasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha	2	28.600.000,00	11.827.100,00	11.827.100,00	
		3.30.02.2.02 Penerbitan Tanda Daftar Gudang	Jumlah Dokumen Tanda Daftar Gudang	3 Dokumen	3.30.02.2.02 Penerbitan Tanda Daftar Gudang	Jumlah Dokumen Tanda Daftar Gudang	3 Dokumen	22.000.000,00	1.482.000,00	1.482.000,00	
		3.30.02.2.05 Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minum di Tempat	Jumlah Surat Izin Usaha Perdagangan untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minuman Beralkohol Golongan B dan C yang Diterbitkan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	1 Dokumen	3.30.02.2.05 Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minum di Tempat	Jumlah Surat Izin Usaha Perdagangan untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minuman Beralkohol Golongan B dan C yang Diterbitkan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	1 Dokumen	24.200.000,00	2.165.980,00	2.165.980,00	
		3.30.03 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Persentase pemenuhan indikator pasar Tipe A kriteria SNI 8152:2015	85%	3.30.03 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Persentase Sarana Perdagangan yang Ditingkatkan Kualitasnya	20,00%	20.714.138.471,00	20.035.005.158,00	21.334.079.403,00	
		3.30.03.2.01 Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Melaksanakan pemenuhan kriteria pasar sesuai SNI (Kriteria SNI)	5 Unit	3.30.03.2.01 Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan (Unit)	5 (unit)	19.561.108.217,00	19.731.428.889,00	20.973.068.009,00	

NO	BIDANG URUSAN	SEBELUM (RKPD Induk 2025)			SESUDAH (RKPD Perubahan 2025)			PAGU		RKPD 2025 PERUBAHAN	ALASAN PERUBAHAN
		PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET	RKPD 2025 (Induk)	APBD INDUK 2025 dan PERGESERAN		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		3.30.03.2.02 Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	Melaksanakan pembinaan dan pengelolaan pasar sesuai SNI (Kriteria SNI)	7 dokumen	3.30.03.2.02 Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat (Dokumen)	1 Dokumen	1.153.030.254,00	303.576.269,00	361.011.394,00	
		3.30.04 PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	a. Kontribusi sektor perdagangan terhadapp PDRB b. Terkendalinya inflasi harga kebutuhan kebutuhan Bapokting	9,21 % 1,10%	3.30.04 PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	a. Kontribusi sektor perdagangan terhadapp PDRB b. Terkendalinya inflasi harga kebutuhan kebutuhan Bapokting	9,21 % 1,10%	550.104.300,00	301.040.388,00	347.339.388,00	
		3.30.04.2.01 Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Aksesibilitas BarangKebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	12 bulan	3.30.04.2.01 Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Aksesibilitas BarangKebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	12 bulan	71.104.300,00	24.246.000,00	24.246.000,00	
		3.30.04.2.02 Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	12 Laporan	3.30.04.2.02 Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota (Laporan)	4 Laporan	446.000.000,00	264.886.000,00	311.185.000,00	
		3.30.04.2.03 Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengawasan Penyuluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	2 Laporan	3.30.04.2.03 Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengawasan Penyuluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	2 Laporan	33.000.000,00	11.908.388,00	11.908.388,00	
		3.30.05 PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Jumlah produk unggulan daerah yang siap ekspor	60%	3.30.05 PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Jumlah produk unggulan daerah yang siap ekspor	60%	113.203.970,00	84.522.728,00	84.522.728,00	

NO	BIDANG URUSAN	SEBELUM (RKPD Induk 2025)			SESUDAH (RKPD Perubahan 2025)			PAGU		RKPD 2025 PERUBAHAN	ALASAN PERUBAHAN
		PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET	RKPD 2025 (Induk)	APBD INDUK 2025 dan PERGESERAN		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		3.30.05.2.01 Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Produk yang siap Ekspor	10	3.30.05.2.01 Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Produk yang siap Ekspor	10	113.203.970,00	84.522.728,00	84.522.728,00	
		3.30.06 PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Persentase jumlah alat UTTP dipasar dan SPBU yang ditera/tera ulang	70%	3.30.06 PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Persentase Penanganan Pengaduan Konsumen	70%	391.000.000,00	100.455.428,00	236.456.379,00	
		3.30.06.2.01 Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang	1725	3.30.06.2.01 Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang (Unit)	1725 (Unit)	391.000.000,00	100.455.428,00	236.456.379,00	
4	3.31 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	3.31.02 PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Kontribusi sektor industri terhadap PDRB	8,25%	3.31.02 PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Persentase Realisasi Investasi Sektor Industri dan Kawasan Industri	2,31%	1.528.890.094,00	1.243.376.326,00	2.855.751.196,00	
		3.31.02.2.01 Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Pertambahan industri baru	40 WUB	3.31.02.2.01 Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri (Dokumen)	1 Dokumen	1.528.890.094,00	1.243.376.326,00	2.855.751.196,00	
		3.31.03 PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN/KOTA	Persentase jumlah perizinan berusaha industri yang difasilitasi dengan yang dikeluarkan oleh instansi terkait secara elektronik	70%	3.31.03 PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	Persentase Izin Usaha Industri yang Diterbitkan	75%	29.363.400,00	16.217.400,00	16.217.400,00	

NO	BIDANG URUSAN	SEBELUM (RKPD Induk 2025)			SESUDAH (RKPD Perubahan 2025)			PAGU		RKPD 2025 PERUBAHAN	ALASAN PERUBAHAN
		PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET	RKPD 2025 (Induk)	APBD INDIK 2025 dan PERGESERAN		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		3.31.03.2.01 Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perizinan Berusaha Industri yang di Fasilitas secara Elektronik	70%	3.31.03.2.01 Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha industri dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah yang berlokasi di satu Kab./Kota sepanjang merupakan Penanaman Modal Dalam Negeri dan selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat (Dokumen)	1 Dokumen	29.363.400,00	16.217.400,00	16.217.400,00	
		3.31.04 PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Tersedianya informasi industri	100%	3.31.04 PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Tersedianya Informasi Industri Secara Lengkap, Akurat, dan Terkini	100%	29.168.700,00	29.168.700,00	29.168.700,00	
		3.31.04.2.01 Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	Terbitnya Laporan/Buku Informasi Industri	1 Laporan	3.31.04.2.01 Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) (Dokumen)	1 Dokumen	29.168.700,00	29.168.700,00	29.168.700,00	
JUMLAH								42.387.893.370,00	45.002.220.031,00	49.274.332.558,00	

NO	BIDANG URUSAN	SEBELUM (RKPD Induk 2025)			SESUDAH (RKPD Perubahan 2025)			PAGU		RKPD 2025 PERUBAHAN	ALASAN PERUBAHAN
		PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET	RKPD 2025 (Induk)	APBD INDUK 2025 dan PERGESERAN		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.18.0.00.0.00.01.0000 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU											
1	X.XX. NON URUSAN	2.18.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Sarana dan Prasarana	BB	2.18.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Predikat Nilai AKIP Perangkat Daerah	BB	9.742.145.431,00	11.127.806.402,00	11.452.406.402,00	
		2.18.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Akuntabilitas Kinerja SKPD	BB	2.18.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase hasil perencanaan dan pelaporan yang dijadikan bahan evaluasi kinerja	100%	28.000.000,00	18.740.000,00	18.740.000,00	
		2.18.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terbayarnya gaji dan tunjangan ASN	14 bln	2.18.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase administrasi keuangan yang tertib, akuntabel dan tepat waktu	100%	4.920.055.000,00	6.839.545.000,00	6.839.545.000,00	
		2.18.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Lancar Ppelaksanaan tugas untuk pelayanan kepada masyarakat	1 unit	2.18.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pengelolaan dan pelayanan administrasi kepegawaian yang tepat waktu, mutakhir dan terdokumentasi	100%	474.740.000,00	371.148.000,00	347.398.000,00	
		2.18.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terpenuhinya aparat yang memiliki wawasan	15 orang	2.18.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi umum yang terlaksana sesuai SOP	100%	1.963.666.181,00	1.406.042.237,00	1.493.592.237,00	
		2.18.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Layanan yang tersedia	5 kegiatan	2.18.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			93.240.000,00	0,00	0,00	
		2.18.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang tersedia	2 kegiatan	2.18.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang difasilitasi/ disediakan	100%	1.668.604.400,00	1.787.810.000,00	1.787.810.000,00	

NO	BIDANG URUSAN	SEBELUM (RKPD Induk 2025)			SESUDAH (RKPD Perubahan 2025)			PAGU		RKPD 2025 PERUBAHAN	ALASAN PERUBAHAN
		PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET	RKPD 2025 (Induk)	APBD INDUK 2025 dan PERGESERAN		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2.18.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah yang dipelihara	117 unit	2.18.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang yang dipelihara dan berfungsi sesuai kondisi standar	100%	593.839.850,00	704.521.165,00	965.321.165,00	
2	2.18 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	2.18.02 PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Realisasi investasi PMDN dan PMA	1,01 Trilyun	2.18.02 PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Persentase Potensi Investasi Daerah yang Terealisasi	50%	330.000.000,00	208.105.000,00	573.872.000,00	
		2.18.02.2.01 Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan evaluasi pelaksanaan pemberian fasilitas /intensif dan kemudahan penanaman modal	5 kali	2.18.02.2.01 Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Penetapan Pemberian Fasilitas/ Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	5 Dok	60.000.000,00	26.013.000,00	41.780.000,00	
		2.18.02.2.02 Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Jumlah jenis potensi investasi daerah yang teridentifikasi sesuai standar	2 kajian	2.18.02.2.02 Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Persentase peningkatan ketersediaan Kajian Pemetaan Potensi investasi dan Peluang Usaha (Pra FS dan IPRO)	100%	270.000.000,00	182.092.000,00	532.092.000,00	
		2.18.03 PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Jumlah investor yang berminat menanamkan modal	20 Investor	2.18.03 PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Persentase investor yang berminat menanamkan modal	100%	675.000.000,00	556.971.528,00	1.041.204.528,00	
		2.18.03.2.01 Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah promosi investasi yang dilaksanakan	5 kali	2.18.03.2.01 Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Investor yang menerima insentif PPB	2 Investor	675.000.000,00	556.971.528,00	1.041.204.528,00	
		2.18.04 PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Nilai Skor Standar Kepuasan Masyarakat	90%	2.18.04 PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atas Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	Nilai SKM 96	901.596.080,00	659.569.080,00	659.569.080,00	

NO	BIDANG URUSAN	SEBELUM (RKPD Induk 2025)			SESUDAH (RKPD Perubahan 2025)			PAGU		RKPD 2025 PERUBAHAN	ALASAN PERUBAHAN
		PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET	RKPD 2025 (Induk)	APBD INDUK 2025 dan PERGESERAN		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2.18.04.2.01 Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah dokumen pelayanan perijinan dan non perijinan yang diterbitkan	2.500 izin	2.18.04.2.01 Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Rata-rata waktu penerbitan pelayanan	16 jam	901.596.080,00	659.569.080,00	659.569.080,00	
		2.18.05 PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Persentase pengendalian pelaksanaan modal dan informasi penanaman modal	84%	2.18.05 PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Persentase Pelaku Usaha yang mempunyai LKPM sesuai standar	100%	428.449.111,00	279.793.898,00	279.793.898,00	
		2.18.05.2.01 Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pengendalian pelaksanaan penanaman modal	80 kali	2.18.05.2.01 Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase investor yang melaporkan LKPM tepat waktu	48%	428.449.111,00	279.793.898,00	279.793.898,00	
		2.18.06 PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Kenaikan penurunan nilai realisasi PMDN dan PMA	100%	2.18.06 PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Persentase Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Tersedia	100%	589.206.944,00	415.288.947,00	415.288.947,00	
		2.18.06.2.01 Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Updating sistem informasi investasi serta perizinan dan non perizinan	100%	2.18.06.2.01 Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Tersedia	100%	589.206.944,00	415.288.947,00	415.288.947,00	
JUMLAH								12.666.397.566,00	13.247.534.855,00	14.422.134.855,00	
2.19.3.26.0.00.01.0000 DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA											
1	X.XX. NON URUSAN	2.19.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	Nilai AKIP	74 (BB)	2.19.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	Predikat Nilai AKIP Perangkat Daerah	BB	7.189.279.059,00	8.384.761.679,00	10.127.857.451,00	

NO	BIDANG URUSAN	SEBELUM (RKPD Induk 2025)			SESUDAH (RKPD Perubahan 2025)			PAGU		RKPD 2025 PERUBAHAN	ALASAN PERUBAHAN
		PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET	RKPD 2025 (Induk)	APBD INDUK 2025 dan PERGESERAN		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		DAERAH KABUPATEN/KOTA			DAERAH KABUPATEN/KOTA						
		2.19.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	8 dokumen	2.19.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase hasil perencanaan dan pelaporan yang dijadikan bahan evaluasi kinerja	100%	234.710.068,00	117.980.068,00	117.980.068,00	
		2.19.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1 kegiatan	2.19.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase administrasi keuangan yang tertib, akuntabel dan tepat waktu	100%	5.080.856.000,00	6.130.144.000,00	6.130.144.000,00	
		2.19.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1 kegiatan	2.19.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pengelolaan dan pelayanan administrasi kepegawaian yang tepat waktu, mutakhir dan terdokumentasi	100%	337.684.000,00	193.987.000,00	216.168.451,00	
		2.19.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	5 kegiatan	2.19.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi umum yang terlaksana sesuai SOP	100%	859.257.419,00	441.359.039,00	741.443.950,00	
		2.19.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah kegiatan pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	2 kegiatan	2.19.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Realisasi Pengadaan Barang Milik Daerah yang sesuai dengan yang direncanakan	100%	42.886.372,00	42.886.372,00	1.457.387.782,00	Penambahan untuk pembelian tanah
		2.19.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2 kegiatan	2.19.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang difasilitasi/ disediakan	100%	361.605.200,00	1.189.035.200,00	1.195.363.200,00	
		2.19.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3 kegiatan	2.19.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang yang dipelihara dan berfungsi sesuai kondisi standar	100%	272.280.000,00	269.370.000,00	269.370.000,00	

NO	BIDANG URUSAN	SEBELUM (RKPD Induk 2025)			SESUDAH (RKPD Perubahan 2025)			PAGU		RKPD 2025 PERUBAHAN	ALASAN PERUBAHAN
		PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET	RKPD 2025 (Induk)	APBD INDUK 2025 dan PERGESERAN		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	2.19 URUSAN PEMERINTAH AN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	2.19.02 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Persentase Organisasi Pemuda yang Aktif	100%	2.19.02 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Persentase Organisasi Pemuda yang Aktif	100%	1.217.049.870,00	467.705.370,00	3.821.886.827,00	
		2.19.02.2.01 Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan pemuda dan kepemudaan terhadap pemuda pelopor kabupaten/kota, wirausaha muda pemula dan pemuda kader kab/kota	2 kegiatan	2.19.02.2.01 Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan pemuda dan kepemudaan terhadap pemuda pelopor kabupaten/kota, wirausaha muda pemula dan pemuda kader kab/kota	5 kegiatan	820.046.870,00	377.874.370,00	3.232.055.827,00	Penambahan untuk program priorotas bupati pemberian beasiswa pemuda
		2.19.02.2.02 Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pemberdayaan dan pengembangan organisasi kepemudaan tingkat daerah kab/kota	2 kegiatan	2.19.02.2.02 Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pemberdayaan dan pengembangan organisasi kepemudaan tingkat daerah kab/kota	1 kegiatan	397.003.000,00	89.831.000,00	589.831.000,00	Penambahan untuk Hibah KNPI
		2.19.03 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Jumlah atlet berprestasi	50 org	2.19.03 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Jumlah atlet berprestasi	55 org	23.479.999.979,00	22.674.295.786,00	35.895.626.062,00	
		2.19.03.2.01 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan pada jenjang pendidikan yang menjadi kewenangan daerah kab/kota	1 kegiatan	2.19.03.2.01 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan pada jenjang pendidikan yang menjadi kewenangan daerah kab/kota	1 kegiatan	15.275.919.000,00	14.964.910.365,00	14.951.740.641,00	
		2.19.03.2.02 Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan penyelenggaraan kejuaraan olahraga tingkat daerah kab/kota	2 kegiatan	2.19.03.2.02 Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan penyelenggaraan kejuaraan olahraga tingkat daerah kab/kota	2 kegiatan	1.774.284.714,00	1.700.433.116,00	1.700.433.116,00	

NO	BIDANG URUSAN	SEBELUM (RKPD Induk 2025)			SESUDAH (RKPD Perubahan 2025)			PAGU		RKPD 2025 PERUBAHAN	ALASAN PERUBAHAN
		PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET	RKPD 2025 (Induk)	APBD INDUK 2025 dan PERGESERAN		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2.19.03.2.03 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah kegiatan pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi tingkat daerah provinsi	2 kegiatan	2.19.03.2.03 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah kegiatan pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi tingkat daerah provinsi	2 kegiatan	570.799.800,00	300.669.800,00	6.015.169.800,00	Penambahan untuk Bonus Atlet
		2.19.03.2.04 Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	Jumlah kegiatan pembinaan pengembangan organisasi olahraga	2 kegiatan	2.19.03.2.04 Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	Jumlah kegiatan pembinaan pengembangan organisasi olahraga	2 kegiatan	5.589.205.000,00	5.532.409.000,00	13.052.409.000,00	Penambahan untuk Hibah KONI
		2.19.03.2.05 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	Jumlah kegiatan pembinaan pengembangan olahraga rekreasi	1 kegiatan	2.19.03.2.05 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	Jumlah kegiatan pembinaan pengembangan olahraga rekreasi	1 kegiatan	269.791.465,00	175.873.505,00	175.873.505,00	
		2.19.04 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	Persentase peningkatan kapasitas dan peran aktif kepramukaan	100%	2.19.04 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	Persentase peningkatan kapasitas dan peran aktif kepramukaan	100%	1.205.000.000,00	1.205.000.000,00	1.205.000.000,00	
		2.19.04.2.01 Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkatkan Kapasitasnya	1 organisasi	2.19.04.2.01 Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkatkan Kapasitasnya	1 organisasi	1.205.000.000,00	1.205.000.000,00	1.205.000.000,00	
3	3.26 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	3.26.02 PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Jumlah Kunjungan Wisata	1.020.000 orang	3.26.02 PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Jumlah Kunjungan Wisata	1.050.000 orang	3.496.007.864,00	3.054.743.864,00	1.817.697.454,00	
		3.26.02.2.03 Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	a. Jumlah Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Dikembangkan Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi)	a. 4 lokasi	3.26.02.2.03 Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	a. Jumlah Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Dikembangkan Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi)	a. 4 lokasi	3.496.007.864,00	3.054.743.864,00	1.817.697.454,00	Pergeseran anggaran untuk pembelian tanah

NO	BIDANG URUSAN	SEBELUM (RKPD Induk 2025)			SESUDAH (RKPD Perubahan 2025)			PAGU		RKPD 2025 PERUBAHAN	ALASAN PERUBAHAN
		PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET	RKPD 2025 (Induk)	APBD INDUK 2025 dan PERGESERAN		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			b. Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Terpelihara	b. 5 Unit		b. Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Terpelihara	b. 2 Unit				
		3.26.03 PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap PDRB Kabupaten	4%	3.26.03 PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap PDRB Kabupaten	1.5%	2.805.000.371,00	2.244.127.514,00	2.635.717.234,00	
		3.26.03.2.01 Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	a. Jumlah Laporan Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri b. Jumlah Dokumen Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	a. 5 lap b. 6 dok	3.26.03.2.01 Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	a. Jumlah Laporan Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri b. Jumlah Dokumen Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	a. 3 lap b. 3 dok	2.805.000.371,00	2.244.127.514,00	2.635.717.234,00	
		3.26.05 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Persentase Pelaku Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Aktif dan Tervalidasi	35%	3.26.05 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Persentase Pelaku Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Aktif dan Tervalidasi	20%	200.000.007,00	55.628.007,00	329.176.822,00	
		3.26.05.2.01 Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Jumlah peserta memperoleh sertifikat pelatihan dasar SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif tingkat dasar	50 orang	3.26.05.2.01 Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Jumlah peserta memperoleh sertifikat pelatihan dasar SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif tingkat dasar	100 orang	100.000.007,00	29.464.007,00	132.063.862,00	Penambahan untuk Kegiatan Sosialisasi Pengembangan Pariwisata
		3.26.05.2.02 Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif	Jumlah pelaku ekonomi kreatif yang mampu mengembangkan usahanya secara mandiri.	20 orang	3.26.05.2.02 Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif	Jumlah pelaku ekonomi kreatif yang mampu mengembangkan usahanya secara mandiri.	100 orang	100.000.000,00	26.164.000,00	197.112.960,00	Penambahan untuk Kegiatan Bimbingan Teknis Bagi Pelaku Usaha Ekonomi Kreatif
JUMLAH								39.592.337.150,00	38.086.262.220,00	55.832.961.850,00	

NO	BIDANG URUSAN	SEBELUM (RKPD Induk 2025)			SESUDAH (RKPD Perubahan 2025)			PAGU		RKPD 2025 PERUBAHAN	ALASAN PERUBAHAN
		PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET	RKPD 2025 (Induk)	APBD INDUK 2025 dan PERGESERAN		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.23.2.24.0.00.01.0000 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN											
1	X.XX. NON URUSAN	2.23.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai AKIP	BB	2.23.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Predikat Nilai AKIP Perangkat Daerah	BB	8.268.337.278,00	11.240.547.069,00	11.821.322.427,00	
		2.23.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	9 Laporan	2.23.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase hasil perencanaan dan pelaporan yang dijadikan bahan evaluasi kinerja	100%	109.201.262,00	55.385.277,00	55.385.277,00	Efisiensi dan Rasionalisasi Anggaran
		2.23.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Bulan Pelaksanaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	14 Bulan	2.23.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase administrasi keuangan yang tertib, akuntabel dan tepat waktu	100%	5.001.094.140,00	6.932.646.000,00	6.932.646.000,00	Pemenuhan kebutuhan OPD
		2.23.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai	7 Kegiatan	2.23.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pengelolaan dan pelayanan administrasi kepegawaian yang tepat waktu, mutakhir dan terdokumentasi	100%	64.469.147,00	209.080.302,00	204.080.302,00	Pemenuhan kebutuhan OPD
		2.23.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Bulan Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan	2.23.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi umum yang terlaksana sesuai SOP	100%	786.090.839,00	815.835.195,00	815.835.195,00	Pemenuhan kebutuhan OPD
		2.23.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	26 Unit	2.23.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Realisasi Pengadaan Barang Milik Daerah yang sesuai dengan yang direncanakan	100%	706.785.325,00	1.315.635.730,00	2.086.160.088,00	Pemenuhan kebutuhan OPD

NO	BIDANG URUSAN	SEBELUM (RKPD Induk 2025)			SESUDAH (RKPD Perubahan 2025)			PAGU		RKPD 2025 PERUBAHAN	ALASAN PERUBAHAN
		PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET	RKPD 2025 (Induk)	APBD INDUK 2025 dan PERGESERAN		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2.23.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Bulan	2.23.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang difasilitasi/ disediakan	100%	955.744.000,00	992.612.000,00	1.068.263.000,00	Pemenuhan kebutuhan OPD
		2.23.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Bulan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Bulan	2.23.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang yang dipelihara dan berfungsi sesuai kondisi standar	100%	644.952.565,00	919.352.565,00	658.952.565,00	Efisiensi dan Rasionalisasi Anggaran
2	2.23 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	2.23.02 PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	a.. Persentase Jumlah pengunjung b.. Rasio Ketersediaan Koleksi Bahan Pustaka c. Persentase Perpustakaan yang dibina b. Koleksi Buku yang tersedia di perpustakaan daerah	a. 20,16% b. 0,25 c. 53% d. 65.188 eks	2.23.02 PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	a.. Persentase Jumlah pengunjung b.. Rasio Ketersediaan Koleksi Bahan Pustaka c. Persentase Perpustakaan yang dibina b. Koleksi Buku yang tersedia di perpustakaan daerah	a. 20,16% b. 0,25 c. 53% d. 65.188 eks	2.513.846.965,00	1.493.527.855,00	3.293.372.316,00	Pemenuhan kebutuhan opd dan pemenuhan program prioritas
		2.23.02.2.01 Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	a. Persentase Jumlah Pengunjung, b. Persentase Jumlah Anggota Perpustakaan c. Tingkat Kepuasan Masyarakat d. Rasio Ketersediaan Koleksi Bahan Pustaka	a. 20,16% b. 11,06% c. 87.00 d. 0,25	2.23.02.2.01 Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	a. Persentase Jumlah Pengunjung, b. Persentase Jumlah Anggota Perpustakaan c. Tingkat Kepuasan Masyarakat d. Rasio Ketersediaan Koleksi Bahan Pustaka	a. 20,16% b. 11,06% c. 87.00 d. 0,25	1.599.729.186,00	941.000.303,00	2.640.845.602,00	Pemenuhan kebutuhan OPD dan pemenuhan program prioritas

NO	BIDANG URUSAN	SEBELUM (RKPD Induk 2025)			SESUDAH (RKPD Perubahan 2025)			PAGU		RKPD 2025 PERUBAHAN	ALASAN PERUBAHAN
		PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET	RKPD 2025 (Induk)	APBD INDUK 2025 dan PERGESERAN		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			f. Jumlah Koleksi Bahan Pustaka yang dilestarikan g. Persentase Perpustakaan yang dibina	e. 7.000 eksemplar f. 53%		f. Jumlah Koleksi Bahan Pustaka yang dilestarikan g. Persentase Perpustakaan yang dibina	e. 7.000 eksemplar f. 53%				
		2.23.02.2.02 Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pemasyarakatan Gemar Membaca	19 Kegiatan	2.23.02.2.02 Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pemasyarakatan Gemar Membaca	19 Kegiatan	914.117.779,00	552.527.552,00	652.526.714,00	Efisiensi dan Rasionalisasi Anggaran
3	2.24 URUSAN PEMERINTAH AN BIDANG KEARSIPAN	2.24.02 PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Persentase Pengelolaan Arsip di OPD	45%	2.24.02 PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Persentase Pengelolaan Arsip di OPD	45%	1.727.439.820,00	775.461.817,00	775.455.855,00	
		2.24.02.2.01 Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	a. Jumlah SKPD yang dibina dan dilakukan Pengawasan b. Jumlah Kecamatan/Desa/Kelurahan yang dibina c. Peraturan Kearsipan yang tersedia	a. 30 SKPD b. 34 Desa/Kelurahan c. 1 Peraturan	2.24.02.2.01 Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	a. Jumlah SKPD yang dibina dan dilakukan Pengawasan b. Jumlah Kecamatan/Desa/Kelurahan yang dibina c. Peraturan Kearsipan yang tersedia	a. 30 SKPD b. 34 Desa/Kelurahan c. 1 Peraturan	825.602.617,00	478.032.679,00	478.026.717,00	Efisiensi dan Rasionalisasi Anggaran
		2.24.02.2.02 Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Arsip Statis yang dilakukan Akuisisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis	1000	2.24.02.2.02 Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Arsip Statis yang dilakukan Akuisisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis	1000	350.582.699,00	185.102.210,00	185.102.210,00	Efisiensi dan Rasionalisasi Anggaran
		2.24.02.2.03 Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Pengelolaan Simpul Jaringan	100	2.24.02.2.03 Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Pengelolaan Simpul Jaringan	100	551.254.504,00	112.326.928,00	112.326.928,00	Efisiensi dan Rasionalisasi Anggaran
		2.24.03 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	Jumlah Perlindungan, penyelamatan Arsip, Autentifikasi Arsip Statis dan Alih Media	300	2.24.03 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	Jumlah Perlindungan, penyelamatan Arsip, Autentifikasi Arsip Statis dan Alih Media	300	936.792.132,00	386.647.801,00	386.647.801,00	

NO	BIDANG URUSAN	SEBELUM (RKPD Induk 2025)			SESUDAH (RKPD Perubahan 2025)			PAGU		RKPD 2025 PERUBAHAN	ALASAN PERUBAHAN
		PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET	RKPD 2025 (Induk)	APBD INDUK 2025 dan PERGESERAN		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2.24.03.2.01 Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (sepuluh) Tahun	Jumlah Dokumen/Berkas Pemusnahan Arsip	300	2.24.03.2.01 Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (sepuluh) Tahun	Jumlah Dokumen/Berkas Pemusnahan Arsip	300	217.998.722,00	76.795.998,00	76.795.998,00	Efisiensi dan Rasionalisasi Anggaran
		2.24.03.2.02 Perlindungan dan Penyelamatan Arsip Akibat Bencana yang Berskala Kabupaten/Kota	Jumlah Arsip yang Dilakukan Pemulihan dan Penyimpanan Akibat Bencana	150	2.24.03.2.02 Perlindungan dan Penyelamatan Arsip Akibat Bencana yang Berskala Kabupaten/Kota	Jumlah Arsip yang Dilakukan Pemulihan dan Penyimpanan Akibat Bencana	150	318.800.607,00	41.412.000,00	41.412.000,00	Efisiensi dan Rasionalisasi Anggaran
		2.24.03.2.03 Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang Digabung dan/atau Dibubarkan, dan Pemekaran Daerah Kecamatan dan Desa/Kelurahan	Jumlah Daftar Arsip yang dilakukan Pendataan, Penyusunan dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Penggabungan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	300	2.24.03.2.03 Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang Digabung dan/atau Dibubarkan, dan Pemekaran Daerah Kecamatan dan Desa/Kelurahan	Jumlah Daftar Arsip yang dilakukan Pendataan, Penyusunan dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Penggabungan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	300	264.996.535,00	133.443.535,00	133.443.535,00	Efisiensi dan Rasionalisasi Anggaran
		2.24.03.2.04 Autentikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media Kabupaten/Kota	Persentase arsip statis dan arsip alih media yang diautentikasi	45%	2.24.03.2.04 Autentikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media Kabupaten/Kota	Persentase arsip statis dan arsip alih media yang diautentikasi	45%	134.996.268,00	134.996.268,00	134.996.268,00	
JUMLAH								13.446.416.195,00	13.896.184.542,00	16.276.798.399,00	
3.27.0.00.0.00.02.0000 DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN											
1	X.XX. NON URUSAN	3.27.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	a. Nilai AKIP	a. BB (Baik)	3.27.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Predikat Nilai AKIP Perangkat Daerah	BB	11.339.303.040,00	12.829.339.872,00	15.347.307.342,00	
			b. Nilai IKM	b. B (Baik)							
		3.27.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan	10 Dokumen	3.27.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase hasil perencanaan dan pelaporan yang dijadikan bahan evaluasi kinerja	100%	207.073.484,00	199.485.484,00	192.060.484,00	

NO	BIDANG URUSAN	SEBELUM (RKPD Induk 2025)			SESUDAH (RKPD Perubahan 2025)			PAGU		RKPD 2025 PERUBAHAN	ALASAN PERUBAHAN
		PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET	RKPD 2025 (Induk)	APBD INDUK 2025 dan PERGESERAN		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		3.27.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Administrasi Keuangan Tepat Waktu	12 Bulan	3.27.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase administrasi keuangan yang tertib, akuntabel dan tepat waktu	100%	6.722.001.513,00	8.554.682.513,00	8.573.799.821,00	
		3.27.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan BMD tepat waktu	12 Bulan	3.27.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase pengadministrasian Barang Milik Daerah (BMD) yang akurat lengkap dan mutakhir.	100%	34.094.280,00	29.874.280,00	29.874.280,00	
		3.27.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah pegawai yang meningkat kemampuan dan kompetensinya	10 orang	3.27.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pengelolaan dan pelayanan administrasi kepegawaian yang tepat waktu, mutakhir dan terdokumentasi	100%	452.808.720,00	553.107.010,00	501.034.010,00	
		3.27.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Indeks layanan kesekretariatan	B	3.27.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi umum yang terlaksana sesuai SOP	100%	1.160.154.568,00	522.618.798,00	522.618.798,00	
		3.27.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah pengadaan BMD	10	3.27.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Realisasi Pengadaan Barang Milik Daerah yang sesuai dengan yang direncanakan	100%	545.021.320,00	488.158.507,00	567.606.669,00	
		3.27.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			3.27.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang difasilitasi/ disediakan	100%	1.459.360.000,00	1.264.949.401,00	1.276.949.401,00	
		3.27.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah BMD terpelihara	14	3.27.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang yang dipelihara dan berfungsi sesuai kondisi standar	100%	758.789.155,00	1.216.463.879,00	3.683.363.879,00	14

NO	BIDANG URUSAN	SEBELUM (RKPD Induk 2025)			SESUDAH (RKPD Perubahan 2025)			PAGU		RKPD 2025 PERUBAHAN	ALASAN PERUBAHAN
		PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET	RKPD 2025 (Induk)	APBD INDUK 2025 dan PERGESERAN		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	3.27 URUSAN PEMERINTAH AN BIDANG PERTANIAN	3.27.02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	a. Produktivitas: - karet; sheet (ton/ha) - lada;biji kering (kg/ha) b. Jumlah populasi sapi yang dikembangkan (ekor)	a. Produktivitas: - 1,1 ton/ha - 220 kg/ha b. 10350 ekor	3.27.02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Persentase peningkatan produktivitas komoditas perkebunan dan peternakan yang strategis	3%	16.366.765.757,00	11.997.577.501,00	8.913.720.891,00	
		3.27.02.2.01 Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	a. Jumlah UPPB (unit pengolahan dan pemasaran bokar) yang difasilitasi b. Dokumen berisi sarana pertanian yang difasilitasi	a. Total 56 unit b. 1 dokumen	3.27.02.2.01 Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	1. Produktivitas Karet; Sheet (ton/ha) 2. Produktivitas Lada; Biji Kering (kg/ha) 3. Produktivitas Kopi; Biji kering (ton) 4. Produksi BOKAR (Bahan Olahan Karet Rakyat) bersih 5. Jumlah UPPB (Unit Pengolahan dan Pemasaran Bahan Olah Karet); dalam bentuk BOKAR Bersih yang dibina 6. Persentase peningkatan produksi BOKAR (Bahan Olahan Karet) bersih	1. 1,1 ton/ha 2. 220 kg/ha 3. 869 kg/ha. 4. 1500 ton 5. 4 UPPB. 6. 3 %	1.170.924.786,00	1.769.099.826,00	1.769.099.826,00	

NO	BIDANG URUSAN	SEBELUM (RKPD Induk 2025)			SESUDAH (RKPD Perubahan 2025)			PAGU		RKPD 2025 PERUBAHAN	ALASAN PERUBAHAN
		PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET	RKPD 2025 (Induk)	APBD INDUK 2025 dan PERGESERAN		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		3.27.02.2.02 Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	Produktivitas: - karet; sheet (ton/ha) - lada; biji kering (kg/ha) - Produksi kopi (ton)	Produktivitas: - 1,1 ton/ha - 220 kg/ha Produksi: 466 ton	3.27.02.2.02 Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	1. Persentase penyediaan bantuan berupa bibit tanaman dan pupuk yang memenuhi standarisasi serta luasan lahan yang dibudidayakan 2. Luas lahan yang dibudidayakan untuk tanaman karet 3. Luas lahan yang dibudidayakan untuk tanaman kopi 4. Luas lahan yang dibudidayakan untuk tanaman sawit	1. 100% 2. 120 Ha 3. 32 Ha 4. 70 Ha	4.467.436.244,00	5.008.047.448,00	5.008.047.448,00	
		3.27.02.2.05 Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota	a. Jumlah populasi ternak yang dikembangkan (ekor) b. Jumlah kelahiran ternak sapi melalui IB (ekor)	a. 10.350 ekor b. 469 ekor	3.27.02.2.05 Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota	1. Persentase perkembangan perbibitan dan pengawasan sarana peternakan yang memenuhi standarisasi 2. Penyediaan sarana peternakan 3. Jumlah perkembangan ternak kambing 4. Jumlah perkembangan ternak sapi 5. Jumlah Pengawasan ternak unggas 6. Jumlah kelahiran ternak sapi melalui IB	1. 100 % 2. 50 unit 3. 100 ekor 4. 100 ekor 5. 11.350 ekor 6. 500 ekor	10.728.404.727,00	5.220.430.227,00	2.136.573.617,00	

NO	BIDANG URUSAN	SEBELUM (RKPD Induk 2025)			SESUDAH (RKPD Perubahan 2025)			PAGU		RKPD 2025 PERUBAHAN	ALASAN PERUBAHAN
		PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET	RKPD 2025 (Induk)	APBD INDUK 2025 dan PERGESERAN		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						7. Luas Lahan yang dibudidayakan untuk tanaman Hijauan Pakan Ternak	7. 15 Ha				
						8. Luas Lahan yang dibudidayakan untuk jagung pakan	8. 60 Ha				
		3.27.03 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Persentase cakupan yang dapat dilayani oleh prasarana pertanian	70%	3.27.03 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Persentase peningkatan ketersediaan prasarana untuk kelompok pekebun dan peternak	2%	15.034.891.766,00	18.642.649.175,00	30.182.837.791,00	
		3.27.03.2.01 Pengembangan Prasarana Pertanian	Pembangunan dan pengembangan kawasan perkebunan dan peternakan:	1 action plan	3.27.03.2.01 Pengembangan Prasarana Pertanian	Pembangunan dan pengembangan kawasan perkebunan dan peternakan:	1 laporan	133.072.728,00	417.394.501,00	392.360.701,00	
		3.27.03.2.02 Pembangunan Prasarana Pertanian	Pembangunan prasarana pendukung kegiatan:- perkebunan- kesehatan hewan, kesehatan masyarakat veteriner dan peternakan- penanggulangan dan pengendalian	- 29%- 27%- 12%	3.27.03.2.02 Pembangunan Prasarana Pertanian	Persentase cakupan pelayanan prasarana jalan produksi dan bangunan pendukung kegiatan perkebunan dan peternakan yang dibangun	0,72	14.901.819.038,00	18.225.254.674,00	29.790.477.090,00	
		3.27.04 PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	a. Persentase angka mortalitas hewan strategis b. Persentase Penyediaan Daging ASUH	a. ≤ 3 % b. 75%	3.27.04 PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Persentase penurunan angka mortalitas hewan strategis Persentase peningkatan penyediaan daging ASUH	a. 0,2 % b. 1 %	2.605.263.407,00	1.865.803.226,00	2.816.672.186,00	

NO	BIDANG URUSAN	SEBELUM (RKPD Induk 2025)			SESUDAH (RKPD Perubahan 2025)			PAGU		RKPD 2025 PERUBAHAN	ALASAN PERUBAHAN
		PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET	RKPD 2025 (Induk)	APBD INDUK 2025 dan PERGESERAN		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		3.27.04.2.01 Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota	Persentase angka penyakit zoonosis	≤ 0 %	3.27.04.2.01 Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase cakupan vaksinasi untuk menekan penyakit Zoonosis	90%	1.400.000.000,00	1.331.362.335,00	1.380.413.938,00	
		3.27.04.2.03 Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase angka mortalitas hewan strategis	≤ 3 %	3.27.04.2.03 Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pelayanan jasa medik veteriner	1. Pelayanan aktif servis ternak ruminansia besar 3.114 ekor, aktif servis rumiansia kecil 886 ekor. 2. Peayanan ternak unggas 71.041 ekor. 3. Vaksinasi jembrana 859 dosis. 4. Vaksinasi rabies 1.708 dosis. 5. Vaksinasi flu burung 39.112 dosis. 6. Vaksinasi PMK 2.505 dosis. 7. Vaksinasi LSD 1.020 dosis.	621.155.832,00	226.653.622,00	194.458.579,00	

NO	BIDANG URUSAN	SEBELUM (RKPD Induk 2025)			SESUDAH (RKPD Perubahan 2025)			PAGU		RKPD 2025 PERUBAHAN	ALASAN PERUBAHAN
		PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET	RKPD 2025 (Induk)	APBD INDUK 2025 dan PERGESERAN		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		3.27.04.2.04 Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	Persentase penyediaan daging ASUH	70%	3.27.04.2.04 Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	Persentase penyediaan daging ASUH	75%	584.107.575,00	307.787.269,00	1.241.799.669,00	
		3.27.05 PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Persentase cakupan pencegahan bencana pertanian (%)	40%	3.27.05 PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Persentase cakupan pencegahan bencana pertanian (%)	40%	1.919.550.935,00	1.239.218.065,00	1.232.956.051,00	
		3.27.05.2.01 Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	a. Persentase fasilitasi pengendalian OPT perkebunan b. Luasan pencegahan kebakaran lahan c. Persentase fasilitasi penanggulangan bencana kesehatan hewan	a. 18% (900 ha/6442,51) b. 75 ha c. 22% (650/ 3039)	3.27.05.2.01 Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	Jumlah Luas Serangan OPT Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan yang dikendalikan Jumlah Luasan Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Jumlah Penanggulangan Pasca Bencana Alam Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan	a. 1100 Ha b. 75 ha c. 1000 ekor	1.919.550.935,00	1.239.218.065,00	1.232.956.051,00	
		3.27.07 PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Persentase SDM Penyuluh Pertanian sektor perkebunan dan peternakan yang ditingkatkan kapasitasnya	80%	3.27.07 PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Persentase kelompok tani yang dikoordinasikan dan difasilitasi menjadi kelembagaan ekonomi petani (KEP) atau korporasi petani	25%	67.726.000,00	67.726.000,00	91.706.380,00	

NO	BIDANG URUSAN	SEBELUM (RKPD Induk 2025)			SESUDAH (RKPD Perubahan 2025)			PAGU		RKPD 2025 PERUBAHAN	ALASAN PERUBAHAN
		PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET	RKPD 2025 (Induk)	APBD INDUK 2025 dan PERGESERAN		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		3.27.07.2.01 Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Jumlah kelompok tani sektor perbunan dan peternakan yang menerima penyuluhan	70 Poktan	3.27.07.2.01 Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Jumlah kelembagaan ekonomi petani yang dibentuk	1 unit	67.726.000,00	67.726.000,00	91.706.380,00	
JUMLAH								47.333.500.905,00	46.642.313.839,00	58.585.200.641,00	
4.01.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DAERAH											
1	X.XX. NON URUSAN	4.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	a. Nilai AKIP b. Indeks Pelayanan Kesekretariatan c. Prosentase SAKIP SKPD yang Berpredikat BB d. Persentase tingkat pelayanan protokol dan komunikasi kepala daerah/ wakil kepala daerah	a. 73 b. 90 c. 50% d. 100%	4.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Predikat Nilai AKIP Perangkat Daerah	B	44.103.974.187,00	47.252.120.953,00	62.015.486.248,00	
		4.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan dan Pelaporan	118 Dokumen	4.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase hasil perencanaan dan pelaporan yang dijadikan bahan evaluasi kinerja	100%	177.844.000,00	153.744.760,00	153.744.760,00	
		4.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1060 Dokumen	4.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase administrasi keuangan yang tertib, akuntabel dan tepat waktu	100%	22.733.973.000,00	28.103.634.998,00	28.103.634.998,00	
		4.01.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Umum dan Perkantoran	100 %	4.01.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase pengadministrasian Barang Milik Daerah (BMD) yang akurat lengkap dan mutakhir.	100%	277.200.000,00	0,00	0,00	

NO	BIDANG URUSAN	SEBELUM (RKPD Induk 2025)			SESUDAH (RKPD Perubahan 2025)			PAGU		RKPD 2025 PERUBAHAN	ALASAN PERUBAHAN
		PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET	RKPD 2025 (Induk)	APBD INDUK 2025 dan PERGESERAN		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Kepegawaian lingkup Sekretariat Daerah	100 %	4.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pengelolaan dan pelayanan administrasi kepegawaian yang tepat waktu, mutakhir dan terdokumentasi	100%	113.350.000,00	138.445.000,00	298.545.000,00	
		4.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Tabalong	100 %	4.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi umum yang terlaksana sesuai SOP	100%	4.087.769.400,00	3.124.474.608,00	10.064.408.163,00	
		4.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	6 Laporan	4.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			0,00	0,00	0,00	
		4.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang lingkup Sekretariat Daerah Kabupaten Tabalong	100 %	4.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang difasilitasi/ disediakan	100%	6.641.960.000,00	7.168.900.000,00	7.653.900.000,00	
		4.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	4.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang yang dipelihara dan berfungsi sesuai kondisi standar	100%	3.846.688.875,00	3.029.297.400,00	6.686.176.473,00	
		4.01.01.2.11 Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah bulan Gaji dan Tunjangan serta Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang dibayarkan	14 bulan	4.01.01.2.11 Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah bulan Gaji dan Tunjangan serta Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang dibayarkan	14 bulan	777.725.000,00	777.725.000,00	777.725.000,00	
		4.01.01.2.12 Fasilitas Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	Terfasilitasinya ke rumah tangga an Sekretariat Daerah	100 %	4.01.01.2.12 Fasilitas Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	Terfasilitasinya ke rumah tangga an Sekretariat Daerah	100 %	3.339.115.725,00	3.073.386.000,00	6.267.497.920,00	

NO	BIDANG URUSAN	SEBELUM (RKPD Induk 2025)			SESUDAH (RKPD Perubahan 2025)			PAGU		RKPD 2025 PERUBAHAN	ALASAN PERUBAHAN
		PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET	RKPD 2025 (Induk)	APBD INDUK 2025 dan PERGESERAN		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4.01.01.2.13 Penataan Organisasi	Tata Kelola Perangkat Daerah yang Baik	100 %	4.01.01.2.13 Penataan Organisasi	Tata Kelola Perangkat Daerah yang Baik	100 %	743.515.000,00	532.888.000,00	663.647.897,00	
		4.01.01.2.14 Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Terlaksananya Pelayanan Ke Protokol an Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	100 %	4.01.01.2.14 Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Terlaksananya Pelayanan Ke Protokol an Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	100 %	1.364.833.187,00	1.149.625.187,00	1.346.206.037,00	
2	4.01 SEKRETARIAT DAERAH	4.01.02 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	a. Persentase dokumen penyelenggaraan pemerintahan yang disusun tepat waktu b. Persentase pelayanan kelembagaan sosial kemasyarakatan c. Persentase pembentukan produk hukum	a. 100% b. 100% c. 100%	4.01.02 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	a. Persentase dokumen penyelenggaraan pemerintahan yang disusun tepat waktu b. Persentase pelayanan kelembagaan sosial kemasyarakatan c. Persentase pembentukan produk hukum	a. 100% b. 100% c. 100%	38.474.641.500,00	37.594.020.625,00	53.913.979.113,00	
		4.01.02.2.01 Administrasi Tata Pemerintahan	Terlaksananya Administrasi Tata Pemerintahan	100 %	4.01.02.2.01 Administrasi Tata Pemerintahan	Terlaksananya Administrasi Tata Pemerintahan	100 %	3.116.148.500,00	2.784.683.175,00	2.875.120.675,00	
		4.01.02.2.02 Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Implementasi Pelayanan Kelembagaan Sosial Kemasyarakatan	100 %	4.01.02.2.02 Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Implementasi Pelayanan Kelembagaan Sosial Kemasyarakatan	100 %	34.671.603.000,00	34.216.839.000,00	50.331.292.988,00	
		4.01.02.2.03 Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Terfasilitasinya dan Terkoordinasinya Produk dan Layanan Hukum	100 %	4.01.02.2.03 Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Terfasilitasinya dan Terkoordinasinya Produk dan Layanan Hukum	100 %	601.390.000,00	525.410.450,00	590.477.450,00	
		4.01.02.2.04 Fasilitasi Kerja Sama Daerah	Terlaksananya Fasilitasi Kerjasama Daerah	100 %	4.01.02.2.04 Fasilitasi Kerja Sama Daerah	Terlaksananya Fasilitasi Kerjasama Daerah	100 %	85.500.000,00	67.088.000,00	117.088.000,00	

NO	BIDANG URUSAN	SEBELUM (RKPD Induk 2025)			SESUDAH (RKPD Perubahan 2025)			PAGU			ALASAN PERUBAHAN
		PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET	RKPD 2025 (Induk)	APBD INDUK 2025 dan PERGESERAN	RKPD 2025 PERUBAHAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4.01.03 PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	a. Persentase tingkat sinkronisasi dan penyelarasan sektor ekonomi dan sumber daya alam b. Persentase tingkat pelayanan pengadaan barang dan jasa	a. 100% b. 100%	4.01.03 PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	a. Persentase tingkat sinkronisasi dan penyelarasan sektor ekonomi dan sumber daya alam b. Persentase tingkat pelayanan pengadaan barang dan jasa	a. 100% b. 100%	4.555.921.000,00	3.806.429.267,00	4.653.339.267,00	
		4.01.03.2.01 Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Terlaksananya Singkronisasi dan Penyelarasan Kebijakan Perekonomian	100 %	4.01.03.2.01 Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Terlaksananya Singkronisasi dan Penyelarasan Kebijakan Perekonomian	100 %	474.000.000,00	623.775.320,00	873.775.320,00	
		4.01.03.2.02 Pelaksanaan Administrasi Pembangunan Daerah	Terlaksananya Administrasi Pembangunan Daerah	100 %	4.01.03.2.02 Pelaksanaan Administrasi Pembangunan Daerah	Terlaksananya Administrasi Pembangunan Daerah	100 %	990.000.000,00	675.500.355,00	1.085.500.355,00	
		4.01.03.2.03 Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Terlaksananya Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa	100 %	4.01.03.2.03 Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Terlaksananya Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa	100 %	2.681.921.000,00	2.333.968.122,00	2.380.878.122,00	
		4.01.03.2.04 Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	Terkoordinasi, Selaras dan Singkronisasinya Kebijakan Sumber Daya Alam	100 %	4.01.03.2.04 Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	Terkoordinasi, Selaras dan Singkronisasinya Kebijakan Sumber Daya Alam	100 %	410.000.000,00	173.185.470,00	313.185.470,00	
		JUMLAH							87.134.536.687,00	88.652.570.845,00	120.582.804.628,00
4.02.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DPRD											
1	X.XX. NON URUSAN	4.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Tingkat Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	4.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Predikat Nilai AKIP Perangkat Daerah	A	46.445.577.505,00	50.435.116.434,00	56.733.365.563,00	
		4.02.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya perencanaan, evaluasi dan pelaporan	100%	4.02.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase hasil perencanaan dan pelaporan yang dijadikan bahan evaluasi kinerja	100%	240.907.400,00	96.227.600,00	131.691.600,00	Penambahan belanja perencanaan, evaluasi dan pelaporan

NO	BIDANG URUSAN	SEBELUM (RKPD Induk 2025)			SESUDAH (RKPD Perubahan 2025)			PAGU		RKPD 2025 PERUBAHAN	ALASAN PERUBAHAN
		PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET	RKPD 2025 (Induk)	APBD INDUK 2025 dan PERGESERAN		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4.02.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terbayarnya Gaji dan Tunjangan PNS	100%	4.02.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase administrasi keuangan yang tertib, akuntabel dan tepat waktu	100%	6.047.146.140,00	6.950.563.040,00	7.045.563.040,00	Penambahan belanja utk BPJS Kes dan Tunjangan Fungsional PPPK
		4.02.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya administrasi kepegawaian Perangkat Daerah	100%	4.02.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pengelolaan dan pelayanan administrasi kepegawaian yang tepat waktu, mutakhir dan terdokumentasi	100%	588.708.108,00	426.889.108,00	374.389.108,00	Pengurangan Anggaran dan Volume Perjalanan Dinas
		4.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya administrasi umum perangkat daerah	100%	4.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi umum yang terlaksana sesuai SOP	100%	3.045.936.948,00	2.525.388.677,00	2.361.898.835,00	Pengurangan Belanja Makan Minum Rapat, Cetak dan Penggandaan, serta Penyesuaian Volume Perjalanan Dinas
		4.02.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terpenuhinya kebutuhan barang milik daerah	100%	4.02.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Realisasi Pengadaan Barang Milik Daerah yang sesuai dengan yang direncanakan	100%	6.064.233.880,00	5.399.637.880,00	8.734.018.060,00	Penambahan Belanja Modal pada Pengadaan Peralatan dan mesin serta pengadaan sapras Gedung
		4.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpenuhinya penyediaan jasa urusan Set DPRD & DPRD	100%	4.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang difasilitasi/ disediakan	100%	2.387.075.935,00	2.555.573.535,00	2.904.123.535,00	Penambahan pembayaran Listrik Rumah Ketua, Listrik Kantor, PDAM Kantor serta Tenaga Outsourcing Pimpinan
		4.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya alat/perlengkapan kantor	100%	4.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang yang dipelihara dan berfungsi sesuai kondisi standar	100%	6.570.569.194,00	6.179.836.694,00	6.024.836.694,00	Adanya pengurangan Volume dan Penghapusan kegiatan
		4.02.01.2.15 Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Terpenuhinya layanan keuangan dan kesejahteraan DPRD	100%	4.02.01.2.15 Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Terpenuhinya layanan keuangan dan kesejahteraan DPRD	100%	20.636.485.068,00	25.436.485.068,00	26.800.385.068,00	Penambahan Belanja Tunjangan Transportasi & Perumahan DPRD
		4.02.01.2.16 Layanan Administrasi DPRD	Terselenggaranya Administrasi DPRD	100%	4.02.01.2.16 Layanan Administrasi DPRD	Terselenggaranya Administrasi DPRD	100%	864.514.832,00	864.514.832,00	2.356.459.623,00	Penambahan Belanja Barang di Rumah Dinas Ketua DPRD

NO	BIDANG URUSAN	SEBELUM (RKPD Induk 2025)			SESUDAH (RKPD Perubahan 2025)			PAGU		RKPD 2025 PERUBAHAN	ALASAN PERUBAHAN
		PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET	RKPD 2025 (Induk)	APBD INDUK 2025 dan PERGESERAN		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	4.02 SEKRETARIAT DPRD	4.02.02 PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	a. Persentase Tingkat Pelayanan Persidangan, Kehumasan dan Legislasi DPRD b. Persentase Tingkat Pelayanan Anggaran, Pengawasan dan Aspirasi/Reses	a. 95% b. 95%	4.02.02 PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	a. Persentase Tingkat Pelayanan Persidangan, Kehumasan dan Legislasi DPRD b. Persentase Tingkat Pelayanan Anggaran, Pengawasan dan Aspirasi/Reses	a. 95% b. 95%	42.224.046.834,00	41.096.726.869,00	44.471.117.972,00	
		4.02.02.2.01 Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Terfasilitasinya Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD	100%	4.02.02.2.01 Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Terfasilitasinya Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD	100 %	4.160.076.760,00	16.728.348.760,00	1.693.257.860,00	Penghapusan terhadap Kegiatan Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan
		4.02.02.2.02 Pembahasan Kebijakan Anggaran	Terfasilitasinya Pembahasan Kebijakan Anggaran	100%	4.02.02.2.02 Pembahasan Kebijakan Anggaran	Terfasilitasinya Pembahasan Kebijakan Anggaran	100%	706.038.100,00	1.179.130.100,00	1.179.130.100,00	Penambahan Perjalanan Dinas AKD Banggar
		4.02.02.2.03 Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Terfasilitasiinya Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	100%	4.02.02.2.03 Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Terfasilitasiinya Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	100%	688.540.000,00	616.653.364,00	362.990.000,00	Pengurangan belanja rapat dengan mengurangi volume kegiatan/target capaian kinerja
		4.02.02.2.04 Peningkatan Kapasitas DPRD	Terfasilitasinya Peningkatan Kapasitas DPRD	100%	4.02.02.2.04 Peningkatan Kapasitas DPRD	Terfasilitasinya Peningkatan Kapasitas DPRD	100%	4.109.406.029,00	3.201.850.529,00	6.362.470.621,00	Penambahan Anggran Bimtek Partai dan Bimtek Dewan
		4.02.02.2.05 Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Terfasilitasinya Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	100%	4.02.02.2.05 Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Terfasilitasinya Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	100%	6.406.194.300,00	6.316.422.300,00	9.754.422.300,00	Penambahan Satuan Harga Paket Reses dari Rp. 6.750.000 menjadi Rp.10.000.000 per titik
		4.02.02.2.06 Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	Terfasilitasinya pelaksanaan dan pengawasan kode etik	100%	4.02.02.2.06 Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	Terfasilitasinya pelaksanaan dan pengawasan kode etik	100%	170.824.725,00	136.174.725,00	1.416.157.000,00	Penambahan kegiatan Capacity Building Pimpinan dan Anggota DPRD beserta Sekretariat DPRD Kabupaten Tabalong

NO	BIDANG URUSAN	SEBELUM (RKPD Induk 2025)			SESUDAH (RKPD Perubahan 2025)			PAGU		RKPD 2025 PERUBAHAN	ALASAN PERUBAHAN
		PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET	RKPD 2025 (Induk)	APBD INDUK 2025 dan PERGESERAN		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4.02.02.2.07 Pembahasan Kerja Sama Daerah	Terfasilitasinya penyusunan bahan komunikasi dan publikasi DPRD	100%	4.02.02.2.07 Pembahasan Kerja Sama Daerah	Terfasilitasinya penyusunan bahan komunikasi dan publikasi DPRD	100%	612.075.000,00	255.853.271,00	255.853.271,00	Pengurangan Perjalanan Dinas bersama Kejaksaan Tabalong
		4.02.02.2.08 Fasilitasi Tugas DPRD	Terfasilitasinya tugas-tugas DPRD	100%	4.02.02.2.08 Fasilitasi Tugas DPRD	Terfasilitasinya tugas-tugas DPRD	100%	25.370.891.920,00	12.662.293.820,00	23.446.836.820,00	Penambahan Belanja SPPD DPRD utk koordinasi & Konsultasi serta Kunker
JUMLAH								88.669.624.339,00	91.531.843.303,00	101.204.483.535,00	
5.01.5.05.0.00.01.0000 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH											
1	X.XX. NON URUSAN	5.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai AKIP	A	5.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Predikat Nilai AKIP Perangkat Daerah	A	12.883.687.703,00	13.079.465.766,00	14.119.415.112,00	
		5.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase hasil perencanaan dan pelaporan yang dijadikan bahan evaluasi kinerja	100%	5.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase hasil perencanaan dan pelaporan yang dijadikan bahan evaluasi kinerja	100%	75.089.152,00	38.551.152,00	54.157.152,00	Penambahan Biaya Rapat untuk Penyusunan Dokumen Perencanaan (Renstra) dan Tambahan Biaya rapat untuk mengakomodir Monev Kinerja setiap triwulan
		5.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pegawai yang menerima gaji dan tunjangan ASN	100%	5.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase administrasi keuangan yang tertib, akuntabel dan tepat waktu	100%	8.339.991.546,00	10.019.944.093,00	10.019.944.093,00	
		5.01.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase administrasi barang milik daerah yang dilaksanakan	100%	5.01.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase pengadministrasian Barang Milik Daerah (BMD) yang akurat lengkap dan mutakhir.	100%	7.350.000,00	7.350.000,00	7.350.000,00	

NO	BIDANG URUSAN	SEBELUM (RKPD Induk 2025)			SESUDAH (RKPD Perubahan 2025)			PAGU		RKPD 2025 PERUBAHAN	ALASAN PERUBAHAN
		PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET	RKPD 2025 (Induk)	APBD INDUK 2025 dan PERGESERAN		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		5.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase peserta bimbingan teknis atau sejenisnya yang mampu menjawab 80% pertanyaan dengan benar	100%	5.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pengelolaan dan pelayanan administrasi kepegawaian yang tepat waktu, mutakhir dan terdokumentasi	100%	570.000.000,00	349.790.000,00	584.901.000,00	Untuk meningkatkan kapasitas SDM ASN Bapperida melalui kegiatan public speaking dan diklat untuk perencanaan
		5.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase aktivitas administrasi umum yang difasilitasi	100%	5.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi umum yang terlaksana sesuai SOP	100%	1.681.308.403,00	819.223.403,00	959.484.964,00	Menghadiri undangan undangan, pelatihan, seminar, atau konferensi yang penting untuk meningkatkan kompetensi karyawan Bapperida
		5.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah yang dilaksanakan	100%	5.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Realisasi Pengadaan Barang Milik Daerah yang sesuai dengan yang direncanakan	100%	649.849.264,00	297.034.780,00	716.832.853,00	Mengganti atau memperbaiki aset yang sudah tua atau rusak agar tetap produktif
		5.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang difasilitasi	100%	5.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang difasilitasi/ disediakan	100%	933.477.000,00	920.950.000,00	935.950.000,00	
		5.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang dipelihara	100%	5.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang yang dipelihara dan berfungsi sesuai kondisi standar	100%	626.622.338,00	626.622.338,00	840.795.050,00	Biaya untuk rehab kantor dan Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya
2	5.01 PERENCANAAN	5.01.02 PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase indikator kinerja sasaran daerah yang dilaksanakan oleh perangkat daerah	100%	5.01.02 PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	1. Persentase Keselarasan RPJMD dengan RKPD 2. Persentase Keselarasan RPJMD dengan Renstra PD	100% 100%	2.795.080.579,00	1.867.287.875,00	1.807.399.173,00	

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
Kabupaten Tabalong Tahun 2025

NO	BIDANG URUSAN	SEBELUM (RKPD Induk 2025)			SESUDAH (RKPD Perubahan 2025)			PAGU		RKPD 2025 PERUBAHAN	ALASAN PERUBAHAN
		PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET	RKPD 2025 (Induk)	APBD INDUK 2025 dan PERGESERAN		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		5.01.02.2.01 Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Persentase realisasi dokumen perencanaan pembangunan daerah yang disusun	100%	5.01.02.2.01 Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Persentase realisasi dokumen perencanaan pembangunan daerah yang disusun	100%	1.422.279.294,00	1.039.541.280,00	922.553.080,00	penambahan anggaran perjalanan dinas dalam rangka persiapan penyusunan Pohon Kinerja sebagai dasar penyusunan dokumen perencanaan menyesuaikan dengan visi dan misi Bupati dan wakil Bupati terpilih
		5.01.02.2.02 Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase SKPD yang mendapatkan Pembinaan dan Pemanfaatan Data Informasi guna penyediaan data Perencanaan Pembangunan	100%	5.01.02.2.02 Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase SKPD yang mendapatkan Pembinaan dan Pemanfaatan Data Informasi guna penyediaan data Perencanaan Pembangunan	100%	555.450.494,00	303.300.044,00	303.299.713,00	
		5.01.02.2.03 Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Realisasi Dokumen Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	100%	5.01.02.2.03 Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase data dan informasi hasil pengendalian, evaluasi dan laporan perencanaan pembangunan daerah yang digunakan menjadi umpan balik penyusunan perencanaan pembangunan berikutnya	100%	559.666.051,00	418.955.051,00	476.054.893,00	adanya penambahan perjalanan dinas dalam rangka persiapan kegiatan evaluasi yang akan menyesuaikan dengan dokumen perencanaan lima tahunan yang akan dibuat dan perjalanan dinas lokal dalam daerah kabupaten dalam rangka kegiatan movev yang dilakukan di setiap kecamatan di akhir tahun anggaran

NO	BIDANG URUSAN	SEBELUM (RKPD Induk 2025)			SESUDAH (RKPD Perubahan 2025)			PAGU		RKPD 2025 PERUBAHAN	ALASAN PERUBAHAN
		PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET	RKPD 2025 (Induk)	APBD INDUK 2025 dan PERGESERAN		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		5.01.02.2.04 Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Persentase Penggunaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	100%	5.01.02.2.04 Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Persentase pelaksanaan implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) di daerah	100%	257.684.740,00	105.491.500,00	105.491.487,00	
		5.01.03 PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase Keselarasan Program pada Dokumen Perencanaan SKPD terhadap program pada Dokumen Perencanaan daerah	100%	5.01.03 PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	1. Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Pemerintahan Pembangunan Manusiadan 2. Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Perekonomian dan SDA 3. Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	100% 100%	3.286.394.980,00	2.192.683.086,00	2.796.856.085,00	
		5.01.03.2.01 Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Persentase Keselarasan Program pada Dokumen Perencanaan SKPD Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia terhadap Program pada Dokumen Perencanaan Daerah	100%	5.01.03.2.01 Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Persentase Keselarasan Program pada Dokumen Perencanaan SKPD Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia terhadap Program pada Dokumen Perencanaan Daerah	100%	1.919.962.758,00	1.225.210.758,00	1.739.683.758,00	Penambahan anggaran untuk trasnport peserta dari desa untuk Bimtek Silangkarr, paket meeting bimtek silangkarr yang kurang hitung pada APBD induk, honor tim kabupaten (nonn ASN) untuk Penaggulangan Kemiskinan dan Stunting, Membangun aplikasi, perjadin dan honor narasumber, serta perjalanan dinas biasa ditambah

NO	BIDANG URUSAN	SEBELUM (RKPD Induk 2025)			SESUDAH (RKPD Perubahan 2025)			PAGU		RKPD 2025 PERUBAHAN	ALASAN PERUBAHAN
		PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET	RKPD 2025 (Induk)	APBD INDUK 2025 dan PERGESERAN		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
											Penambahan anggaran untuk Survey Lapangan, Pengumpulan dan Updating data Penduduk Miskin di Kelurahan serta penyusunan (kajian) RPKD Tahun 2025-2029
		5.01.03.2.02 Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Persentase Keselarasan Program pada Dokumen Perencanaan SKPD Bidang Perekonomian dan SDA terhadap Program pada Dokumen Perencanaan Daerah	100%	5.01.03.2.02 Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Persentase Keselarasan Program pada Dokumen Perencanaan SKPD Bidang Perekonomian dan SDA terhadap Program pada Dokumen Perencanaan Daerah	100%	404.600.000,00	424.840.095,50	452.090.095,00	Keperluan Koordinasi Kegiatan
		5.01.03.2.03 Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Persentase Keselarasan Program Pada Dokumen Perencanaan SKPD Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan terhadap Program Pada dokumen Perencanaan Daerah	100%	5.01.03.2.03 Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Persentase Keselarasan Program Pada Dokumen Perencanaan SKPD Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan terhadap Program Pada dokumen Perencanaan Daerah	100%	961.832.222,00	542.632.232,50	605.082.232,00	Keperluan Koordinasi Kegiatan
3	5.05 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	5.05.02 PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase hasil kelitbangan yang ditindaklanjuti	70%	5.05.02 PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase Rekomendasi Kebijakan Pembangunan Daerah yang dijadikan sebagai Landasan dalam Implementasi Pembangunan	64%	3.597.466.050,00	2.764.688.557,00	4.138.641.797,00	

NO	BIDANG URUSAN	SEBELUM (RKPD Induk 2025)			SESUDAH (RKPD Perubahan 2025)			PAGU			ALASAN PERUBAHAN
		PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET	RKPD 2025 (Induk)	APBD INDUK 2025 dan PERGESERAN	RKPD 2025 PERUBAHAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		5.05.02.2.01 Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Persentase penelitian di bidang penyelenggaraan pemerintahan dan pengkajian peraturan yang dihasilkan	100%	5.05.02.2.01 Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Persentase penelitian di bidang penyelenggaraan pemerintahan dan pengkajian peraturan yang ditindaklanjuti	100%	748.132.000,00	525.123.257,00	775.853.497,00	
					5.05.02.2.02 Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Persentase Penelitian di bidang sosial dan kependudukan yang ditindaklanjuti	100%	0,00	0,00	180.000.000,00	
		5.05.02.2.03 Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Persentase Penelitian di bidang Ekonomi dan Pembangunan yang dihaasilkan	100%	5.05.02.2.03 Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Persentase Penelitian di bidang Ekonomi dan Pembangunan yang ditindaklanjuti	100%	397.334.050,00	374.930.050,00	389.210.050,00	
		5.05.02.2.04 Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Persentase inovasi daerah yang direkomendasikan untuk diterapkan	50%	5.05.02.2.04 Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Persentase Pengembangan Inovasi dan Teknologi yang ditindaklanjuti	100%	2.452.000.000,00	1.864.635.250,00	2.793.578.250,00	
JUMLAH								22.562.629.312,00	19.904.125.284,00	22.862.312.167,00	
5.02.0.00.0.00.01.0000 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH											
1	X.XX. NON URUSAN	5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai AKIP	BB	5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Predikat Nilai AKIP Perangkat Daerah	BB	106.806.508.787,00	29.283.577.033,00	50.401.961.522,00	
		5.02.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun	11 Dok	5.02.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase hasil perencanaan dan pelaporan yang dijadikan bahan evaluasi kinerja	100%	90.625.990,00	90.625.990,00	90.625.990,00	
		5.02.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen pelaporan keuangan yang disusun	17 dok	5.02.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase administrasi keuangan yang tertib, akuntabel dan tepat waktu	100%	99.132.451.051,00	12.761.416.100,00	12.761.416.100,00	

NO	BIDANG URUSAN	SEBELUM (RKPD Induk 2025)			SESUDAH (RKPD Perubahan 2025)			PAGU		RKPD 2025 PERUBAHAN	ALASAN PERUBAHAN
		PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET	RKPD 2025 (Induk)	APBD INDUK 2025 dan PERGESERAN		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		5.02.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pelayanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	5.02.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pengelolaan dan pelayanan administrasi kepegawaian yang tepat waktu, mutakhir dan terdokumentasi	100%	481.909.124,00	497.070.000,00	497.070.000,00	
		5.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase tersedianya administrasi umum perangkat daerah	100%	5.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi umum yang terlaksana sesuai SOP	100%	1.598.975.900,00	1.635.414.074,00	1.635.414.074,00	
		5.02.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	5.02.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Realisasi Pengadaan Barang Milik Daerah yang sesuai dengan yang direncanakan	100%	1.786.178.621,00	10.634.039.983,00	32.564.808.412,00	mobil dan sepeda motor serta Penambahan Sound system, meja,kursi podium, lighting, Sofa unutm aula barunak (Rp. 33.605.128.412)
		5.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	5.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang difasilitasi/ disediakan	100%	1.398.698.101,00	1.495.700.886,00	1.565.700.886,00	untuk keperluan Pameran
		5.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	5.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang yang dipelihara dan berfungsi sesuai kondisi standar	100%	2.317.670.000,00	2.169.310.000,00	1.286.926.060,00	pemeliharaan eskalator
2	5.02 KEUANGAN	5.02.02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	a. Persentase ketepatan waktu penyusunan dan Penetapan APBD	100%	5.02.02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	a. Ketepatan Waktu Penyampaian KUA - PPAS, RAPBD, dan Perda APBD Induk dan Perubahan	Pernyataan (Tepat Waktu/Tidak Tepat Waktu)	333.854.524.993,00	403.830.939.547,00	392.296.769.806,19	

NO	BIDANG URUSAN	SEBELUM (RKPD Induk 2025)			SESUDAH (RKPD Perubahan 2025)			PAGU		RKPD 2025 PERUBAHAN	ALASAN PERUBAHAN
		PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET	RKPD 2025 (Induk)	APBD INDUK 2025 dan PERGESERAN		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			b. Persentase Waktu Penyelesaian SP2D berdasarkan SPM yang dinyatakan sah dan lengkap sesuai ketentuan dan tepat Waktu c. Persentase Ketepatan waktu Penyampaian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	100% 100%		b.- Persentase Laporan Perbendaharaan yang tepat waktu. - Persentase pencairan anggaran sesuai pedoman c. Persentase Laporan Keuangan Tepat Waktu	100% 100%				
		5.02.02.2.01 Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Jumlah dokumen penganggaran keuangan daerah	100 Dok	5.02.02.2.01 Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Persentase Ketersediaan Dokumen KUA-PPAS, Perubahan KUA-PPAS, Dokumen Perbup dan Perda APBD serta perubahan Perbup dan Perda APBD (%)	100%	1.158.422.446,00	844.614.208,00	840.014.208,00	
		5.02.02.2.02 Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Jumlah dokumen pengelolaan perbendaharaan daerah	60 Dok	5.02.02.2.02 Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Persentase Penerbitan dan Pencairan SP2D dan Ketersediaan Laporan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya (%)	100%	1.011.797.547,00	265.995.547,00	265.995.045,00	
		5.02.02.2.03 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Jumlah dokumen akuntansi dan pelaporan keuangan daerah	16 Dok	5.02.02.2.03 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Persentase Ketersediaan Dokumen Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, Raperda dan Raperbup Pertanggungjawaban APBD (%)	100%	1.573.000.000,00	557.421.910,00	536.547.098,00	

NO	BIDANG URUSAN	SEBELUM (RKPD Induk 2025)			SESUDAH (RKPD Perubahan 2025)			PAGU		RKPD 2025 PERUBAHAN	ALASAN PERUBAHAN
		PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET	RKPD 2025 (Induk)	APBD INDUK 2025 dan PERGESERAN		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		5.02.02.2.04 Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	1 tahun	5.02.02.2.04 Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Terlaksananya Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	100%	330.111.305.000,00	402.162.907.882,00	390.654.213.455,19	
		5.02.03 PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Persentase kesesuaian nilai aktiva tetap BMD dengan Neraca Keuangan Pemerintah Daerah	100%	5.02.03 PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Persentase SKPD yang tertib penatausahaan BMD yang sesuai peraturan perundang-undangan	100%	2.858.318.400,00	2.031.854.400,00	2.031.854.400,00	
		5.02.03.2.01 Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase jumlah SKPD dengan laporan aset baik	100%	5.02.03.2.01 Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase Ketersediaan Laporan Aset Tetap dan Persediaan semua OPD, Laporan Pemanfaatan dan Pengamanan Barang Milik Daerah (%)	100%	2.858.318.400,00	2.031.854.400,00	2.031.854.400,00	
JUMLAH								443.519.352.180,00	435.146.370.980,00	444.730.585.728,19	
5.02.0.00.0.00.02.0000 BADAN PENDAPATAN DAERAH											
1	X.XX. NON URUSAN	5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai AKIP	BB	5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Predikat Nilai AKIP Perangkat Daerah	BB	19.279.395.000,00	24.661.667.691,00	20.377.472.436,00	
		5.02.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi Perangkat daerah	23 Dokumen	5.02.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase hasil perencanaan dan pelaporan yang dijadikan bahan evaluasi kinerja	100%	167.066.000,00	117.648.000,00	107.928.000,00	Pengurangan belanja makan minum rapat, digeser untuk penambahan belanja perlengkapan dinas (Baju Napak Tilas, Pakaian Dinas untuk Honorer/ P3K, Belanja Pakaian Batik Tradisional dan Belanja Pakaian Olahraga) pada Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
Kabupaten Tabalong Tahun 2025

NO	BIDANG URUSAN	SEBELUM (RKPD Induk 2025)			SESUDAH (RKPD Perubahan 2025)			PAGU		RKPD 2025 PERUBAHAN	ALASAN PERUBAHAN
		PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET	RKPD 2025 (Induk)	APBD INDUK 2025 dan PERGESERAN		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		5.02.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya penatausahaan keuangan Perangkat Daerah	44 Dokumen	5.02.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase administrasi keuangan yang tertib, akuntabel dan tepat waktu	100%	14.024.085.000,00	19.745.393.003,00	16.009.174.046,00	Menggeser dana titipan Opsen PKB/ BBNKB yang sebelumnya pada anggaran induk dititipkan pada Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN dikarenakan adanya penambahan dana insentif fiskal ke Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah dan pengurangan belanja makan minum rapat pada sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD, digeser ke Sub Kegiatan pengadaan pakaian dinas untuk penambahan belanja perlengkapan dinas (Baju Napak Tilas, Pakaian Dinas untuk Honorer/ P3K, Belanja Pakaian Batik Tradisional dan Belanja Pakaian Olahraga)

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
Kabupaten Tabalong Tahun 2025

NO	BIDANG URUSAN	SEBELUM (RKPD Induk 2025)			SESUDAH (RKPD Perubahan 2025)			PAGU		RKPD 2025 PERUBAHAN	ALASAN PERUBAHAN
		PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET	RKPD 2025 (Induk)	APBD INDUK 2025 dan PERGESERAN		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		5.02.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100%	5.02.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase pengadministrasian Barang Milik Daerah (BMD) yang akurat lengkap dan mutakhir.	100%	51.346.000,00	17.522.000,00	47.967.119,00	Terdapat penambahan belanja perjalanan dinas biasa pada Sub Kegiatan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD dan terdapat pengurangan belanja ATK, kertas dan cover serta belanja alat/ bahan untuk kegiatan kantor perabot kantor (figura) pada Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD karena sudah dianggarkan di Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perengkapan kantor
		5.02.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya administrasi kepegawaian	100%	5.02.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pengelolaan dan pelayanan administrasi kepegawaian yang tepat waktu, mutakhir dan terdokumentasi	100%	197.700.000,00	282.785.996,00	295.714.232,00	Terdapat penambahan pada Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan untuk belanja pakaian batik tradisional dan belanja pakaian olah raga

NO	BIDANG URUSAN	SEBELUM (RKPD Induk 2025)			SESUDAH (RKPD Perubahan 2025)			PAGU		RKPD 2025 PERUBAHAN	ALASAN PERUBAHAN
		PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET	RKPD 2025 (Induk)	APBD INDUK 2025 dan PERGESERAN		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		5.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya kegiatan administrasi umum	100%	5.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi umum yang terlaksana sesuai SOP	100%	1.583.683.911,00	1.082.560.888,00	1.215.022.077,00	Terdapat penambahan belanja Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah pada Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
		5.02.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya barang milik daerah	52 Unit	5.02.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Realisasi Pengadaan Barang Milik Daerah yang sesuai dengan yang direncanakan	100%	195.806.789,00	114.580.519,00	206.961.125,00	Penambahan belanja laptop pada Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya serta penambahan belanja barang untuk dijual/ diserahkan kepada pihak ketiga/ pihak lainnya (Kegiatan Sinergi Opsen PKB/ BBNKB dengan Unit Pelayanan Pendapatan Daerah (UPPD) Tanjung)
		5.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan	12 Bulan	5.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang difasilitasi/ disediakan	100%	1.433.906.000,00	1.666.449.985,00	1.771.515.437,00	Terdapat penambahan belanja jasa tenaga pelayanan umum (Belanja Tenaga Outsourcing) untuk sekretariat, bagian layanan dan penilaian dan bagian pembukuan pada Sub kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

NO	BIDANG URUSAN	SEBELUM (RKPD Induk 2025)			SESUDAH (RKPD Perubahan 2025)			PAGU		RKPD 2025 PERUBAHAN	ALASAN PERUBAHAN
		PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET	RKPD 2025 (Induk)	APBD INDUK 2025 dan PERGESERAN		
1		5.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	5.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang yang dipelihara dan berfungsi sesuai kondisi standar	100%	1.625.801.300,00	1.634.727.300,00	723.190.400,00	Terdapat pergeseran belanja untuk belanja modal bangunan gedung tempat kerja, anggaran tersebut dialihkan ke Dinas Pekerjaan Umum. Terdapat juga penambahan untuk jasa perencanaan rehab ruang kepala badan pada Sub Kegiatan Pemeliharaan/ rehabilitasi Gedung Kantor dan bangunan Lainnya
2	5.02 KEUANGAN	5.02.04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase Kontribusi Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah	43,54 %	5.02.04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase Kenaikan Jumlah Wajib Pajak	2,00%	4.901.101.942,00	3.162.513.223,00	6.498.951.578,00	Terdapat penambahan untuk Kegiatan Sinergi Opsen PKB/ BBNKB dengan Unit Pelayanan Pendapatan Daerah (UPPD) Tanjung
			Persentase Kontribusi Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah	5,1 %		Persentase Peningkatan Penerimaan Pajak Daerah	6,00%				
			Persentase SKPD pengelola PAD yang mencapai target (%)	0,14		Persentase Peningkatan Sistem Tata Kelola Pajak dan Retribusi Daerah	100,00%				
		5.02.04.2.01 Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah	Jumlah Pajak Daerah Jumlah Retribusi Daerah Jumlah OPD pengelola retribusi	104.016.101.486 12.187.192.358 4 OPD	5.02.04.2.01 Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah	Realisasi Wajib Pajak Baru Realisasi Wajib Pajak yang Memenuhi Kewajiban Perpajakannya Realisasi Data Objek Pajak yang Dimutakhirkan	280 WP 100,00% 100,00%	4.901.101.942,00	3.162.513.223,00	6.498.951.578,00	

NO	BIDANG URUSAN	SEBELUM (RKPD Induk 2025)			SESUDAH (RKPD Perubahan 2025)			PAGU		RKPD 2025 PERUBAHAN	ALASAN PERUBAHAN
		PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET	RKPD 2025 (Induk)	APBD INDUK 2025 dan PERGESERAN		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			yang mencapai target			Realisasi Penetapan Pajak Daerah Persentase Terselaksainnya Piutang Pajak Daerah Realisasi Manajemen Pengelolaan Pajak Daerah Terlaksananya Pengelolaan Pajak Daerah Berbasis Teknologi Informasi	100,00% 100,00% 100,00% 100,00%				
JUMLAH								24.180.496.942,00	27.824.180.914,00	26.876.424.014,00	
5.03.5.04.0.00.01.0000 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA											
1	X.XX. NON URUSAN	5.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Terhadap Pelayanan Kesekretariatan	82	5.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Predikat Nilai AKIP Perangkat Daerah	BB	8.779.824.289,00	9.392.038.593,00	10.357.509.318,00	
		5.03.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (%)	100%	5.03.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase hasil perencanaan dan pelaporan yang dijadikan bahan evaluasi kinerja	100%	144.448.234,00	83.216.234,00	108.387.050,00	
		5.03.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pembayaran gaji dan tunjangan ASN dan penyelesaian laporan keuangan tepat waktu*) (%)	100%	5.03.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase administrasi keuangan yang tertib, akuntabel dan tepat waktu	100%	5.286.861.870,00	6.368.110.870,00	6.388.462.870,00	
		5.03.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	5.03.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pengelolaan dan pelayanan administrasi kepegawaian yang tepat waktu, mutakhir dan terdokumentasi	100%	344.400.000,00	278.602.500,00	494.485.500,00	

NO	BIDANG URUSAN	SEBELUM (RKPD Induk 2025)			SESUDAH (RKPD Perubahan 2025)			PAGU		RKPD 2025 PERUBAHAN	ALASAN PERUBAHAN
		PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET	RKPD 2025 (Induk)	APBD INDUK 2025 dan PERGESERAN		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		5.03.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Terpenuhiya Administrasi Umum Perangkat Daerah (%)	100%	5.03.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi umum yang terlaksana sesuai SOP	100%	1.365.220.718,00	1.072.969.232,00	1.597.523.425,00	
		5.03.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan BMD sesuai rencana	100%	5.03.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			75.270.117,00	0,00	0,00	
		5.03.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	5.03.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang difasilitasi/ disediakan	100%	839.899.900,00	839.637.500,00	974.618.216,00	
		5.03.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)	100%	5.03.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang yang dipelihara dan berfungsi sesuai kondisi standar	100%	723.723.450,00	749.502.257,00	794.032.257,00	
2	5.03 KEPEGAWAIAN	5.03.02 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Indeks kepuasan Terhadap Layanankepegawaian Kepegawaian daerah (IKM) Persentase Penyusunan Formasi dan Pelaksanaan Pengadaan ASN Persentase penyelesaian pelanggaran disiplin ASN	8200% 100% 100%	5.03.02 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Indeks kepuasan Terhadap Layanankepegawaian Kepegawaian daerah (IKM) Persentase Penempatan pegawai sesuai dengan Anjab Persentase Peningkatan Kualitas SDM Aparatur Persentase Perencanaan Kebutuhan yang sesuai dengan Formasi	90 90% 40% 100%	4.887.349.608,00	4.431.685.587,00	6.644.081.548,00	

NO	BIDANG URUSAN	SEBELUM (RKPD Induk 2025)			SESUDAH (RKPD Perubahan 2025)			PAGU		RKPD 2025 PERUBAHAN	ALASAN PERUBAHAN
		PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET	RKPD 2025 (Induk)	APBD INDUK 2025 dan PERGESERAN		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						Persentase ASN yang ditingkatkan Kompetensinya	100%				
						Persentase Pengembangan Karir ASN sesuai dengan Kompetensinya	90%				
						Persentase Pegawai dengan SKP Bernilai Baik	100%				
		5.03.02.2.01 Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Nilai Indeks Kepuasan Terhadap Layanan Pengadaan, Pemberhentian, & Informasi Kepegawaian	82	5.03.02.2.01 Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Nilai Indeks Kepuasan Terhadap Layanan Pengadaan, Pemberhentian, & Informasi Kepegawaian	100,00%	1.222.917.738,00	955.466.267,00	2.590.417.575,00	
						Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pegawai	100,00%				
		5.03.02.2.02 Mutasi dan Promosi ASN	Indeks kepuasan terhadap layanan mutasi dan promosi ASN (Nilai)	82	5.03.02.2.02 Mutasi dan Promosi ASN	Persentase Layanan Kepegawaian Mutasi dan Penilaian Kinerja Aparatur Tepat Waktu	90,00%	939.871.000,00	659.279.000,00	1.156.584.000,00	
						Persentase Pelaksanaan Mutasi dan Rotasi Sesuai Kebutuhan	100,00%				
		5.03.02.2.03 Pengembangan Kompetensi ASN	Persentase Peningkatan Pendidikan (Persen)	100%	5.03.02.2.03 Pengembangan Kompetensi ASN	Persentase Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi ASN	100,00%	1.793.563.400,00	2.280.110.400,00	2.335.903.200,00	
		5.03.02.2.04 Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Indeks Kepuasan Terhadap layanan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur (nilai)	82	5.03.02.2.04 Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Persentase pegawai yang melakukan penilaian kinerja	100,00%	930.997.470,00	536.829.920,00	561.176.773,00	
						Persentase ASN yang berdisiplin	100,00%				

NO	BIDANG URUSAN	SEBELUM (RKPD Induk 2025)			SESUDAH (RKPD Perubahan 2025)			PAGU			ALASAN PERUBAHAN
		PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET	RKPD 2025 (Induk)	APBD INDUK 2025 dan PERGESERAN	RKPD 2025 PERUBAHAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	5.04 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	5.04.02 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Persentase Peningkatan kompetensi pegawai	100,0%	5.04.02 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Persentase ASN yang Mendapatkan Pengembangan Kompetensi Dasar, Manajerial, dan Fungsional Persentase ASN yang Mendapatkan Pengembangan Kompetensi Teknis	100,00%	4.591.353.707,00	3.323.567.307,00	4.191.741.989,00	
		5.04.02.2.01 Pengembangan Kompetensi Teknis	Persentase pengembangan Kompetensi teknis (Persen)	100%	5.04.02.2.01 Pengembangan Kompetensi Teknis	Persentase ASN yang Lulus Diklat	100 orang	1.122.094.973,00	552.948.973,00	829.314.973,00	
		5.04.02.2.02 Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Persentase pengembangan manajerial dan fungsional (Persen)	100%	5.04.02.2.02 Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Persentase ASN yang lulus pengembangan manajerial dan fungsional (Persen)	100%	3.199.529.734,00	2.679.674.534,00	3.261.344.216,00	
		5.04.02.2.03 Pengembangan Kompetensi Pemerintahan Dalam Negeri	Persentase Pengembangan Kompetensi Pemerintahan Dalam Negeri	100%	5.04.02.2.03 Pengembangan Kompetensi Pemerintahan Dalam Negeri	Persentase Peningkatan Kompetensi Pemerintah Dalam Negeri	100,00%	269.729.000,00	90.943.800,00	101.082.800,00	
		JUMLAH							18.258.527.604,00	17.147.291.487,00	21.193.332.855,00
6.01.0.00.0.00.01.0000 INSPEKTORAT											
1	X.XX. NON URUSAN	6.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai AKIP	BB	6.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Predikat Nilai AKIP Perangkat Daerah	BB	15.244.971.067,00	20.523.362.605,00	22.592.681.983,00	
		6.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen	9 Dokumen	6.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase hasil perencanaan dan pelaporan yang dijadikan bahan evaluasi kinerja	100%	27.225.000,00	18.975.000,00	18.975.000,00	dikarerakan adanya efesien Pengurangan anggaran

NO	BIDANG URUSAN	SEBELUM (RKPD Induk 2025)			SESUDAH (RKPD Perubahan 2025)			PAGU		RKPD 2025 PERUBAHAN	ALASAN PERUBAHAN
		PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET	RKPD 2025 (Induk)	APBD INDUK 2025 dan PERGESERAN		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		6.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	gaji dan tnjangan ASN	14 Bulan	6.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase administrasi keuangan yang tertib, akuntabel dan tepat waktu	100%	9.581.193.784,00	14.201.990.000,00	14.201.990.000,00	Adanya Penambahan Personel Auditor/P2UPD serta PPPK
		6.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kapabilitas APIP	3 Level	6.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pengelolaan dan pelayanan administrasi kepegawaian yang tepat waktu, mutakhir dan terdokumentasi	100%	2.681.250.000,00	4.289.595.000,00	5.750.170.000,00	Untuk pemenuhan Peningkatan kualitas APIP
		6.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Nilai IKM Pelayanan Administrasi Umum	74%	6.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi umum yang terlaksana sesuai SOP	100%	1.258.389.403,00	601.825.441,00	1.052.869.819,00	Pemenuhan sapras APIP
		6.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Nilai IKM Pelayanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	80%	6.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang difasilitasi/ disediakan	100%	648.104.170,00	769.538.370,00	927.238.370,00	Pemenuhan sapras APIP
		6.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah alat dan perlengkapan kantor yang dilakukan pemeliharaan	5 Macam	6.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang yang dipelihara dan berfungsi sesuai kondisi standar	100%	1.048.808.710,00	641.438.794,00	641.438.794,00	dikarerakan adanya efesien Pengurangan anggaran
2	6.01 INSPEKTORAT DAERAH	6.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAA N PENGAWASAN	Tingkat Muturitas SPIP Kab. Tabalong	50%	6.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAA N PENGAWASAN	Tingkat Muturitas SPIP Kab. Tabalong	50%	4.300.328.000,00	3.081.047.180,00	3.081.047.180,00	dikarerakan adanya efesien Pengurangan anggaran
		6.01.02.2.01 Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Persentase Jumlah Kegiatan Pengawasan Internal	100%	6.01.02.2.01 Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Persentase Jumlah Kegiatan Pengawasan Internal	100%	3.672.388.000,00	2.666.004.180,00	2.666.004.180,00	dikarerakan adanya efesien Pengurangan anggaran
		6.01.02.2.02 Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Persentase Jumlah Kegiatan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	100%	6.01.02.2.02 Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Persentase Jumlah Kegiatan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	100%	627.940.000,00	415.043.000,00	415.043.000,00	dikarerakan adanya efesien Pengurangan anggaran

NO	BIDANG URUSAN	SEBELUM (RKPD Induk 2025)			SESUDAH (RKPD Perubahan 2025)			PAGU		RKPD 2025 PERUBAHAN	ALASAN PERUBAHAN
		PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET	RKPD 2025 (Induk)	APBD INDUK 2025 dan PERGESERAN		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		6.01.03 PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Jumlah Perangkat Daerah dengan Predikat WBK	3 PD	6.01.03 PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Jumlah Perangkat Daerah dengan Predikat WBK	3 PD	1.182.637.567,00	961.806.917,00	961.806.917,00	dikarerakan adanya efesien Pengurangan anggaran
		6.01.03.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Tersedianya dokumen kebijakan dan instrumen teknis Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan		6.01.03.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Tersedianya dokumen kebijakan dan instrumen teknis Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	8 Rekomendasi	240.750.000,00	176.527.250,00	176.527.250,00	dikarerakan adanya efesien Pengurangan anggaran
		6.01.03.2.02 Pendampingan dan Asistensi	Persentase Implementasi Rencana Aksi Pencegahan Korupsi pada 8 Area Intervensi	3 PD	6.01.03.2.02 Pendampingan dan Asistensi	Persentase Implementasi Rencana Aksi Pencegahan Korupsi pada 8 Area Intervensi	3 PD	941.887.567,00	785.279.667,00	785.279.667,00	dikarerakan adanya efesien Pengurangan anggaran
JUMLAH								20.727.936.634,00	24.566.216.702,00	26.635.536.080,00	
7.01.0.00.0.00.01.0000 KECAMATAN TANJUNG											
1	X.XX. NON URUSAN	7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Evaluasi SAKIP	A	7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Predikat Nilai AKIP Perangkat Daerah	BB	16.444.600.121,00	17.340.598.331,00	16.940.077.105,00	
		7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	18 Dokumen	7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase hasil perencanaan dan pelaporan yang dijadikan bahan evaluasi kinerja	100%	150.177.292,00	144.377.292,00	112.927.292,00	
		7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pembayaran gaji dan tunjangan ASN dan penyelesaian laporan keuangan tepat waktu	100%	7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase administrasi keuangan yang tertib, akuntabel dan tepat waktu	100%	8.182.444.436,00	10.719.016.436,00	10.719.781.436,00	

NO	BIDANG URUSAN	SEBELUM (RKPD Induk 2025)			SESUDAH (RKPD Perubahan 2025)			PAGU		RKPD 2025 PERUBAHAN	ALASAN PERUBAHAN
		PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET	RKPD 2025 (Induk)	APBD INDUK 2025 dan PERGESERAN		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		7.01.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase barang milik daerah pada perangkat daerah teradministrasi dengan baik	100%	7.01.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase pengadministrasian Barang Milik Daerah (BMD) yang akurat lengkap dan mutakhir.	100%	28.278.192,00	28.278.192,00	29.425.000,00	
		7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pengelolaan dan pelayanan administrasi kepegawaian yang tepat waktu, mutakhir dan terdokumentasi	100%	168.623.752,00	137.650.000,00	160.750.000,00	
		7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah Daerah	100%	7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi umum yang terlaksana sesuai SOP	100%	1.872.852.863,00	701.964.603,00	1.054.894.782,00	
		7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pengadaan barang milik daerah pada perangkat daerah	100%	7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Realisasi Pengadaan Barang Milik Daerah yang sesuai dengan yang direncanakan	100%	1.804.914.964,00	1.461.359.276,00	1.382.693.292,00	
		7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang difasilitasi/ disediakan	100%	1.198.787.000,00	1.399.010.000,00	1.388.410.000,00	
		7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara	100%	7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang yang dipelihara dan berfungsi sesuai kondisi standar	100%	3.038.521.622,00	2.748.942.532,00	2.091.195.303,00	
2	7.01 KECAMATAN	7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAA N PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase pelayanan kelembagaan sosial kemasyarakatan	73,96%	7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAA N PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Peningkatan Kualitas Layanan Masyarakat	100%	650.772.600,00	183.833.680,00	364.247.470,00	

NO	BIDANG URUSAN	SEBELUM (RKPD Induk 2025)			SESUDAH (RKPD Perubahan 2025)			PAGU		RKPD 2025 PERUBAHAN	ALASAN PERUBAHAN
		PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET	RKPD 2025 (Induk)	APBD INDUK 2025 dan PERGESERAN		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Penilaian Masyarakat yang puas terhadap Pelayanan Pemerintah di Tingkat Kecamatan	100%	7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Terlaksananya penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan	100%	254.705.200,00	183.833.680,00	226.819.880,00	
		7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Persentase pelaksanaan tugas urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di Kecamatan	100%	7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Terlaksananya penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat daerah yang ada di kecamatan	100%	396.067.400,00	0,00	137.427.590,00	
		7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Peningkatan Kinerja Aparature, Kapasitas dan Tata Kelola Kewilayahan Desa	75,8%	7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Peningkatan Kualitas Layanan Masyarakat	100%	4.635.227.570,00	5.438.376.137,00	5.648.536.073,00	
		7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Tersedianya dokumen dan rencana strategis pemberdayaan desa	100%	7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	100%	17.799.000,00	17.359.000,00	24.099.000,00	
		7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Bulan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan pada Perangkat Daerah	12 Bulan	7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	100%	4.034.308.180,00	5.282.567.348,00	5.517.282.654,00	
		7.01.03.2.06 Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Persentase Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	100%	7.01.03.2.06 Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Persentase Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	100%	583.120.390,00	138.449.789,00	107.154.419,00	

NO	BIDANG URUSAN	SEBELUM (RKPD Induk 2025)			SESUDAH (RKPD Perubahan 2025)			PAGU			ALASAN PERUBAHAN
		PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET	RKPD 2025 (Induk)	APBD INDUK 2025 dan PERGESERAN	RKPD 2025 PERUBAHAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Tingkat penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketenteraman dan Kenyamanan)	97,64%	7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Peningkatan Kinerja Pelayanan Kecamatan	100%	53.398.844,00	13.139.700,00	94.687.200,00	
		7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	jumlah kegiatan koordinasi dalam upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban	12 Bulan	7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	100%	53.398.844,00	13.139.700,00	94.687.200,00	
		7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAA N URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase dokumen penyelenggaraan pemerintahan yang disusun tepat waktu	82,23%	7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAA N URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Peningkatan Kinerja Pelayanan Kecamatan	100%	760.623.358,00	709.250.939,00	753.750.939,00	
		7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase pemenuhan layanan kepada masyarakat yang sesuai SOP Urusan Pemerintahan Umum	100%	7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase peningkatan Fasilitas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100%	760.623.358,00	709.250.939,00	753.750.939,00	
		7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase dokumen penyelenggaraan pemerintahan yang disusun tepat waktu	75,8%	7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Peningkatan Kinerja Pelayanan Kecamatan	100%	158.542.624,00	114.108.992,00	105.008.992,00	
		7.01.06.2.01 Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Bulan fasilitas, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	12 Bulan	7.01.06.2.01 Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100%	158.542.624,00	114.108.992,00	105.008.992,00	
JUMLAH								22.703.165.117,00	23.799.307.779,00	23.906.307.779,00	

NO	BIDANG URUSAN	SEBELUM (RKPD Induk 2025)			SESUDAH (RKPD Perubahan 2025)			PAGU		RKPD 2025 PERUBAHAN	ALASAN PERUBAHAN
		PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET	RKPD 2025 (Induk)	APBD INDUK 2025 dan PERGESERAN		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.01.0.00.0.00.02.0000 KECAMATAN MURUNG PUDAK											
1	X.XX. NON URUSAN	7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Evaluasi Nilai AKIP	B Nilai	7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Predikat Nilai AKIP Perangkat Daerah	BB	13.308.383.035,00	15.555.335.119,00	16.486.356.874,00	
		7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi Perangkat daerah yang disusun	10 Dokumen	7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase hasil perencanaan dan pelaporan yang dijadikan bahan evaluasi kinerja	100%	186.232.600,00	86.109.868,00	32.114.868,00	Pengurangan pada sub keg Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektorial Daerah untuk belanja perjalanan dinas dan makan minum sosialisasi
		7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Keuangan Perangkat Daerah	31 Dokumen	7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase administrasi keuangan yang tertib, akuntabel dan tepat waktu	100%	8.105.597.052,00	10.948.017.000,00	11.198.017.000,00	Penambahan pada sub keg Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN untuk belanja pajak PPH 21
		7.01.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	12 Dokumen	7.01.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase pengadministrasian Barang Milik Daerah (BMD) yang akurat lengkap dan mutakhir.	100%	1.525.684,00	1.558.129,00	1.558.129,00	
		7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Laporan	7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi umum yang terlaksana sesuai SOP	100%	1.180.724.103,00	746.184.374,00	769.499.238,00	Pengurangan pada sub keg Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
		7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	124 Unit	7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Realisasi Pengadaan Barang Milik Daerah yang sesuai dengan yang direncanakan	100%	1.712.814.572,00	1.499.209.001,00	1.393.293.253,00	Penambahan pada belanja modal peralatan dan mesin, belanja mebel dan belanja modal gedung kantor

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
Kabupaten Tabalong Tahun 2025

NO	BIDANG URUSAN	SEBELUM (RKPD Induk 2025)			SESUDAH (RKPD Perubahan 2025)			PAGU		RKPD 2025 PERUBAHAN	ALASAN PERUBAHAN
		PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET	RKPD 2025 (Induk)	APBD INDUK 2025 dan PERGESERAN		
1		7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	12 Laporan	7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang difasilitasi/ disediakan	100%	1.284.458.031,00	1.420.341.104,00	1.580.718.282,00	Penambahan pada Sub Keg Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik untuk belanja air dan listrik dan pada sub Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor belanja makan minum rapat aktifitas lapangan (gotong royong) pada 5 kelurahan
		7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Unit yang dipelihara dalam rangka pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan Daerah	101 Unit	7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang yang dipelihara dan berfungsi sesuai kondisi standar	100%	837.030.993,00	853.915.643,00	1.511.156.104,00	Penambahan pada Sub Keg Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya belanja Rehap gedung kantor
2	7.01 KECAMATAN	7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAA N PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Pelayanan kelembagaan Sosial Kemasyarakatan	100%	7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAA N PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Pelayanan kelembagaan Sosial Kemasyarakatan	100%	871.864.615,00	750.498.177,00	1.137.515.650,00	

NO	BIDANG URUSAN	SEBELUM (RKPD Induk 2025)			SESUDAH (RKPD Perubahan 2025)			PAGU		RKPD 2025 PERUBAHAN	ALASAN PERUBAHAN
		PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET	RKPD 2025 (Induk)	APBD INDUK 2025 dan PERGESERAN		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah laporan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan	10 Laporan	7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah laporan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan	10 Laporan	153.807.934,00	134.841.496,00	230.294.050,00	Penambahan pada Sub keg Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait untuk belanja MTQ dan Pada Sub Keg Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan untuk belanja Kecamatan Bersholawat dan Honorarium instruktur senam
		7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di wilayah Kecamatan	12 Laporan	7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di wilayah Kecamatan	12 Laporan	585.656.681,00	591.656.681,00	880.221.600,00	Penambahan pada Sub Keg Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan untuk belanja penambahan honor RT dan BPJS ketenagakerjaan RT pda 5 Kelurahan
		7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang dilaksnakan	12 Dokumen	7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang dilaksnakan	12 Dokumen	132.400.000,00	24.000.000,00	27.000.000,00	Penambahan pada Sub keg Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha untuk balanja survey tanah

NO	BIDANG URUSAN	SEBELUM (RKPD Induk 2025)			SESUDAH (RKPD Perubahan 2025)			PAGU		RKPD 2025 PERUBAHAN	ALASAN PERUBAHAN
		PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET	RKPD 2025 (Induk)	APBD INDUK 2025 dan PERGESERAN		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Peningkatan Kinerja Aparatur, Kapasitas aparatur dan Tata Kelola Kewilayahan Desa	100%	7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Peningkatan Kinerja Aparatur, Kapasitas aparatur dan Tata Kelola Kewilayahan Desa	100%	4.315.541.319,00	5.006.269.408,00	4.799.296.462,00	
		7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	5 Desa	7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	5 Desa	31.950.000,00	17.701.564,00	17.701.564,00	
		7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Kelurahan yang mengikuti Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	5 Kelurahan	7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Kelurahan yang mengikuti Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	5 Kelurahan	3.690.451.932,00	4.543.329.179,00	4.181.863.935,00	Penambahan pada Sub keg Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan untuk belanja Pelatihan pada masyarakat Eco enzyme dan tanaman hidroponik
		7.01.03.2.06 Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah Keluarga yang mengikuti Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga tingkat kecamatan dan kelurahan	1 00 Keluarga	7.01.03.2.06 Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah Keluarga yang mengikuti Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga tingkat kecamatan dan kelurahan	1 00 Keluarga	593.139.387,00	445.238.665,00	599.730.963,00	Penambahan pada Sub Keg Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas belanja pemberian makanan tambahan posyandu di kelurahan
		7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Jumlah Laporan Program Koordinasi Kententrman dan Ketertiban Umum	12 Laporan	7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Jumlah Laporan Program Koordinasi Kententrman dan Ketertiban Umum	12 Laporan	57.531.600,00	53.706.600,00	140.306.600,00	

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
Kabupaten Tabalong Tahun 2025

NO	BIDANG URUSAN	SEBELUM (RKPD Induk 2025)			SESUDAH (RKPD Perubahan 2025)			PAGU		RKPD 2025 PERUBAHAN	ALASAN PERUBAHAN
		PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET	RKPD 2025 (Induk)	APBD INDUK 2025 dan PERGESERAN		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Laporan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	12 Laporan	7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Laporan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	12 Laporan	57.531.600,00	53.706.600,00	140.306.600,00	Penambahan pada Sub Keg Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan belanja Acara Sosialisasi Penyuluhan Hukum
		7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAA N URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Dokumen Penyelenggaraaan Pemerintahan yang di susun Target Waktu	80,83%	7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAA N URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Dokumen Penyelenggaraaan Pemerintahan yang di susun Target Waktu	81%	135.497.600,00	110.697.600,00	121.471.932,00	
		7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Dokumen penyelenggaraan urusan pemerintah umum sesuai penugasan kepala daerah	12 Dokumen	7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Dokumen penyelenggaraan urusan pemerintah umum sesuai penugasan kepala daerah	12 Dokumen	135.497.600,00	110.697.600,00	121.471.932,00	Penambahan pada sub keg Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia pada Belanja Kegiatan Halal bi halal dan Belanja Hari Jadi Kab. Tabalong

NO	BIDANG URUSAN	SEBELUM (RKPD Induk 2025)			SESUDAH (RKPD Perubahan 2025)			PAGU		RKPD 2025 PERUBAHAN	ALASAN PERUBAHAN
		PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET	RKPD 2025 (Induk)	APBD INDUK 2025 dan PERGESERAN		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Jumlah Dokumen yang difasilitasi dalam rangka pelaksanaan program pembinaan dan pengawasan pemerintah desa	12 Dokumen	7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Jumlah Dokumen yang difasilitasi dalam rangka pelaksanaan program pembinaan dan pengawasan pemerintah desa	12 Dokumen	56.819.792,00	69.488.992,00	70.855.685,00	
		7.01.06.2.01 Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang difasilitasi dalam rangka fasilitas, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintah desa	12 Dokumen	7.01.06.2.01 Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang difasilitasi dalam rangka fasilitas, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintah desa	12 Dokumen	56.819.792,00	69.488.992,00	70.855.685,00	Penambahan pada Sub Keg Fasilitas Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa pada belanja Honor PPTK
JUMLAH								18.745.637.961,00	21.545.995.896,00	22.755.803.203,00	
7.01.0.00.0.00.03.0000 KECAMATAN TANTA											
1	X.XX. NON URUSAN	7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai AKIP	BB	7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Predikat Nilai AKIP Perangkat Daerah	BB	4.812.080.784,00	5.014.776.518,00	5.048.748.090,00	
		7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi Perangkat daerah	22 Dokumen	7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase hasil perencanaan dan pelaporan yang dijadikan bahan evaluasi kinerja	100%	24.456.820,00	15.281.138,00	11.781.138,00	Efisiensi Anggaran
		7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya penatausahaan keuangan Perangkat Daerah	20 Dokumen	7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase administrasi keuangan yang tertib, akuntabel dan tepat waktu	100%	3.230.361.111,00	3.613.727.747,00	3.613.727.747,00	
		7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya administrasi umum Perangkat Daerah	100%	7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi umum yang terlaksana sesuai SOP	100%	436.943.425,00	243.486.205,00	272.857.777,00	Penambahan Karangan Bunga/ Ucapan Selamat, Lampu buat 17 an dan Hari Jadi Kab

NO	BIDANG URUSAN	SEBELUM (RKPD Induk 2025)			SESUDAH (RKPD Perubahan 2025)			PAGU		RKPD 2025 PERUBAHAN	ALASAN PERUBAHAN
		PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET	RKPD 2025 (Induk)	APBD INDUK 2025 dan PERGESERAN		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1 Unit	7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Realisasi Pengadaan Barang Milik Daerah yang sesuai dengan yang direncanakan	100%	646.963.953,00	646.963.953,00	646.963.953,00	
		7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan Daerah	12 Bulan	7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang difasilitasi/ disediakan	100%	286.413.000,00	308.375.000,00	316.475.000,00	tambahan Makan minum acara kegiatan Sekretariat
		7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Unit	7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang yang dipelihara dan berfungsi sesuai kondisi standar	100%	186.942.475,00	186.942.475,00	186.942.475,00	
2	7.01 KECAMATAN	7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Pelayanan kelembagaan Sosial Kemasyarakatan	75%	7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Terlaksananya Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	75%	141.412.540,00	137.952.540,00	201.450.540,00	Penambahan Kegiatan MTQ
		7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	3 Laporan	7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	3 laporan	141.412.540,00	137.952.540,00	201.450.540,00	
		7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Terlaksananya Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	100%	7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	100%	99.387.000,00	72.313.707,00	128.215.640,00	
		7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Tersedianya dokumen dan rencana strategis pemberdayaan desa	3 dokumen	7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Tersedianya dokumen Koordinasi Pemberdayaan Desa	3 Dokumen	18.450.000,00	7.892.492,00	44.854.492,00	Penambahan Kegiatan Gema Jalin

NO	BIDANG URUSAN	SEBELUM (RKPD Induk 2025)			SESUDAH (RKPD Perubahan 2025)			PAGU		RKPD 2025 PERUBAHAN	ALASAN PERUBAHAN
		PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET	RKPD 2025 (Induk)	APBD INDUK 2025 dan PERGESERAN		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		7.01.03.2.06 Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	100 Keluarga	7.01.03.2.06 Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	100 Keluarga	80.937.000,00	64.421.215,00	83.361.148,00	Penambahan Belanja Baju Batik PKK
		7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Prosentasi Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Keamanan dan Kenyamanan)	100%	7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Keamanan dan Kenyamanan)	100%	97.700.000,00	71.717.000,00	70.217.000,00	
		7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Terlaksananya Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	100%	7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Terlaksananya Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	100%	97.700.000,00	71.717.000,00	70.217.000,00	
		7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Dokumen Penyelenggaraan Pemerintahan yang disusun Tepat Waktu	100%	7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Dokumen Penyelenggaraan Pemerintahan yang disusun tepat waktu	100%	137.836.810,00	112.423.810,00	187.275.018,00	
		7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Terlaksananya Penyelenggaraan Urusan pemerintahan Umum sesuai penugasan Kepala Daerah	2 Dokumen	7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Terlaksananya Penyelenggaraan Urusan pemerintahan Umum sesuai penugasan Kepala Daerah	2 Dokumen	137.836.810,00	112.423.810,00	187.275.018,00	Penambahan Belanja SPDP yg di Efisiensi Kegiatan Paskibraka, Hari Jadi Kabupaten, 17 an
		7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Dokumen Penyelenggaraan Pemerintahan yang disusun Tepat Waktu	100%	7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Dokumen Penyelenggaraan Pemerintahan yang disusun tepat waktu	100%	72.346.792,00	68.531.192,00	66.661.192,00	
		7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Terlaksananya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa	14 Dokumen	7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Terlaksananya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintah Desa	14 Dokumen	72.346.792,00	68.531.192,00	66.661.192,00	

NO	BIDANG URUSAN	SEBELUM (RKPD Induk 2025)			SESUDAH (RKPD Perubahan 2025)			PAGU		RKPD 2025 PERUBAHAN	ALASAN PERUBAHAN
		PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET	RKPD 2025 (Induk)	APBD INDUK 2025 dan PERGESERAN		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
JUMLAH								5.360.763.926,00	5.477.714.767,00	5.702.567.480,00	
7.01.0.00.0.00.04.0000 KECAMATAN MUARA HARUS											
1	X.XX. NON URUSAN	7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai AKIP	BB	7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Predikat Nilai AKIP Perangkat Daerah	BB	4.437.947.063,00	4.734.046.241,00	4.802.245.251,00	
		7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja Perangkat daerah	8 Dokumen	7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase hasil perencanaan dan pelaporan yang dijadikan bahan evaluasi kinerja	100%	20.145.352,00	16.692.624,00	16.692.624,00	
		7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen penatausahaan keuangan perangkat daerah yang disusun	20 dokumen	7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase administrasi keuangan yang tertib, akuntabel dan tepat waktu	100%	2.711.922.360,00	3.221.547.360,00	3.221.547.360,00	
		7.01.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah dokumen penatausahaan BMD perangkat daerah yang disusun	3 dokumen	7.01.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase pengadministrasian Barang Milik Daerah (BMD) yang akurat lengkap dan mutakhir.	100%	2.896.776,00	2.896.776,00	5.596.776,00	Penambahan makanan dan minuman rapat
		7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya administrasi kepegawaian Perangkat Daerah	100%	7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pengelolaan dan pelayanan administrasi kepegawaian yang tepat waktu, mutakhir dan terdokumentasi	100%	8.703.420,00	8.703.420,00	17.406.840,00	Penambahan belanja kain batik/sasirangan untuk hari jadi tabalong
		7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase terpenuhinya administrasi umum perangkat daerah	100%	7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi umum yang terlaksana sesuai SOP	100%	300.643.268,00	184.553.924,00	203.003.924,00	Penambahan makanan dan minuman rapat (lintas sektor program prioritas) dan perjalanan dinas dalam kota (ke kabupaten)

NO	BIDANG URUSAN	SEBELUM (RKPD Induk 2025)			SESUDAH (RKPD Perubahan 2025)			PAGU		RKPD 2025 PERUBAHAN	ALASAN PERUBAHAN
		PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET	RKPD 2025 (Induk)	APBD INDUK 2025 dan PERGESERAN		
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah alat yang dibeli	3 unit	7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Realisasi Pengadaan Barang Milik Daerah yang sesuai dengan yang direncanakan	100%	319.861.223,00	225.916.373,00	264.261.963,00	Penambahan belanja kursi rapat,sofa dan tarup/tenda
		7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang difasilitasi/ disediakan	100%	208.889.452,00	208.850.552,00	208.850.552,00	
		7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik daerah yang dipelihara	34 unit	7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang yang dipelihara dan berfungsi sesuai kondisi standar	100%	864.885.212,00	864.885.212,00	864.885.212,00	
2	7.01 KECAMATAN	7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAA N PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase pelayanan kelembagaan sosial kemasyarakatan	80%	7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAA N PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase pelayanan kelembagaan sosial kemasyarakatan	85%	152.517.295,00	140.967.295,00	218.473.481,00	
		7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah laporan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan	5 laporan	7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah laporan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan	5 laporan	152.517.295,00	140.967.295,00	218.473.481,00	Penambahan untuk kegiatan kecamatan bershalawat (makan minum, dekor panggung,sewa sound sistem dll) dan Festival anak sholeh indonesia (FASI)
		7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase peningkatan kinerja aparatur,kapasitas aparatur dan tata kelola kewilayahan desa	75%	7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase peningkatan kinerja aparatur,kapasitas aparatur dan tata kelola kewilayahan desa	85%	90.054.730,00	61.854.730,00	99.569.530,00	
		7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah pemerintah desa yang dibina/diberdayakan	7 desa	7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah pemerintah desa yang dibina/diberdayakan	7 desa	21.100.000,00	9.900.000,00	21.150.000,00	Penambahan makanan dan minuman rapat

NO	BIDANG URUSAN	SEBELUM (RKPD Induk 2025)			SESUDAH (RKPD Perubahan 2025)			PAGU		RKPD 2025 PERUBAHAN	ALASAN PERUBAHAN
		PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET	RKPD 2025 (Induk)	APBD INDUK 2025 dan PERGESERAN		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		7.01.03.2.06 Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah keluarga yang diberdayakan/disejahterakan	1.544 keluarga	7.01.03.2.06 Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah keluarga yang diberdayakan/disejahterakan	1.544 keluarga	68.954.730,00	51.954.730,00	78.419.530,00	Penambahan makanan dan minuman aktivitas lapangan, bibit tanaman, batik tradisional
		7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Tingkat Penyelesaian pelanggaran K3 (Ketertiban, Keamanan dan Kenyamanan)	100%	7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Tingkat Penyelesaian pelanggaran K3 (Ketertiban, Keamanan dan Kenyamanan)	100%	107.920.952,00	55.879.852,00	56.204.852,00	
		7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah patroli terpadu tingkat kecamatan	12 patroli	7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah patroli terpadu tingkat kecamatan	12 patroli	107.920.952,00	55.879.852,00	56.204.852,00	Penambahan makanan dan minuman rapat dan narasumber dan pengurangan honor PPTK menyesuaikan pagu sub kegiatan
		7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase dokumen penyelenggaraan pemerintahan yang disusun tepat waktu	80%	7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase dokumen penyelenggaraan pemerintahan yang disusun tepat waktu	85%	147.209.736,00	127.489.736,00	144.209.736,00	
		7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah laporan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah	12 laporan	7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah laporan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah	12 laporan	147.209.736,00	127.489.736,00	144.209.736,00	Pergeseran belanja hari kesadaran, hadiah perlombaan dan penambahan uang harian petugas paskibra, penambahan makanan dan minuman hari jadi tabalong di kabupaten dan kecamatan
		7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	75%	7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	85%	39.923.744,00	28.723.744,00	40.470.544,00	

NO	BIDANG URUSAN	SEBELUM (RKPD Induk 2025)			SESUDAH (RKPD Perubahan 2025)			PAGU		RKPD 2025 PERUBAHAN	ALASAN PERUBAHAN
		PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET	RKPD 2025 (Induk)	APBD INDUK 2025 dan PERGESERAN		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah pemerintah desa yang dibina/di awasi	7 desa	7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah pemerintah desa yang dibina/di awasi	7 desa	39.923.744,00	28.723.744,00	40.470.544,00	Penambahan makanan dan minuman rapat
JUMLAH								4.975.573.520,00	5.148.961.598,00	5.361.173.394,00	
7.01.0.00.0.00.05.0000 KECAMATAN BANUA LAWAS											
1	X.XX. NON URUSAN	7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai AKIP	B	7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Predikat Nilai AKIP Perangkat Daerah	B	3.797.133.081,00	4.165.723.879,00	4.249.723.879,00	
		7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi Perangkat daerah yang disusun	8 Dokumen	7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase hasil perencanaan dan pelaporan yang dijadikan bahan evaluasi kinerja	100%	23.700.000,00	16.950.000,00	16.950.000,00	Pengurangan belanja Cetak
		7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen penatausahaan keuangan Perangkat Daerah yang disusun	20 Laporan	7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase administrasi keuangan yang tertib, akuntabel dan tepat waktu	100%	2.947.907.000,00	3.436.191.000,00	3.436.191.000,00	Penambahan PPH Pasal 21 Gaji dan Tunjangan serta Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja
		7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Terpenuhinya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi umum yang terlaksana sesuai SOP	100%	279.342.893,00	160.179.084,00	235.179.084,00	Efisiensi perjalanan dinas Biasa
		7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah alat yang dibeli	2 Unit	7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Realisasi Pengadaan Barang Milik Daerah yang sesuai dengan yang direncanakan	100%	173.703.854,00	163.759.261,00	163.759.261,00	
		7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang difasilitasi/ disediakan	100%	239.609.334,00	255.774.534,00	264.774.534,00	Penambahan anggaran belanja Listrik

NO	BIDANG URUSAN	SEBELUM (RKPD Induk 2025)			SESUDAH (RKPD Perubahan 2025)			PAGU		RKPD 2025 PERUBAHAN	ALASAN PERUBAHAN
		PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET	RKPD 2025 (Induk)	APBD INDUK 2025 dan PERGESERAN		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah yang di pelihara	48 Unit	7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang yang dipelihara dan berfungsi sesuai kondisi standar	100%	132.870.000,00	132.870.000,00	132.870.000,00	
2	7.01 KECAMATAN	7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Pelayanan Kelembagaan Sosial Kemasyarakatan	80%	7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Pelayanan Kelembagaan Sosial Kemasyarakatan	80%	268.494.700,00	169.658.680,00	232.408.680,00	
		7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah laporan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan	1 Laporan	7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah laporan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan	1 Laporan	234.864.700,00	156.158.680,00	168.908.680,00	Efisiensi perjalanan dinas dalam kota
		7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Jumlah Kegiatan Yang difasilitasi	3 Kegiatan	7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Jumlah Kegiatan Yang difasilitasi	3 Kegiatan	33.630.000,00	13.500.000,00	63.500.000,00	penambahan untk anggaran Kecamatan Banua Lawas Bershalawat
		7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Peningkatan Kinerja Aparatur, Kapasitas Aparatur dan Tata Kelola Kewilayah Desa	80%	7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Peningkatan Kinerja Aparatur, Kapasitas Aparatur dan Tata Kelola Kewilayah Desa	80%	90.939.442,00	71.279.442,00	77.579.442,00	
		7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Pemerintah Desa Yang Dibina dan diberdayakan	15 Desa	7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Pemerintah Desa Yang Dibina dan diberdayakan	15 Desa	25.200.000,00	7.200.000,00	7.200.000,00	Efisiensi perjalanan dinas dalam kota
		7.01.03.2.06 Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah TP PKK Desa yang Dibina	15 Desa	7.01.03.2.06 Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah TP PKK Desa yang Dibina	15 Desa	65.739.442,00	64.079.442,00	70.379.442,00	Penambahan anggaran belanja pakaian olahraga untuk HUT LANSIA

NO	BIDANG URUSAN	SEBELUM (RKPD Induk 2025)			SESUDAH (RKPD Perubahan 2025)			PAGU			ALASAN PERUBAHAN
		PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET	RKPD 2025 (Induk)	APBD INDUK 2025 dan PERGESERAN	RKPD 2025 PERUBAHAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3, Ketertiban, Ketentraman dan Kenyamanan	100%	7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3, Ketertiban, Ketentraman dan Kenyamanan	100%	77.270.000,00	50.800.000,00	50.800.000,00	
		7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Patroli Terpadu Tingkat Kecamatan	12 Patroli Terpadu	7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Patroli Terpadu Tingkat Kecamatan	12 Patroli Terpadu	77.270.000,00	50.800.000,00	50.800.000,00	Efisiensi perjalanan dinas dalam kota
		7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Dokumen Penyelenggaraan Pemerintahan yang disusun Tepat Waktu	80%	7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Dokumen Penyelenggaraan Pemerintahan yang disusun Tepat Waktu	80%	178.172.515,00	159.925.046,00	184.675.046,00	
		7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah laporan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah	1 Laporan	7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah laporan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah	1 Laporan	178.172.515,00	159.925.046,00	184.675.046,00	Penambahan anggaran untuk Hari Jadi Tabalong
		7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	80%	7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	80%	43.735.192,00	28.335.192,00	28.335.192,00	
		7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Pemerintah Desa yang di bina dan di awasi	15 Desa	7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Pemerintah Desa yang di bina dan di awasi	15 Desa	43.735.192,00	28.335.192,00	28.335.192,00	Efisiensi perjalanan dinas dalam kota
JUMLAH								4.455.744.930,00	4.645.722.239,00	4.823.522.239,00	

NO	BIDANG URUSAN	SEBELUM (RKPD Induk 2025)			SESUDAH (RKPD Perubahan 2025)			PAGU		RKPD 2025 PERUBAHAN	ALASAN PERUBAHAN
		PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET	RKPD 2025 (Induk)	APBD INDUK 2025 dan PERGESERAN		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.01.0.00.0.00.06.0000 KECAMATAN KELUA											
1	X.XX. NON URUSAN	7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat	A	7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Predikat Nilai AKIP Perangkat Daerah	A	5.569.520.084,00	5.819.614.047,00	6.212.483.647,00	
		7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi Perangkat daerah	15 Dok	7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase hasil perencanaan dan pelaporan yang dijadikan bahan evaluasi kinerja	100%	83.914.129,00	60.850.608,00	60.850.608,00	
		7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya penatausahaan keuangan Perangkat Daerah	12 Dok	7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase administrasi keuangan yang tertib, akuntabel dan tepat waktu	100%	3.862.121.820,00	4.450.890.969,00	4.450.890.969,00	Penambahan pagu karena Pajak PPH kurang untuk pembayaran Gaji dan Tunjangan
		7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya kegiatan administrasi umum	100%	7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi umum yang terlaksana sesuai SOP	100%	806.343.637,00	465.859.248,00	668.975.235,00	Penambahan dan Pergeseran Antar Kegiatan
		7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya barang milik daerah	5 unit	7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Realisasi Pengadaan Barang Milik Daerah yang sesuai dengan yang direncanakan	100%	31.773.090,00	40.604.541,00	269.989.397,00	Penambahan dan Pergeseran Antar Kegiatan
		7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan	12 Bln	7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang difasilitasi/ disediakan	100%	389.663.488,00	430.333.488,00	489.566.263,00	Penambahan dan Pergeseran Antar Kegiatan
		7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang yang dipelihara dan berfungsi sesuai kondisi standar	100%	395.703.920,00	371.075.193,00	272.211.175,00	Penambahan dan Pergeseran Antar Kegiatan
2	7.01 KECAMATAN	7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAA N PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Pelayanan Kelembagaan Sosial Kemasyarakatan	74%	7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAA N PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	PERSENTASE PELAYANAN KELEMBAGAAN SOSIAL KEMASYARAKATAN	85%	179.097.306,00	270.174.263,00	496.804.663,00	

NO	BIDANG URUSAN	SEBELUM (RKPD Induk 2025)			SESUDAH (RKPD Perubahan 2025)			PAGU		RKPD 2025 PERUBAHAN	ALASAN PERUBAHAN
		PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET	RKPD 2025 (Induk)	APBD INDUK 2025 dan PERGESERAN		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1 keg	7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	12 Kel/ Desa	173.697.306,00	268.374.263,00	495.004.663,00	Penambahan dan Pergeseran Antar Kegiatan
		7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Terselenggaranya Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	1 keg	7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	3 Kegiatan	5.400.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	
		7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Peningkatan Kinerja Aparatur, Kapasitas Aparatur dan Tata Kelola Kewilayahan Desa	75,8%	7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	PERSENTASE PENINGKATAN KINERJA APARATUR, KAPASITAS APARATUR DAN TATA KELOLA KEWILAYAHAN DESA	85%	746.763.693,00	704.401.644,00	714.901.644,00	
		7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Terlaksananya koordinasi kegiatan pemberdayaan desa	1 keg	7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Pemerintah Desa yang dibina/ diberdayakan	12 Kel/ Desa	128.005.879,00	43.928.693,00	43.928.693,00	
		7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Terlaksananya kegiatan pemberdayaan kelurahan	1 keg	7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Pemerintah Kelurahan yang dibina dan diberdayakan	1 PKK	442.784.706,00	660.472.951,00	670.972.951,00	Penambahan dan Pergeseran Antar Kegiatan
		7.01.03.2.06 Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Terlaksananya Keluarga yang Mengikuti Pertumbuhan dan Peningkatan Kesadaran dalam Keluarga dalam Ketertiban Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	1 keg	7.01.03.2.06 Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan			175.973.108,00	0,00	0,00	

NO	BIDANG URUSAN	SEBELUM (RKPD Induk 2025)			SESUDAH (RKPD Perubahan 2025)			PAGU		RKPD 2025 PERUBAHAN	ALASAN PERUBAHAN
		PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET	RKPD 2025 (Induk)	APBD INDUK 2025 dan PERGESERAN		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman & Keamanan)	98%	7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman dan Keamanan)	100%	32.385.000,00	30.885.000,00	30.885.000,00	
		7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Terlaksananya Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	1 keg	7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Patroli Terpadu Tingkat Kecamatan	12 Patroli Terpadu	32.385.000,00	30.885.000,00	30.885.000,00	
		7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase dokumen penyelenggaraan pemerintahan yang disusun tepat waktu	82%	7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	PERSENTASE DOKUMEN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN YANG DISUSUN TEPAT WAKTU	85%	264.147.064,00	249.443.770,00	249.443.770,00	
		7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Terlaksananya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	1 keg	7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Pelaporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	12 Laporan	264.147.064,00	249.443.770,00	249.443.770,00	
		7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	85%	7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	PERSENTASE PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	85%	190.947.606,00	61.747.567,00	61.747.567,00	
		7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Terlaksananya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	1 Keg	7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Pemerintahan Desa yang dibina dan diawasi	12 Kel/ Desa	190.947.606,00	61.747.567,00	61.747.567,00	
JUMLAH								6.982.860.753,00	7.136.266.291,00	7.766.266.291,00	

NO	BIDANG URUSAN	SEBELUM (RKPD Induk 2025)			SESUDAH (RKPD Perubahan 2025)			PAGU		RKPD 2025 PERUBAHAN	ALASAN PERUBAHAN
		PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET	RKPD 2025 (Induk)	APBD INDUK 2025 dan PERGESERAN		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.01.0.00.0.00.07.0000 KECAMATAN PUGAAN											
1	X.XX. NON URUSAN	7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai AKIP	B	7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Predikat Nilai AKIP Perangkat Daerah	B	3.657.216.692,00	3.878.533.468,00	3.998.102.100,00	
		7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi perangkat daerah yang disusun	8 Dokumen	7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase hasil perencanaan dan pelaporan yang dijadikan bahan evaluasi kinerja	100%	26.402.728,00	16.202.728,00	16.202.728,00	Efisiensi Perjalanan Dinas
		7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen penatausahaan keuangan perangkat daerah yang disusun	20 Dokumen	7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase administrasi keuangan yang tertib, akuntabel dan tepat waktu	100%	2.822.629.186,00	3.199.964.186,00	3.299.964.186,00	Penambahan PPH 21 untuk Gaji dan Tunjangan
		7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase terpenuhinya administrasi umum perangkat daerah	100%	7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi umum yang terlaksana sesuai SOP	100%	311.125.185,00	278.951.053,00	308.644.685,00	Efisiensi Perjalanan Dinas
		7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase tersedianya jasa penunjang perangkat daerah	100%	7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang difasilitasi/ disediakan	100%	245.118.093,00	271.685.501,00	261.560.501,00	Pengurangan Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh
		7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah yang di pelihara	40 Unit	7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang yang dipelihara dan berfungsi sesuai kondisi standar	100%	251.941.500,00	111.730.000,00	111.730.000,00	Pengurangan belanja pemeliharaan AC
2	7.01 KECAMATAN	7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAA N PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase pelayanan kelembagaan sosial kemasyarakatan	85%	7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAA N PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase pelayanan kelembagaan sosial kemasyarakatan	85%	152.053.491,00	153.467.500,00	207.218.184,00	
		7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah laporan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan	3 Laporan	7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah laporan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan	3 Laporan	152.053.491,00	153.467.500,00	207.218.184,00	Penambahan untuk Kegiatan MTQ dan Kecamatan Bershalawat

NO	BIDANG URUSAN	SEBELUM (RKPD Induk 2025)			SESUDAH (RKPD Perubahan 2025)			PAGU		RKPD 2025 PERUBAHAN	ALASAN PERUBAHAN
		PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET	RKPD 2025 (Induk)	APBD INDUK 2025 dan PERGESERAN		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase peningkatan kinerja aparatur, kapasitas aparatur dan tata kelola kewilayahan desa	80%	7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase peningkatan kinerja aparatur, kapasitas aparatur dan tata kelola kewilayahan desa	80%	105.624.075,00	71.684.925,00	67.984.925,00	
		7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah pemerintahan desa yang di bina/ diberdayakan	7 Desa	7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah pemerintahan desa yang di bina/ diberdayakan	7 Desa	18.599.000,00	10.800.000,00	10.800.000,00	Efisiensi Perjalanan Dinas
		7.01.03.2.06 Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga tingkat kecamatan yang di bina/ diberdayakan	7 Desa	7.01.03.2.06 Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga tingkat kecamatan yang di bina/ diberdayakan	7 Desa	87.025.075,00	60.884.925,00	57.184.925,00	Efisiensi Perjalanan Dinas
		7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase tingkat penyelesaian K3 (ketertiban, keamanan dan kenyamanan)	100%	7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase tingkat penyelesaian K3 (ketertiban, keamanan dan kenyamanan)	100%	37.970.000,00	33.970.000,00	35.470.000,00	
		7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah patroli terpadu tingkat kecamatan	7 desa	7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah patroli terpadu tingkat kecamatan	7 desa	37.970.000,00	33.970.000,00	35.470.000,00	Efisiensi Perjalanan Dinas
		7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase layanan umum lainnya tepat waktu	85%	7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase layanan umum lainnya tepat waktu	85%	193.401.778,00	200.194.558,00	238.479.802,00	
		7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah laporan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah	1 Laporan	7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah laporan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah	1 Laporan	193.401.778,00	200.194.558,00	238.479.802,00	Penambahan Kegiatan Hari Jadi Tabalong
		7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase pembinaan dan pengawasan desa	80%	7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase pembinaan dan pengawasan desa	80%	80.126.342,00	53.145.192,00	59.645.192,00	

NO	BIDANG URUSAN	SEBELUM (RKPD Induk 2025)			SESUDAH (RKPD Perubahan 2025)			PAGU		RKPD 2025 PERUBAHAN	ALASAN PERUBAHAN
		PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET	RKPD 2025 (Induk)	APBD INDUK 2025 dan PERGESERAN		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Pemerintah Desa yang di bina dan di awasi	7 Desa	7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Pemerintah Desa yang di bina dan di awasi	7 Desa	80.126.342,00	53.145.192,00	59.645.192,00	Efisiensi Perjalanan Dinas
JUMLAH								4.226.392.378,00	4.390.995.643,00	4.606.900.203,00	
7.01.0.00.0.00.08.0000 KECAMATAN JARO											
1	X.XX. NON URUSAN	7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai AKIP	BB (8B)	7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Predikat Nilai AKIP Perangkat Daerah	BB (8B)	3.422.205.542,00	3.622.175.225,00	3.769.207.257,00	Bertambah
		7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan evaluasi perangkat daerah yang disusun	10 Dokumen	7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase hasil perencanaan dan pelaporan yang dijadikan bahan evaluasi kinerja	100%	23.922.728,00	21.072.728,00	21.072.728,00	
		7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	jumlah Dokumen penatausahaan keuangan perangkat daerah yg disusun	20 Dokumen	7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase administrasi keuangan yang tertib, akuntabel dan tepat waktu	100%	2.667.892.000,00	3.069.989.000,00	3.069.989.000,00	
		7.01.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	10 Dokumen	7.01.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase pengadministrasian Barang Milik Daerah (BMD) yang akurat lengkap dan mutakhir.	100%	2.319.136,00	829.120,00	829.120,00	
		7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Terpenuhinya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi umum yang terlaksana sesuai SOP	100%	339.758.178,00	140.878.877,00	230.183.589,00	Bertambah
		7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Yang dibeli	5 Unit	7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Realisasi Pengadaan Barang Milik Daerah yang sesuai dengan yang direncanakan	100%	46.000.000,00	23.000.000,00	80.727.320,00	Bertambah

NO	BIDANG URUSAN	SEBELUM (RKPD Induk 2025)			SESUDAH (RKPD Perubahan 2025)			PAGU		RKPD 2025 PERUBAHAN	ALASAN PERUBAHAN
		PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET	RKPD 2025 (Induk)	APBD INDUK 2025 dan PERGESERAN		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	80%	7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang difasilitasi/ disediakan	100%	231.670.500,00	255.762.500,00	255.762.500,00	
		7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Unit yang dipelihara dalam rangka Pemeliharaan Barang Milik Daerah	34 Unit	7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang yang dipelihara dan berfungsi sesuai kondisi standar	100%	110.643.000,00	110.643.000,00	110.643.000,00	
2	7.01 KECAMATAN	7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAA N PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Terselenggaranya Kegiatan Kesejahteraan Masyarakat	85%	7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAA N PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Terselenggaranya Kegiatan Kesejahteraan Masyarakat	85%	87.705.400,00	78.565.400,00	85.261.400,00	Bertambah
		7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah laporan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan	70,00%	7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah laporan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan	1 Laporan	87.705.400,00	78.565.400,00	85.261.400,00	Bertambah
		7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Peningkatan Kinerja Aparatur,Kapasitas aparatur dan tata kelola Kewilayahan Desa	85%	7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Peningkatan Kinerja Aparatur,Kapasitas aparatur dan tata kelola Kewilayahan Desa	85%	94.322.600,00	42.583.600,00	74.380.600,00	Bertambah
		7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Pemerintahan Desa Yang dibina/ diberdayakan	9 desa	7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Pemerintahan Desa Yang dibina/ diberdayakan	9 Desa	35.634.600,00	26.549.000,00	56.996.000,00	Bertambah
		7.01.03.2.06 Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Terlaksananya 10 Program Pokok PKK Kecamatan	100%	7.01.03.2.06 Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Terlaksananya 10 Program Pokok PKK Kecamatan	100%	58.688.000,00	16.034.600,00	17.384.600,00	Bertambah

NO	BIDANG URUSAN	SEBELUM (RKPD Induk 2025)			SESUDAH (RKPD Perubahan 2025)			PAGU			ALASAN PERUBAHAN
		PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET	RKPD 2025 (Induk)	APBD INDUK 2025 dan PERGESERAN	RKPD 2025 PERUBAHAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Tingkat Penyelesaian Penyelenggaraan K3 (Ketertiban, Keamanan dan Kenyamanan)	80%	7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Tingkat Penyelesaian Penyelenggaraan K3 (Ketertiban, Keamanan dan Kenyamanan)	80%	51.000.000,00	44.650.000,00	44.650.000,00	
		7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Laporan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	9 laporan	7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Laporan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	9 Laporan	51.000.000,00	44.650.000,00	44.650.000,00	
		7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAA N URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase layanan Umum Lainnya Tepat Waktu	85%	7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAA N URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase layanan Umum Lainnya Tepat Waktu	85%	106.010.000,00	103.557.760,00	159.520.075,00	Bertambah
		7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	12 dokumen	7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah laporan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah	1 Laporan	106.010.000,00	103.557.760,00	159.520.075,00	Bertambah
		7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Desa	85%	7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Desa	85%	87.180.392,00	64.990.392,00	66.490.392,00	Bertambah
		7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	9 dokumen	7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	9 Dokumen	87.180.392,00	64.990.392,00	66.490.392,00	Bertambah
		JUMLAH							3.848.423.934,00	3.956.522.377,00	4.199.509.724,00

NO	BIDANG URUSAN	SEBELUM (RKPD Induk 2025)			SESUDAH (RKPD Perubahan 2025)			PAGU		RKPD 2025 PERUBAHAN	ALASAN PERUBAHAN
		PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET	RKPD 2025 (Induk)	APBD INDUK 2025 dan PERGESERAN		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.01.0.00.0.00.09.0000 KECAMATAN MUARA UYA											
1	X.XX. NON URUSAN	7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai AKIP	BB (80)	7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Predikat Nilai AKIP Perangkat Daerah	BB (80)	5.423.467.281,00	5.508.477.134,00	5.721.686.976,00	
		7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi Perangkat daerah yang disusun	8 Dokumen	7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase hasil perencanaan dan pelaporan yang dijadikan bahan evaluasi kinerja	100%	48.770.920,00	44.770.920,00	38.596.920,00	Berkurang
		7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen penatausahaan keuangan Perangkat Daerah yang disusun	20 Dokumen	7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase administrasi keuangan yang tertib, akuntabel dan tepat waktu	100%	2.713.431.752,00	2.967.194.752,00	3.023.809.747,00	Bertambah
		7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Terpenuhinya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi umum yang terlaksana sesuai SOP	100%	529.186.679,00	328.592.781,00	275.922.993,00	Berkurang
		7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah barang milik daerah yang dibeli	15 Unit	7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Realisasi Pengadaan Barang Milik Daerah yang sesuai dengan yang direncanakan	100%	659.084.277,00	922.093.238,00	549.090.221,00	Berkurang
		7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Tersedianya Jasa Penunjang urusan pemerintah daerah	100%	7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang difasilitasi/ disediakan	100%	280.748.000,00	353.579.790,00	351.945.242,00	Berkurang
		7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah yang di pelihara	35 Unit	7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang yang dipelihara dan berfungsi sesuai kondisi standar	100%	1.192.245.653,00	892.245.653,00	1.482.321.853,00	Bertambah
2	7.01 KECAMATAN	7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAA N PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Pelayanan kelembagaan Sosial Kemasyarakatan	85%	7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAA N PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Pelayanan kelembagaan Sosial Kemasyarakatan	85%	118.722.194,00	102.538.740,00	173.808.606,00	Bertambah

NO	BIDANG URUSAN	SEBELUM (RKPD Induk 2025)			SESUDAH (RKPD Perubahan 2025)			PAGU		RKPD 2025 PERUBAHAN	ALASAN PERUBAHAN
		PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET	RKPD 2025 (Induk)	APBD INDUK 2025 dan PERGESERAN		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah laporan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan	3 Laporan	7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah laporan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan	3 Laporan	98.154.034,00	84.454.034,00	161.986.034,00	Bertambah
		7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Terselenggaranya Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	1 keg	7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Terselenggaranya Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	1 keg	20.568.160,00	18.084.706,00	11.822.572,00	Berkurang
		7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	P:ersentase Peningkatan Kinerja Aparatur, Kapasitas aparatur dan Tata Kelola Kewilayahan Desa	85%	7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	P:ersentase Peningkatan Kinerja Aparatur, Kapasitas aparatur dan Tata Kelola Kewilayahan Desa	85%	186.101.344,00	171.541.344,00	154.436.436,00	
		7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah pemerintahan desa yang dibina/diberdayakan	14 Desa	7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah pemerintahan desa yang dibina/diberdayakan	14 Desa	23.816.200,00	21.816.200,00	7.732.800,00	Berkurang
		7.01.03.2.06 Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga tingkat kecamatan yang di bina/diberdayakan	14 Desa	7.01.03.2.06 Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga tingkat kecamatan yang di bina/diberdayakan	14 Desa	162.285.144,00	149.725.144,00	146.703.636,00	Berkurang
		7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Keamanan dan Kenyamanan)	100%	7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Keamanan dan Kenyamanan)	100%	101.436.000,00	83.436.000,00	70.227.600,00	
		7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Patroli Terpadu Tingkat Kecamatan	14 Patroli Terpadu	7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Patroli Terpadu Tingkat Kecamatan	14 Patroli Terpadu	101.436.000,00	83.436.000,00	70.227.600,00	Berkurang

NO	BIDANG URUSAN	SEBELUM (RKPD Induk 2025)			SESUDAH (RKPD Perubahan 2025)			PAGU		RKPD 2025 PERUBAHAN	ALASAN PERUBAHAN
		PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET	RKPD 2025 (Induk)	APBD INDUK 2025 dan PERGESERAN		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Layanan Umum Lainnya Tepat Waktu	85%	7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Layanan Umum Lainnya Tepat Waktu	85%	382.413.349,00	318.868.349,00	290.175.949,00	
		7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah laporan penyelenggaraan urusan pemerintahan	1 Laporan	7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah laporan penyelenggaraan urusan pemerintahan	1 Laporan	382.413.349,00	318.868.349,00	290.175.949,00	Berkurang
		7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Desa	85%	7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Desa	85%	89.999.992,00	79.979.992,00	75.505.992,00	
		7.01.06.2.01 Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Pemerintah Desa yang di bina dan di awasi	14 Desa	7.01.06.2.01 Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Pemerintah Desa yang di bina dan di awasi	14 Desa	89.999.992,00	79.979.992,00	75.505.992,00	Berkurang
JUMLAH								6.302.140.160,00	6.264.841.559,00	6.485.841.559,00	
7.01.0.00.0.00.10.0000 KECAMATAN HARUAI											
1	X.XX. NON URUSAN	7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai AKIP	BB (80)	7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Predikat Nilai AKIP Perangkat Daerah	BB	3.501.967.668,00	3.681.689.457,00	4.233.501.135,00	

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
Kabupaten Tabalong Tahun 2025

NO	BIDANG URUSAN	SEBELUM (RKPD Induk 2025)			SESUDAH (RKPD Perubahan 2025)			PAGU		RKPD 2025 PERUBAHAN	ALASAN PERUBAHAN
		PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET	RKPD 2025 (Induk)	APBD INDUK 2025 dan PERGESERAN		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi Perangkat daerah	8 Dokumen	7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase hasil perencanaan dan pelaporan yang dijadikan bahan evaluasi kinerja	100%	16.365.552,00	15.065.552,00	15.065.552,00	total pagu pada kegiatan perencanaan penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah tetap, namun terjadi pergeseran pagu antar sub kegiatan pada RKPD perubahan Tahun anggaran 2025 (seperti Pergeseran Belanja Makan Minum Rapat, Belanja Fotocopy dll).
		7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan penatausahaan keuangan perangkat daerah yang disusun	20 laporan	7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase administrasi keuangan yang tertib, akuntabel dan tepat waktu	100%	2.367.561.823,00	2.687.612.395,00	2.687.612.395,00	terjadi Penambahan pada anggaran Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN seperti Penambahan PPH Pasal 21 dan Perhitungan Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja ASN
		7.01.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah dokumen penatausahaan BMD perangkat daerah yang disusun	3 dokumen	7.01.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase pengadministrasian Barang Milik Daerah (BMD) yang akurat lengkap dan mutakhir.	100%	1.800.216,00	1.800.216,00	1.800.216,00	-

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
Kabupaten Tabalong Tahun 2025

NO	BIDANG URUSAN	SEBELUM (RKPD Induk 2025)			SESUDAH (RKPD Perubahan 2025)			PAGU		RKPD 2025 PERUBAHAN	ALASAN PERUBAHAN
		PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET	RKPD 2025 (Induk)	APBD INDUK 2025 dan PERGESERAN		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase terpenuhinya administrasi umum perangkat daerah	100%	7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi umum yang terlaksana sesuai SOP	100%	298.009.651,00	156.169.964,00	202.619.373,00	Penyesuaian Kebutuhan pada sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD, Penambahan Spanduk pada sub kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan, Penambahan dan Penyesuaian pada Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
		7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah barang milik daerah yang dibeli	3 unit	7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Realisasi Pengadaan Barang Milik Daerah yang sesuai dengan yang direncanakan	100%	167.294.434,00	146.387.330,00	473.967.689,00	Tambahan Pengadaan Lemari arsip, Tambahan Fasilitas untuk gedung baru Kantor kecamatan Haruai seperti Belanja Filling Kabinet, CCTV Kantor Kecamatan, Belanja AC, Kulkas, display ruang aula, Dispenser, Personal Computer, scanner ADF dll

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
Kabupaten Tabalong Tahun 2025

NO	BIDANG URUSAN	SEBELUM (RKPD Induk 2025)			SESUDAH (RKPD Perubahan 2025)			PAGU		RKPD 2025 PERUBAHAN	ALASAN PERUBAHAN
		PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET	RKPD 2025 (Induk)	APBD INDUK 2025 dan PERGESERAN		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang difasilitasi/ disediakan	100%	308.511.200,00	346.230.000,00	471.558.044,00	Penambahan Penyediaan Karangan Bunga, Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH), Kemudian Belanja Batik Tradisional untuk kegiatan Hari Jadi Kabupaten Tabalong, Untuk kegiatan Peresmian Gedung Kantor Baru Kecamatan Haruai bertempat di Desa Nawin Kec Haruai, Penambahan Tagihan Listrik (untuk memenuhi kekurangan anggaran Pembayaran Listrik Pada APBD Induk 2025).
		7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik daerah yang dipelihara	31 unit	7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang yang dipelihara dan berfungsi sesuai kondisi standar	100%	342.424.792,00	328.424.000,00	380.877.866,00	Penambahan Honorarium PPTK pada sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan, Pengadaan Gorden Kantor, Pemasangan tralis (keamanan gedung baru kantor kecamatan Haruai), Pembangunan Fasilitas Tempat Parkir gedung baru kecamatan Haruai, dll.

NO	BIDANG URUSAN	SEBELUM (RKPD Induk 2025)			SESUDAH (RKPD Perubahan 2025)			PAGU		RKPD 2025 PERUBAHAN	ALASAN PERUBAHAN
		PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET	RKPD 2025 (Induk)	APBD INDUK 2025 dan PERGESERAN		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	7.01 KECAMATAN	7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	80%	7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	85%	80.149.400,00	75.149.400,00	172.351.680,00	
		7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah laporan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan	3 laporan	7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah laporan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan	5 laporan	80.149.400,00	75.149.400,00	172.351.680,00	Penambahan pada Kegiatan Haruai bershalawat dan Kegiatan Musabaqah tilawatil Qur'an
		7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase peningkatan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	85%	7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase peningkatan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	85%	53.139.000,00	41.039.000,00	40.040.000,00	
		7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah pemerintah desa yang dibina/diberdayakan	13 desa	7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah pemerintah desa yang dibina/diberdayakan	13 desa	13.040.000,00	10.440.000,00	10.440.000,00	-
		7.01.03.2.06 Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah Keluarga yang diberdayakan/ disejahterakan	9021 Keluarga	7.01.03.2.06 Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah Keluarga yang diberdayakan/ disejahterakan	9021 Keluarga	40.099.000,00	30.599.000,00	29.600.000,00	Penyesuaian (efisiensi) Perjalanan Dinas Ke Desa.
		7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (Ketertiban, ketentraman dan kenyamanan)	100%	7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (Ketertiban, ketentraman dan kenyamanan)	100%	41.840.000,00	39.240.000,00	39.240.000,00	
		7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah laporan hasil upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum	12 laporan	7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah laporan hasil upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum	12 laporan	41.840.000,00	39.240.000,00	39.240.000,00	Penyesuaian (efisiensi) Perjalanan Dinas Ke Desa.

NO	BIDANG URUSAN	SEBELUM (RKPD Induk 2025)			SESUDAH (RKPD Perubahan 2025)			PAGU		RKPD 2025 PERUBAHAN	ALASAN PERUBAHAN
		PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET	RKPD 2025 (Induk)	APBD INDUK 2025 dan PERGESERAN		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAA N URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase dokumen penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang disusun tepat waktu	80%	7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAA N URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase dokumen penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang disusun tepat waktu	80%	103.976.000,00	99.176.000,00	99.176.000,00	
		7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah dokumen laporan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah	2 dokumen	7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah dokumen laporan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah	2 dokumen	103.976.000,00	99.176.000,00	99.176.000,00	-
		7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	85%	7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	85%	40.296.192,00	37.396.192,00	38.564.808,00	
		7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah dokumen fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	12 dokumen	7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah dokumen fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	12 dokumen	40.296.192,00	37.396.192,00	38.564.808,00	Penambahan Belanja makan minum rapat pada sub kegiatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa
JUMLAH								3.821.368.260,00	3.973.690.049,00	4.622.873.623,00	
7.01.0.00.0.00.11.0000 KECAMATAN UPAU											
1	X.XX. NON URUSAN	7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai AKIP	B	7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Predikat Nilai AKIP Perangkat Daerah	B	2.679.967.885,00	3.514.229.399,00	3.770.764.333,00	Penyesuaian anggaran berdasarkan kebutuhan aktual pelaksanaan program dan efisiensi belanja operasional perangkat daerah.

NO	BIDANG URUSAN	SEBELUM (RKPD Induk 2025)			SESUDAH (RKPD Perubahan 2025)			PAGU		RKPD 2025 PERUBAHAN	ALASAN PERUBAHAN
		PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET	RKPD 2025 (Induk)	APBD INDUK 2025 dan PERGESERAN		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi Perangkat daerah yang disusun	8 Laporan	7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase hasil perencanaan dan pelaporan yang dijadikan bahan evaluasi kinerja	100%	19.580.040,00	19.395.000,00	19.395.000,00	Tidak ada perubahan target dan pagu, hanya penyesuaian nomenklatur anggaran.
		7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen penatausahaan keuangan Perangkat Daerah yang disusun	20 Laporan	7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase administrasi keuangan yang tertib, akuntabel dan tepat waktu	100%	1.901.231.003,00	2.895.176.236,00	2.990.176.236,00	Penambahan anggaran untuk peningkatan kualitas administrasi keuangan perangkat daerah.
		7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Terpenuhinya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi umum yang terlaksana sesuai SOP	100%	313.756.986,00	170.541.986,00	336.233.404,00	Penyesuaian pagu akibat revisi kebutuhan dukungan administrasi umum perangkat daerah.
		7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		100%	7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			65.453.679,00	0,00	0,00	Kegiatan tidak dilanjutkan pada perubahan RKPD karena efisiensi anggaran.
		7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang difasilitasi/ disediakan	100%	248.720.000,00	297.890.000,00	261.460.750,00	Penyesuaian pagu untuk efisiensi kegiatan jasa penunjang.
		7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah yang di pelihara	11 Unit	7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang yang dipelihara dan berfungsi sesuai kondisi standar	100%	131.226.177,00	131.226.177,00	163.498.943,00	Kegiatan tidak dilanjutkan pada perubahan RKPD karena efisiensi anggaran.
2	7.01 KECAMATAN	7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAA N PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Pelayanan Kelembagaan Sosial Kemasyarakatan	80%	7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAA N PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Pelayanan Kelembagaan Sosial Kemasyarakatan	80%	1.639.372.912,00	1.601.217.912,00	2.722.667.761,00	Penambahan pagu untuk mendukung optimalisasi pelayanan kelembagaan sosial kemasyarakatan.

NO	BIDANG URUSAN	SEBELUM (RKPD Induk 2025)			SESUDAH (RKPD Perubahan 2025)			PAGU		RKPD 2025 PERUBAHAN	ALASAN PERUBAHAN
		PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET	RKPD 2025 (Induk)	APBD INDUK 2025 dan PERGESERAN		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah laporan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan	1 Laporan	7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah laporan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan	1 Laporan	1.639.372.912,00	1.601.217.912,00	2.722.667.761,00	Penambahan pagu untuk mendukung optimalisasi pelayanan kelembagaan sosial kemasyarakatan.
		7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Peningkatan Kinerja Aparatur, Kapasitas aparatur dan Tata Kelola Kewilayah	80%	7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Peningkatan Kinerja Aparatur, Kapasitas aparatur dan Tata Kelola Kewilayah	80%	68.318.500,00	59.175.000,00	93.235.000,00	Penambahan pagu untuk mendukung optimalisasi pelayanan kelembagaan sosial kemasyarakatan.
		7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Pemerintahan Desa yang di bina dan berdayakan	6 Desa	7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Pemerintahan Desa yang di bina dan berdayakan	6 Desa	12.163.500,00	7.080.000,00	7.080.000,00	Tidak ada perubahan nilai pagu.
		7.01.03.2.06 Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	2000 Keluarga	7.01.03.2.06 Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	2000 Keluarga	56.155.000,00	52.095.000,00	86.155.000,00	Penambahan anggaran untuk peningkatan jumlah keluarga penerima manfaat program.
		7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Tingkat Penyelesaian K3 (Ketertiban, Keamanan dan Kenyamanan)	100%	7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Tingkat Penyelesaian K3 (Ketertiban, Keamanan dan Kenyamanan)	100%	43.065.000,00	38.350.000,00	38.350.000,00	Tidak ada perubahan target dan anggaran.
		7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Patroli Terpadu Tingkat Kecamatan	12 Patroli Terpadu	7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Patroli Terpadu Tingkat Kecamatan	12 Patroli Terpadu	43.065.000,00	38.350.000,00	38.350.000,00	Tidak ada perubahan anggaran dan target.

NO	BIDANG URUSAN	SEBELUM (RKPD Induk 2025)			SESUDAH (RKPD Perubahan 2025)			PAGU		RKPD 2025 PERUBAHAN	ALASAN PERUBAHAN
		PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET	RKPD 2025 (Induk)	APBD INDUK 2025 dan PERGESERAN		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Dokumen Penyelenggaraan Pemerintahan yang di susun tepat Waktu	80%	7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Dokumen Penyelenggaraan Pemerintahan yang di susun tepat Waktu	80%	149.601.060,00	140.611.060,00	297.748.060,00	Penambahan pagu untuk mendukung pelaksanaan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah.
		7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah laporan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah	1 Laporan	7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah laporan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah	1 Laporan	149.601.060,00	140.611.060,00	297.748.060,00	Penambahan pagu untuk mendukung pelaksanaan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah.
		7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	80%	7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	80%	94.868.728,00	55.257.292,00	55.257.292,00	Efisiensi anggaran berdasarkan evaluasi realisasi tahun sebelumnya.
		7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Pemerintah Desa yang di bina dan di awasi	6 Desa	7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Pemerintah Desa yang di bina dan di awasi	6 Desa	94.868.728,00	55.257.292,00	55.257.292,00	Tidak ada perubahan anggaran dan target, tetap efisien.
JUMLAH								4.675.194.085,00	5.408.840.663,00	6.978.022.446,00	
7.01.0.00.0.00.12.0000 KECAMATAN BINTANG ARA											
1	X.XX. NON URUSAN	7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai AKIP	B	7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Predikat Nilai AKIP Perangkat Daerah	B	3.007.025.162,00	3.364.762.026,00	3.548.270.026,00	
		7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi Perangkat daerah yang disusun	8 Laporan	7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase hasil perencanaan dan pelaporan yang dijadikan bahan evaluasi kinerja	100%	19.629.000,00	16.696.864,00	14.446.864,00	

NO	BIDANG URUSAN	SEBELUM (RKPD Induk 2025)			SESUDAH (RKPD Perubahan 2025)			PAGU		RKPD 2025 PERUBAHAN	ALASAN PERUBAHAN
		PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET	RKPD 2025 (Induk)	APBD INDUK 2025 dan PERGESERAN		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen penatausahaan keuangan Perangkat Daerah yang disusun	20 Laporan	7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase administrasi keuangan yang tertib, akuntabel dan tepat waktu	100%	2.413.606.000,00	2.771.523.000,00	2.851.523.000,00	
		7.01.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah dokumen penatausahaan BMD Perangkat Daerah yang disusun	3 Laporan	7.01.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase pengadministrasian Barang Milik Daerah (BMD) yang akurat lengkap dan mutakhir.	100%	1.813.000,00	1.813.000,00	1.813.000,00	
		7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Terpenuhinya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi umum yang terlaksana sesuai SOP	100%	136.683.128,00	124.165.128,00	140.585.847,00	
		7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah alat yang dibeli	15 unit	7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Realisasi Pengadaan Barang Milik Daerah yang sesuai dengan yang direncanakan	100%	85.137.719,00	85.137.719,00	0,00	
		7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang difasilitasi/disediakan	100%	218.916.790,00	234.186.790,00	224.211.790,00	
		7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah yang di pelihara	35 unit	7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang yang dipelihara dan berfungsi sesuai kondisi standar	100%	131.239.525,00	131.239.525,00	315.689.525,00	
2	7.01 KECAMATAN	7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAA N PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Pelayanan Kelembagaan Sosial Kemasyarakatan	80%	7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAA N PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya kualitas dan ketepatan pelaporan penyelenggaraan pemerintahan/Persentase Pelayanan Kelembagaan Sosial Kemasyarakatan	80%	100.795.000,00	90.371.000,00	131.697.000,00	

NO	BIDANG URUSAN	SEBELUM (RKPD Induk 2025)			SESUDAH (RKPD Perubahan 2025)			PAGU		RKPD 2025 PERUBAHAN	ALASAN PERUBAHAN
		PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET	RKPD 2025 (Induk)	APBD INDUK 2025 dan PERGESERAN		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah laporan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan	3 Laporan	7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan	100%	100.795.000,00	90.371.000,00	131.697.000,00	
		7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase peningkatan kinerja aparatur, kapasitas aparatur dan tata kelola kewilayahan desa	80%	7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa/kelurahan/Pe rsentase peningkatan kinerja aparatur, kapasitas aparatur dan tata kelola	80%	55.844.000,00	29.550.000,00	51.996.477,00	
		7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah usulan masyarakat yang diakomodir	9 desa	7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase terlaksanya Koordinasi Kegiatan Koordinasi Pemberdayaan Desa	85%	27.344.000,00	6.750.000,00	6.750.000,00	
		7.01.03.2.06 Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah TP PKK Desa yangg dibina	9 Desa	7.01.03.2.06 Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Persentase terlaksananya Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	80%	28.500.000,00	22.800.000,00	45.246.477,00	
		7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Tingkat Penyelesaian pelanggaran K3 (Ketertiban, Keamanan dan Kenyamanan)	100%	7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan meningkat	100%	60.214.000,00	42.970.000,00	46.570.000,00	
		7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Patroli Terpadu Tingkat Kecamatan	12 Patroli Terpadu	7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (Ketertiban, ketentraman dan kenyamanan)	100%	60.214.000,00	42.970.000,00	46.570.000,00	

NO	BIDANG URUSAN	SEBELUM (RKPD Induk 2025)			SESUDAH (RKPD Perubahan 2025)			PAGU		RKPD 2025 PERUBAHAN	ALASAN PERUBAHAN
		PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET	RKPD 2025 (Induk)	APBD INDUK 2025 dan PERGESERAN		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase dokumen penyelenggaraan pemerintahan yang disusun tepat waktu	80%	7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Meningkatnya kualitas dan ketepatan pelaporan penyelenggaraan pemerintahan/Persentase dokumen penyelenggaraan pemerintahan yang disusun tepat waktu	80%	122.109.145,00	117.251.145,00	121.903.145,00	
		7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah laporan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah	1 Laporan	7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase terlaksananya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	80%	122.109.145,00	117.251.145,00	121.903.145,00	
		7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	80%	7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa/ Persentase desa yang mendapat pembinaan administrasi pemerintahan secara berkala	80%	42.555.192,00	34.683.192,00	35.009.192,00	
		7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Pemerintah Desa yang di bina dan di awasi	9 Desa	7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase terlaksananya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	80%	42.555.192,00	34.683.192,00	35.009.192,00	
JUMLAH								3.388.542.499,00	3.679.587.363,00	3.935.445.840,00	

NO	BIDANG URUSAN	SEBELUM (RKPD Induk 2025)			SESUDAH (RKPD Perubahan 2025)			PAGU		RKPD 2025 PERUBAHAN	ALASAN PERUBAHAN
		PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET	RKPD 2025 (Induk)	APBD INDUK 2025 dan PERGESERAN		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8.01.0.00.0.00.01.0000 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK											
1	X.XX. NON URUSAN	8.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat	B	8.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Predikat Nilai AKIP Perangkat Daerah	B	6.423.141.639,00	7.698.065.137,00	8.465.116.212,00	
		8.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen	11 buah	8.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase hasil perencanaan dan pelaporan yang dijadikan bahan evaluasi kinerja	100%	52.000.000,00	51.997.524,00	167.647.524,00	Penambahan untuk anggaran perjalanan dinas yg kurang dan makan minum rapat evaluasi kinerja dan rencana aksi kinerja
		8.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Gaji ASN terbayarkan	12 bulan	8.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase administrasi keuangan yang tertib, akuntabel dan tepat waktu	100%	3.647.703.322,00	5.322.070.000,00	5.322.070.000,00	
		8.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya bimbingan teknis	12 bulan	8.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pengelolaan dan pelayanan administrasi kepegawaian yang tepat waktu, mutakhir dan terdokumentasi	100%	42.625.000,00	29.000.000,00	45.421.828,00	Penambahan untuk kain sasirangan souvenir
		8.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terwujudnya kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	12 bulan	8.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi umum yang terlaksana sesuai SOP	100%	934.347.198,00	605.167.229,00	1.042.232.787,00	Penunjang Penyediaan Peralatan Operasional Kantor, Penambahan Penyelenggaraan Rapat-Rapat Koordinasi SKPD
		8.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terwujudnya pengadaan barang penunjang urusan pemerintah daerah	20 unit	8.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Realisasi Pengadaan Barang Milik Daerah yang sesuai dengan yang direncanakan	100%	465.745.906,00	465.745.906,00	465.745.906,00	

NO	BIDANG URUSAN	SEBELUM (RKPD Induk 2025)			SESUDAH (RKPD Perubahan 2025)			PAGU		RKPD 2025 PERUBAHAN	ALASAN PERUBAHAN
		PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET	RKPD 2025 (Induk)	APBD INDUK 2025 dan PERGESERAN		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		8.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah pembayaran telpon, sumber daya air, listrik, materai, honorarium tenaga kontrak	12 bulan	8.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang difasilitasi/ disediakan	100%	756.139.362,00	699.503.627,00	874.677.316,00	Penambahan biaya tagihan listrik dan air, Penambahan kegiatan untuk hari jadi Tabalong
		8.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya pemeliharaan alat dan perlengkapan kantor	18 unit	8.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang yang dipelihara dan berfungsi sesuai kondisi standar	100%	524.580.851,00	524.580.851,00	547.320.851,00	Pemeliharaan atap mushola dan aula, pemeliharaan ruang kaban, serta perencanaan untuk bangunan gedung depan kantor (lobby)
2	8.01 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	8.01.02 PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Persentase pelaksanaan kegiatan sosialisasi ideologi wawasan kebangsaan	80%	8.01.02 PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Persentase pelaksanaan kegiatan sosialisasi ideologi wawasan kebangsaan	80%	1.574.294.118,00	1.272.506.918,00	2.087.202.300,00	
		8.01.02.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Terlaksananya kegiatan sosialisasi ideologi wawasan kebangsaan	60 orang	8.01.02.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Terlaksananya kegiatan sosialisasi ideologi wawasan kebangsaan	60 orang	1.574.294.118,00	1.272.506.918,00	2.087.202.300,00	Permohonan/proposal dari anggota FPK (Forum Pembauran Kebangsaan) untuk peningkatan wawasan, Peningkatan wawasan bagi anggota paskibraka, serta penganggaran honor harian pelatih dan sewa gedung untuk paskibraka yg tidak teranggarkan
		8.01.03 PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN	Persentase pemantauan politik daerah dan verifikasi bantuan keuangan partai politik	80%	8.01.03 PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN	Persentase pemantauan politik daerah dan verifikasi bantuan keuangan partai politik	80%	2.251.171.568,00	1.907.904.568,00	1.721.680.430,00	

NO	BIDANG URUSAN	SEBELUM (RKPD Induk 2025)			SESUDAH (RKPD Perubahan 2025)			PAGU		RKPD 2025 PERUBAHAN	ALASAN PERUBAHAN
		PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET	RKPD 2025 (Induk)	APBD INDUK 2025 dan PERGESERAN		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK			ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK						
		8.01.03.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Terlaksananya pemantauan politik daerah dan verifikasi bantuan keuangan partai politik	12 bulan	8.01.03.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Terlaksananya pemantauan politik daerah dan verifikasi bantuan keuangan partai politik	12 bulan	2.251.171.568,00	1.907.904.568,00	1.721.680.430,00	Pergeseran uang hibah parpol
		8.01.04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Persentase pelaksanaan pembinaan LSM dan Ormas	80%	8.01.04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Persentase pelaksanaan pembinaan LSM dan Ormas	80%	1.231.130.000,00	750.258.000,00	1.287.273.570,00	
		8.01.04.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Terlaksananya pembinaan LSM dan Ormas	12 bulan	8.01.04.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Terlaksananya pembinaan LSM dan Ormas	12 bulan	1.231.130.000,00	750.258.000,00	1.287.273.570,00	Koordinasi, konsultasi serta peningkatan wawasan LSM ke Yogyakarta, dan Satgas pemberantasan premanisme
		8.01.05 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Persentase pelaksanaan pembinaan dan pengembangan ketahanan sosial, budaya dan ekonomi	80%	8.01.05 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Persentase pelaksanaan pembinaan dan pengembangan ketahanan sosial, budaya dan ekonomi	80%	634.439.420,00	459.487.420,00	672.482.534,00	

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
Kabupaten Tabalong Tahun 2025

NO	BIDANG URUSAN	SEBELUM (RKPD Induk 2025)			SESUDAH (RKPD Perubahan 2025)			PAGU			ALASAN PERUBAHAN
		PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET	RKPD 2025 (Induk)	APBD INDUK 2025 dan PERGESERAN	RKPD 2025 PERUBAHAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		8.01.05.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Terlaksananya pembinaan dan pengembangan ketahanan sosial budaya, dan ekonomi	12 bulan	8.01.05.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Terlaksananya pembinaan dan pengembangan ketahanan sosial budaya, dan ekonomi	12 bulan	634.439.420,00	459.487.420,00	672.482.534,00	Permohonan/proposal dari Forum FKUB untuk peningkatan wawasan
		8.01.06 PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Persentase pelaksanaan penanganan konflik sosial dengan forum-forum di Kabupaten Tabalong	80%	8.01.06 PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Persentase pelaksanaan penanganan konflik sosial dengan forum-forum di Kabupaten Tabalong	80%	1.160.000.000,00	833.707.000,00	11.456.643.512,00	
		8.01.06.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Terlaksananya penanganan konflik sosial dengan forum-forum di kabupaten tabalong	Masyarakat, 8 forum dan orang asing	8.01.06.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Terlaksananya penanganan konflik sosial dengan forum-forum di kabupaten tabalong	Masyarakat, 8 forum dan orang asing	1.160.000.000,00	833.707.000,00	11.456.643.512,00	Kegiatan undangan rapat/pertemuan di luar daerah dan luar provinsi serta kegiatan monitoring rawan konflik dan penanganan konflik serta deteksi dini, pulbaket di daerah, Peningkatan wawasan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat dan tim kewaspadaan dini ke Bali dan Banyuwangi Tahun 2025
JUMLAH								13.274.176.745,00	12.921.929.043,00	25.690.398.558,00	

Sumber: Renja PD/SIPD.RI Tahun 2025

BAB VI

P E N U T U P

***PERUBAHAN RKPD
KABUPATEN TABALONG
TAHUN 2025***

BAB VI

P E N U T U P

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Tabalong Tahun 2025 merupakan acuan dan pedoman dalam rangka proses penyusunan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran dan Prioritas dan Perubahan Plafon Anggaran Sementara. Selanjutnya hal ini digunakan sebagai dasar menyusun Perubahan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (PRAPBD) Kabupaten Tabalong untuk Tahun Anggaran 2025.

Perubahan RKPD Tahun 2025 disusun agar setiap Perangkat Daerah dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan umum, tugas pembangunan dan tugas pelayanan kepada masyarakat dapat dilaksanakan secara baik, konsisten dan berkelanjutan dengan mengedepankan koordinasi demi terlaksananya pembangunan yang berkelanjutan serta tepat sasaran.

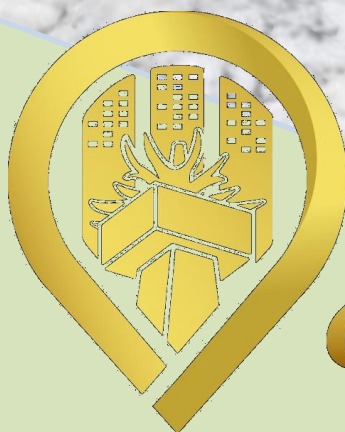
Koordinasi pembangunan tersebut dilakukan secara lintas sektor dan lintas daerah baik antar Kabupaten/Kota, Provinsi maupun Pusat dengan berpihak pada pemangku kepentingan pembangunan serta berlandaskan pada prinsip transparansi dan akuntabilitas kinerja yang pada akhirnya mampu mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Penyusunan Perubahan RKPD Kabupaten Tabalong Tahun 2025 pada akhirnya akan menjadi ukuran kinerja bagi Perangkat Daerah yang terangkum dalam Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah, dengan maksud agar pelaksanaan pembangunan dapat memenuhi harapan dan aspirasi masyarakat serta dapat memberikan pemecahan masalah mendesak bagi masyarakat pada tahun yang direncanakan.



Tepat Data
Tepat Rencana
Tepat Sasaran



**DATA YANG AKURAT, MELAHIRKAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN BERKUALITAS DAN SASARAN YANG
DICAPAI AKAN BERDAMPAK LUAS BAGI
KESEJAHTERAAN MASYARAKAT**



**TABALONG
SMART**

**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN,
RISET DAN INOVASI DAERAH KABUPATEN TABALONG
TAHUN 2025**